



PERATURAN DAERAH

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
2017



BUPATI MESUJI

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009—2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2014-2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011—2031;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI

dan

BUPATI MESUJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mesuji untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2022.
8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

9. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten Mesuji, adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Lembaga lain.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.
13. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD ini merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati periode Tahun 2017-2022 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 3

RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra OPD.

Pasal 4

Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja OPD dengan memperhatikan RPJMD.

BAB III MAKSUD DAN

TUJUAN Pasal 5

- (1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan :
 - a. menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. tersedianya rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Mesuji;
 - c. pedoman bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD;
 - d. mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Mesuji;
 - e. menjadi bahan dalam penyusunan RKPD.
- (2) RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Pemerintah Daerah.

BAB IV PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Mesuji sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB V ASAS PENYUSUNAN

Pasal 8

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah dengan meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
- (3) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.
- (4) Materi yang tercantum dalam Peraturan Daerah RPJMD ini tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji.

Pasal 9

Bupati melalui OPD terkait menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

BAB VI RUANG LINGKUP

Pasal 10

Dokumen RPJMD terdiri dari :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Gambaran keuangan daerah;
- 4) Permasalahan dan isu strategis daerah;
- 5) Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 6) Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- 7) Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- 8) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 9) Penutup.

Pasal 11

Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 12

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 13

Bupati wajib melakukan pengendalian atas RPJM Daerah.

Pasal 14

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 16

Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 17

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 18

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala OPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 19

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 20

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan

Bagian Ketiga

Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. Merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI MESUJI,



KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 27 Desember 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji,



RIZAL FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017 NOMOR 11

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI ,
PROVINSI LAMPUNG : 11/593/MSJ/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MESUJI TAHUN 2017-2022

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022. RPJMD ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati Mesuji dengan tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014-2019.

Maksud dan Tujuan Penetapan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat 1 Cukup jelas

 Ayat 2 Cukup jelas
Pasal 6

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Ayat 4 Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Ayat 4 Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Ayat 3 Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1 Cukup jelas

Ayat 2 Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR GRAFIK.....	
BAB I. PENDAHULUAN	I- 1
1.1. Latar Belakang	I- 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunann.....	I- 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I- 5
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I- 6
1.5. Sistematika Penulisan	I- 7
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II- 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II- 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II- 20
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II- 36
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II- 78
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III- 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III- 1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III- 15
3.3. Kerangka Pendanaan.....	III- 26
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	IV- 1
4.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV- 1
4.2. Isu Strategis	IV- 23
BAB V. PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V- 1
5.1. Visi.....	V- 1
5.2. Misi.....	V- 2
5.3. Tujuan dan Sasaran.....	V- 2
BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI- 1
6.1. Kebijakan Umum.....	VI- 1
6.2. Program Pembangunan.....	VI- 2

BAB VII	KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-	1
7.1.	Kerangka Pendanaan.....	VII-	1
7.2.	Program Perangkat Daerah	VII-	3
BAB VIII	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH.....	VIII-	1
BAB IX.	PENUTUP.....	IX-	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Cakupan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji 2016.....	II	-	2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Tingkat Kelerengan Kabupaten Mesuji.....	II	-	7
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Struktur Geologi di Wilayah Kabupaten Mesuji.....	II	-	7
Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Mesuji.....	II	-	8
Tabel 2.5	Jaringan Tata Air di Kabupaten Mesuji 2016.....	II	-	8
Tabel 2.6	Curah Hujan di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2014	II	-	9
Tabel 2.7	Luas Areal Penggunaan Lahan per Kecamatan Tahun 2015.....	II	-	9
Tabel 2.8	Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	10
Tabel 2.9	Populasi Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 201.....	II	-	12
Tabel 2.10	Populasi Ternak Unggas Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2016.....	II	-	13
Tabel 2.11	Luas Hutan di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2015.....	II	-	15
Tabel 2.12	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 2012-2016.....	II	-	16
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten Mesuji Tahun 2015.	II	-	17
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	18
Tabel 2.15	Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	19
Tabel 2.16	Bencana Banjir yang terjadi selama tahun 2016.....	II	-	19
Tabel 2.17	Bencana Kebakaran yang terjadi selama tahun 2016.....	II	-	20
Tabel 2.18	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji.....	II	-	21
Tabel 2.19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabu- paten Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	II	-	22
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	II	-	23
Tabel 2.21	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2016 (%)...	II	-	24
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Pengeluaran 2011-2016 (%).....	II	-	25
Tabel 2.23	Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional.....	II	-	25
Tabel 2.24	Pertumbuhan PDRB PerKapita Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	26
Tabel 2.25	Perkembangan Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2016.....	II	-	27
Tabel 2.26	Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2016.....	II	-	29
Tabel 2.27	Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah.....	II	-	29
Tabel 2.28	Perkembangan Rata-rata Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2016.....	II	-	30
Tabel 2.29	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	30
Tabel 2.30	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di Kabupaten Mesuji.....	II	-	31
Tabel 2.31	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	31
Tabel 2.32	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016.....	II	-	32
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016.....	II	-	33
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016.....	II	-	33
Tabel 2.35	Data Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah Kabupaten Mesuji 2012-2016.....	II	-	34
Tabel 2.36	Pertumbuhan Angka Kematian ibu dan bayi tahun 2012 s/d Tahun 2016..	II	-	35

Tabel 2.37	Perkumpulan Kesenian di Kabupaten Mesuji Tahun 2014-2016.....	II	-	36
Tabel 2.38	Data Cabang dan Klub Olahraga Kab. Mesuji Tahun 2015.....	II	-	36
Tabel 2.39	Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kab. Mesuji Tahun 2017.....	II	-	37
Tabel 2.40	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016 Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mesuji.....	II	-	38
Tabel 2.41	Pertumbuhan Puskesmas dan Pustu tahun 2012 s/d Tahun 2016.....	II	-	39
Tabel 2.42	Pertumbuhan Jumlah Dokter Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Mesuji	II	-	40
Tabel 2.43	Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	40
Tabel 2.44	Perkembangan Jalan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2015.....	II	-	41
Tabel 2.45	Perkembangan Jalan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2015.....	II	-	42
Tabel 2.46	Perkembangan Panjang Jalan yang Dibangun di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	43
Tabel 2.47	Perkembangan Panjang Jembatanyang Dibangun di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	44
Tabel 2.48	Jumlah luas areal jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Ha) Tahun 2012 – 2016.....	II	-	44
Tabel 2.49	Total Panjang Drainase Per Kecamatan di Kabupaten Mesuji tahun 2016.....	II	-	45
Tabel 2.50	Perkembangan Kriminalitas Kab. Mesuji Tahun 2015-2016.....	II	-	45
Tabel 2.51	Perkembangan Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rumah Tangga yang Melakukan Pemasangan SPAM di Kabupaten Mesuji.....	II	-	47
Tabel 2.52	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Mesuji tahun 2015.....	II	-	48
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah MCK yang Dibangun Tahun 2012 - 2016.....	II	-	48
Tabel 2.54	Data Volume Sampah di Kabupaten Mesuji tahun 2016.....	II	-	49
Tabel 2.55	Timbulan Sampah (m ³)/Per Hari dan Ton Per Tahun.....	II	-	49
Tabel 2.56	Perkembangan Tata Ruang di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016..	II	-	50
Tabel 2.57	Data kendaraan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 - 2015.....	II	-	51
Tabel 2.58	Perkembangan Persentase Perusahaan dan Industri Rumah tangga yang sudah menggunakan IPAL.....	II	-	52
Tabel 2.59	Perkembangan Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	53
Tabel 2.60	Perkembangan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Di Kab. Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	53
Tabel 2.61	Perkembangan Partisipasi Perempuan dalam lembaga pemerintahan dan legislative Di Kab. Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	54
Tabel 2.62	Persentase Peserta KB Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Sedang Digunakan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014.....	II	-	55
Tabel 2.63	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	II	-	56
Tabel 2.64	Perkembangan Penanganan PMKS Tahun 2012 – 2016.....	II	-	56
Tabel 2.65	Data Ketenagakerjaan Tahun 2012 – 2016.....	II	-	58
Tabel 2.66	Pertumbuhan Banyaknya Koperasi, Anggota dan Volume Usaha Menurut Jenis Koperasi Tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Mesuji.....	II	-	59
Tabel 2.67	Pertumbuhan Banyaknya Koperasi Primer dan Aktivitasnya Tahun 2012 – 2016.....	II	-	61

Tabel 2.68	Daftar Industri Skala Kecil (Home Industri) di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	63
Tabel 2.69	Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	64
Tabel 2.70	Perkembangan Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Mesuji.....	II	-	64
Tabel 2.71	Perkembangan Investasi PMDN /PMA di Kabupaten Mesuji.....	II	-	64
Tabel 2.72	Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2012 - 2016.....	II	-	65
Tabel 2.73	Perkembangan Kepegawaian Kabupaten. Mesuji.....	II	-	65
Tabel 2.74	Produk Hukum yang diterbitkan dari Tahun 2012 - 2016.....	II	-	66
Tabel 2.75	Perkembangan Persentase Desa berkembang di Kab. Mesuji dari Tahun 2012 - 2016.....	II	-	66
Tabel 2.76	Banyaknya Sarana Telekomunikasi Warga Tahun 2016.....	II	-	67
Tabel 2.77	Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Lokasi/Media Akses di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	67
Tabel 2.78	Persentase Rumah tangga yang Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	67
Tabel 2.79	Perkembangan Kondisi Perpustakaan Kab. Mesuji Tahun 2012 - 2016..	II	-	68
Tabel 2.80	Pertumbuhan Luas Tanam Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016.....	II	-	68
Tabel 2.81	Luas Tanam Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016.....	II	-	70
Tabel 2.82	Luas Panen Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016.....	II	-	71
Tabel 2.83	Luas Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016.....	II	-	71
Tabel 2.84	Luas Areal Tanam Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 dan 2016.....	II	-	72
Tabel 2.85	Produksi Tanam Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 dan 2016.....	II	-	72
Tabel 2.86	Produksi Tanam Pertanian Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	73
Tabel 2.87	Jumlah Rasio Elektrik di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	74
Tabel 2.88	Jumlah KK Menggunakan Listrik PLN dan Non PLN per Kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2016.....	II	-	74
Tabel 2.89	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kabupaten Mesuji tahun 2016.....	II	-	74
Tabel 2.90	Pertumbuhan Usaha Pariwisata Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2016.....	II	-	75
Tabel 2.91	Jumlah Potensi, Pemanfaatan, dan Peluang Sektor Perikanan di Kabupaten Mesuji tahun 2016.....	II	-	76
Tabel 2.92	Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton):.....	II	-	77
Tabel 2.93	Perkembangan Jumlah Pasar yang direhabilitasi.....	II	-	77
Tabel 2.94	Capaian Hasil Pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Transmigrasi...	II	-	78
Tabel 2.95	Angka Konsumsi Rumah Tangga / Kapita.....	II	-	79
Tabel 2.96	Perkembangan Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Tahun 2014-2015.....	II	-	79
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.....	II	-	79
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016.....	III	-	2

Tabel 3.2	persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mesuji.....	III	-	8
Tabel 3.3	Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mesuji.....	III	-	12
Tabel 3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mesuji.....	III	-	18
Tabel 3.5	Struktur Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016 (Rp)....	III	-	20
Tabel 3.6	Defisit Riil Anggaran dan Penutupan Defisit Riil Kabupaten Mesuji.....	III	-	23
Tabel 3.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mesuji.....	III	-	24
Tabel 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mesuji.....	III	-	24
Tabel 3.9	Data Realisasi Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah.....	III	-	25
Tabel 3.10	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 s.d Tahun 2022 Kabupaten Mesuji.....	III	-	29
Tabel 3.11	Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 - 2022.....	III	-	30
Tabel 3.12	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.....	III	-	32
Tabel 3.13	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mesuji.....	III	-	35
Tabel 5.1	Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji.....	V	-	3
Tabel 5.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mesuji....	V	-	4
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Mesuji.....	VI	-	3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mesuji.....	VI	-	7
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Mesuji.....	VI	-	9
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Mesuji.....	VII	-	2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan Pendanaan Kabupaten Mesuji.....	VII	-	4
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mesuji.....	VIII	-	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD.....	I	-	3
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I	-	6
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Hubungan antara Kondisi Geografi Daerah dengan Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	II	-	1
Gambar 2.2	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Mesuji.....	II	-	5
Gambar 2.3	Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan.....	II	-	6

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD.....	I	-	3
Grafik	1.2	Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I	-	6
Grafik	2.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II	-	17
Grafik	2.2	Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Mesuji Tahun 2015 - 2016.....	II	-	18
Grafik	2.3	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mesuji.....	II	-	27
Grafik	2.4	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (p1) di Kabupaten Mesuji Tahun 2010 – 2014.....	II	-	28
Grafik	3.1	Proporsi PAD, Dana Perimbangan, Transfer Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Pendapatan Lain-lain yang sah.....	III	-	7
Grafik	3.2	Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (%).....	III	-	8
Grafik	3.3	Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016.....	III	-	19
Grafik	3.4	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012 - 2016.....	III	-	19
Grafik	3.5	Proporsi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja Daerah.....	III	-	20

Lampiran : Peraturan Daerah Nomor Tahun
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Mesuji tahun 2017-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang substansinya saling berkaitan dan mampu menjadi kerangka acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sinergi oleh semua pemangku kepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama kedua undang-undang tersebut diharapkan bisa menjadi arah bagi cita-cita pembangunan beserta strategi dan cara pencapaiannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD juga memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, serta indikator kinerja daerah. RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ini merupakan tahap kedua dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025. Berdasarkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mesuji 2005 – 2025, ditetapkan visi pembangunan adalah “Mesuji Tumbuh, Berkembang, Maju dan Berdaya Saing Menjadi Bumi Agribisnis 2025” yang secara harfiah mengandung pengertian bahwa Kabupaten Mesuji memiliki motivasi dan semangat baru untuk TUMBUH dan BERKEMBANG sehingga menjadi daerah yang MAJU dan BERDAYA SAING menuju BUMI AGRIBISNIS yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam sendiri.

Sementara itu dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ini visi kepala daerah terpilih yang akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah “Terwujudnya Mesuji yang sejahtera, Aman dan Berkeadilan” Visi tersebut kemudian juga dijabarkan ke dalam berbagai bentuk program dan kegiatan

pembangunan beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Mesuji. Selain itu RPJMD ini juga disusun dengan mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah, yaitu selain memuat program sektoral dan lintas sektoral juga memuat program kewilayahan sehingga pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan aspek ruang dan kewilayahan yang diharapkan bisa mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mesuji.

Dengan memperhatikan muatan dan substansi RPJMD yang bersifat strategis, maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2017-2022 harus disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi PD masing-masing. Demikian juga dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

Dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mesuji Tahun 2005-2025, memperhatikan RPJM Nasional, berbagai isu dan permasalahan strategis, potensi yang dimiliki Kabupaten Mesuji saat ini, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan pada 5 (lima) tahun sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 didasarkan pada beberapa pendekatan berikut ini :

1. Pendekatan Politik.

Dengan memandang bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih merupakan program dan agenda pembangunan yang ditawarkan secara politik kepada masyarakat dalam kampanye pemilukada, maka visi misi tersebut kemudian dijabarkan dan diterjemahkan secara lebih detil dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022. Selain itu dalam proses penyusunan RPJMD ini, para anggota DPRD Kabupaten Mesuji juga ikut terlibat dengan memberikan masukan, pertimbangan dan pendapatnya secara politik dalam pembahasan Raperda tentang RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022.

2. Pendekatan Teknokratik.

Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah serta berdasarkan data-data dan informasi yang relevan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022. Selain itu kemampuan dan kapasitas para perencana dalam menyusun RPJMD juga diperhatikan karena sangat mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan tersebut.

3. Pendekatan Partisipatif (Bottom-Up)

Pendekatan partisipatif ini dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan (stake holder) dalam proses penyusunan RPJMD sehingga diharapkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lebih banyak terjaring. Selain itu dengan keterlibatan semua elemen masyarakat diharapkan bisa meningkatkan rasa memiliki terhadap proses pembangunan yang akan dilakukan.

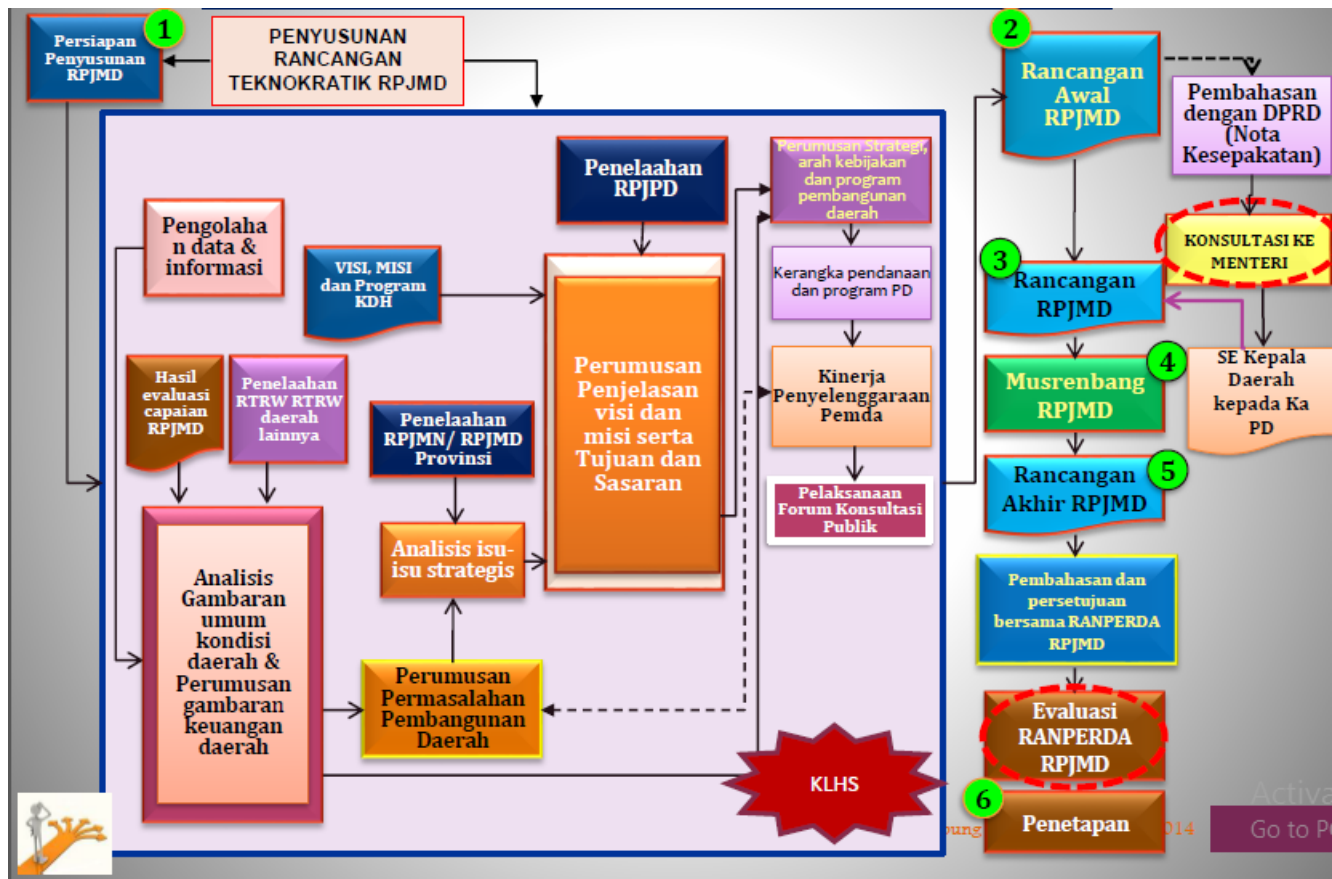
4. Pendekatan Atas Bawah (top down)

Pendekatan secara top down terutama dilakukan dengan melakukan sinkronisasi prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan lain yang berada di atasnya, yaitu RPJMD Provinsi Lampung dan juga RPJM Nasional. Dengan melakukan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lain tersebut, diharapkan terjadi sinergi antar berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan juga pemerintah pusat.

Tahapan dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ini meliputi penelaahan dokumen yang relevan, pengolahan data dan analisis sektoral, serta

dialog yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holder). Proses penyusunan tersebut secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1. Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD



1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2011—2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mesuji 2005-2025.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

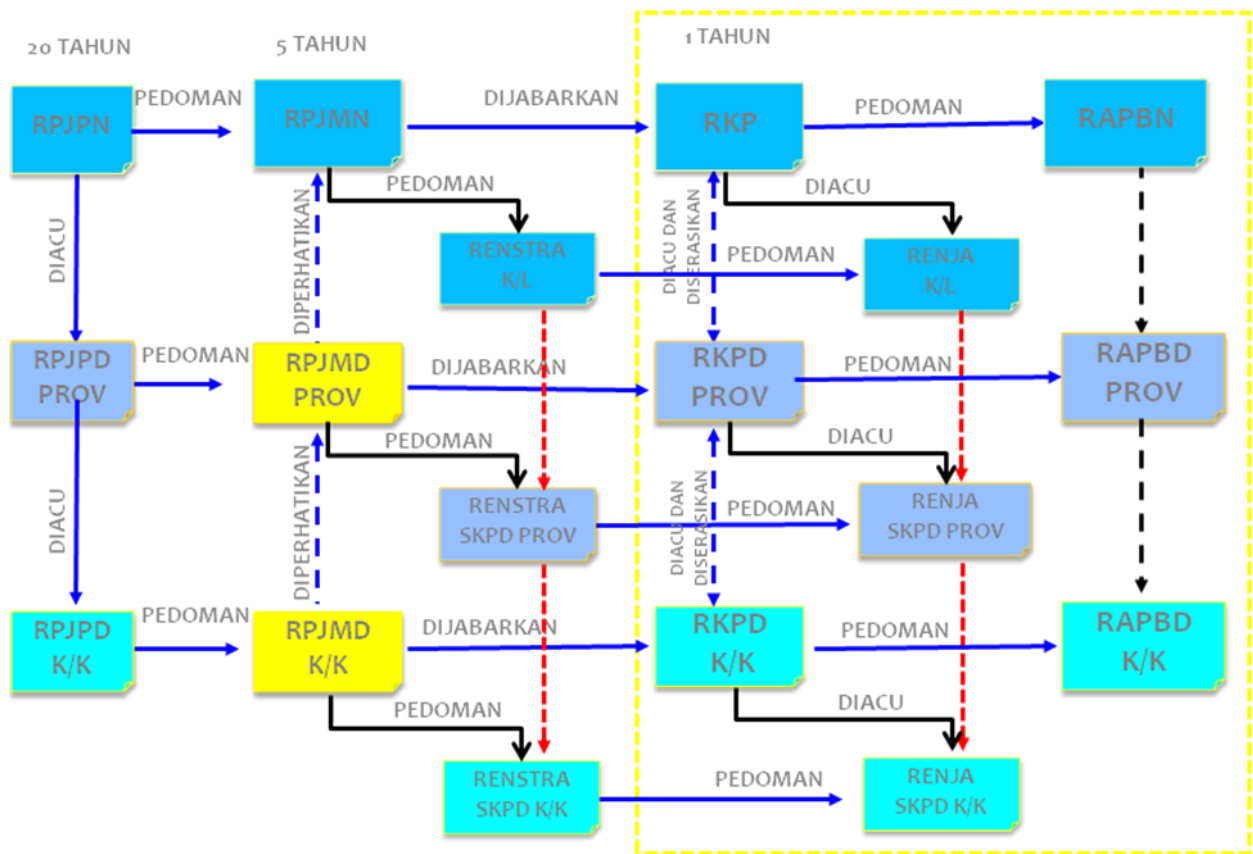
Pembangunan daerah pada dasarnya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, perluasan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu sesuai dengan kewenangannya, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk jangka panjang 20 tahun pada tataran nasional sudah ditetapkan Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Di tingkat Provinsi Lampung sudah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sedangkan ditingkat Kabupaten, sudah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji No. 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mesuji Tahun 2005 – 2025. Sedangkan untuk jangka menengah 5 (lima) tahunan, pada tataran nasional sudah diterbitkan Undang-undang No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Di tingkat Provinsi Lampung sudah terbit Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019. Dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mesuji 2017 – 2022.

Selain itu dalam penyusunan RPJMD ini juga berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten Mesuji. Dengan demikian penyusunan RPJMD ini memperhatikan aspek ruang dan kewilayahan yaitu menjadi pedoman sekaligus batasan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, sehingga diharapkan pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan berjalan sinergis dengan program dan kegiatan kewilayahan.

Hubungan antar dokumen tersebut lebih detil dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Mesuji pada saat kampanye Pemilukada. Selain itu penyusunan RPJMD ini juga merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan mengingat dokumen RPJMD periode sebelumnya telah habis masa berlakunya.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan demikian RPJMD ini menjadi arah dan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta arah dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tiap tahun selama lima tahun ke depan. Selain itu, RPJMD ini juga digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja daerah dan juga kinerja kepala OPD selama lima tahun ke depan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Kabupaten Mesuji 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini terdiri dari tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi Kabupaten Mesuji meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah, terutama yang akan digunakan untuk mendukung analisis dan penggambaran isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi dan kebijakan.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kinerja keuangan di masa lalu yang terdiri dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang terdiri dari proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang terdiri dari proyeksi pendapatan dan belanja dan penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menggambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat/pengaruh terhadap Kabupaten Mesuji.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan menjadi visi misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022. Selain itu juga dijelaskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih



BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

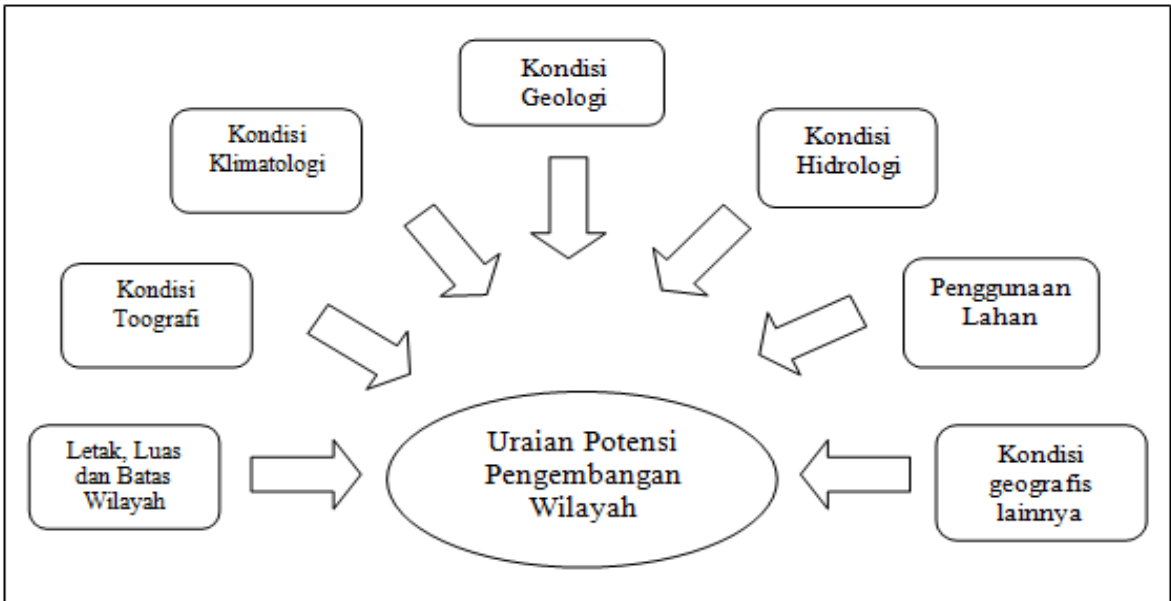
BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Berikut adalah gambar kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan Budidaya yang menjadi dasar dalam penyajian data Kondisi dan Potensi Daerah Kabupaten Mesuji.

Gambar 2.1.
kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan Budidaya



Sumber : Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kabupaten Mesuji, dengan ibu kota Wiralaga Mulya, terletak dalam wilayah Provinsi Lampung dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara yuridis formal, Kabupaten Mesuji terbentuk sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung. Secara geografis wilayah Kabupaten Mesuji terletak pada 3⁰45' – 4⁰40' arah Utara-Selatan dan 106⁰15' – 107⁰00' arah Timur-Barat. Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.



- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Luas Kabupaten Mesuji sesuai dengan Undang-undang pembentukannya yaitu 2.184 km2. Kabupaten Mesuji memiliki 105 desa dengan luas wilayah masing-masing sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Cakupan dan Luas Wilayah Kabupaten Mesuji 2016

Nomor	Kecamatan	Kode	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RK	Jumlah RT	Luas (Km)	%
1	Mesuji	18011503	Tirtalaga	4	12	12,59	4%
		18011520	Wiralaga I	7	14	22,33	7%
		18011521	Wiralaga II	6	11	101,47	34%
		18011522	Tanjung Serayan	5	10	19,03	6%
		18011540	Nipah Kuning	5	10	27,19	9%
		18011543	Sungai Badak	9	27	42,39	14%
		18011544	Sidomulyo	10	24	20,68	7%
		18011547	Sumber Makmur	5	12	24,16	8%
		18011548	Mulya Sari	4	9	14,53	5%
		18011549	Wiralaga Mulya	4	9	4,91	2%
		18011550	Suka Maju	4	6	10,78	4%
TOTAL			11	63	144	300,06	14%
2	Mesuji Timur	18011601	Pangkal Mas Mulya	4	13	9,6	1%
		18011602	Pangkal Mas Jaya	3	6	5,7	1%
		18011603	Tanjung Mas Makmur	4	14	5,3	1%
		18011604	Muara Mas	4	8	7,4	1%
		18011605	Tanjung Mas Mulya	4	9	11	1%
		18011606	Tanjung Mas Jaya	4	10	6,9	1%
		18011607	Wonosari	6	20	28,1	3%
		18011608	Dwi Karya Mustika	6	18	12	1%
		18011609	Eka Mulya	5	19	13,2	2%
		18011610	Marga Jadi	7	17	9,2	1%
		18011611	Tanjung Menang	5	15	7,5	1%
		18011612	Talang Batu	11	36	137,8	17%
		18011613	Sungai Cambai	4	12	99,4	12%
		18011614	Margo Jaya	4	11	7,4	1%
		18011615	Pangkal Mas	4	8	7,3	1%
		18011616	Tanjung Menang Raya	5	14	7,5	1%



Nomor	Kecamatan	Kode	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RK	Jumlah RT	Luas (Km)	%
		18011617	Tebing Karya Mandiri	4	8	7,5	1%
		18011618	Tanjung Mas Rejo	4	11	6,4	1%
		18011619	Margo Mulyo	4	9	7,2	1%
		18011620	Muara Asri	4	8	6,1	1%
			Register 45			407,7	50%
TOTAL			20	96	266	810,2	37%
3	Rawajitu Utara	18011701	Sidang Gunung Tiga	4	18	49	24%
		18011702	Sidang Bandar Anom	4	15	10,5	5%
		18011703	Sidang Kurnia Agung	4	12	9,17	4%
		18011704	Sidang Iso Mukti	4	20	12,3	6%
		18011705	Sidang Sido Rahayu	4	9	9,16	4%
		18011706	Sidang way Puji	4	13	12,64	6%
		18011707	Panggung Jaya	4	20	10,14	5%
		18011708	Telogo Rejo	4	13	10,54	5%
		18011709	Panggung Rejo	3	6	6,92	3%
		18011710	Sungai Buaya	5	12	14,62	7%
		18011711	Sungai Sidang	8	22	33,08	16%
		18011712	Sidang Muara Jaya	5	14	11,94	6%
		18011713	Sidang Makmur	4	9	13,82	7%
TOTAL			13	57	183	203,83	9%
4	Way Serdang	18011101	Bumi Harapan	4	12	6,643	3%
		18011102	Buko Poso	8	36	16,13	7%
		18011103	Hadi Mulyo	5	17	16,9	7%
		18011104	Gedung Boga/Raja	8	23	20,23	8%
		18011105	Suka Agung	5	14	12,169	5%
		18011106	Rejo Mulyo	4	8	10,154	4%
		18011107	Labuhan Baru	5	11	11,72	5%
		18011108	Panca Warna	10	22	12,546	5%
		18011109	Kebun Dalam	7	19	17,78	7%
		18011110	Kejadian	5	14	6,644	3%
		18011111	Labuhan Batin	5	10	26,594	11%
		18011112	Labuhan Makmur	4	7	7,26	3%
		18011113	Gedung Sri Mulyo	8	15	15,41	6%
		18011114	Labuhan Permai	5	8	13,906	6%
		18011115	Sumber Rejo	5	10	6,64	3%
		18011116	Margo Bhakti	6	13	9,894	4%



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

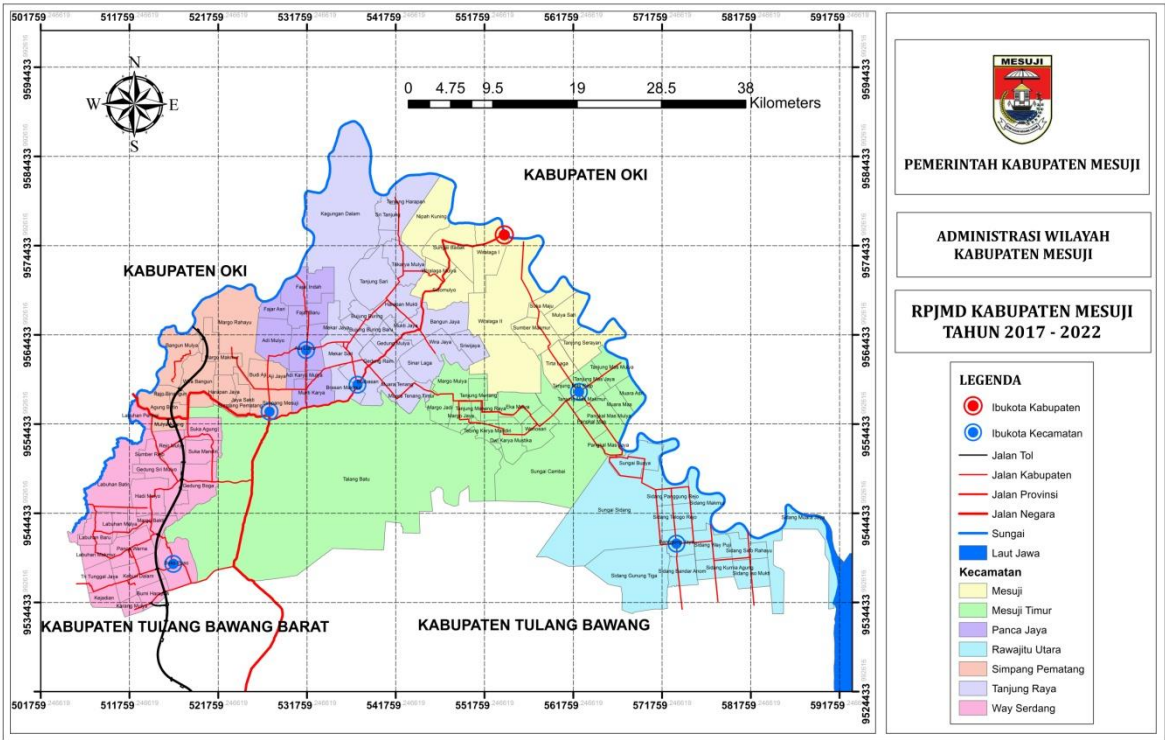
Nomor	Kecamatan	Kode	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RK	Jumlah RT	Luas (Km)	%
		18011117	Labuhan Mulya	5	10	7,074	3%
		18011118	Karang Mulya	4	8	5,287	2%
		18011119	Tri Tunggal Jaya	4	12	8,966	4%
		18011120	Suka Mandiri	5	12	9,321	4%
TOTAL			20	112	281	241,27	11%
5	Simpang Pematang	18011205	Budi Aji	5	13	8,05	6%
		18011206	Simpang Pematang	9	18	6,2	5%
		18011207	Harapan Jaya	3	9	8,47	6%
		18011208	Margo Rahyu	4	13	5,99	4%
		18011209	Wira Bangun	6	25	18,1	14%
		18011221	Agung Batin	5	10	19,84	15%
		18011222	Bangun Mulyo	5	11	20,66	15%
		18011223	Jaya Sakti	3	12	6,97	5%
		18011224	Rejo BinanguN	5	7	5,6	4%
		18011225	027 Aji Jaya	5	9	6,5	5%
		18011226	025 Simpang Mesuji	7	22	8,29	6%
		18011227	026 Margo Makmur	3	8	14,11	11%
		18011228	028 Mulya Agung	5	10	4,95	4%
TOTAL			13	65	167	133,73	6%
6	Panca Jaya	18011301	Mukti Karya	7	23	16,04	16%
		18011302	Adi Luhur	6	29	19,45	20%
		18011303	Fajar Baru	7	15	12,21	12%
		18011304	Adi Mulya	6	17	18,41	19%
		18011305	Fajar Asri	4	8	8,4	9%
		18011306	Fajar Indah	6	14	19,74	20%
		18011307	Adi Karya Mulya	5	10	4,43	4%
TOTAL			7	41	116	98,68	5%
7	Tanjung Raya	18011401	Muara Tenang	5	12	11,31	3%
		18011402	Brabasan	7	24	7,19	2%
		18011403	Gedung Ram	4	16	9,57	2%
		18011404	Mekar Sari	5	11	10,31	3%
		18011405	Sinar Laga	6	16	15,47	4%
		18011406	Wira Jaya	5	15	11,45	3%
		18011407	Bangun Jaya	7	18	20,65	5%
		18011408	Bujung Buring	6	12	6,7	2%
		18011409	Harapan Mukti	5	17	14,32	4%
		18011410	Tri Karya Mulya	5	12	15,78	4%
		18011411	Tanjung Sari	7	20	24,21	6%
		18011412	Kagungan Dalam	3	6	145,33	37%

Nomor	Kecamatan	Kode	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RK	Jumlah RT	Luas (Km)	%
		18011413	Sri Tanjung	4	8	6,47	2%
		18011414	Berasan Makmur	7	22	8,94	2%
		18011415	Mekar Jaya	4	8	9,91	3%
		18011416	Gedung Mulya	4	15	12,32	3%
		18011417	Tanjung Harapan	4	8	28,81	7%
		18011418	Muara Tenang Timur	5	16	13,6	3%
		18011419	Sriwijaya	4	8	9,67	2%
		18011420	Mukti Jaya	5	11	7	2%
		18011421	Bujung Buring Baru	5	9	6,8	2%
TOTAL			21	107	284	395,81	18%
KABUPATEN MESUJI			105	541	1.441	2184	100%

Sumber: BPMPD Kab. Mesuji 2016 dan Kecamatan Dalam Angka 2016, (Data diolah)

Gambar 2.2.

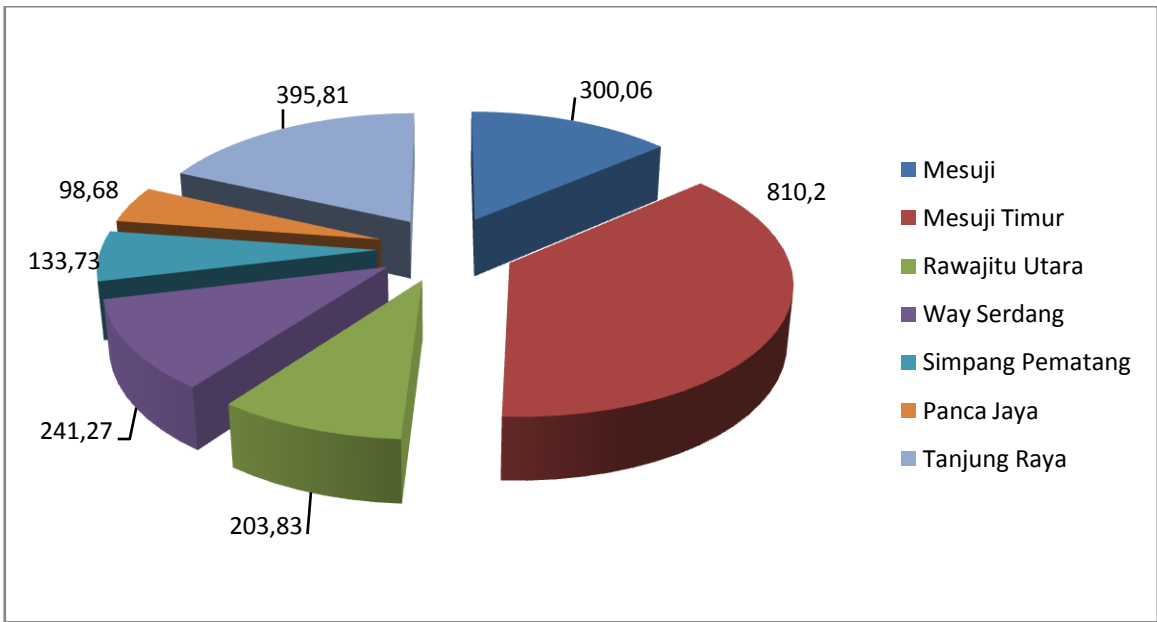
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Mesuji



Sumber: Bappeda Kabupaten Mesuji kabupaten Mesuji, 2016



Gambar 2.3. Luas Wilayah berdasarkan Kecamatan



2. Topografi

Secara topografi, wilayah Kabupaten Mesuji dapat dibagi dalam 4 unit topografi, sebagai berikut:

- a. Daerah dataran yang dimanfaatkan untuk perkebunan.
- b. Daerah rawa, terdapat disepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0 – 1 M yang merupakan daerah rawa yang dimanfaatkan untuk area persawahan, meliputi wilayah Kecamatan Mesuji Timur, dan Rawajitu Utara;
- c. Daerah *River Basin*, terbatas dua *River Basin* yang utama yaitu *River Basin* Mesuji dan *River Basin* sungai kecil lainnya. Pada areal *River Basin* Sungai Mesuji dan anak-anak sungai lainnya membentuk pola aliran sungai yang umumnya merupakan sungai-sungai desa; dan
- d. Daerah *Aluvial* meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down stem*). Dan sungai besar yaitu sungai Mesuji, dapat digunakan untuk pelabuhan

Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Mesuji, dibedakan menjadi 3 (tiga) wilayah yaitu:

- a. wilayah datar dengan kemiringan lereng 0⁰ – 3⁰;
- b. wilayah agak landai dengan kemiringan lereng 3⁰ – 8⁰;
- c. wilayah landai dengan kemiringan lereng 8⁰ – 15⁰;

Untuk mengetahui topografi/kemiringan lereng di wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Menurut Tingkat Kelerengan Kabupaten Mesuji

No	Kemiringan Lereng	Luas	
		(Ha)	(%)
1	0-3 ⁰	92.865,00	42,52
2	3-8 ⁰	98.864,00	45,18
3	8-15 ⁰	26.871,00	12,30
Jumlah		218.400,00	100,00

Sumber : RTRW 2011, 2016

3. Geologi

Informasi geologis wilayah Kabupaten Mesuji tersusun dari formasi geologi Aluvium (Qa), Endapan Rawa (Qs), dan formasi Muara Enim (Tmpm). Formasi Aluvium tersebar disepanjang Sungai mesuji yang merupakan batas dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan. Struktur geologi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mesuji pada bagian Utara terdapat lapisan sediment vulkanis dan celah (*firaves emution*) yang mengalami kelipatan di zaman *Peistosin* Batuan yang menghasilkan lapisan minyak bumi.

Potensi endapan bahan tambang belum banyak diketahui namundari data geologi dapat diketahui adanya bahan tambang (endapan mineral) diantaranya:

1. Minyak bumi, terdapat pada lapisan yang terakumulasi sebagai lanjutan dariendapan minyak bumi daerah Sritanjung Kecamatan Tanjung Raya;
2. Batubara muda, endapan terdapat pada lapisan sediment, formasi *endosita*, yang terdapat di daerah :
 - Fajar Asri, Adi Luhur di Kecamatan Panca Jaya;
 - Tri Karya Mulya, Harapan Mukti dan Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya;
 - Kecamatan Mesuji;

Formasi geologi lainnya adalah Endapan Rawa yang merupakan luasan terbesar di wilayah Kabupaten Mesuji, terutama bagian tengah kawasan. Formasi Muaraenim merupakan formasi yang paling kecil di wilayah Kabupaten Mesuji, terdapat di Desa Sidomulyo dan sebagian perbatasan Kecamatan Mesuji Timur. Guna mengetahui struktur geologi di wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah Menurut Struktur Geologi di Wilayah Kabupaten Mesuji

No	Struktur Geologi	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Aluvium	32.992,00	15,11
2	Endapan Rawa	65.181,00	29,84
3	Formasi Kasai	2.356,00	1,08
4	Formasi Muaraenim	117.817,00	53,97
Jumlah		218.400,00	100,00

Sumber : diolah Tahun 2010

Peta RBI Bakosurtanal, Tahun 2010

Peta Geologi Lembar Menggala Tulang Selapan, Tahun 2010

4. Hidrologi

Keberadaan air di Kabupaten Mesuji amat melimpah dimana daerah aliran Sungai yang ada diantaranya Sungai Pelawi Besar, Sungai Sidang, Sungai Buaya dan Sungai Gebang. Selain daerah aliran sungai tersebut banyak terdapat aliran sungai kecil yang merupakan anak sungai, sungai yang ada diantaranya Way Badak, Way Brabasan, Way Tulung Pangeran dan lainnya, data daerah aliran sungai sebagai bagian hidrologi Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Mesuji

No	Nama Sungai	Panjang	Kecamatan
1	Sungai Pelawi Besar	10,14	Mesuji Timur
2	Sungai Sidang	19,33	Rawajitu Utara
3	Sungai Buaya	51,00	Mesuji Timur, Rawajitu Utara
4	Sungai Gebang	10,40	Mesuji

Sumber : Kabupaten Mesuji Dalam Angka 2016

Berdasar Data Dinas Pekerjaan umum pada tahun 2016 Jaringan Tata Air Mesuji memiliki luas baku 22.988 ha, luas fungsi 10.974 ha. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Jaringan Tata Air di Kabupaten Mesuji 2016

No	Data Jaringan Tata Air	Volume	Satuan
1	Luas Baku	22.988	Ha
2	Luas Fungsi	10.974	Ha
3	Tanggul Penahan Banjir	67.053	Km
4	Saluran Pengaman Banjir	-	Km
5	Saluran Pembuangan Primer	153.566	M
6	Saluran Pembuangan Sekunder	142.545	M
7	Sauran Pembuangan Kolektor	53.255	Km
8	Saluran Pembuangan Tersier	745.407	M
9	Bangunan Pembuang Sekunder	116	Buah
10	Bangunan Pembuang Tersier	30	Buah
11	Bangunan Pelengkap/silang	-	Buah
12	Jalan Inspeksi (Tanah Puru P.6)	78.204	Km
13	Jalan Penghubung (Tanah puru P.J.P.6)	-	Km
14	Jalan Masuk Perkerasan (P.6)	-	Km
15	Rumah Pengamat/Juru Pengairan	1	Buah

Sumber : Dinas PU Kabupaten Mesuji, 2016

5. Klimatologi

Iklim merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan usaha pertanian. Kabupaten Mesuji merupakan wilayah beriklim tropis. Selama 2014 curah hujan tertinggi adalah 260.

Tabel 2.6.
Curah Hujan di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2014

No	Bulan	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1	Januari	210	489	229
2	Pebruari	389	339	142
3	Maret	227	248	245
4	April	362	202	234
5	Mei	362	170	168
6	Juni	200	245	128
7	Juli	132	344	109
8	Agustus	0	158	177
9	September	0	56	0
10	Oktober	110	196	30
11	Nopember	225	305	110
12	Desember	350	460	260

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Stasiun Klimatologi Masgar Lampung 2015

6. Penggunaan Lahan

Deskripsi luas wilayah setiap kecamatan dan penggunaan lahan selengkapny dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Luas Areal dan Penggunaan Lahan per Kecamatan Tahun 2015 (Ha)

No	Kecamatan	Luas	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
1	Way Serdang	241,27	73	25.498	3.871
2	Simpang Pematang	133,73	925	9.176	3.860
3	Panca Jaya	98,68	426	16.609	2.737
4	Tanjung Raya	395,81	1.486	15.305	7.016
5	Mesuji	300,06	6.633	19.656	1.200
6	Mesuji Timur	407,7	5.943	72.007,87	3.069
7	Rawajitu Utara	203,85	9.193	7.803	5.929
Jumlah		218.416	24.679	166.054	27.682
Persentase		100	11%	76%	13%

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016



2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji didasari oleh deskripsi karakteristik wilayah, sehingga dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lainnya.

a. Potensi Infrastruktur

Proyek Jalan Tol Trans – Sumatera (JTTS) menjadi salah satu modal utama Lampung untuk mengembangkan potensi daerah, salah satu nya Kab. Mesuji, dengan menjadi daerah yang dilintasi jalan Tol menyebabkan infrastruktur di Kabupaten Mesuji memiliki potensi tinggi untuk berkembang, mengingat Mesuji masih banyak memiliki lahan kosong dan dapat dimanfaatkan menjadi daerah industri yang dapat merangsang pembangunan Infrastruktur menjadi lebih baik, terutama untuk Kecamatan Way Serdang yang menjadi lokasi Exit-Tol.

b. Potensi Pertanian

Luas lahan pertanian tahun 2015 adalah 190.734 hektar dengan tiga komoditi terbesar yang ditanam yakni padi 54.091,1 ha, ubi kayu 1.366 ha, dan jagung 220,5 ha.

Tabel 2.8.
Produksi Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Padi					
Luas Panen (ha)	30688,7	23403,4	29193,2	42850,5	54091,1
Produksi (Ton)	144237	112336	145966	214253	270456
Jagung					
Luas Panen (ha)	542,92	152,88	85,26	578,2	220,5
Produksi (Ton)	2280,26	642,096	358,092	2428,44	926,1
Kedelai					
Luas Panen (ha)	101,92	514,5	232,26	2367,68	49,98
Produksi (Ton)	152,88	771,75	348,39	3551,52	74,97
Kacang Tanah					
Luas Panen (ha)	46	22	21	33	95
Produksi (Ton)	46	22	21	33	95
Kacang Hijau					
Luas Panen (ha)	28	12	0	10	15
Produksi (Ton)	28	12	0	10	15
Ubi Kayu					
Luas Panen (ha)	8556	5388	5621	1580	1366
Produksi (Ton)	218178	137394	143336	40290	34833
Ubi Jalar					
Luas Panen (ha)	248	81	28	37	54
Produksi (Ton)	1041,6	340,2	117,6	155,4	226,8

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016

c. Potensi Peternakan

Dengan luas areal lahan yang belum diusahakan maka Kabupaten Mesuji masih terbuka untuk investasi di sub sektor peternakan, dilihat perkembangan dari tahun 2014 – 2016 ternak besar dan kecil relatif stabil. Populasi sapi mengalami penurunan 1%, kerbau menurun 16%, pertumbuhan Kambing meningkat 10%, pertumbuhan domba meningkat 2%, pertumbuhan babi menurun 7%. Secara lengkap ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.9.
Populasi Ternak Besar dan Kecil Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak														
		Sapi potong			Kerbau			Kambing			Domba			Babi		
		2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Way Serdang	3.981	3.105	3.610	8	6	7	6.478	7.980	8.370	67	37	42	240	86	93
2	Simpang Pematang	1.450	1.758	2.020	17	2	2	5.408	5.918	6.193	56	81	92	296	230	254
3	Panca Jaya	1.233	951	1.065	15	-	-	3.246	5.032	5.204	35	-	-	-	6	6
4	Tanjung Raya	1.475	1.411	1.609	42	27	32	6.892	7.063	7.324	106	104	117	751	556	583
5	Mesuji	608	474	501	25	22	25	3.903	4.159	4.398	110	98	105	-	-	-
6	Mesuji Timur	1.193	924	1.033	21	15	18	2.489	2.451	2.607	145	142	156	984	963	987
7	Rawa Jitu Utara	710	263	271	12	-	-	2.436	3.099	3.278	163	171	195	-	-	-
	Jumlah	10.650	8.886	10.109	140	72	84	30.852	35.702	37.374	682	633	707	2.271	1.841	1.923

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2016

* Angka Sementara



Tabel 2.10.
Populasi Ternak Unggas Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2016

No	Kecamatan	Jenis Ternak																	
		Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam ras Pedaging			Itik			Puyuh			Merpati		
		2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)
(1)	(2)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
1	Way Serdang	23.307	27.486	28.097	-	-	-	30.000	180.000	180.000	3.800	806	887	-	-	-	-	-	-
2	Simpang Pematang	18.482	19.210	19.322	-	1.000	1.000	40.000	10.000	10.000	-	850	896	-	-	-	-	-	-
3	Panca Jaya	9.887	11.151	11.875	-	-	-	-	-	-	-	445	494	-	600	600	-	51	87
4	Tanjung Raya	32.099	36.487	37.087	1.000	-	-	-	13.000	13.000	-	944	1.027	-	1.500	1.500	-	-	-
5	Mesuji	38.981	36.705	37.798	250	-	-	-	2.000	-	-	322	367	-	-	3.000	-	-	-
6	Mesuji Timur	45.980	47.213	48.156	-	-	-	108.693	30.000	30.000	-	499	551	-	1.700	-	-	-	-
7	Rawa Jitu Utara	20.872	21.023	21.583	-	-	-	-	-	-	-	2.09	2.534	-	-	-	-	-	-



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

No	Kecamatan	Jenis Ternak																	
		Ayam Buras			Ayam Ras Petelur			Ayam ras Pedaging			Itik			Puyuh			Merpati		
		2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)	2014	2015	2016*)
												0							
	Jumlah	189.608	199.275	203.918	1.250	1.000	1.000	178.693	235.000	233.000	3.800	5.956	6.756	-	3.800	5.100	-	51	87

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan, 2016



Sedangkan untuk populasi ternak unggas, Ayam buras meningkat 4%, ayam ras petelur mengalami penurunan 10%, ayam ras pedaging meningkat 15%, bebek/itik meningkat 35%, burung puyuh meningkat 67% dan terakhir burung merpati meningkat 85%.

d. **Potensi Hutan**

Potensi hutan yang ada di Kabupaten Mesuji terdiri dari hutan rakyat dan hutan tanaman industri. Hutan rakyat merupakan hutan yang diusahakan oleh penduduk dengan sumber daya yang dimiliki tanpa bantuan pihak lain dimana hasilnya dikelola oleh masyarakat sendiri, hutan tanaman industri merupakan hutan yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara dengan tujuan mempertahankan ekosistem lingkungan dan pemanfaatan hutan untuk kepentingan keuntungan perusahaan pengelola. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa hutan rakyat di Kabupaten Mesuji seluas 531,00 ha dan luas hutan tanaman industri 42.762 ha. Data dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Luas Hutan di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2015

No	Jenis Hutan	Luas	
		Ha	%
1	Hutan Rakyat	531,00	1
2	Hutan Tanaman Industri	42.762,00	99
Jumlah		45.362,00	100

Sumber : - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mesuji, 2016
- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016

e. **Potensi Pertambangan**

Bahan tambang terkandung yang mempunyai potensi untuk penambangan yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji adalah pasir.

Potensi pesisir di Kabupaten Mesuji terbesar di beberapa desa yang ada di Kecamatan Mesuji, diantaranya :

- a) Desa Labuan Batin Kecamatan Way Serdang
Di Labuhan Batin Kec. Serdang Kab. Mesuji, memiliki pontensi bahan tambang galian-C berupa pasir. Pasir yang ditemukan di Labuhan Batin terdapat di sungai Mesuji yang melintasiatau melewati Kabupaten Mesuji sepanjang ± 44Km.

Potensi pasir Kuarsa yang ada di labuhan Batin, terdapat di sepanjang aliran sungai Mesuji yang melintasi Labuhan Batin. Sungai Mesuji yang mengalir di Labuhan Batin dibagi hilir berbatasan dengan Dusun Serang Katon. Sedangkan di bagian hulu berbatasan dengan Lebak Tebakang wilayah daerah Way Kanan.
- b) Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji
Didesa sungai Badak terdapat potensi pasir yang merupakan bahan galian golongan C yang berada di areal perkebunan penduduk dengan ketebalan dari 1–4 dan memiliki luas ± 30 Ha.



2.1.3. ASPEK DEMOGRAFI

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat didukung oleh tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan tersebut. Penduduk dapat bertindak sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan. Aspek penduduk yang menjadi bahasan antara lain jumlah penduduk, perkembangan penduduk, penyebaran penduduk, kepadatan penduduk, dan struktur penduduk.

1. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji tahun 2012 adalah 191.221 jiwa, tahun 2013 sebanyak 192.759 jiwa, dan dalam Sensus Penduduk tahun 2014 sebanyak 194.282 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 5 tahun (2012—2016) sebesar 1%. Lebih jelas mengenai jumlah perkembangan penduduk wilayah Kabupaten Mesuji sebagaimana terlihat pada Tabel 2.12.

Table 2.12.
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kabupaten Mesuji 2012 – 2016

NO	KECAMATAN	2012	2013	2014	2015	2016	Kenaikan/ Penurunan %
1.	Way Serdang	41.567	42.490	42.719	43.096	43.437	1,11%
2.	Simpang	23.869	24.450	24.709	25.055	25.387	1,55%
3.	Panca Jaya	15.62	15.659	15.650	15.698	15.730	0,16%
4.	Tanjung Raya	34.956	35.313	35.526	35.865	36.172	0,86%
5.	Mesuji	20.306	20.413	20.398	20.453	20.489	0,22%
6.	Mesuji Timur	30.309	30.509	30.552	30.700	30.820	0,42%
7.	Rawajitu Utara	24.586	23.925	24.728	24.815	24.878	0,32%
	JUMLAH	191.22	192.759	194.282	195.682	196.913	0,66%

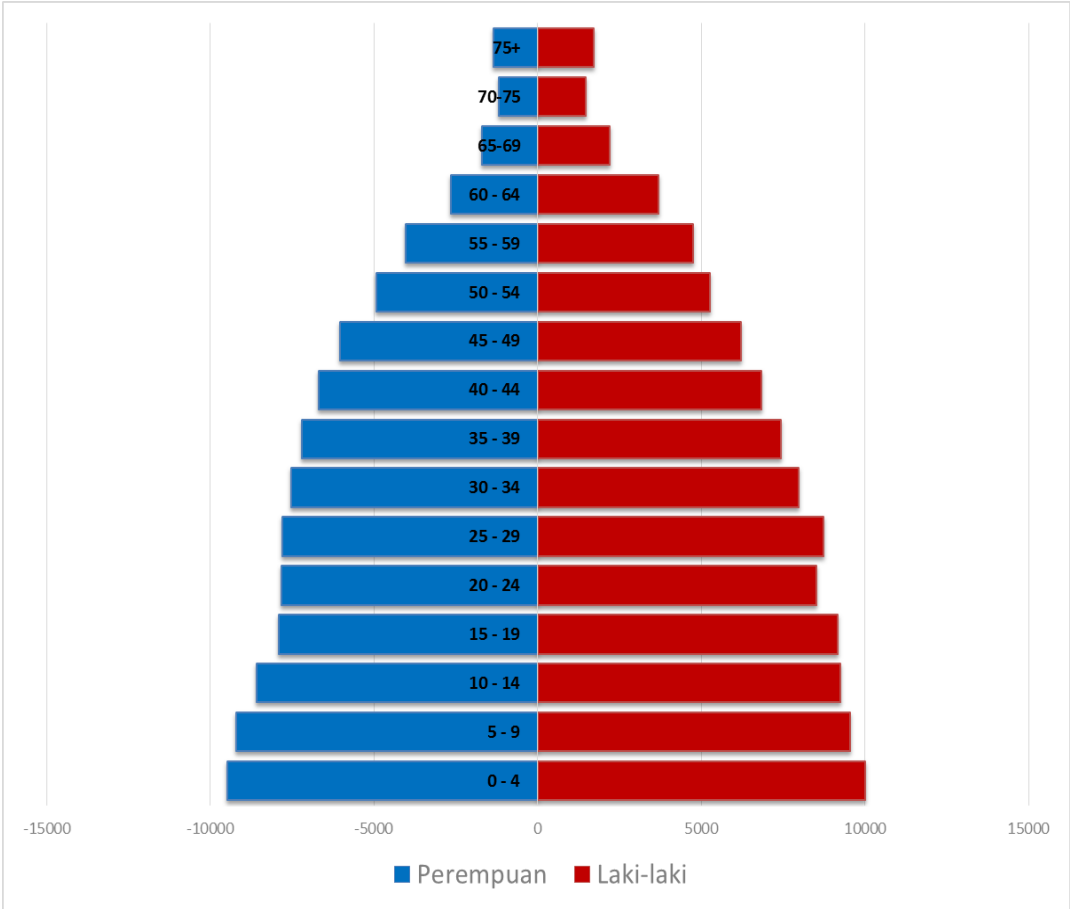
Sumber: Data diolah Tahun 2016

*) Mesuji Dalam Angka 2013 s/d 2016

Jumlah penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan jenis kelamin per kecamatan tahun 2015 dan tahun 2016 ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 2.1.
Jumlah Penduduk Kab Mesuji berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Mesuji Dalam Angka 2017

2. Jumlah Kepala Keluarga

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Mesuji adalah 195.682 jiwa, dan jumlah keluarga 69.896 KK. Jumlah penduduk dan kepala keluarga per kecamatan secara lengkap ditampilkan pada tabel 2.13.

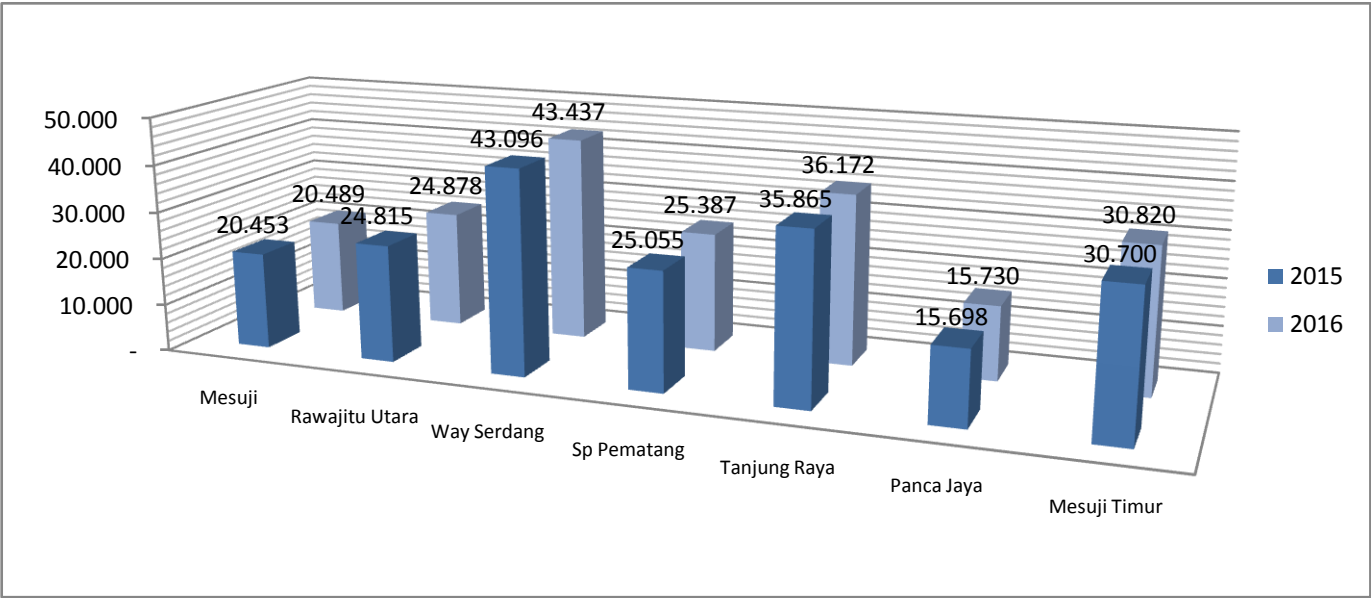
Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten Mesuji Tahun 2015

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Mesuji	11	20.453	9.076
2	Tanjung Raya	21	35.865	17.411
3	Rawajitu Utara	13	24.815	7.985
4	Mesuji Timur	20	30.700	10.653
5	Simpang Pematang	13	25.055	6.704
6	Way Serdang	20	43.096	11.696
7	Panca Jaya	7	15.698	6.371
Kabupaten Mesuji		105	195.682	69.896

Sumber: - Kabupaten Mesuji Dalam Angka, 2016



Grafik 2.2.
Pertumbuhan Pendudukan Kabupaten Mesuji Tahun 2015—2016



Tabel 2.14.
Kepadatan Penduduk di Wilayah Kabupaten Mesuji Tahun 2016

No	Kec	Desa	Luas km2	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa/km2)
1	Mesuji	11	300,06	20.489	68,28
2	Tanjung Raya	21	395,81	36.172	91,39
3	Rawajitu Utara	13	203,85	24.878	122,04
4	Mesuji Timur	20	810,20	30.820	38,04
5	Simpang Pematang	13	133,73	25.387	189,84
6	Way Serdang	20	241,27	43.437	180,03
7	Panca Jaya	7	98,68	15.730	159,40
Kabupaten Mesuji		105	2.184	196.913	89,89

Sumber: - Kecamatan dalam angka 2016, (Data Diolah)

Dari data di atas, kecamatan terpadat adalah Kecamatan Simpang Pematang dengan kepadatan 189 jiwa/km2 dan kecamatan terjarang adalah Kecamatan Mesuji Timur dengan jumlah penduduk 38 jiwa/km2.

3. Rumah Ibadah

Sarana peribadatan di wilayah perencanaan sangat penting untuk masyarakat/penduduk dalam melaksanakan keagamaan dan kerohanian. Penduduk diwilayah Kabupaten Mesuji sangat heterogen, maka sarana peribadatan yang ada terdiri Masjid, Mushola, Rumah Gereja, Pura dan Wihara.

Sarana peribadatan di Kabupaten Mesuji lebih di dominasi oleh Masjid dan Mushola. Hal ini disebabkan mayoritas penduduk di Kabupaten Mesuji memeluk agama Islam berjumlah 157.557 jiwa dan jumlah Mushola/Mesjid 1.014 buah, penduduk beragama Kristiani berjumlah 2.428 jiwa dengan jumlah gereja 54 unit, untuk yang beragama Hindu berjumlah 2.839 jiwa, terdapat 22 pure dan untuk vihara berjumlah 4 buah dengan pemeluk agama Budha 165 jiwa. Dapat dilihat pada tabel 2.15

Tabel 2.15.
Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Mesuji
Tahun 2016

No	Agama	Rumah Ibadah	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Islam	1.014	157.557	1%
2	Kristiani	54	2.428	2%
3	Hindu	22	2.839	1%
4	Budha	4	165	2%

Sumber: Kecamatan dalam Angka dan Statistik Daerah Kecamatan, 2016

4. Bencana Alam

Daerah Rawan Bencana yang ada di Kabupaten Mesuji umumnya adalah rawan banjir karena berdekatan dengan sungai besar dan kecil maupun kondisi geografisnya yang rendah, dan kebakaran khusus wilayah Kecamatan Simpang pematang. menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mesuji. Pada tahun 2016 terdapat bencana banjir yang merusak tempat tinggal warga dengan jumlah korban 939 jiwa dan 508 ha lahan.

Tabel 2.16.
Bencana Banjir yang terjadi selama tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Korban	Jumlah Korban Meninggal	Pekiraan Luas Lahan Banjir
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Ha)
1	2	5	6	3
1	Tanjung Raya		-	-
2	Mesuji		-	-
3	Mesuji Timur	173 KK	-	471 Ha
4	Panca Jaya	9 KK	-	2 Ha

NO	Kecamatan	Jumlah Korban	Jumlah Korban Meninggal	Pekiraan Luas Lahan Banjir
		(Jiwa)	(Jiwa)	(Ha)
5	Simpang Pematang	60 KK	-	-
6	Way Serdang	-	-	-
7	Rawa Jitu Utara	697 KK	-	35 Ha

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

Tabel 2.17.
Bencana Kebakaran yang terjadi selama tahun 2016

NO	Kecamatan	Jumlah Korban	Jumlah Korban Meninggal
		(Jiwa)	(Jiwa)
1	2	3	4
1	Tanjung Raya	2 KK	-
2	Mesuji	6 KK	-
3	Mesuji Timur	1 KK	-
4	Panca Jaya	1 KK	-
5	Simpang Pematang	1 KK	-
6	Way Serdang	-	-
7	Rawa Jitu Utara	-	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian makro adalah data produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

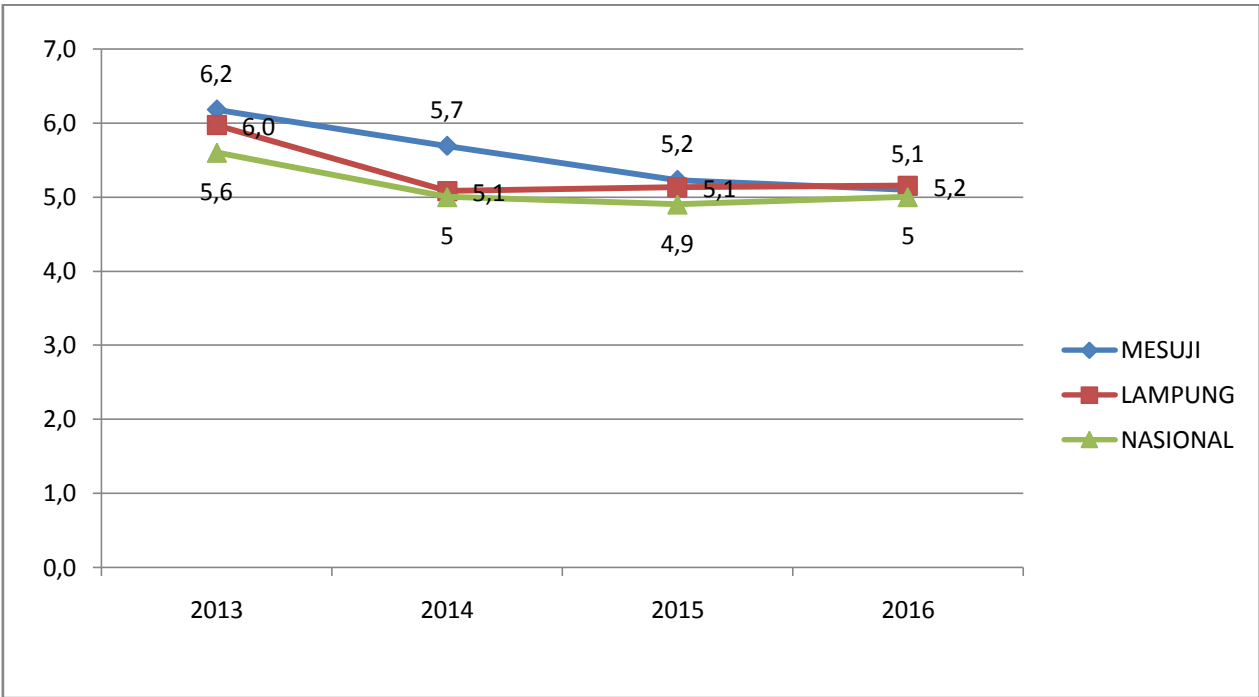
1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, restoran dan hotel; pengangkutan dan komunikasi; lembaga keuangan; dan jasa-jasa lainnya;
2. Untuk mengetahui struktur perekonomian;



- 3. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan;
- 4. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan harga produsen.

Jika disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kab. Mesuji terus mengalami penurunan.

Graffik 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Nasional



Sumber: BPS Kab. Mesuji, Data Diolah, 2017

Berdasarkan perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir dapat diperkirakan target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mesuji

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN MESUJI					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
5,23	5,36	5,49	5,62	5,75	5,88

Sumber : Bappeda Kab. Mesuji, 2017

Berbagai upaya perlu dilakukan guna memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Kab. Mesuji. Untuk itu, penyusunan program/kegiatan harus diarahkan untuk mendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,93 persen. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Informasi dan Komunikasi mencatat sebesar 9,60 persen, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,53 persen, kategori



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,64 persen, kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,39 persen, kategori Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,69 persen, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 7,32 persen, Kategori Industri Pengolahan sebesar 7,24 persen, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,66 persen, kategori Real estate sebesar 5,45 persen, kategori Lainnya sebesar 5,27 persen, Kategori Jasa Pendidikan sebesar 4,30 persen, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,78 persen, kategori Konstruksi 2,99 persen, kategori Jasa Perusahaan sebesar 2,85 persen, kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,94 persen, dan kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40 persen. PDRB atas dasar Harga Konstan dan pengeluaran dan Laju Pertumbuhan Riil Kabupaten Mesuji dari 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2.19.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 s/d Tahun 2016

NO	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar harga Konstan (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.316.272,05	2.442.222,21	2.543.079,85	2.649.827,14	2.750.015,07
2	Pertambangan dan Penggalian	24.612,63	26.786,29	28.911,84	31.099,40	33.710,00
3	Industri Pengolahan	948.510,76	1.019.503,74	1.097.687,23	1.184.159,95	1.269.923,69
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.676,23	5.144,20	6.112,52	6.760,09	7.499,19
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.530,44	1.579,15	1.637,91	1.653,47	1.660,05
6	Konstruksi	387.010,80	406.593,54	428.346,30	436.632,48	449.699,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	572.563,37	607.411,63	642.284,00	676.365,97	714.657,20
8	Transportasi dan Pergudangan	71.155,46	77.266,76	83.791,08	91.861,11	100.614,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.829,87	39.788,33	43.503,03	47.385,40	51.479,16
10	Informasi dan Komunikasi	96.033,52	104.985,13	114.213,32	123.579,11	135.441,61
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.314,76	19.532,10	20.699,82	21.319,72	21.733,54
12	Real Estate	118.155,47	126.610,10	137.500,17	143.797,19	151.632,43

NO	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar harga Konstan (Juta Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015*	2016**
13	Jasa Perusahaan	744,44	845,68	956,67	1.026,32	1.055,60
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	112.670,99	119.443,08	129.350,96	136.027,17	145.988,90
15	Jasa Pendidikan	92.767,20	100.901,22	110.022,07	117.512,87	122.560,12
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20.562,09	22.183,40	24.046,42	25.863,95	27.851,85
17	Jasa lainnya	18.344,32	19.059,48	20.113,88	21.354,21	22.480,20
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.840.754,40	5.139.856,04	5.432.257,07	5.716.225,55	6.008.001,77

Sumber : PDRB Kab. Mesuji Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, 2017

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.20.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d Tahun 2016

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Rp)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.870.184	2.996.978	3.161.513	3.320.146	3.489.571
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	50.972	53.209	57.242	61.735	67.954
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	256.804	269.634	279.668	297.749	320.212
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.510.543	1.585.505	1.675.995	1.737.342	1.863.455
Perubahan Inventori	65.713	7.921	942	1.151	1.835
Ekspor Barang dan Jasa	1.450.074	1.615.217	1.689.977	1.755.645	1.820.165
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.363.535	1.388.608	1.433.079	1.457.542	1.555.189
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.840.754	5.139.856	5.432.257	5.716.226	6.008.002

Sumber : PDRB Kab. Mesuji Menurut Pengeluaran 2012-2016, 2017



Tabel 2.21.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011-2016 (%)

NO	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)					
		2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	3.93	5.44	4.13	4.20	3.78
2	Pertambangan dan Penggalian	-	7.48	8.83	7.94	7.57	8.39
3	Industri Pengolahan	-	8.94	7.48	7.67	7.88	7.24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-	11.91	10.01	18.82	10.59	10.93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	4.74	3.18	3.72	0.95	0.40
6	Konstruksi	-	4.02	5.06	5.35	1.93	2.99
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	6.25	6.09	5.74	5.31	5.66
8	Transportasi dan Pergudangan	-	8.58	8.59	8.44	9.63	9.53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	7.9	8.03	9.34	8.92	8.64
10	Informasi dan Komunikasi	-	10.05	9.32	8.79	8.20	9.60
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	6.91	6.65	5.98	2.99	1.94
12	Real Estate	-	6.41	7.16	8.60	4.58	5.45
13	Jasa Perusahaan	-	13.28	13.60	13.12	7.28	2.85
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	3.97	6.01	8.30	5.16	7.32
15	Jasa Pendidikan	-	8.52	8.77	9.04	6.81	4.30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	6.87	7.88	8.40	7.56	7.69
17	Jasa lainnya	-	3.68	3.90	5.53	6.17	5.27
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-	5.57	6.18	5.69	5.23	5.10

Sumber : PDRB Kab. Mesuji Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, 2017

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara



Tabel 2.22.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Pengeluaran 2011-2016 (%)

Jenis Pengeluaran	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	4.93	4.42	5.49	5.02	5.10
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	6.78	4.39	7.58	7.85	10.07
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	6.21	5	3.72	6.47	7.54
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	8.36	4.96	5.71	3.66	7.26
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	-	19.45	11.39	4.63	3.89	3.67
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-	22.07	1.84	3.20	1.71	6.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-	5.57	6.18	5.69	5.23	5.10

Sumber : PDRB Kab. Mesuji Menurut Pengeluaran 2012-2016, 2017

2. Laju Inflasi Kabupaten Mesuji

Laju inflasi untuk Kabupaten Mesuji secara riil belum dapat dipastikan karena sampai dengan saat ini Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk menghitung laju inflasi hanya menetapkan 2 kota di Provinsi Lampung yang dihitung laju inflasinya. Adapun Kota yang dihitung laju inflasinya untuk Propinsi Lampung yaitu Metro dan Bandar Lampung.

Sampai saat ini Kabupaten Mesuji telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang bekerja sama dengan Bank BI, sebagai upaya untuk mendapatkan pendekatan nilai inflasi Daerah, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain menganalisa permasalahan ekonomi sektor riil, menyusun beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi dan melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Untuk pendekatan yang lebih ideal Pemerintah Kabupaten Mesuji menggunakan data asumsi inflasi berdasarkan Inflasi Provinsi Lampung dan disandingkan dengan data nasional. Adapun data inflasi Provinsi Lampung yang digunakan sebagai pendekatan data inflasi Mesuji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional

NO	INDIKATOR	Tahun 2015	Asumsi 2016	Target 2017
1	Inflasi Lampung	4-5%	3,15%	4,91 %
2	Inflasi Nasional	5%	3,45%	4,37 %

Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Tw II Prov Lampung, Agustus 2017

3. PDRB per kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya PDRB per kapita suatu wilayah. Semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tinggi



pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada PDRB per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun secara makro.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Mesuji mencapai Rp. 41.209.034,85 dengan pertumbuhan sebesar 10,26 persen.

Tabel 2.24.
Pertumbuhan PDRB PerKapita Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 - 2016

TAHUN	ADHB	%	ADHK	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2012	28.024.129,25	8,55	25.302. 666,81	4,66
2013	30.251.785,14	7,95	26.664.674,77	5,38
2014	34.000.423,42	12,39	27.960.681,18	4,86
2015	37.373.592,50	9,92	29.211.810,76	4,47
2016	41.209.034,85	10,26	30.510.945,40	4,45

Sumber : PDRB Kab. Mesuji Menurut Lapangan Usaha 2012-2016, 2017

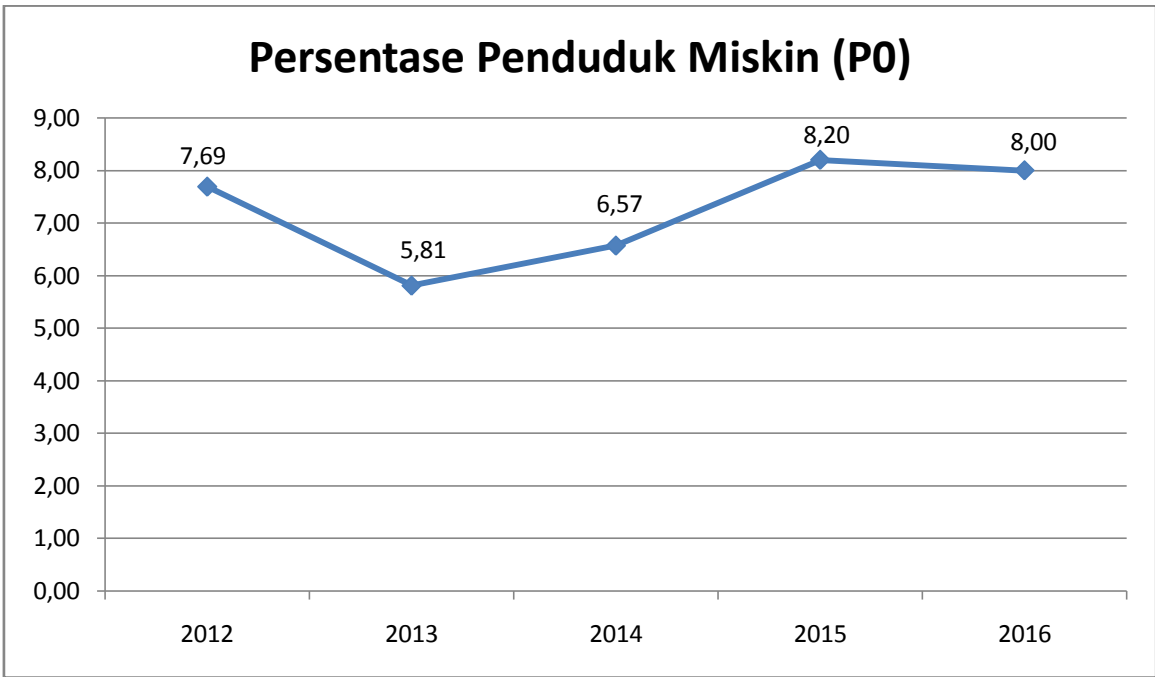
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji tiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini diperoleh karena adanya upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada sektor infrastruktur maupun sektor lainnya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi disuatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji dari tahun 2012 – 2016, meskipun secara garis besar terus meningkat namun pada tahun 2016 mulai menampakan penurunan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji sebesar 7,69%, mengalami penurunan sampai sebesar 5,81% pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan sampai tahun 2015 menjadi 8,20%, kemudian mengalami penurunan menjadi 8,00% pada tahun 2016. Dengan demikian, analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji pun capaiannya membaik dari tahun 2015 sampai tahun 2016.



Grafik 2.3.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016



Sumber: Data diolah, BPS, 2016

Tabel 2.25.
Perkembangan Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016

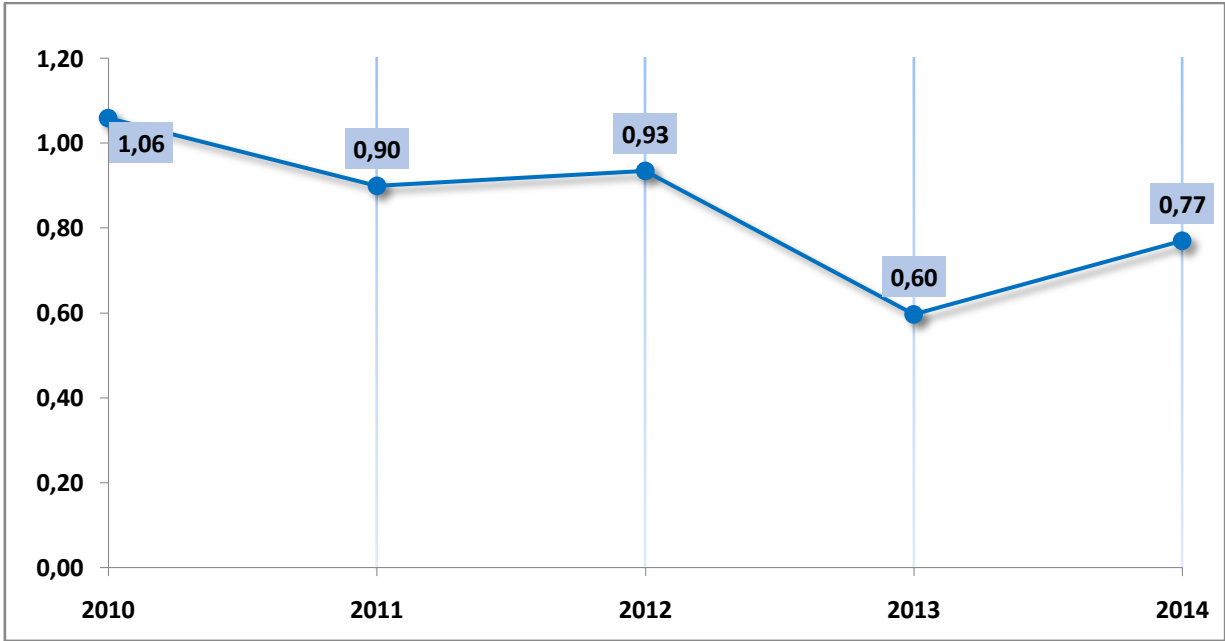
No	Tahun	DATA PENDUDUK MISKIN TAHUN 2012 - 2016							Jumlah
		Mesuji	Mesuji Timur	Rawa Jitu Utara	Tanjung Raya	Panca Jaya	Simpang Pematang	Way Serdang	
1	2012	1.991	2.604	1.149	2.287	886	799	1.491	11.207
		18%	23%	10%	20%	8%	7%	13%	100%
2	2013	1.991	2.604	1.149	2.287	886	799	1.491	11.207
		18%	23%	10%	20%	8%	7%	13%	100%
3	2014	1.991	2.604	1.149	2.287	886	799	1.491	11.207
		18%	23%	10%	20%	8%	7%	13%	100%
4	2015	1.584	2.047	895	2.269	728	851	2.280	10.654
		15%	19%	8%	21%	7%	8%	21%	100%
5	2016	1.584	2.047	895	2.269	728	851	2.280	10.654
		15%	19%	8%	21%	7%	8%	21%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Mesuji, 2017

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2014 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Mesuji sebesar 0,77%, angka tersebut berada dibawah indeks P1 nasional yaitu sebesar 1,75% dan juga jauh dibawah indeks P1 Provinsi Lampung (2,3%). Dengan indeks P1 0,77% (<5%) angka ini memperlihatkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Mesuji lebih mudah

ditanggulangi mengingat hanya sedikit selisihnya antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskina (lihat grafik 11). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada tahun 2010 mencapai angka 1,06. Angka ini pada tahun 2014 menurun sebanyak 0,29 hingga menjadi 0,77. Selama periode 2010 – 2014 penurunan rata-rata indeks kedalaman kemiskinan per tahun sebesar 0,06 (lihat grafik 12). Perkembangan indeks P1 penurunannya tidak konsisten, periode 2010 – 2013 mengalami penurunan sebesar 0,46 yaitu dari angka 1,06 pada tahun 2010 menurun sampai angka 0,6 pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 0,77, hal ini sejalan dengan kenaikan angka garis kemiskinan periode tahun 2010 – 2014 yaitu sebesar 35,20% sehingga menyebabkan beban masyarakat semakin berat, dan berdampak juga pada peningkatan tingkat kemiskinan periode tahun 2013 – 2014 yaitu dari 5,81 pada tahun 2013 menjadi 6,57 pada tahun 2014.

Grafik 2.4.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Mesuji
Tahun 2010 – 2014



Sumber: Data diolah, BPS, 2014

5. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sekaligus mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berikut gambaran masing-masing indeks komposit pembentuk IPM, yaitu Ekonomi (Pengeluaran Perkapita), Pendidikan (Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah) dan Kesehatan (Angka Harapan Hidup).

- a. Pengeluaran Perkapita
Pertumbuhan pengeluaran penduduk per kapita (Angka konsumsi penduduk per kapita) Kabupaten Mesuji dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, yang semula 6.502,5 pada tahun 2012 meningkat menjadi 7.099 pada

tahun 2016. Lebih rinci pengeluaran perkapita penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita
Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
Kabupaten Mesuji	6.502,5	6.706,08	6.763,9	6.836,32	7.099

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2016

- b. Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah
- Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas yang menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Perhitungan ini digunakan untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif atau tahun standar yang harus dijalani untuk bersekolah yang dicapai penduduk.

Tabel.2.27.
Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka rata-rata lama sekolah

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
a. Harapan Lama Sekolah	10.15	10.25	10.34	10.78	11.20
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah	5.63	5.65	5.80	6.12	6.13

Sumber : BPS Prov Lampung, 2017

- c. Angka Harapan Hidup
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu saat ia meninggal. Data angka harapan hidup di suatu daerah berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program social lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Berikut ditampilkan perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2015 pada tabel berikut.



Tabel 2.28.
Perkembangan Rata-rata Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 s/d 2016

No	Tahun	Rata-rata AHH
1	2012	66,57
2	2013	66,70
3	2014	67,05
4	2015	67,15
5	2016	67.32
Jumlah rata		2,65

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2016

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 5 (lima) bentuk pengangguran:

- a. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)
- b. Setengah menganggur (*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.

Berikut perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Mesuji selama kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.29.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran
Terbuka Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	Per Agustus 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	35,56	37,54	39,70	42,27	43,63
2.	Jumlah pengangguran	-	-	-	-	24.967
	a. Setengah Mengangur	-	-	-	-	19.973
	b. Penganguran Terbuka	5.139	5.109	4.997	4.950	4.994

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

- e. Penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di kabupaten Mesuji
- Sektor Ketenaga kerjaan merupakan salah satu sector penting bagi pembangunan ekonomi daerah khususnya dalam upaya pemerintah daerah mengurangi jumlah penduduk miskin. BPS menggunakan batasan umur 15 tahun keatas dari semua penduduk dan dikenal dengan istilah penduduk usia kerja. Penduduk Kabupaten Mesuji sebagian besar bekerja di sector pertanian, sisa nya terbagi dalam 8 sektor lainnya. Disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.30.

Penduduk berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama di kabupaten Mesuji

Uraian	1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	9*
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama	58.112	376	3.386	-	3.750	10.834	1.464	512	5.070

Sumber: Mesuji Dalam Angka 2017

*Note : 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalan

3. Industri

4. Listrik, Gas dan Air Minum

5. Konstruksi

6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomidasi

7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi

8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan

9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan

Selain penghitungan PDRB yang mangalami perubahan, Penghitungan IPM pun mengalami perubahan yang sama dengan PDRB. Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Mesuji dinilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan perkembangan IPM Kab. Mesuji yang terus meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2016, dengan urutan sebagai berikut 57.67, 58.16, 58.71, 59.79 dan terakhir pada tahun 2016 dengan nilai IPM 60.72. Keberhasilan IPM bukan diukur dari tercapainya target atau realisasi anggaran namun apakah permasalahan pembangunan manusia benar-benar terselesaikan dengan program pembangunan yang ada. Berikut perkembangan IPM dari tahun 2012 s/d 2016.

Tabel 2.31.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	IPM	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72

Sumber: BPS Kab. Mesuji, 2017



1.2.2. Kesejahteraan Sosial
a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Berikut Pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Mesuji tahun 2012 s/d 2016.

Tabel.2.32.
Angka Partisipasi Sekolah
di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
a. APS SD/MI	81.06	83.31	82.84	86.07	89.54
b. APS SLTP/MTs	90.08	94.80	91.34	91.36	95.73
c. APS SLTA/MA/SMK	-	40.33	99.35	84.61	86.55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji 2017

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel.2.33.
Angka Partisipasi Kasar
di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Kasar (APK)					
a. APK SD/MI	93.7	95.12	94.4	95.3	95.44
b. APK SLTP/MTs	94.80	94.60	94.10	94.90	98.11
c. APK SMU	34.20	42.80	70.90	96.08	96.13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji 2017

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. APM Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.34.
Angka Partisipasi Murni
di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Partisipasi Murni (APM)					
a. APM SD/MI	92.70	81.00	81,25	83,21	87.80
b. APM SLTP/MTs	62.40	76.60	76,96	77,07	81.82
c. APM SLTA/MA/SMK	26.00	34.30	74,7	74,92	75.08

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji 2016

d. Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah

Angka Kelulusan SD/MI pada Tahun 2014 adalah sebesar 97,2 sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 99,3 atau kenaikan sebesar 2,1 %, Angka Kelulusan SLTP/MTS pada Tahun 2014 adalah sebesar 96,6 sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 97,69 atau kenaikan sebesar 1,09 %, sedangkan untuk Angka Kelulusan SMA/MA/SMK pada Tahun 2014 adalah sebesar 98,9 sedangkan pada tahun 2015 mengalami Penurunan sebesar 82,75 atau Penurunan sebesar (16,15) % dan bertahan sampai 2016.

Angka Putus Sekolah SD/MI pada Tahun 2014 adalah sebesar 1,07 sedangkan pada tahun 2015 mengalami Penurunan sebesar 0,4 atau penurunan sebesar (0,67) %, Angka Putus Sekolah SLTP/MTs pada Tahun 2014 adalah sebesar 3,2 sedangkan pada tahun 2015 mengalami Penurunan sebesar 1,5 atau penurunan sebesar (1,77) %, sedangkan untuk Angka Putus Sekolah SLTA/MA/SMK pada Tahun 2014 adalah sebesar 5,0 sedangkan pada tahun 2015 mengalami Penurunan sebesar 2,03 atau penurunan sebesar (2,97) % dan pada 2016 tidak terdapat perubahan.

Tabel 2.35.
Data Angka Kelulusan dan Angka Putus Sekolah
Kabupaten Mesuji 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Kelulusan					
	a. Angka Kelulusan SD/MI	98.03	100	97,2	99,3	98.01
	b. Angka Kelulusan SLTP/MTs	96.80	98.50	96,6	97,69	98.60
	c. Angka Kelulusan SMA/MA/SMK	96.30	100	98,9	92,75	98.74
2	Angka Putus Sekolah					
	a. Putus Sekolah SD/MI	-	4.17	1,07	0,4	0.4
	b. Putus Sekolah SLTP	-	3.58	3,2	1,5	1.5
	c. Putus Sekolah SLTA	-	9.18	1,79	2,03	2.03

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji 2016

e. Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.



Tabel 2.36.
Pertumbuhan Angka Kematian ibu dan bayi tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 KH)	—	0.74	0.83	0.53	2,66
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1.000 KH)	—	12.65	20.05	15.97	8,5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mesuji, 2017

1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga. Kondisi sosial budaya di wilayah Kabupaten Mesuji merupakan bagian dari sosial budaya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung dikenal juga dengan julukan “*Sang Bumi Ruai Jurai*” yang berarti satu bumi yang didiami oleh dua macam masyarakat (suku/etnis), yaitu masyarakat *Pepadun* dan *Saibatin*. Masyarakat pertama mendiami daratan dan pedalaman Lampung, seperti daerah Tulang Bawang, Mesuji, Abung, Sungkai, Way Kanan, dan Pubian, sedangkan masyarakat kedua mendiami daerah pesisir pantai, sebelum Labuhan Maringgai, Pesisir Krui, Pesisir Semangka (Wonosobo dan Kota Agung), Belalau, dan Pesisir Rajabasa.

Disamping penduduk asli suku Lampung, suku Banten, Suku Bugis, Jawa, Bali juga menetap di wilayah Kabupaten Mesuji. Suku-suku ini masuk secara massif sejak Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1905 memindahkan orang-orang dari Jawa dan ditempatkan di hampir semua daerah. Kebijakan ini terus berlanjut hingga 1979, batas akhir secara resmi dinyatakan tidak lagi menjadi daerah transmigrasi. Namun, pertumbuhan penduduk yang berasal dari pendatang pun tetap saja tidak terbendung setiap tahunnya. Beberapa desa tergabung dalam satu marga, sedangkan kampong itu sendiri terdiri atas beberapa buway. Di setiap buway atau gabungan buway terdapat rumah besar yang disebut *Nuwow Balak*. Biasanya *Nuwow Balak* ini merupakan rumah dari kepala kerabat yang merupakan kepala pimpinan klan dan kepala *kebuwayan* tersebut, yang disebut juga punyimbang bumi.

Masyarakat Mesuji memiliki bahasa dan aksara sendiri, namun penggunaan bahasa pada daerah pedesaan terutama pada perdesaan masyarakat (*riyuh* ataupun *pekon*), penggunaan Bahasa Lampung sangat dominan. Bahasa Lampung terdiri dari dua dialek, pertama dialek “O” yang biasanya digunakan oleh masyarakat Pepadun, meliputi Abung dan Menggala serta dialek “A” dan umumnya digunakan masyarakat Saibatin, seperti Labuan Maringgai, Pesisir Krui, Pesisir Semangka, Belalau, Ranau, Pesisir Rajabasa, Komring, dan Kayu Agung. Namun demikian ada pula masyarakat Pepadun yang menggunakan dialek “A” ini, yaitu Way Kanan, Sungkai, dan Pubian. Disamping memiliki bahasa daerah yang khas, masyarakat Lampung juga memiliki aksara sendiri yang disebut dengan huruf Kha Gha Nga. Aksara dan Bahasa Lampung itu menjadi kurikulum muatan lokal yang wajib dipelajari oleh murid-murid SD dan SMP di seluruh Provinsi Lampung.

Nilai-nilai budaya masyarakat ini bersumber dari falsafah piil pesanggiri, yang terdiri dari harga diri, prilaku, dan sikap hidup :

- a. *Nengah nyapur* (hidup bermasyarakat, membuka diri dalam pergaulan)



- b. *Nemui nyimah* (terbuka tangan, murah hati dan ramah pada semua orang)
- c. *Berjuluk Beadek* (bernama, bergelar, saling menghormati)
- d. *Sakai Sambayan* (gotong royong, tolong menolong)

Upaya pembangunan seni budaya dan olah raga di Kabupaten Mesuji tidak hanya pada pengembangan seni budaya lokal namun juga pengembangan seni budaya masyarakat pendatang mencakup seni moderen. Perkumpulan seni drama dan musik terdapat 25 perkumpulan pada tahun 2014 bamun menurun menjadi 16 perkumpulan pada tahun 2015, sama seperti seni drama perkembangan seni wayang pun menurun pada tahun 2014 terdapat 8 perkumpulan dan tahun 2015 menjadi 7 perkumpulan sedangkan jumlah perkumpulan seni tari meningkat dari 30 kelompok pada tahun 2014 menjadi 32 perkumpulan tahun 2015. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Perkumpulan Kesenian di Kabupaten Mesuji Tahun 2014—2015

No	Tahun	Seni Drama/ Musik	Wayang Orang /Golek/ Kulit	Tari-tarian	Jumlah
1	2014	25	8	30	63
2	2015	16	7	32	55

Sumber : Statistik Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015

Pembangunan keolahragaan di Kabupaten Mesuji meliputi berbagai cabang olah raga. Pada 2015 yang tercatat diantaranya Bola Volly 199 perkumpulan, Bulu Tangkis 160 perkumpulan dan sepakbola memiliki 90 perkumpulan ketiga cabang olahraga tersebut merupakan olahraga dengan perkumpulan terbanyak seperti ditampilkan pada tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Data Cabang dan Klub Olahraga Kab. Mesuji Tahun 2015

NO	Cabang Olahraga	Klub Olahraga
1	Sepak Bola	90
2	Bola Volly	199
3	Bulu Tangkis	160
4	Tenis	5
5	Tenis Meja	78
Jumlah		532

Sumber : Statistik Dalam Angka 2016 dan Kecamatan Dalam Angka 2016, (Data Diolah)

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM



Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan perpustakaan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Dari data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan, pada tahun 2017 Rasio ketersediaan terhadap jumlah penduduk usia sekolah untuk tingkat SD dengan rasio tertinggi adalah Kecamatan Mesuji Timur yaitu 1:227 atau 1 gedung sekolah untuk setiap 227 orang kelompok usia 7-12 th. Jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya, Kecamatan Mesuji Timur adalah yang terbanyak penduduk usia sekolahnya dari setiap gedung sekolahnya.

Sementara itu untuk rasio ketersediaan sekolah tingkat SMP Tahun 2017 Kecamatan Panca Jaya adalah yang tertinggi dibanding Kecamatan Lain yaitu 1:545 disusul oleh Kecamatan Rawajitu Utara sebesar 1:368, hal ini menunjukkan masih kurangnya gedung sekolah di kedua kecamatan ini. Secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Jumlah Prasarana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kab. Mesuji
Tahun 2017

No	Kecamatan	SD			SMP		
		Jml Gedung Sekolah	Jml Penduduk kelompok usia 7-12	Rasio	Jml Gedung sekolah	Jml Penduduk kelompok usia 13-15	Rasio
1.	Rawajitu Utara	23	3.047	1:132	3	1.105	1:368
2.	Mesuji Timur	18	4.091	1:227	8	1.613	1:202
3.	Mesuji	14	2.921	1:209	6	1.145	1:191
4.	Tanjung Raya	22	4.941	1:225	9	2.203	1:245
5.	Panca Jaya	10	2.008	1:201	2	1.089	1:545
6.	Simpang Pematang	14	3.025	1:216	9	797	1:89
7.	Way Serdang	27	4.904	1:182	11	1.808	1:164
	Jumlah	129	24.937		48	9.760	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017

b. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2016 sebesar 113,3, rasio guru murid jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 99,9 Secara lebih lengkap rasio guru terhadap murid per kecamatan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan SD dan SMP Tahun 2016
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mesuji

No	Kecamatan	SD				SMP			
		Jumlah Guru	Jumlah Murid		Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid		Rasio
			L	P			L	P	
1	Way Serdang	301	2.468	2.257	15,70	118	845	901	14,80
2	Simpang Pematang	181	1.698	1.598	18,21	80	526	491	12,71
3	Panca Jaya	107	973	880	17,32	47	302	242	11,57
4	Tanjung Raya	279	2.543	2.251	17,18	102	784	820	15,73
5	Mesuji	172	1.319	1.178	14,52	64	432	418	13,28
6	Mesuji Timur	229	1.815	1.620	15,00	69	572	578	16,67
7	Rawa Jitu Utara	192	1.361	1.242	13,56	32	208	219	13,34
Jumlah		1.461	12.177	11.026	15,88	512	3.669	3.669	14,33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

2. Urusan Kesehatan

a. Ketersediaan Sarana Kesehatan Masyarakat

Rumah sakit adalah salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan seperti asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Mesuji telah terpenuhi dengan dibangunnya rumah sakit pada tahun 2015 dan telah beroperasi pada pertengahan 2016.

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana, dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Untuk itu perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selayaknya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

Secara lengkap data rasio dan perkembangan pelayanan puskesmas dan pustu dari tahun 2012 s/d 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.41.
Pertumbuhan Puskesmas dan Pustu tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah					
1.	Puskesmas	12	12	12	12	12
	Jumlah Rumah					
2.	Sakit	0	0	0	1	1
	Rasio Rumah					
3.	Sakit per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32
2.	Jumlah Pustu	41	41	43	43	43
	Jumlah					
3.	Posyandu	150	155	172	170	170
	Rasio Posyandu					
4.	persatuan balita	0.88	0.6	0.88	0,86	0,92
	Jumlah					
5.	Penduduk	192.330	192.843	194.283	195.682	
	Rasio Puskesmas					
6.	persatuan penduduk	4,65	5,15	6,15	3,8	3,81
	Rasio Pustu					
7.	persatuan penduduk	1,17	1.27	0.85	0.82	0.82

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mesuji, 2017

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 100.000 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Kabupaten Mesuji belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Kabupaten Mesuji. Selain itu distribusi dokter serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jumlah dokter di Kabupaten Mesuji 29



dokter untuk melayani jumlah penduduk 195.682 jiwa pada tahun 2015. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42.
Pertumbuhan Jumlah Dokter Tahun 2012 s/d 2016 Kabupaten Mesuji

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Dokter	18	20	25	29	26
2	Jumlah Penduduk	192.330	192.843	194.283	195.682	196.913
3	Rasio	9,36	10,37	12,87	14,82	13,20

Sumber:Dinas Kesehatan Kab, Mesuji 2017

Rasio dokter per satuan penduduk tertinggi adalah Mesuji sebesar 24,45 dan terendah adalah Way Serdang sebesar 6,96. Sementara ketersediaan tenaga kesehatan merupakan seberapa besar jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Mesuji yang berprofesi sebagai paramedik dan memberikan pelayanan medis per 80.000 penduduk. Jumlah tenaga medis yang ada di Kabupaten Mesuji tahun 2015 sejumlah 325 orang terdiri dari bidan 171 orang, perawat 140 Orang dan Perawat gigi 14 orang. Rasio tenaga medis tertinggi adalah di Kecamatan Tanjung Raya sebesar 211,91 sedangkan yang terendah adalah 79,82 di Kecamatan Simpang Pematang. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.61 s/d Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016

No	Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
1	Bidan	72	79	158	194	228
2	Perawat	83	83	119	125	148
3	Perawat Gigi	9	13	13	14	
Jumlah		164	175	290	325	

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab. Mesuji 2016, (Data Diolah)

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Jaringan Jalan

Dilihat kondisi perkerasan jalannya, jalan-jalan yang ada di wilayah Kabupaten Mesuji sudah beraspal, berbatu, dan tanah. Fungsi jalan saat ini memiliki 2 (dua) fungsi jalan arteri primer yaitu jalan negara dan provinsi, serta jalan lokal sekunder yaitu jalan kabupaten.

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.



- 2. Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.
- 3. Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- 4. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Jalan provinsi di Kabupaten Mesuji memiliki panjang 40,03 km, dalam kondisi baik sepanjang 4,7 km. Sedangkan untuk jalan kabupaten dengan total panjang 593,81 km, 204,47 km dalam kondisi baik. Namun jalan Negara dengan total 41,07 km seluruhnya dalam kondisi sedang.

1). Jaringan Jalan Arteri Primer (Jalan Negara dan Provinsi)

Jaringan jalan arteri atau primer yaitu jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mesuji dengan wilayah diluarnya. Kabupaten Mesuji dapat dicapai dari Ibukota Kabupaten Tulang Bawang, Kota Menggala, melalui jalan Lintas Timur Sumatra. Rute yang ditempuh adalah Kota Menggala–Simpang Pematang menggunakan prasarana jalan Regional Lintas Timur Sumatra, kemudian dilanjutkan ke arah Timur dengan rute Simpang Pematang–Brabasan–Wiralaga, yang disebut Jalan Poros dan merupakan jalan berstatus jalan provinsi.

Total panjang jalan Negara adalah 41,07 km dengan kondisi seluruhnya beraspal. Sedangkan jalan provinsi dari total panjang 40,03 km, sebanyak 25,13 km beraspal dan 14,90 kerikil . Secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Perkembangan Jalan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2015

KEADAAN		STATUS JALAN			
		JALAN NEGARA		JALAN PROVINSI	
		2014	2015	2014	2015
I.	JENIS PERMUKAAN				
	a. Diaspal	41,07	41,07	25,13	25,13
	b. Kerikil	-	-	14,90	14,90
	c. Tanah	-	-	-	-
	d. Tidak Dirinci	-	-	-	-
	JUMLAH	41,07	41,07	40,03	40,03
II.	KONDISI JALAN				
	a. Baik	-	-	3,4	4,7
	b. Sedang	41,07	41,07	-	-

KEADAAN		STATUS JALAN			
		JALAN NEGARA		JALAN PROVINSI	
		2014	2015	2014	2015
	c. Rusak	-	-	36,63	35,33
	d. Rusak Berat	-	-	-	-
	JUMLAH	41,07	41,07	40,03	40,03
III.	KELAS JALAN				
	a. Kelas I	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	-	-	-
	d. Kelas III A	41,07	41,07	-	-
	e. Kelas III B	-	-	40,03	40,03
	f. Kelas III C	-	-	-	-
	g. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-
	JUMLAH	41,07	41,07	40,03	40,03

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Mesuji, 2016

Berdasarkan informasi yang diperoleh pemerintah daerah, kerusakan jalan poros tersebut terutama dikarenakan beban kendaraan yang melintasi jalan tersebut umumnya melebihi kemampuan jalan. Jalan poros merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan perkebunan dan perkebunan rakyat ke lokasi industri pengolahan, sehingga setiap hari truk pengangkut menggunakan jalan tersebut untuk mengangkut hasil perkebunan ke pabrik pengolahan.

2). Jaringan Jalan Lokal Sekunder (Jalan Kabupaten)

Jaringan jalan lokal sekunder yaitu jaringan jalan yang menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Mesuji. Jaringan jalan lokal terdapat di Kabupaten Mesuji umumnya merupakan jaringan jalan yang dibuka pada saat pembukaan kawasan transmigrasi yang merupakan daerah rawa, maka pada saat pembukaan lahan dilakukan pembangunan saluran-saluran air dimana jaringan jalan yang dibangun pada saat itu adalah mengikuti saluran-saluran tersebut.

Kondisi jaringan jalan lokal dalam kondisi rusak berat sebanyak 176,23 km sehingga perjalanan antar kecamatan menuju pusat Kabupaten Mesuji membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam. Panjang prasarana jalan lokal (jalan kabupaten) memiliki panjang 593,81 km, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.45.
Perkembangan Jalan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 – 2015

KEADAAN		STATUS JALAN	
		JALAN KAB/KOTA	
		2014	2015
I.	JENIS PERMUKAAN		
	a. Diaspal	132,67	195,37
	b. Kerikil	237,59	242,58
	c. Tanah	169,90	155,84



KEADAAN		STATUS JALAN	
		JALAN KAB/KOTA	
		2014	2015
	d. Tidak Dirinci	-	-
	JUMLAH	540,16	593,81
II.	KONDISI JALAN		
	a. Baik	27,1	204,47
	b. Sedang	108,03	88,5
	c. Rusak	64,82	124,61
	d. Rusak Berat	340,22	176,23
	JUMLAH	540,17	593,81
III.	KELAS JALAN		
	a. Kelas I	-	-
	b. Kelas II	-	-
	c. Kelas III	-	-
	d. Kelas III A	-	-
	e. Kelas III B	540,17	593,81
	f. Kelas III C	-	-
	g. Kelas Tidak Dirinci	-	-
	JUMLAH	540,17	593,81

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Mesuji, 2016

Tabel 2.46.
Perkembangan Panjang Jalan yang Dibangun di Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016

No	Panjang Jalan yang Dibangun	2012	2013	2014	2015	2016
	Baik	-	80.205	80.205	36.35	276.35
	Sedang	-	134.55	386.1	434.947	69.11
	Buruk/Rusak Ringan	-	325.15	73.865	198.34	98.63
	Rusak Berat	-	-	-	-	119.05

b. Prasarana Jembatan

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Mesuji umumnya sudah banyak yang diperbaiki, terdapat juga jembatan baru yang dibangun untuk menghubungkan antar wilayah. Saat ini sudah terdapat 160 jembatan yang tersebar di tujuh kecamatan. Guna mengetahui perkembangan prasarana Jembatan di wilayah Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Perkembangan Panjang Jembatanyang Dibangun di Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016

No	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2012	2013	2014	2015	2016
	Baik	-	67	90	96	38
	Sedang	-	44	21	26	40
	Buruk/Rusak Ringan	-	17	17	6	42
	Rusak Berat	-	-	-	-	36

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji, 2017

c. Jaringan Irigasi

Irigasi adalah suatu sistem untuk mengairi suatu lahan dengan cara membendung sumber air. Atau dalam pengertian lain irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Adapun Fungsi Irigasi adalah sebagai berikut:

- 1. Memasok kebutuhan air tanaman
- 2. Menjamin ketersediaan air apabila terjadi betatan
- 3. Menurunkan suhu tanah
- 4. Mengurangi kerusakan akibat frost
- 5. Melunakkan lapis keras pada saat pengolahan tanah

Di Kabupaten Mesuji terdapat 31 irigasi yang tersebar di 7 kecamatan dengan dua jenis irigasi yaitu irigasi rawa pasang surut dan irigasi permukaan. Secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.48.
Jumlah luas areal jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Ha) Tahun 2012 – 2015

NO	URAIAN	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
1.	Baik	200	450	650	860
2.	Buruk	1866	1616	1416	1206

d. Drainase

Secara umum, drainase diwilayah Kabupaten Mesuji mengikuti pola jaringan jalan eksisting dan memanfaatkan sungai sebagai saluran primer. Karakteristik kawasan yang datar dan berupa rawa sejak awal telah diinterfensi melalui pembangunan saluran-saluran irigasi rawa terutama dikawasan pemukiman transmigrasi untuk menghindari terjadinya genangan. Saluran tersebut secara berjenjang terdiri dari saluran primer, saluran sekunder

yang dilengkapi pintu air, saluran tersier, dan pada sisi kanan dan kiri jalan terdapat saluran gendong.

Sampai tahun 2016 telah dibangun drainase sebanyak 11.721 yang terdapat di hampir seluruh kecamatan. Hanya Kecamatan Rawajitu Utara yang belum ada pembangunan drainase. Dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Total Panjang Drainase Per Kecamatan di Kabupaten Mesuji tahun 2016

Kecamatan	Panjang Penanganan (Meter)
Simpang Pematang	1670
Tanjung Raya	4060
Panca Jaya	1106
Mesuji Timur	340
Mesuji	438
Way Serdang	4107
Rawajitu Utara	0
Total (m)	11721

Sumber: Dinas kesehatan, 2016

4. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan yang menjadi tolak ukur kenyamanan masyarakat adalah Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Hal ini menjadi penting dikarenakan berkaitan langsung dengan tingkat kriminalitas. Pada tahun 2017 s/d 2022 Pemerintah Kab. Mesuji memiliki indikator yaitu menurunnya tingkat kriminalitas di Kab. Mesuji. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kriminalitas di Kab. Mesuji. Berikut ditampilkan perkembangan kriminalitas Kab. Mesuji Tahun 2015 – 2016.

Tabel 2.50.
Perkembangan Kriminalitas Kab. Mesuji Tahun 2015-2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TH 2015		TH 2016	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	2	3	4	5	6
1.	PEMBUNUHAN	6	5	3	2
2.	PENGANIAYAAN BERAT	1	1	0	0
3.	PENCULIKAN	0	0	0	0
4.	C U R A S	13	5	33	11
5.	C U R A T	35	24	38	28
6.	PENCURIAN RANMOR	27	10	19	8
7.	PERKOSAAN	1	1	1	1
8.	PEMERASAN / RAMPAS	2	2	7	7
9.	NARKOBA	-	-	-	-
10.	KENAKALAN REMAJA	-	-	-	-
11.	PEMBAKARAN	3	0	0	0
12.	KEBAKARAN	-	-	-	-
13.	CUWATPON	-	-	-	-
14.	UANG PALSU	-	-	-	-
15.	BENCANA ALAM	-	-	-	-
16.	PENGRUSAKAN	6	3	4	2
17.	ILLEGAL LOGING	0	0	0	0

NO	JENIS KRIMINALITAS	TH 2015		TH 2016	
		JTP	PTP	JTP	PTP
1	2	3	4	5	6
18.	PENJARAHAN	0	0	0	0
19.	S A R A	0	0	0	0
20.	LAHGUN SENPI / SENPI RAKITAN	8	7	3	2
21.	KEJ. HANDAK/MOLOTOV	0	0	0	0
22.	PENYELUNDUPAN	0	0	0	0
23.	P O A	0	0	0	0
24.	PEMOGOKAN	0	0	0	0
25.	DEMO / UNJUK RASA	0	0	0	0
26.	PERKELAHIAN TNI / POLRI	0	0	0	0
27.	KONEKSITAS	0	0	0	0
28.	KEJ. POLITIK	0	0	0	0
29.	KEJ. TERHADAP PRESIDEN	0	0	0	0
30.	KEJ. Tibbum / KEROYOK	12	10	9	8
31.	KECELAKAAN LAUT	0	0	0	0
32.	KECELAKAAN UDARA	0	0	0	0
33.	KECELAKAAN KERETA API	0	0	0	0
34.	KECELAKAAN LALU LINTAS	-	-	-	-
35.	PERJUDIAN	12	12	6	6
36.	PERZINAHAN	0	0	0	0
37.	PERBUATAN CABUL/ PA	3	2	9	9
38.	PENADAHAN	1	1	0	0
39.	PENIPUAN	7	4	2	1
40.	PENGGELOPAN	13	11	7	6
41.	PENYUAPAN	0	0	0	0
42.	PENCURIAN RINGAN/BIASA	7	4	8	7
43.	KEJAHATAN KESUSILAAN	0	0	0	0
44.	PENGANIAYAAN RINGAN	-	-	-	-
45.	BANK GELAP	0	0	0	0
46.	WARKAT BANK	0	0	0	0
47.	HAK CIPTA	0	0	0	0
48.	PERTANAHAN	0	0	0	0
49.	BURSA EFEK	0	0	0	0
50.	KORUPSI	0	0	1	1
51.	KREDIT BINMAS	0	0	0	0
52.	KEJAHATAN SURAT/METRAI	0	0	0	0
53.	DAGANG WANITA / ANAK	0	0	0	0
54.	PELANGGARAN KUHP	0	0	0	0
55.	PAJAK CUKAI	0	0	0	0
56.	LAIN-LAIN	7	6	7	6
57.	DLL KEJAHATAN / PELANGGARAN	0	0	0	0
JUMLAH		187	129	171	127

Sumber : Polres Kab. Mesuji, 2017

5. **Urusan Perumahan Rakyat**
a. **Rumah Tinggal Bersanitasi**

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi berupa fasilitas air bersih, pembuangan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah.

1. **Fasilitas Air Bersih dan Rumah Layak Huni**

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun

bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Pemakaian air bersih merupakan kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi penduduk secara rutin guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik buruknya pelayanan air bersih/minum akan sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku air untuk pengolahan lebih lanjut. Sumber air bersih/minum yang digunakan oleh penduduk di Kabupaten Mesuji sebagian besar merupakan sumur buatan penduduk. Kualitas air umumnya masih rendah karena ada bagian-bagian tertentu yang berupa air payau. Sebagian penduduk lain menampung air hujan dengan peralatan penampungan sendiri dan sebagian besar juga memanfaatkan air di sungai.

Kabupaten Mesuji setiap tahun berupaya mengurangi rumah tinggal tidak layak huni dengan melakukan program Pembangunan Rumah Layak Huni (Barulahu) yang sudah memiliki fasilitas sanitasi berupa akses air bersih.

Berdasar pada data Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berikut ditampilkan perkembangan Barulahu dan rumah tangga yang melakukan pemasangan SPAM.

Tabel 2.51.
Perkembangan Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni dan Rumah Tangga yang Melakukan Pemasangan SPAM di Kabupaten Mesuji

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pembangunan rumah layak huni	-	507	1251	2595	1901
Rumah Tangga yang melakukan Pemasangan SPAM	404	551	972	276	503

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

2. Limbah Rumah Tangga

Jenis limbah yang dihasilkan di kabupaten Mesuji berupa limbah rumah tangga dan limbah industri hasil pengolahan. Limbah rumah tangga terdiri dari larutan maupun tersuspensi. Dalam usaha penyehatan lingkungan, pembangunan sarana pembuangan akhir limbah secara sehat merupakan kebutuhan yang sangat penting. Karena itu seluruh limbah harus menggunakan saluran tertutup baik berupa pipa yang ditanam didalam tanah ataupun dengan septictank. Dengan demikian melihat kondisi fisik yang porositasnya tinggi maka dapat menggunakan sistem perorangan /individual atau komunal yaitu dengan septictank. Selain itu masyarakat melakukan pembuangannya dengan WC pribadi maupun WC umum atau MCK umum yang ada disekitar kecamatan Mesuji. Pembuangan limbah dengan septictank ini secara ekonomis lebih ringan dibandingkan dengan sistem jaringan, selain itu sistem ini juga lebih sederhana.



Dari data Dinas Kesehatan Tahun 2015 rumah tangga yang menggunakan jamban sehat permanen berjumlah 19.417 RT, atau diatas 50% dari jumlah KK yang ada. Secara lengkap ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.52.
Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Mesuji tahun 2015

Kecamatan	JSP	JSSP	Sharing	OD
Mesuji	715	1.928	172	4.548
Mesuji Timur	3.066	4.094	855	1.498
Panca Jaya	2.439	1.438	216	156
Rawajitu Utara	1.480	4.238	152	1.611
Simpang Pematang	3.565	2.858	62	364
Tanjung Raya	4.933	3.187	2.084	2.796
Way Serdang	5.182	4.916	74	1.898
Jumlah	21.380	22.659	3.615	12.871

Sumber: Dinas kesehatan, 2016

Tabel 2.53.
Perkembangan Jumlah MCK yang dibangun Tahun 2012 - 2016

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah MCK yang dibangun (titik)	-	3	8	11	4

Sumber:Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman, 2016

3. Persampahan

Sampah secara sederhana diartikan sebagai sampah organik maupun anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi tersebut. Sumber sampah umumnya berasal dari perumahan dan pasar. Sampah menjadi masalah penting untuk perkotaan dan perdesaan yang padat penduduknya. Kondisi pada perkotaan berbeda dengan kondisi perdesaan yang umumnya tidak mengalami permasalahan dalam penanganan persampahan. Ketersediaan lahan di Kabupaten Mesuji masih cukup luas mempermudah masyarakat Mesuji mengelola sendiri persampahan yang ditimbulkannya.

Penanganan sampah diwilayah Kabupaten Mesuji masih dilakukan secara individual dan belum dilayani oleh pengelolaan persampahan dari dinas terkait. Umumnya penduduk mengelola sampah dengan cara langsung membakar, menimbun, dan bahkan terdapat beberapa area dimana ditemui pembuangan sampah kesaluran irigasi rawa. Secara khusus diperlukan TPS mengingat pada wilayah ini terdapat berbagai kegiatan yang menghasilkan limbah padat (sampah) yang perlu dikelola secara baik untuk menciptakan kawasan perkotaan yang memiliki daya tarik untuk berinvestasi.

Berdasarkan informasi dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup, terdapat 235 unit tempat pembuangan sampah, 1 unit tempat pengolahan akhir. Pada tabel 2.102 dan



tabel 2.103 ditampilkan volume sampah per hari dan per tahun yang dihasilkan per kecamatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 2.54.
Data Volume Sampah di Kabupaten Mesuji tahun 2016

Kategori	Jumlah
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah	235 Unit
Tempat Pengolahan Akhir	1 unit
Volume Produksi Sampah	11.931,85 Ton
Volume Sampah yang Ditangani	84 Ton

Sumber: Badan Pengelola Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 2.55.
Timbulan Sampah (m³)/Per Hari dan Ton Per Tahun

Kecamatan	2014	2015	2016
Simpang Pematang	60	57,22	57,04
Tanjung Raya	99,6	99,57	99
Panca Jaya	36,3	35,90	42,89
Mesuji Timur	76,5	86,98	92,84
Mesuji	58,02	64,62	53,59
Way Serdang	96,23	96,77	91,18
Rawajitu Utara	58,82	61,81	67,74
Total (m³)	485,47	502,87	504,28
Total Ton Per Tahun	177.196,55	183.548,86	184.062,20

Sumber: Badan Pengelola Lingkungan Hidup, 2016

6. Urusan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mesuji sebagai suatu rencana penataan ruang wilayah yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah. Pada hakekatnya penataan ruang adalah suatu rangkaian proses siklik, dimulai dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang ini secara hukum merupakan wewenang dan tugas pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

1. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Mesuji meliputi:
 - a. Kawasan Kota Bahari Wiralaga di Kecamatan Mesuji;
 - b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Rawajitu Utara dan Kecamatan Mesuji Timur; dan
 - c. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Mesuji dan Kecamatan Mesuji Timur.
2. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
 - a. Kawasan Wiralaga di Kecamatan Mesuji; dan
 - b. Kawasan Simpang Pematang di Kecamatan Simpang Pematang
3. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi meliputi:
 - a. Kawasan Simpang pematang di Kecamatan Simpang Pematang.;
 - b. Kawasan Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya;
 - c. Kawasan Bukoposo di Kecamatan Way Serdang;
 - d. Kawasan Mukti Karya di Kecamatan Panca Jaya;
 - e. Kawasan Sidomulyo di Kecamatan Mesuji;
 - f. Kawasan Tanjung Mas Makmur di Kecamatan Mesuji Timur; dan
 - g. Kawasan Panggung Jaya di Kecamatan Rawa Jitu Utara.
4. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Kawasan Brabasan di Kecamatan Tanjung Raya; dan
 - b. Kawasan Simpang Pematang di Kecamatan Simpang Pematang
5. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. Kawasan Simpang Pematang di Kecamatan Simpang Pematang; dan
 - b. Kawasan Tanjung Raya di Kecamatan Tanjung Raya.

Tabel 2.56.
Perkembangan Tata Ruang di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %

Sumber:Perda RTRW Kab. Mesuji, 2017

7. Urusan Perhubungan
Sistem Transportasi

Sistem transportasi, merupakan sarana dan prasarana vital dalam memberikan pelayanan untuk pergerakan barang, orang dan informasi baik, dalam konteks internal wilayah ataupun dalam kaitanya dengan daerah yang lebih luas. Melalui penyediaan jaringan jalan, diharapkan mobilitas orang, barang, dan informasi dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Sistem transportasi yang ada saat ini di Kabupaten Mesuji terdiri dari tranportasi darat dan transportasi sungai. Oleh karena itu, kondisi eksisting sistem transportasi di wilayah perencanaan akan dibagi berdasarkan kedua jenis tersebut.

a. Sistem Transportasi Sungai/Air

Tranportasi sungai yang ada di Kabupaten Mesuji memanfaatkan sungai-sungai besar seperti Sungai Mesuji dan Sungai Buaya, selain itu juga memanfaatkan saluran primer kawasan yang bermuara ke Sungai Mesuji. Transportasi sungai selama ini menjadi alternatif transportasi darat, terutama untuk mencapai pasar Tanjung Mas Makmur dari pemukiman sepanjang Sungai Mesuji, karena transportasi sungai ini sangat mempersingkat waktu dan jarak tempuh.

Transportasi air melalui Sungai Mesuji tidak hanya dimanfaatkan oleh warga Mesuji saja, tetapi juga oleh penduduk di UPT Gajah Mati (Kabupaten OKI, Provinsi Sumatra Selatan) untuk pergerakan orang dan barang. Sampai saat ini di Kabupaten Mesuji sudah terdapat lima dermaga, tiga diantaranya dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung terdapat di Wiralaga, KTM dan Sungai Sidang, juga terdapat dermaga yang merupakan aset PT Wahyuni Mandira dan Pratama Nusantara Sakti, terakhir dermaga di Tanah merah desa sidang muara jaya yang juga merupakan aset PT Wahyuni Mandira, saat ini belum beroperasi namun merupakan calon dermaga untuk kapal perintis. Kapal perintis ini direncanakan akan beroperasi pada tahun 2017 dengan akses pelayanan dari Sungai Sidang ke Sungai Top Wali dan Sungai Sunda Kelapa, jakarta Utara. Kehadiran kapal ini berdampak transportasi lebih efektif dan efisien. Jika jalur darat dari Kabupaten Mesuji menuju Jakarta membutuhkan waktu sekitar 14 jam, nanti jika menggunakan kapal perintis hanya butuh waktu tujuh jam.

Berdasarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mesuji, angkutan sungai yang aktif terdiri dari :

- a. Kapal Motor ukuran 20 Gt ke bawah : 80 buah
- b. Speed boat : 100 buah

b. Sistem Transportasi Darat

Tercatat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan pesat pada jumlah kendaraan di Kabupaten Mesuji, yang sebelum nya berjumlah 37.386 unit kendaraan, pada tahun 2015 berjumlah 93.816 unit. Namun dari data yang tersedia Kabupaten Mesuji belum memiliki kendaraan umum.

Tabel 2.57.
Data kendaraan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014 - 2015

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN	
		2014	2015
1	Kendaraan Bermotor Roda 2	35.441	91.091
2	Kendaraan Bermotor Roda 3	57	101
3	Mobil Penumpang (Sedan, SUV	744	1.122
4	Bus Besar (36-60)	1	1
5	Bus Sedang		

NO	JENIS KENDARAAN	TAHUN	
		2014	2015
		5	5
6	Bus Kecil (9-16)	3	3
7	Bus Gandeng (Articulated Bus)	-	-
8	Bus Tingkat (Double Decker Bus)	-	-
9	Mobil Pick UP	501	677
10	Truk Engkel	317	421
11	Truk Besar	315	393
12	Truk Tronton	-	-
13	Truk Gandeng	-	-
14	Truk Sumbu	-	-
15	Truk Tempel	1	1
16	Ambulance (dengan / tanpa perlengkapan tindakan Rumah Sakit	1	1
17	Kendaraan Pemadam Kebakaran	-	-
TOTAL KESELURUHAN		37.386	93.816

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2017

8. **Urusan Lingkungan Hidup**

Seluruh Perusahaan / Industri yang berada di Kabupaten Mesuji seluruhnya sudah memiliki dokumen UKL-UPL dan sudah menggunakan IPAL, namun Industri Rumah tangga belum ada yang menggunakan IPAL. Persentase setiap tahun nya dapat dilihat pada tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Perkembangan Persentase Perusahaan dan Industri Rumah tangga yang sudah menggunakan IPAL

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL	100%	100%	100%	100%	100%

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Industri Rumah tangga yang menggunakan IPAL	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

9. Urusan Pertanahan

Daerah di Kabupaten Mesuji yang masih banyak terdapat lahan kosong menjadi persoalan sendiri, yaitu dalam hal kepemilikan, terdapat beberapa kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat, perusahaan ataupun pemerintah daerah yang butuh perhatian besar dalam penyelesaiannya. Jumlah kasus dan penyelesaiannya setiap tahun dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.59.
Perkembangan Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 - 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kasus Sengketa Tanah	-	-	9	13	10
Jumlah Fasilitasi penyelesaian bidang tanah sengketa	-	-	9	6	7
Jumlah lahan bersertifikat milik pemerintah	0	0	10	9	6

Sumber : Sekretariat Daerah, Bag. Tata Pemerintah, 2017

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kemudahan dalam proses administrasi kependudukan di Kabupaten Mesuji masih menjadi harapan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil masih banyak warga yang belum memiliki kelengkapan dokumen kependudukan dari total seluruh warga di kabupaten Mesuji. Berikut ditampilkan perkembangan Data Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.60.
Perkembangan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Di Kab. Mesuji
Tahun 2012 - 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah penduduk yang memiliki KK	87.228	88.443	104.025	104.268	106.417
Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP	96.014	111.393	123.086	131.211	140.774

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan per tahun	10.607	13.371	35.003	43.267	55.229
Jumlah akta kematian yang diterbitkan per tahun	119	101	105	104	110
Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan per tahun	7	15	49	37	31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

11. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tercatat keterlibatan Perempuan dalam lembaga pemerintahan dan legislative di Kabupaten Mesuji rentan rendah. Hal ini terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.61.
Perkembangan Partisipasi Perempuan dalam lembaga pemerintahan dan legislative Di Kab. Mesuji Tahun 2012 - 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemeritah	-	-	-	32,48	33,50
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative	20	20	14,29	14,29	14 ,29

Sumber : DP2KBP3A, 2017

12. **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Akseptor Keluarga Berencana

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) 50.700 jiwa, dari jumlah tersebut yang merupakan akseptor ada 45.096 jiwa atau 89% sudah melaksanakan KB. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Persentase Peserta KB Menurut Alat/Cara Kontrasepsi yang Sedang Digunakan di Kabupaten Mesuji Tahun 2014

No	Alat/Cara KB	Jumlah	Persentase
1	Pil KB	11558	26%
2	IUD	5142	11%
3	MOP	143	0%
4	Suntik	18976	42%
5	Implan	6543	15%
6	Kondom	2650	6%
7	MOW	84	0%
Jumlah		45.096	100%

Sumber: Kabupaten Mesuji Dalam Angka, 2016

13. Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial memiliki berbagai aspek yang ditangani diantaranya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- a. Kekerasan fisik; adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual meliputi : (I) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (II) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dilihat dari pertumbuhan nya selama lima tahun terakhir, Penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Mesuji mengalami penurunan dari yang sebelum nya berjumlah 18.705 kasus selama tiga tahun berturut-turut, pada tahun 2015 berkurang menjadi 18.205 kasus, dan bertahan sampai 2016 Kecamatan Way serdang merupakan daerah dengan jumlah PMKS terbanyak sejumlah 4.116. disusul Kecamatan Mesuji Timur

3.612 kasus dan Kecamatan Tanjung Raya 3.323 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.63.
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 - 2016

No	JENIS PMKS	PERKEMBANGAN PMKS TAHUN 2012 - 2016				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Anak Terlantar	257	257	257	414	414
2	Anak Nakal	11	11	11	0	0
3	Tuna Susila	0	0	0	0	0
4	Pengemis	1	1	1	1	1
5	Gelandangan	0	0	0	6	6
6	Korban Narkotika	0	0	0	6	6
7	Anak. Wanita dan Lansia Korban Kekerasan	39	39	39	2	2
8	Anak Balita Terlantar	10	10	10	168	168
9	Anak Jalanan	0	0	0	0	0
10	Lanjut Usia Terlantar	2380	2380	2380	1635	1635
11	Wanita Rawan Sosial dan Ekonomi	469	469	469	824	824
12	Keluarga Fakir Miskin	11207	11207	11207	10.654	10.654
13	Keluarga Berumah Tak Layak huni	4101	4101	4101	4101	4101
14	Keluarga Bermasalah Sosial	106	106	106	250	250
15	Korban Bencana Alam	2	2	2	22	22
16	Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana	122	122	122	122	122
	JUMLAH	18705	18705	18705	18205	18205

Sumber : Dinas Sosial, 2016

Tabel 2.64.
Perkembangan Penanganan PMKS Tahun 2012 – 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya (orang)	250	200	250	250	250
Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu (orang)	50	50	50	50	50
Jumlah pelayanan bagi penyandang cacat dan mental	20	0	0	0	0



Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan	32	32	32	32	30

14. Urusan Ketenagakerjaan
Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. 5 (lima) bentuk pengangguran:

- c. Pengangguran terbuka: baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan)
- d. Setengah menganggur (*underemployment*): yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari, minggu, musiman) kurang dari yang mereka kerjakan.
- e. Tampaknya bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh; yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka dan setengah menganggur, termasuk disini adalah:
 - 1) Pengangguran tidak kentara (*disguised unemployment*), misalnya para petani yang bekerja di ladang selama sehari penuh, padahal pekerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu sehari penuh.
 - 2) Pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*), misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.
 - 3) Pensiun lebih awal
- f. Tenaga kerja yang lemah (*impaired*); yaitu mereka yang mampu untuk bekerja full time tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit.
- g. Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu mereka yang mampu untuk bekerja secara produktif tetapi karena sumberdaya-sumberdaya penolong kurang memadai sehingga mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu dengan baik.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2016 rasio angkatan kerja adalah 68,87 dari total penduduk Kabupaten Mesuji, dan terdapat 73,31 yang bekerja dan 26,69 pengangguran. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.65.



Tabel 2.65.
Data Ketenagakerjaan Tahun 2012 – 2016

NO	URAIAN	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	Per Agustus 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Penduduk	-	-	-	-	199.794
2	Jumlah Angkatan Kerja	112.136	118.395	125.202	133.304	137.592
3	Jumlah penduduk yang bekerja	90.177	98.286	100.205	101.096	100.875
4	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	117	135	50	113	50
5	Jumlah TKI ke Luar Negeri Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapore dll	77	174	201	226	350
6	Jumlah Tenaga Kerja Asing	9	8	6	6	5
7	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	35,56	37,54	39,70	42,27	43,63
8	Angka pengangguran usia produktif	5139	5109	4997	4950	4994
9	Rasio upah minimum kabupaten terhadap upah minimum pemerintah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji, 2016

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.



Tabel 2.66.
Pertumbuhan Banyaknya Koperasi, Anggota dan Volume Usaha Menurut Jenis Koperasi Tahun 2012 – 2016 di Kabupaten Mesuji

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
2012	1 Koperasi Unit Desa	11	8.316	17.087.713.340
	2 Koperasi Pegawai Negeri	1	1.026	70.000.000
	3 Koperasi Serba Usaha	17	748	2.068.475.450
	4 Koperasi Simpan Pinjam	9	394	1.038.507.435
	5 Koperasi Karyawan/Buruh	2	64	57.000.000
	6 Koperasi Pasar	2	32	12.000.000
	7 Koperasi Ponpes	5	148	100.400.000
	8 Koperasi Pertanian	18	231	308.513.000
	9 Koperasi Nelayan	3	0	0
	10 Koperasi Perikanan	0	0	0
	11 Koperasi Perkebunan	6	90	87.000.000
	12 Koperasi Wanita	3	94	218.030.000
	13 KSP Syariah (KJKS)	17	10.547	14.559.588.535
	14 Koperasi Lain-lain	5	66	12.000.000
	Jumlah	99	21.756	35.619.227.760
No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
2013	1 Koperasi Unit Desa	11	8.316	17.087.713.340
	2 Koperasi Pegawai Negeri	1	1.026	70.000.000
	3 Koperasi Serba Usaha	17	748	2.068.475.450
	4 Koperasi Simpan Pinjam	23	1.435	2.867.224.935
	5 Koperasi Karyawan/Buruh	2	64	57.000.000
	6 Koperasi Pasar	2	32	12.000.000
	7 Koperasi Ponpes	5	148	100.400.000
	8 Koperasi Pertanian	18	231	308.513.000
	9 Koperasi Nelayan	3	0	0
	10 Koperasi Perikanan	0	0	0
	11 Koperasi Perkebunan	6	90	87.000.000
	12 Koperasi Wanita	3	94	218.030.000
	13 KSP Syariah (KJKS)	18	11.082	16.728.532.535
	14 Koperasi Lain-lain	5	66	12.000.000
	Jumlah	114	23.332	39.616.889.260
No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
2014	1 Koperasi Unit Desa	14	8.672	17.147.963.340
	2 Koperasi Pegawai Negeri	1	1.026	70.000.000
	3 Koperasi Serba Usaha	24	948	2.222.575.450

No		Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
	4	Koperasi Simpan Pinjam	23	1.435	2.867.224.935
	5	Koperasi Karyawan/Buruh	3	84	68.000.000
	6	Koperasi Pasar	2	32	12.000.000
	7	Koperasi Ponpes	5	148	100.400.000
	8	Koperasi Pertanian	18	231	308.513.000
	9	Koperasi Nelayan	3	0	0
	10	Koperasi Perikanan	0	0	0
	11	Koperasi Perkebunan	6	90	87.000.000
	12	Koperasi Wanita	4	139	229.030.000
	13	KSP Syariah (KJKS)	20	11.149	16.856.532.535
	14	Koperasi Lain-lain	5	66	12.000.000
	Jumlah		128	24.020	39.981.239.260
No		Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
2015	1	Koperasi Unit Desa	16	8.729	17.186.183.340
	2	Koperasi Pegawai Negeri	1	1.026	70.000.000
	3	Koperasi Serba Usaha	29	1.074	2.766.143.581
	4	Koperasi Simpan Pinjam	23	1.435	2.867.224.935
	5	Koperasi Karyawan/Buruh	4	182	83.000.000
	6	Koperasi Pasar	2	32	12.000.000
	7	Koperasi Ponpes	5	148	100.400.000
	8	Koperasi Pertanian	18	231	308.513.000
	9	Koperasi Nelayan	3	0	0
	10	Koperasi Perikanan	0	0	0
	11	Koperasi Perkebunan	6	90	87.000.000
	12	Koperasi Wanita	5	159	249.030.000
	13	KSP Syariah (KJKS)	20	11.149	16.856.532.535
	14	Koperasi Lain-lain	5	66	12.000.000
	Jumlah		137	24.321	40.598.027.391
No		Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
2016	1	Koperasi Unit Desa	16	8.729	17.186.183.340
	2	Koperasi Pegawai Negeri	1	1.026	70.000.000
	3	Koperasi Serba Usaha	44	1.141	2.966.143.581
	4	Koperasi Simpan Pinjam	23	1.435	2.867.224.935
	5	Koperasi Karyawan/Buruh	4	182	83.000.000
	6	Koperasi Pasar	3	32	12.000.000
	7	Koperasi Ponpes	6	148	100.400.000
	8	Koperasi Pertanian	18	231	308.513.000
	9	Koperasi Nelayan	3	0	0
	10	Koperasi Perikanan	0	0	0
	11	Koperasi Perkebunan	6	90	87.000.000

No	Jenis Koperasi	Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Anggota (Orang)	Volume Usaha (Rupiah)
12	Koperasi Wanita	5	159	249.030.000
13	KSP Syariah (KJKS)	21	11.169	16.856.532.535
14	Koperasi Lain-lain	5	66	12.000.000
	Jumlah	155	24.408	40.798.027.391

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016

Tabel 2.67.
Pertumbuhan Banyaknya Koperasi Primer dan Aktivitasnya
Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Simpang Pematang	Panca Jaya	Tanjung Raya	Mesuji	Mesuji Timur	Rawa Jitu Utara	Way Serdang
2012								
1	Jumlah Koperasi (Unit)	13	6	31	11	21	7	10
2	Jumlah Anggota (Orang)	4.791	130	10.763	248	2.919	109	2.796
3	Modal (Rupiah)	1.146.567.679	82.530.000	4.011.376.854	320.281.275	1.292.382.713	61.455.000	914.266.256
4	Volume Usaha (Rupiah)	6.489.074.913	168.000.000	8.229.067.550	299.311.275	3.771.998.884	69.814.000	16.591.961.138
5	Asset (Rupiah)	4.252.834.886	82.530.000	22.296.973.909	320.281.275	3.547.108.602	61.455.000	17.081.029.462
2013								
1	Jumlah Koperasi (Unit)	18	6	35	11	22	10	12
2	Jumlah Anggota (Orang)	5.403	130	10.981	248	2.986	227	3.357
3	Modal (Rupiah)	1.857.492.679	82.530.000	4.266.206.854	320.281.275	1.313.292.713	122.005.000	982.539.256
4	Volume Usaha (Rupiah)	7.654.791.913	168.000.000	8.753.068.050	299.311.275	3.771.998.884	182.814.000	18.786.905.138
5	Asset (Rupiah)	5.398.802.886	82.530.000	22.618.670.409	320.281.275	3.568.018.602	122.005.000	18.177.176.669
2014								
1	Jumlah Koperasi (Unit)	18	7	41	14	24	11	13
2	Jumlah Anggota (Orang)	5.403	150	11.418	348	3.031	266	3.404
3	Modal (Rupiah)	1.857.492.679	98.800.000	4.464.364.854	376.231.275	1.353.692.713	177.580.000	1.114.039.256
4	Volume Usaha (Rupiah)	7.654.791.913	179.000.000	8.931.818.050	340.911.275	3.796.998.884	232.814.000	18.844.905.138
5	Asset (Rupiah)	5.398.802.886	98.800.000	22.816.828.409	382.231.275	3.608.418.602	177.580.000	18.308.676.669
2015								
1	Jumlah Koperasi (Unit)	18	7	41	16	29	11	15
2	Jumlah Anggota (Orang)	5.403	150	11.418	401	3.234	266	3.449
3	Modal (Rupiah)	1.857.492.679	98.800.000	4.464.364.854	453.691.275	1.502.816.770	177.580.000	1.158.314.256
4	Volume Usaha (Rupiah)	7.654.791.913	179.000.000	8.931.818.050	492.131.275	3.971.119.115	232.814.000	19.136.353.038
5	Asset (Rupiah)	5.398.802.886	98.800.000	22.816.828.409	535.031.275	3.864.463.659	177.580.000	18.423.329.669
2016								
1	Jumlah Koperasi (Unit)	20	8	47	18	29	13	20
2	Jumlah Anggota	5.403	150	11.505	401	3.234	266	3.449

No	Uraian	Simpang Pematang	Panca Jaya	Tanjung Raya	Mesuji	Mesuji Timur	Rawa Jitu Utara	Way Serdang
	(Orang)							
3	Modal (Rupiah)	1.897.742.679	124.050.000	4.573.254.854	497.171.275	1.502.816.770	228.550.000	1.233.514.256
4	Volume Usaha (Rupiah)	7.654.791.913	179.000.000	9.131.818.050	492.131.275	3.971.119.115	232.814.000	19.136.353.038
5	Asset (Rupiah)	5.439.052.886	124.050.000	23.075.718.409	578.511.275	3.864.463.659	228.550.000	18.498.529.669

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016

Pada dua tabel diatas ditampilkan pertumbuhan koperasi dari tahun 2012–2016 berdasarkan jumlah koperasi, jumlah anggota, modal dan volume usaha nya. dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi di Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan, sampai 2016 jumlah koperasi mencapai 155 unit dengan jumlah anggota sebanyak 24.408 anggota.

1. Jumlah UKM

Usaha kecil dalam bentuk industri rumah tangga (*home industry*) adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Industri rumah tangga (*home industry*) pada tahun 2016 tercatat sebanyak 263 unit yang terdiri atas 25 jenis usaha. Jenis usaha terbanyak adalah industri pembuatan tempe sebanyak 62 industri, terbanyak kedua adalah pembuat batu bata dengan jumlah 60 industri, sedangkan pembuat kerupuk menjadi terbanyak ketiga dengan jumlah 49 industri. Wilayah kecamatan yang paling banyak sebagai tempat usaha industri rumah tangga adalah Tanjung Raya sebanyak 87 industri, Simpang Pematang sebanyak 55 industri dan Kecamatan Rwajitu Utara sebanyak 34 industri. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Daftar Industri Skala Kecil (Home Industri)
di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

No	Nama Industri	Mesuji	Mesuji Timur	Simpang Pematang	Tanjung Raya	Rawa Jitu Utara	Way Serdang	Panca Jaya
1	Penggilingan Padi	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembuatan Meubel	6	-	16	12	3	6	1
3	Produksi Tempe	1	9	9	27	6	6	4
4	Produksi Tahu	2	2	17	2	1	7	2
5	Produksi Genteng	-	-	-	-	-	-	-
6	Pembuatan Mie	-	-	-	-	-	-	-
7	Pembuat Es	-	-	-	-	-	-	-
8	Pembuat Kerupuk	5	7	5	14	5	2	11
9	Gergaji Kayu	-	-	-	-	-	-	-
10	Las Besi	-	-	-	-	-	-	-
11	Pembuat Batu Bata	2	-	1	31	17	5	4
12	Industri Makanan	-	-	-	-	-	-	-
13	Anyaman Tikar	-	-	-	-	-	-	-
14	Anyaman Bambu	-	-	3	-	-	-	-
15	Industri Anyaman	-	1	4	1	2	1	-
16	Penggilingan Tepung	-	-	-	-	-	-	-
17	Pembuat Kopra	-	-	-	-	-	-	-
18	Pengolah Air Bersih	-	-	-	-	-	-	-
19	Usaha Percetakan	-	-	-	-	-	-	-
20	Pembuat Atap	-	-	-	-	-	-	-
21	Pembuat Anglo	-	-	-	-	-	-	-
22	Pembuat Jamu	-	-	-	-	-	-	-
23	Pembuat Ikan Asin	-	-	-	-	-	-	-
24	Pembuat Klotok	-	3	-	-	-	-	-
25	Pengolahan Sawit	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		16	22	55	87	34	27	22

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, 2016

Tabel 2.69.
Perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Mesuji
Tahun 2012 – 2016

URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah koperasi aktif	60	75	89	98	116
Jumlah koperasi yang berbadan hokum	99	114	128	137	155
Jumlah koperasi berkualifikasi "berkualitas"	9	15	22	23	45
Jumlah UMKM	521	539	518	2983	2983

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2017

16. Urusan Penanaman Modal

Jumlah usaha Mikro sebanyak 49 unit, Kecil 52 unit dan Menengah 23 unit dengan total modal mencapai Rp 32 Milyar lebih. Berikut ditampilkan pada tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Perkembangan Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Kabupaten Mesuji

No	Skala Usaha	Jumlah Usaha Tahun 2015	2015
1.	Mikro	49	1.350.100.000
2.	Kecil	52	9.752.454.000
3.	Menengah	23	21.750.000.000
Total		124	32.852.554.000

Sumber : BPMPT, 2015

Tabel 2.71.
Perkembangan Investasi PMDN /PMA
di Kabupaten Mesuji

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Investor PMDN/PMA	195	220	163	84	61
Jumlah Investasi PMDN/PMA	22.512.101.000	35.863.463.900	32.852.554.000	74.111.551.000	43.210.300.000

Sumber : BPMPT, 2017

17. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

Di Kabupaten Mesuji belum banyak yang bisa dijadikan sumber penghasilan asli daerah, namun seiring berjalannya waktu terdapat beberapa potensi yang bisa dikembangkan, seperti pajak daerah dan usaha. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya persentase Penghasilan Asli Daerah dari total keseluruhan penghasilan daerah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.72.
Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2012 - 2016

PERKEMBANGAN REALISASI PAD				
2012	2013	2014	2015	2016
1,85%	2,61%	3,74%	3,03%	3,81%

Untuk urusan Kepegawaian , perkembangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73.
Perkembangan Kepegawaian Kabupaten. Mesuji

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pegawai	-	-	2597	2553	2457
a. Eselon IIa	-	-	1	1	1
b. Eselon IIb	-	-	35	34	33
c. Eselon IIIa	-	-	51	51	49
d. Eselon IIIb	-	-	91	88	93
e. Eselon Iva	-	-	200	232	224
f. Eselon IVb	-	-	8	14	14
g. staf	-	-	2211	1933	2043

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, 2017

Berikut ditampilkan perkembangan jumlah produk hukum daerah yang disusun selama kurun waktu lima tahun terakhir.



Tabel 2.74.
Produk Hukum yang diterbitkan dari Tahun 2012 - 2016

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah produk hukum daerah yang disusun	445	405	400	532	568

Sumber : sekretariat Daerah Bag. Hukum dan Organisasi, 2017

18. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan suatu daerah dapat dilihat dari berapa jumlah desa/kelurahan yang sudah berkembang, inilah yang menjadi salah satu indicator program kinerja pemerintah Kabupaten Mesuji dalam lima tahun ke depan (2017 – 2022). Berikut ditampilkan perkembangan desa sampai tahun 2016.

Tabel 2.75.
Perkembangan Persentase Desa berkembang di Kab. Mesuji dari Tahun 2012 - 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah desa/kelurahan Cepat Berkembang %	-	-	10,47	12,38	13,33
Jumlah desa/kelurahan Berkembang%	-	-	96,19	84,76	84,76
Jumlah desa/kelurahan Kurang Berkembang%	-	-	2,85	2,85	1,90

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2017

19. Urusan Komunikasi dan Informatika

Jaringan Telekomunikasi

Telekomunikasi memegang peranan penting dalam mendorong percepatan arus informasi. Cepatnya arus informasi ini sangat dipengaruhi oeh revolusi tehnologi dalam dua bidang penting yakni moderenisasi, transportasi, dan telekomunikasi. Semakin pesatnya pembangunan telekomunikasi, khususnya telekomunikasi nirkabel, semakin ningkat pula pembangunan infrastruktur prasarana pendukung seperti menara telekomunikasi.

Berkembangnya telekomunikasi seluler berdampak pada menurunnya pengguna telekomunikasi kabel. Pada tahun 2016 di Kabupaten Mesuji menurut data terdapat± 2.812 pelanggan telepon rumah. Sedangkan untuk fasilitas Kantor Pos, telepon umum dan wartel belum tersedia secara merata di Kabupaten Mesuji. Secara lebih rinci data Sarana telekomunikasi yang ada di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Banyaknya Sarana Telekomunikasi Warga Tahun 2016

No.	Kecamatan	Kantor Pos	Telepon Rumah	Telepon Umum	Wartel/ Kios Pon	Televisi	Radio
1	Mesuji		508			1683	780
2	Tanjung Raya	1	924			4722	2376
3	Rawa Jitu Utara		25			2965	1646
4	Mesuji Timur		992			5236	1789
5	Simpang Pematang	1	51			3822	969
6	Way Serdang		272			4521	1642
7	Panca Jaya		40			240	117
Jumlah		2	2812	0	0	23189	9319

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2016

Persentase rumah tangga yang mengakses internet berdasarkan lokasi/media akses sebanyak 62,15% di kantor, 28,95% mengakses di rumah. Rumah tangga yang memiliki telepon seluler dengan jumlah nomor HP aktif 1-2 nomor sebanyak 36,78% dan data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel-tabel berikut.

Tabel 2.77.
Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet Menurut Lokasi/Media Akses di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

Lokasi/Media Akses	Persentase
Rumah	28,95
Warnet	1,31
Kantor	62,15
Sekolah	6,26
Lainnya	1,33
Total	100

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2016

Tabel 2.78.
Persentase Rumah tangga yang Memiliki Telepon Seluler (HP) di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

Jumlah Nomor HP Aktif	Persentase
1-2	36,78
> 2	63,22
Total Rumah Tangga	52,61

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, 2016

20. Urusan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Mesuji terbilang rendah, terlebih Kab. Mesuji belum memiliki Perpustakaan Daerah. Perpustakaan saat ini hanya terdapat di beberapa sekolah, itupun tidak semua dalam kondisi baik. Berikut ditampilkan jumlah perpustakaan kondisi baik, jumlah pengunjung dan jumlah koleksi buku selama tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.79.
Perkembangan Kondisi Perpustakaan Kab. Mesuji Tahun 2012 - 2016

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	-	368	438	967	1431
Jumlah koleksi buku (eksemplar)	-	1500	3000	5000	6500
Jumlah perpustakaan yang baik (unit)	-	26	27	27	29

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan
1. Urusan Pertanian
Potensi Pertanian dan Perkebunan

Pada tahun 2015 tercatat luas lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal 18.614,33 ha dan luas perkebunan 44.419,11 ha namun pada dasarnya area perumahan kabupaten Mesuji merupakan transmigrasi dengan pembagian luas lahan seperempat hektar per KK, yang hanya digunakan sebagian untuk tempat tinggal, dengan kata lain sisa lahan yang ada masih sangat berpotensi.

Tabel 2.80.
Pertumbuhan Luas Tanam Komoditas Pertanian Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

No	Kecamatan	Komoditas pertanian (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Mesuji					
	Padi Sawah	8.704	464	6.528	9.801	14.811
	Jagung	484	61	16	192	47
	Kedelai	37	39	10	1.145	-
	Ubi Kayu	206	314	307	119	51
	Ubi Jalar	139	36	15	4	9
	Kacang Tanah	21	14	14	6	5
	Kacang Hijau	15	-	-	-	4
	Jumlah	9.606	928	6.890	11.267	14.927
2	Tanjung Raya					
	Padi Sawah	639	528	711	751	1.397
	Jagung	5	-	-	25	-
	Kedelai	67	-	-	-	17

No	Kecamatan	Komoditas pertanian (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Ubi Kayu	1.562	1.298	1.600	15	-
	Ubi Jalar	78	3	-	-	-
	Kacang Tanah	2	-	3	-	-
	Kacang Hijau	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.353	1.829	2.314	791	1.414
3	Rawajitu Utara					
	Padi Sawah	10.229	14.172	13.403	19.274	19.671
	Jagung	17	51	25	250	2
	Kedelai	-	380	148	520	1
	Ubi Kayu	1.325	352	200	29	29
	Ubi Jalar	6	6	5	-	8
	Kacang Tanah	-	-	-	-	-
	Kacang Hijau	-	-	-	-	-
	Jumlah	11.577	14.961	13.781	20.073	19.711
4	Mesuji Timur					
	Padi Sawah	9.822	7.041	7.340	11.157	16.555
	Jagung	19	16	21	82	105
	Kedelai	-	105	78	567	5
	Ubi Kayu	2.037	446	1.260	143	521
	Ubi Jalar	-	1	2	3	12
	Kacang Tanah	-	3	-	5	30
	Kacang Hijau	-	-	-	3	7
	Jumlah	11.878	7.612	8.701	11.960	17.235
5	Simpang Pematang					
	Padi Sawah	1.330	1.088	1.265	2.034	2.046
	Jagung	8	3	-	20	50
	Kedelai	-	-	-	184	-
	Ubi Kayu	1.329	255	670	71	180
	Ubi Jalar	5	13	3	3	10
	Kacang Tanah	12	3	-	12	20
	Kacang Hijau	8	5	-	4	4
	Jumlah	2.692	1.367	1.938	2.328	2.310
6	Way Serdang					
	Padi Sawah	85	109	101	173	140
	Jagung	19	23	23	21	19
	Kedelai	-	-	-	-	28
	Ubi Kayu	1.507	2.168	1.330	858	415
	Ubi Jalar	9	16	4	16	11
	Kacang Tanah	8	2	3	10	-
	Kacang Hijau	5	7	-	2	-

No	Kecamatan	Komoditas pertanian (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Jumlah	1.633	2.325	1.461	1.080	613
7	Panca Jaya					
	Padi Sawah	506	479	441	535	575
	Jagung	2	2	2	-	2
	Kedelai	-	1	1	-	-
	Ubi Kayu	590	555	254	345	170
	Ubi Jalar	11	6	2	11	4
	Kacang Tanah	3	-	1	-	40
	Kacang Hijau	-	-	-	1	-
	Jumlah	1.112	1.043	701	892	791
Jumlah		40.851	30.065	35.786	48.391	57.001

Sumber:Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2016

Areal tanaman hortikultura yang diusahakan masyarakat seluas 515 hektar dengan berbagai jenis tanaman.

Areal perkebunan memiliki luas 51.409 hektar, dengan jenis komoditi unggulan yaitu: karet 27.853 ha dan sawit 22.030 ha. Produksi kebun karet tahun 2016 mencapai 6.308 ton, sawit 23.081 ton dan kelapa dalam 68 ton.

Tabel 2.81.
Luas Tanam Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016

No.	KOMODITAS	Luas Tanam (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Petsai/Sawi	-		-	-	
2	Kacang Panjang	80	125	-	38	71
3	Cabe Besar	36	67	67	20	110
4	Cabe Rawit	20	38	38	32	40
5	Tomat	14	14	25	14	24
6	Terung	51	51	88	29	55
7	Buncis	2	2	-	-	-
8	Ketimun	41	41	363	40	33
9	Labu siam	-	-	2	4	-
10	Kangkung	82	123	118	38	108
11	Bayam	93	93	85	93	73
12	Semangka	8	8	8	6	1
13	Melon	-	-	-	-	-
Total		427	562	794	314	515

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016



Tabel 2.82.
Luas Panen Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016

No.	KOMODITAS	Luas Panen (Ha)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Petsai/Sawi	-	-		-	
2	Kacang Panjang	80	125	-	21	71
3	Cabe Besar	36	67	67	14	110
4	Cabe Rawit	20	38		32	40
5	Tomat	14	14	25	14	24
6	Terung	51	51	88	24	55
7	Buncis	2	2	-	-	-
8	Ketimun	41	41	363	40	33
9	Labu siam	-	-	2	4	-
10	Kangkung	82	123	118	25	108
11	Bayam	93	93	85	93	73
12	Semangka	8	8	8	6	1
13	Melon	-	-	-	-	
Total		427	562	756	273	515

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016

Tabel 2.83.
Luas Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2012-2016

No.	KOMODITAS	Produksi (Ton)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Petsai/Sawi	-		-	-	-
2	Kacang Panjang	160	466	-	353	693
3	Cabe Besar	72	186	515,8	135	456
4	Cabe Rawit	40	107	50	28	133
5	Tomat	28	28	418	153	1.390
6	Terung	102	102	1.196	269	626
7	Buncis	4	4	-	-	-
8	Ketimun	82	82	700	80	157
9	Labu siam	-	-	100	20	-
10	Kangkung	164	351	846	262	738
11	Bayam	186	182	363,1	180	15.345
12	Semangka	16	16	16	8	250
13	Melon	-	-	-	-	-
Total		854	1524	4205,6	1488	19788

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016

Tabel 2.84.
Luas Areal Tanam Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 dan 2016

No	Kec	Luas Areal (ha)						Jumlah	
		Tanaman Tahunan		Tanaman Semusim		Tanaman Rempah dan Penyegar		(Ha)	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Way Serdang	13.838	13.838	-	-	73	73	13911	13911
2	Simpang Pematang	8.407	8.407	2	2	17	17	8426	8426
3	Panca Jaya	5.766	5.767	2	2	36	36	5804	5805
4	Tanjung Raya	9.659	9.609	-	-	64	64	9723	9673
5	Mesuji	2.212	2.212	-	-	48	4	2260	2216
6	Mesuji Timur	9.798	9.798	-	-	23	23	9821	9821
7	Rawajitu Utara	1.524	1.524	1	1	32	32	1557	1557
Jumlah		51.204	51.155	5	5	293	249	51502	51409

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016;

Tabel 2.85.
Produksi Tanam Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mesuji Tahun 2015 dan 2016

No	Kec	Produksi (Ton)					
		(Tanaman Tahunan) Kelapa Dalam, Karet, Kelapa Sawit		(Tanaman Semusim) Tembakau		(Tanaman Rempah dan Penyegar) Kopi, Kakao	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
1	Way Serdang	11.014	11.014	-	-	38	38
2	Simpang Pematang	11.761	11.761	0,02	0,02	15	15
3	Panca Jaya	644	644	0,04	0,04	31	31
4	Tanjung Raya	5.085	1.567	-	-	20	6
5	Mesuji	1	1	-	-	10	5
6	Mesuji Timur	-	-	-	-	7	7
7	Rawajitu Utara	952	952	0,01	0,01	12	12
Jumlah		29.457	25.939	0,07	0,07	133	114

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2016



Tabel 2.86.
Produksi Tanam Pertanian Menurut Jenis Tanaman
Di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

No	Kecamatan	Komoditas pertanian (Ha)							Jumlah
		Padi sawah	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kacang Hijau	
1	Mesuji	14.811	47	-	51	9	5	4	116
2	Tanjung Raya	1.397	-	17	-	-	-	-	17
3	Rawajitu Utara	19.671	2	1	29	8	-	-	40
4	Mesuji Timur	16.555	105	5	521	12	30	7	680
5	Simpang Pematang	2.046	50	-	180	10	20	4	264
6	Way Serdang	140	19	28	415	11	-	-	473
7	Panca Jaya	575	2	-	170	4	40	-	216
Jumlah		55.195	225	51	1.366	54	95	15	57.001
Persentase (%)		96,8316	0,39473	0,08947	2,39645	0,09474	0,16666	0,02632	100

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2016

2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Jaringan Listrik

Pelayanan jaringan listrik oleh PLN di wilayah Kabupaten Mesuji saat ini masih terbatas. Sehingga harus menggunakan mesin diesel/genset pribadi atau secara komunal. Hal ini menyebabkan tidak semua warga mampu memenuhi kebutuhan listrik. Listrik non PLN berasal dari mesin diesel/genset, umumnya dikelola secara komunal dan beroperasi setiap harinya dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.

Pada tahun 2010 jumlah rumah tangga yang menjadi pelanggan PLN berjumlah 1.844 unit, non-PLN berjumlah 28.100 unit, dan non-listrik berjumlah 15.844 unit. Namun angka tersebut sudah sangat meningkat, berdasarkan data Dinas Pertambangan pada tahun 2016 tercatat yang menjadi pelanggan PLN berjumlah 64.193 KK, non-PLN berjumlah 30.426 KK, dan tidak ada warga yang non-listrik. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pelanggan PLN dan non-PLN di Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada Tabel tabel berikut.

Tabel 2.87.
Jumlah Rasio Elektrik di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

No	Uraian	2014		2015		2016	
		Jumlah KK	Rasio Elektrik	Jumlah KK	Rasio Elektrik	Jumlah KK	Rasio Elektrik
1	Total Jumlah	93.840	100	92.222	100	94.619	100%
2	KK PLN	65.260	69,50%	64.823	70,20%	64.193	68%
3	Non PLN	28.580	30,40%	27.399	29,70%	30.426	32%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2016

Tabel 2.88.
Jumlah KK Menggunakan Listrik PLN dan Non PLN per Kecamatan di Kabupaten Mesuji Tahun 2016

Nomor	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah KK	
			PLN	Non PLN
1	Way Serdang	20	12.415	4.441
2	Simpang Pematang	13	7.220	2.037
3	Panca Jaya	7	6.588	0
4	Tanjung Raya	21	19.043	3.576
5	Mesuji	11	7.174	4.663
6	Mesuji Timur	20	8.492	6.997
7	Rawajitu Utara	13	3.261	8.712
TOTAL		105	64.193	30.426

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

Tabel 2.89.
Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan di Kabupaten Mesuji tahun 2016

Sumber Penerangan	Jumlah
Listrik PLN	68%
Listrik Non PLN	32%
Petromak/aladin/pelita/sentir/obor/lainnya	-
Jumlah	100,00

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi, 2016

3. Urusan Pariwisata

Wilayah Kabupaten Mesuji sebagian besar adalah areal perkebunan dan melimpahnya sumberdaya air oleh karenanya destinasi wisata yang menjadi andalan adalah potensi wisata agro diantaranya wisata agro perkebunan jeruk di Kecamatan Tanjung Raya dan Kecamatan Mesuji serta potensi wisata bahari yaitu Danau Wirabangun (Pantai Dono), wisata pemancingan dan dayung perahu.Dapat dilihat pada 2015 dan 2016 wisata tirta



semakin bertambah dengan adanya wisata Waterboom, Rest Area Tugu Tani dan Alun-alun Simpang. Secara lengkap ditampilkan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Pertumbuhan Usaha Pariwisata Menurut Kecamatan Tahun 2014 – 2016

No	Kecamatan	Jenis Objek Wisata	2014		2015		2016	
			Objek Wisata	Jumlah	Objek Wisata	Jumlah	Objek Wisata	Jumlah
1	Way Serdang	Wisata Tirta	Pemancingan , Dayung Perahu Wisata tirta Bukoposo, Bendungan Hadimulyo, Bendungan Bumi Harapan,	3	Pemancingan , Dayung Perahu Wisata tirta Bukoposo, Bendungan Hadimulyo, Bendungan Bumi Harapan, Rest Area Tugu Petani	4	Pemancingan , Dayung Perahu Wisata tirta Bukoposo, Bendungan Hadimulyo, Bendungan Bumi Harapan, Rest Area Tugu Petani	4
2	Sp. Pematang	Wisata Tirta,	Danau Wirabangun (p. Dono), Embung, Bendungan,	3	Danau Wirabangun (p. Dono), Embung, Bendungan,	3	Danau Wirabangun (p. Dono), Alun-alun, Embung, Bendungan,	4
3	Panca Jaya	-	-	-	Waterboom	1	Waterboom	1
4	Tanjung Raya	Wisata Tirta, agrowisata	Waterboom Dan Taman Keanekaragaman Hayati, Bendungan Brabasan, Bendungan Bangun Jaya, Benil	4	Waterboom Dan Taman Keanekaragaman Hayati, Bendungan Brabasan, Bendungan Bangun Jaya, Benil	4	Waterboom Dan Taman Keanekaragaman Hayati, Bendungan Brabasan, Bendungan Bangun Jaya, Benil	4
5	Mesuji	Wisata Alam, Wisata Religi agrowisata	Pemancingan , Dayung Perahu, , Sungai Wiralaga, Wisata Alam Puncak Wiralaga, Makam Kuno	3	Pemancingan , Dayung Perahu, , Sungai Wiralaga, Wisata Alam Puncak Wiralaga, Makam Kuno	3	Pemancingan , Dayung Perahu, , Sungai Wiralaga, Wisata Alam Puncak Wiralaga, Makam Kuno	3
6	Mesuji Timur	Wisata Bahari	Pemancingan , Dayung	1	Pemancingan , Dayung	1	Pemancingan , Dayung	1

No	Kecamatan	Jenis Objek Wisata	2014		2015		2016	
			Objek Wisata	Jumlah	Objek Wisata	Jumlah	Objek Wisata	Jumlah
			Perahu Wisata Bahari Muara Mas		Perahu Wisata Bahari Muara Mas		Perahu Wisata Bahari Muara Mas	
7	Rawajitu Utara	Wisata Budaya	Wisata Sungai Sidang, Sungai Buaya	2	Wisata Sungai Sidang, Sungai Buaya	2	Wisata Sungai Sidang, Sungai Buaya	2
Jumlah				16		18		19

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2016

4. Urusan Perikanan dan Kelautan

Potensi Perikanan

Daerah aliran sungai yang mendukung bagi pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Mesuji dengan wilayah yang cukup luas dan belum optimal diusahakan menjadikan sektor perikanan amat baik untuk menjadi salah satu daya tarik investasi. Pada tahun 2016 dari potensi 1.512 unit Keramba Sangkar sudah dimanfaatkan hampir 4% dan kolam sudah dimanfaatkan 62% dari total potensi 1.244 ha. Perikanan masih memiliki peluang 1.449 Unit keramba sangkar dan 470 hektar kolam. Data terinci dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Jumlah Potensi, Pemanfaatan, dan Peluang Sektor Perikanan di Kabupaten Mesuji tahun 2016

No	Kecamatan	Potensi		Pemanfaatan		Peluang	
		Keramba sangkar (unit)	Kolam (Ha)	Keramba sangkar (unit)	Kolam (Ha)	Keramba sangkar (unit)	Kolam (Ha)
1	Mesuji	448	325	2	175	446	150
2	Tanjung Raya	78	175	2	50	76	125
3	Rawajitu Utara	495	215	23	180	472	35
4	Mesuji Timur	200	120	-	100	200	20
	Simpang						
5	Pematang	146	145	6	90	140	55
6	Way Serdang	95	195	30	160	65	35
7	Panca Jaya	50	69	-	19	50	50
Jumlah		1.512	1.244	63	774	1.449	470

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Mesuji, 2016



Tabel 2.92.
Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton):

URAIAN	TAHUN				
	2012	2012	2012	2012	2012
a. Perikanan tangkap	1823,74	1094,21	1175,50	1214,99	1341,95
b. Perikanan budidaya	676,26	1780,26	1443,33	1742,21	4343,05
Peningkatan kelompok/jumlah rumah tangga petani ikan	823	1484	1892	1939	1964

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Mesuji, 2017

5. Urusan Perdagangan

Masih sedikitnya jumlah pasar yang tersedia di seluruh kabupaten Mesuji, tercatat hanya memiliki 27 unit pasar untuk memnuhi kebutuhan masyarakat di 105 desa. Dari 27 unit tersebut kondisi nya sebagian besar masih semi permanen dan baru 6 unit pasar yang telah direhabilitasi menjadi permanen, berikut perkembangan pasar Kab. Mesuji yang direhabilitasi dari tahun 2012 – 2016.

Tabel 2.93.
Perkembangan Jumlah Pasar yang direhabilitasi

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pasar yang direhabilitasi	1	1	1	2	1

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2017

6. Urusan Transmigrasi

Program dan kegiatan pembangunan bidang transmigrasi tahun 2012-2016 diarahkan untuk meningkatkan penataan kawasan transmigrasi yang ditandai dengan semakin meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada dikawasan Transmigrasi. Selama tahun anggaran 2012-2015 sudah dilaksanakan beberapa program guna meningkatkan kesejahteraan daerah transmigrasi. Berikut capaian hasil pelaksanaan program/kegiatan di bidang transmigrasi dari tahun 2012-2015.

Tabel 2.94.
Capaian Hasil Pelaksanaan program/kegiatan di Bidang Transmigrasi

No	Uraian	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya lahan yang bersertifikat dan meningkatnya keamanan atas hak tanah transmigrasi.	Tersedianya lahan yang bersertifikat dan meningkatnya keamanan atas hak tanah transmigrasi.	Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi berupa permohonan penerbitan buku sertifikat sebanyak 5.033 bidang untuk lahan transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya permasalahan teknis di BPN Tulang Bawang	Kegiatan sertifikasi lahan transmigrasi tidak dapat dilaksanakan karena terkendala masalah teknis pada instansi yang membidangi masalah pertanahan (BPN).
2	Program Infrastruktur Antar Kawasan Transmigrasi	Terwujudnya data teknis pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi	Terwujudnya data teknis pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi	Terlaksananya pembangunan 1 (satu) unit rumah pengolahan pupuk (Granulator), 1 (satu) unit rumah jaga gudang pengolahan pupuk yang berlokasi di Desa Pangkal Mas MulyaKecamatan Mesuji Timur dan 1 (satu) unit workshop alsitan (alat mesin pertanian) berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji terlaksana (100%)	Terlaksananya pemasangan mesin pupuk granular di Desa Pangkal Mas Jaya; Terselesaikannya rehabilitasi tugu KTM dan pengecatan jembatan KTM.

Sumber : AMJ Kab. Mesuji Tahun 2012 – 2017, 2017

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, domestik, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan perekonomian daerah dapat dilihat dari besarnya pengeluaran. Berikut perkembangan jenis pengeluaran Kab. Mesuji.

Tabel 2.95.
Angka Konsumsi Rumah Tangga / Kapita

Uraian	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Konsumsi RT per Kapita					
- Total Pengeluaran RT	4.42	5.49	5.02	5.10	4.93
- Jumlah RT	87.228	104.025	104.268	105.816	102.534
- Rasio (a/b)	-	-	-	-	-

Untuk sektor perdagangan, berdasarkan penerbitan surat ijin usaha perdagangan perkembangan jumlah pedagang besar (PB), pedagang menengah (PM) dan pedagang kecil (PK) tahun 2014—2015 dapat dilihat pada tabel 2.94.

Tabel 2.96.
Perkembangan Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Tahun 2014-2015

NO	Jenis Izin	Jumlah Berkas		Rata-Rata Lama Proses Penyelesaian
		2014	2015	
1.	Izin Tanda Daftar Perusahaan	231	132	5 Hari
2.	Izin Tanda Daftar Industri	3	1	5 Hari
3.	Izin Usaha Industri	2	3	5 Hari
4.	Izin Usaha Perdagangan	230	127	5 Hari
5.	Izin Tanda Daftar Gudang	33	3	5 Hari
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	4	16	5 Hari
7.	Jumlah Total	503	282	

Sumber: BPMPT Kab. Mesuji 2015

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan PDRB (%)	4,93	5.57	6.18	5.69	5.23	-	-

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	25,82	28.02	30,12	34,03	37,37	41,20	41,20
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8.07	7.69	5.81	6.57	8.20	8.00	8.00
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	57.32	57.67	58.16	58.71	59.79	60.72	60.72
	a. Pengeluaran Per Kapita (rupiah/kapita/ bulan)	6402.02	6502.5	6706.08	6763.9	6836.32	7099	7099
	b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	10.06	10.15	10.25	10.34	10.78	11.20	11.20
	c. Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	5.62	5.63	5.65	5.80	6.12	6.13	6.13
	d. Angka Harapan Hidup (tahun)	66.44	66.57	66.70	67.05	67.15	67.32	67.32
5	Tingkat Pengangguran Terbuka		5.139	5.109	4.997	4.950	4.994	4.994
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	PELAYANAN URUSAN WAJIB							
	URUSAN PENDIDIKAN							
A	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	- SD/MI	-	93.7	95.12	94.4	95.3	95.44	95.44
	- SMP/MTs	-	94.80	94.60	94.10	94.90	98.11	98.11
	- SMU	-	34.20	42.80	70.90	96.08	96.13	96.13
B	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	- SD/MI	-	92.70	81.00	81.25	83.21	87.80	87.80
	- SMP/MTs	-	62.40	76.60	76.96	77.07	81.82	81.82
	- SMU	-	26.00	34.30	74.70	74.92	75.08	75.08
C	Angka Partisipasi Sekolah (APS)							
	- SD/MI	-	81.06	83.31	82.84	86.07	89.54	89.54
	- SMP/MTs	-	90.08	94.80	91.34	91.36	95.73	95.73

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	- SMU	-	-	40.33	99.35	84.61	86.55	86.55
D	Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan							
	- SD/MI	-	98.03	100	97.20	99.30	98.01	98.01
	- SMP/MTs	-	96.80	98.50	96.60	97.69	98.60	98.60
	- SMU	-	96.30	100	98.90	92.75	98.74	98.74
E	Angka Putus Sekolah seluruh jenjang pendidikan							
	- SD/MI	-	-	4.17	1.07	0.4	0.4	0.4
	- SMP/MTs	-	-	3.58	3.26	1.5	1.5	1.5
	- SMU	-	-	9.18	1.79	2.03	2.03	2.03
F	Jumlah dan persentase sekolah yang terakreditasi							
	- SD/MI	-	-	-	-	-	81 %	81 %
	- SMP/MTs	-	-	-	-	-	28,2 %	28,2 %
	- SMU	-	-	-	-	-	58,3 %	58,3 %
	URUSAN KESEHATAN							
A	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 KH)	-	-	0.74	0.83	0.53	2,66	2,66
B	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1.000 KH)	-	-	12.65	20.05	15.97	8,5	8,5
C	Angka penemuan dan penanganan penderita DBD	-	-	-	8	13	83	83
D	Angka kasus baru TB baru (BTA) positif (%)	-	-	-	82	183	15	15
E	Jumlah rumah sakit	0	0	0	0	1	1	1
F	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.32
G	Jumlah puskesmas	-	12	12	12	12	12	12
H	Rasio puskesmas per satuan penduduk	-	4,65	5,15	6,15	3,8	3,81	3,81
I	Jumlah puskesmas pembantu	-	41	41	43	43	43	43

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
J	Rasio puskesmas pembantu per satuan penduduk	-	1,17	1.27	0.85	0.82	0.82	0.82
K	Jumlah posyandu	-	150	155	172	170	170	170
L	Rasio posyandu per satuan balita	-	0.88	0.6	0.88	0,86	0,92	0,92
M	Jumlah dokter spesialis	0	0	0	0	0	3	3
N	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	44%	44%	21,9%	78,43%	57,36%	57,36%
o	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan gratis	-	43,016	47,058	88,437	48,077	45,207	45,207
	URUSAN PEKERJAAN UMUM							
A	Panjang jalan yang dibangun							
	Baik	-	-	80.205	80.205	36.35	276.35	276.35
	Sedang	-	-	134.55	386.1	434.947	69.11	69.11
	Buruk/ Rusak Ringan	-	-	325.15	73.865	198.34	98.63	98.63
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	119.05	119.05
B	Jumlah jembatan yang dibangun (unit)							
	Baik	-	-	67	90	96	38	38
	Sedang	-	-	44	21	26	40	40
	Buruk/ Rusak Ringan	-	-	17	17	6	42	42
	Rusak Berat	-	-	-	-	-	36	36
C	Panjang drainase yang dibangun (meter)	-	-	-	-	-	11721	11721
D	<i>Panjang jalan berkondisi baik</i>							
	- <i>Jalan provinsi</i>	-	-	-	3,4	4,7	-	-
	- <i>Jalan kabupaten</i>	-	-	-	27,1	204,47	-	-
E	<i>Panjang jembatan berkondisi baik</i>		-	67	90	96	38	38

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
F	Jumlah luas areal jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Ha)							
	Baik	-	-	200	450	650	860	860
	Buruk	-	-	1866	1616	1416	1206	1206
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT							
A	Jumlah pembangunan rumah layak huni	-	-	507	1251	2595	1901	1901
B	Cakupan pelayanan air minum							
	- Air minum perdesaan	-	404	551	972	276	503	503
C	Jumlah MCK yang dibangun	-	-	3	8	11	4	4
D	Jumlah tempat pembuangan sampah	-	-	-	-	-	235	235
E	Luss ruang terbuka hijau dan ruang yang tersedia	-	-	-	-	124.871	99.881,5	99.881,5
	URUSAN PENATAAN RUANG							
A	Persentase kawasan dan lingkungan yang tertata dengan baik	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %	56,73 %
B	Jumlah bangunan yang memiliki IMB	-	50	56	60	68	3920	3920
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
A	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang	-	5	4	4	4	4	4

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	berlaku							
B	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan	-	2	2	2	1	2	2
	URUSAN PERHUBUNGAN							
A	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang	-	-	58	67	78	82	82
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
A	Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	Industri Rumah tangga yang menggunakan IPAL	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
C	Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL	0%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
D	Status mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%
E	Status mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	URUSAN PERTANAHAN							
A	Jumlah Fasilitasi penyelesaian bidang tanah sengketa	-	-	-	9	6	7	7
B	Jumlah lahan bersertifikat milik	0	0	0	10	9	6	6

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	pemerintah							
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL							
A	Jumlah penduduk yang memiliki KK	-	87.228	88.443	104.025	104.268	106.417	106.417
B	Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP	-	96.014	111.393	123.086	131.211	140.774	140.774
C	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan per tahun	-	10.607	13.371	35.003	43.267	55.229	55.229
D	Jumlah akta kematian yang diterbitkan per tahun	-	119	101	105	104	110	110
E	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan per tahun	-	7	15	49	37	31	31
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
A	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemeritah	-	-	-	-	32,48	33,50	33,50
B	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislative	20	20	20	14,29	14,29	14 ,29	14 ,29
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA							
A	Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur	-	70,51	69,96	68,93	74,01	75,07	75,07
B	Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	16.143 15.210	13.594 20.558	14.309 19.675	12.963 23.116	- -	- -	- -
	URUSAN SOSIAL							

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
A	Jumlah pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya (orang)	200	250	200	250	250	250	1.150
B	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu (orang)	50	50	50	50	50	50	300
C	Jumlah pelayanan bagi penyandang cacat dan mental	4	20	0	0	0	0	24
D	Jumlah kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan	35	32	32	32	32	30	158
	URUSAN KETENAGAKERJAAN							
A	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	-	35,56	37,54	39,70	42,27	43,63	43,63
B	Angka pengangguran usia produktif	-	5139	5109	4997	4950	4994	4994
C	Rasio upah minimum kabupaten terhadap upah minimum pemerintah	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
A	Jumlah koperasi aktif	62	60	75	89	98	116	116
B	Jumlah koperasi yang berbadan hukum	76	99	114	128	137	155	155
C	Jumlah koperasi berkualifikasi "berkualitas"	14	9	15	22	23	45	45
E	Jumlah UMKM	-	521	539	518	2983	2983	2983
	URUSAN PENANAMAN MODAL							
A	Jumlah Investor	-	195	220	163	84	61	61

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	PMDN/PMA							
B	Jumlah Investasi PMDN/PMA	-	22.512.1 01.000	35.863.46 3.900	32.852.5 54.000	74.111.55 1.000	43.210. 300.000	43.210.30 0.000
	URUSAN KEBUDAYAAN							
A	Jumlah penyelenggaraan event budaya	2	2	2	2	2	2	2
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
A	Jumlah cabang olah raga yang dibina	-	-	-	11	11	11	11
B	Jumlah sarana olahraga yang tersedia	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,10	0,10
C	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga	-	-	-	11	11	15	15
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI							
A	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	-	-	0,21	0,02	0,03	0,03
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN							
A	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah	disclaimer	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
B	Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS (org)	-	-	12	13	3	8	36
C	Persentase kontribusi	-	-	10	4	4	4	4

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	PAD terhadap pendapatan Daerah							
D	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	-	193	55	5	-0,49	-0,09	-0,09
E	Persentase aset yang dikelola dengan baik	89	90	100	100	100	100	100
F	Terselenggaranya sistem pengendalian internal pada SKPD	-	-	50	47	26	41	41
G	Terlaksananya seleksi jabatan struktural secara terbuka	-	-	-	-	-	1	1
H	Persentase izin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)	-	14	12	12	9	6	6
I	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	62	445	405	400	532	568	568
	URUSAN KETAHANAN PANGAN							
A	Jumlah cadangan pangan masyarakat (ton)	-	-	-	-	-	1,489	1,489
B	Jumlah desa rawan pangan (desa)	-	-	-	-	2	4	4
C	Jumlah informasi ketersediaan pangan daerah (Kkal/kap/hari)	-	-	-	-	1.718,3	1.685	1.685
D	Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya (poktan)	-	-	10	10	12	12	44
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
A	Jumlah desa/kelurahan Cepat Berkembang %	-	-	-	10,47	12,38	13,33	13,33
B	Jumlah desa/kelurahan	-	-	-	96,19	84,76	84,76	84,76

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	Berkembang%							
C	Jumlah desa/kelurahan Kurang Berkembang%	-	-	-	2,85	2,85	1,90	1,90
	URUSAN PERPUSTAKAAN							
A	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	--	-	368	438	967	1431	3204
B	Jumlah koleksi buku (eksemplar)	-	-	1500	3000	5000	6500	6500
C	Jumlah perpustakaan yang baik (unit)	-	-	26	27	27	29	29
2	PELAYANAN URUSAN PILIHAN							
	URUSAN PERTANIAN							
A	Luas areal tanam dan panen padi (ha)							
	- Tanam	-	-	25,762	37,140	54,410	54,852	54,852
	- Panen	-	-	22,868	36,814	49,789	54,663	54,663
B	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)							
	- Tanam	-	40.851	30.065	35.786	48.391	57.001	57.001
	- Panen	-	40.851	30.065	35.786	48.391	57.001	57.001
C	Luas areal tanam dan panen buah-buahan							
	- Tanam (batang)	-	-	-	112.244	114.326	119.829	-
	- Panen (kg)	-	-	-	100.989	170.251	212.388	-
D	Luas areal tanam dan panen biofarmaka							
	- Tanam (rumpun)	-	-	-	124.351	132.412	149.318	-
	- Panen (rumpun)	-	-	-	6,98	7,5	9	-
E	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran							
	- Tanam (ha)	-	54	1524	4205,6	1488	19788	19788
	- Panen (ha)	-	54	1524	4205,6	1488	19788	19788
F	Produktivitas padi	-	-	5,67	6,31	5,16	4,75	4,75

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	(kw/ha)							
G	Produksi padi (ton)	-	-	145,991	234,237	257,053	259,583	259,583
H	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persentase)	-	7.79	7.27	5,73	8,49	-	-
I	Jumlah populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (Ekor)	-	38915	41825	35299	44588	45846	45846
	URUSAN KEHUTANAN							
A	Kontribusi sektor kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB (persentase)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
A	Rasio Elektrifikasi (persentase)	-	-	-	66,95	69,54	70,29	70,29
B	Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB (persentase)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	URUSAN PARIWISATA							
A	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	-	-	-	-	0	5000	5000
	URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN							
A	Konsumsi protein hewani asal ikan (kg/kapita/tahun)	-	36,82	41,31	47,33	51,70	90,48	90,48
	a. Perikanan tangkap	-	1823,74	1094,21	1175,50	1214,99	1341,95	1341,95
	b. Perikanan budidaya	-	676,26	1780,26	1443,33	1742,21	4343,05	4343,05
B	Peningkatan kelompok/jumlah rumah tangga petani ikan	-	823	1484	1892	1939	1964	1964

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja PEMBANGUNAN	Kondisi Awal RPJMD Tahun 2011	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
	URUSAN PERDAGANGAN							
A	Jumlah pasar yang tersedia	27	27	27	27	27	27	27
B	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (persentase)	6,51	6,25	6,09	5,6	-	-	-
	URUSAN INDUSTRI							
A	Jumlah industri kecil dan menengah	1368	1368	1368	1368	1424	1462	1462
B	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persentase)	-	16,27	10,96	17,38	8,45	-	8,45
	URUSAN TRANSMIGRASI							
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
A	Angka Konsumsi RT per Kapita							
	- Total Pengeluaran RT	4.17	4.93	4.42	5.49	5.02	5.10	5.10
	- Jumlah RT	-	87.228	104.025	104.268	105.816	102.534	102.534
B	Lama proses perijinan (hari)	-	-	-	5	5	-	-



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

"Bumi Ragab Begawe Caram"

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Daerah Kabupaten Mesuji mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebermanfaatan manfaat bagi masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Rata-rata pertumbuhan pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Rata-rata Pertumbuhan 2012-2016
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH						
Pendapatan Pajak Daerah	856.181.521,00	1.273.650.944	4.321.789.586,00	4.574.612.497,00	4.434.683.124,00	72,72%
Pendapatan Retribusi Daerah	864.724.736,00	3.847.500.791	3.942.802.175,00	3.649.788.486,00	3.040.365.946,00	80,82%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	338.233.336,00	402.635.739	406.884.438,39	1.232.016.548,80	1.252.597.906,98	56,14%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.210.024.945,94	6.929.239.358	12.230.514.235,27	9.256.883.571,61	19.055.399.549,64	42,41%
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.269.164.538,94	12.453.026.836,13	20.901.990.437,09	18.713.301.105,42	27.783.046.526,44	39,11%
PENDAPATAN TRANSFER						
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA						

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Rata-rata Pertumbuhan 2012-2016
PERIMBANGA N						
Dana Bagi Hasil Pajak	20.371.923.222,00	18.209.115.441,00	13.986.195.337,00	14.761.771.700,00	16.116.297.851,00	-4,77%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam	23.026.259.991,00	17.689.931.920,00	22.723.313.642,00	12.028.753.923,00	7.396.528.849,00	-13,93%
Dana Alokasi Umum	294.053.217.000,00	338.570.276.000,00	387.694.110.000,00	402.889.285.000,00	447.672.298.000,00	11,19%
Dana Alokasi Khusus	56.212.090.000,00	40.157.750.000,00	51.809.920.000,00	72.963.290.000,00	82.056.181.119,00	13,76%
Alokasi Dana Desa	0	0	0	29.397.590.000,00	65.959.833.000,00	31,09%
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	393.663.490.213,00	414.627.073.360,53	476.213.538.979,49	532.040.690.623,03	619.201.138.818,94	12,07%
Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0		
Dana Penyesuaian	15.777.198.000,00	19.483.603.000,00	27.006.316.000,00	26.388.926.000,00	22.079.780.250,00	10,87%
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	15.777.198.000,00	19.483.603.000,00	27.006.316.000,00	26.388.926.000,00	22.079.780.250,00	10,87%
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.312.964.950,00	14.686.289.696,92	32.174.793.212,00	34.361.386.952,00	52.822.880.460,00	35,65%

Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Rata-rata Pertumbuhan 2012-2016
Pendapatan Bagi Hasil Lainya	0	0	0	0	0	
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	23.312.964.950,00	14.686.289.696,55	32.174.793.213,19	34.361.386.952,07	52.822.880.460,54	35,65%
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	441.022.817.701,94	461.249.992.893,21	556.296.638.629,77	611.504.304.680,52	721.886.846.055,92	13,29%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	15.500.000.000,00	0	0	0	
Pendapatan Dana Darurat	0	0	0	0	0	
Pendapatan Lainnya	78.219.506,19	0	2.000.000.000,00	7.111.524.264,00	7.797.225.836,00	
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	5.078.219.506,19	15.500.000.000,00	2.000.000.000,00	7.111.524.264,00	7.797.225.836,00	95,84%
JUMLAH PENDAPATAN	446.101.037.208,13	476.749.992.893,21	558.296.638.629,77	618.615.828.944,52	729.684.071.891,92	13,18%



Pengukuran kinerja pendapatan APBD dilaksanakan dengan mengukur sumber pendapatan. Struktur pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam kurun waktu tahun 2012-2016 sumber utama pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer dengan angka pertumbuhan rata-ratanya mencapai 13,29%. Berurutan kemudian penopang pendapatan dari PAD sebesar 39,11% dan terakhir dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar 95,84%. Dari data tersebut rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya sebesar 13,18%.

Dari sudut pandang capaian kinerja per rincian obyek, secara rata-rata dalam kurun waktu tahun 2012-2016 kontribusi pendapatan daerah terbesar berasal dari Pendapatan Transfer yang sebesar 98,61%, selanjutnya berasal dari PAD sebesar 3,01% dan Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 1,39%.

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pada kurun waktu 2012-2016 Pendapatan Asli Daerah mempunyai rata-rata pertumbuhan sebesar 39,11%. Sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sendiri rata-rata dalam kurun waktu tersebut sebesar 3,01%. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB P2, Pajak BPHTB, Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Hiburan.
2. Retribusi Daerah terdiri dari
 - a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - b. Retribusi Jasa Usaha yang merupakan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu Pemakaian Alat Berat dan Pemakaian Gedung
 - c. Retribusi Perizinan tertentu yang terdiri dari Retribusi IMB, Retribusi Gangguan/Keramaian, Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik PT Bank Lampung.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berupa Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Dana Kapitasi/JKN dan Penerimaan Lainnya

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer di Kabupaten Mesuji terdiri dari: 1) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, 2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dan 3) Transfer Pemerintah Provinsi.

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang bersumber dari SDA Pertambangan Minyak Bumi, SDA Pertambangan Panas Bumi, SDA Pertambangan Panas Bumi, SDA Pertambangan Umum, SDA Cukai Tembakau, SDA Kehutanan, dan SDA Perikanan;
 - c. Dana Alokasi Umum;
 - d. Dana Alokasi Khusus dan
 - e. Alokasi Dana Desa
- 2. Transfer Pusat – Lainnya yang bersumber dari Dana Penyesuaian seperti tunjangan profesi guru PNSD serta Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD. Untuk tahun 2016 alokasi dana penyesuaian telah diubah menjadi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran DAK Non Fisik Pada APBD Tahun Anggaran 2016.
- 3. Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Transfer Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, Bagi Hasil Pajak KB, BBNKB, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar KB, Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

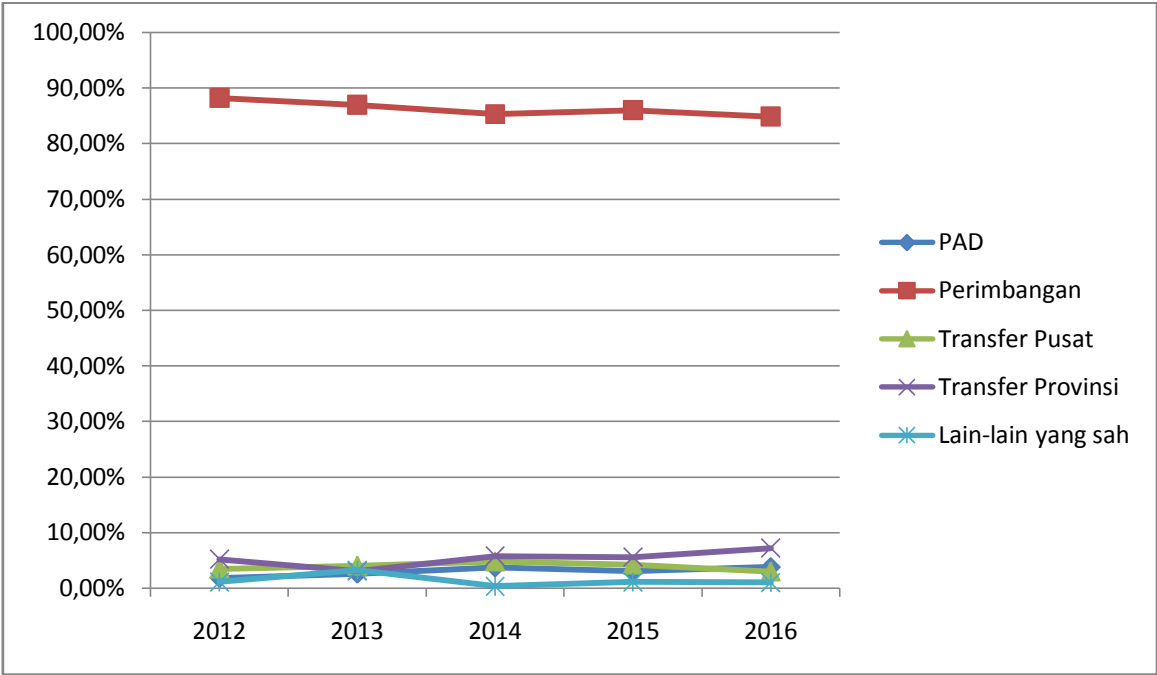
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah dapat diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Mesuji dalam kurun waktu tahun 2012-2015 tergolong masih rendah, terlihat dari proporsi PAD yang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan total jumlah pendapatan daerah yaitu hanya sekitar 1,85% – 3,74%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Mesuji terhadap dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Lampung cukup tinggi.

Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan, Transfer Pusat, Transfer Propinsi dan Lain- Lain Pendapatan yang sah terhadap Total Pendapatan tahun 2012-2016.



Grafik 3.1
Proporsi PAD, Dana Perimbangan, Transfer Pusat Lainnya, Transfer Provinsi dan Pendapatan Lain-lain yang sah

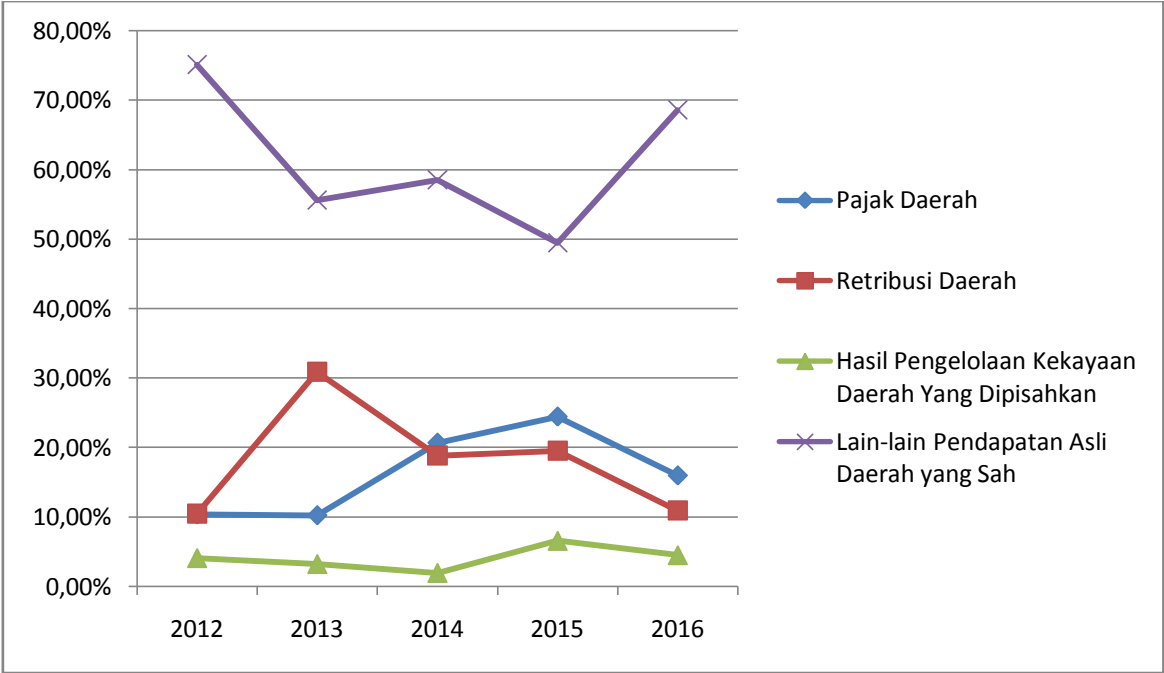


Berdasarkan Grafik 3.1 diketahui bahwa pada tahun 2012 Porsi PAD Kabupaten Mesuji adalah sebesar 1,85% dari total Pendapatan Daerah, pada tahun 2013 naik menjadi 2,61%, kemudian pada tahun 2014 porsi PAD kembali naik menjadi 3,74% sementara itu pada tahun 2015 porsi PAD mengalami penurunan sedikit menjadi 3,03% dan pada tahun 2016 porsi PAD kembali mengalami peningkatan menjadi 3,81%.

Pada pos Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2012-2016, Pos lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berisi Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Kapitasi, dan Penerimaan Lainnya cukup dominan dengan kontribusi antara 49,47% - 75,10% dengan kecenderungan menurun porsi kontribusinya terhadap Total PAD. Selanjutnya Pajak Daerah sebesar 10,23% - 24,45% serta retribusi Daerah 10,46% - 30,90%. Sisanya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu 1,95% - 6,58%. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Grafik 3.2.



Grafik 3.2
Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (%).



Pada Pos Belanja Daerah, Anggaran Belanja Daerah pada hakikatnya adalah rencana pengeluaran pemerintah yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah dengan tujuan kemaslahatan masyarakat, sehingga realisasi belanja daerah dapat menjadi gambaran kinerja pemerintah dalam melaksanakan atau merealisasikan rencana pembangunan daerah.

Tabel 3.2
Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Mesuji

URAIAN	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
BELANJA					
BELANJA TIDAK LANGSUNG	95,63	90,18	80,84	96,22	96,15%
Belanja Pegawai	96,73	91,34	78,78	95,69	95,67%
Belanja Bunga					
Belanja Subsidi					
Belanja Hibah	100	90,34	92,78	96,3	93,96
Belanja Bantuan Sosial	20,11	83,43	98,41	99,73	99,32
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	96,04	96,04	96,04	96,04	98,96
Belanja Tidak Terduga	99,03	33,48	94,84	95,81	10,06
Belanja Langsung	94,13	90,45	86,2	87,79	86,18%
Belanja Pegawai	94,29	90,15	87,16	91,55	92,10%
Belanja Barang dan Jasa	95,23	89,79	89,45	86,67	85,37



URAIAN	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
Belanja Modal	93,31	91,09	83,31	88,18	82,89
JUMLAH TOTAL BELANJA	94,63	90,36	84,17	91,03	91,03

Sumber: BPKAD Kab. Mesuji 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat persentase realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Kabupaten Mesuji. Realisasi Total Belanja Daerah dari tahun 2012-2016 terjadi secara fluaktif setiap tahunnya dikisaran 84,17%-94,63%. Hal ini menunjukkan tingkat serapan yang cukup tinggi terhadap anggaran belanja daerah. Realisasi belanja langsung berada dikisaran 86,18%-94,13%, hal ini menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dari Pemerintah Kabupaten Mesuji selama kurun waktu tersebut terkait belanja pembangunan (Belanja Langsung) untuk kesejahteraan masyarakat mesuji. Sementara untuk Belanja Tidak Langsung realisasi belanjanya berada dikisaran 80,84%-96,22%.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai sumber informasi kepada manajemen Pemerintah Daerah mengenai likuiditas keuangan daerah, memberikan informasi tentang fleksibilitas keuangan (*financial flexibility*) *serata sebagai* dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Secara umum Neraca Daerah memiliki persamaan dasar yaitu :

ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA

Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji, dapat dilihat dari posisi neraca terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap Neraca, diantaranya sebagai berikut :

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*)

Rasio Cair
(*Quick Ratio*)

=

Aset Lancar – Persediaan
Hutang Jangka Pendek

=

(84.301.760.576,12 – 30.566.415.941,25)
28.171.688.405,06

=

1,91



Rasio Cair (Quick Ratio) dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 1 (satu) menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 1 (satu) menunjukkan hasil yang kurang. Capaian rasio sebesar 1,91 menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjamin pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek.

b. Analisis Pertumbuhan Aset Tetap

Pertumbuhan Aset =

Nilai Aset Tahun n - Nilai Aset Tahun n-1

Nilai Aset Tahun n

Analisis Pertumbuhan bertujuan untuk melakukan perbandingan nilai pos aset tetap dalam neraca sehingga dapat diketahui persentase pertumbuhan posisi aset tetap pemerintah daerah. Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Mesuji pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 414.782.583.191,36 dan pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 1.236.385.064.018,68 atau dengan kata lain terjadi pertumbuhan aset tetap mencapai 198,08% dengan rata-rata pertumbuhan aset tetap sebesar 38,25% setiap tahunnya.

c. Analisis Proporsi Aset Tetap

Proporsi Aset Tetap A =

Nilai Aset A

Nilai Total Aset Tetap

x 100%

Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset tetap Pemerintah Kabupaten Mesuji secara lebih komprehensif yaitu apakah kelompok aset tertentu nilainya terlalu besar atau terlalu kecil dari nilai yang wajar. Aset tetap di Kabupaten Mesuji dari tahun 2012-2016 terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Kontruksi dalam Pengerjaan serta akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan Total Aset di Tahun 2015 mencapai Rp. 1.236.385.064.018,68 dengan porsi aset terbesar berupa jaringan jalan, irigasi dan jaringan yang mencapai 53,50%, aset berupa gedung dan bangunan 36,07%, Peralatan dan Mesin 14,23%, Tanah 7,88%, Kontruksi dalam pengerjaan 5,55%, dan aset lainnya 1,27% serta nilai penyusutan aset sebesar -18,51%.



d. Analisis Modal Kerja

Modal Kerja = Aset Lancar – Kewajiban
Modal Kerja = Rp.84.301.760.576,12 – Rp.28.171.688.405,06 = Rp.56.130.072.171,06

Analisis Modal Kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya. Pada neraca tahun 2016, Kabupaten Mesuji memiliki Modal kerja mencapai Rp. 56.130.072.171,06 yang merupakan nilai kecukupan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasional rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, menggunakan dana cadangan atau penggunaan pos pembiayaan lainnya.

Tabel 3.3
Rata-rata pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mesuji

No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan pertahun
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ASET						
2	ASET LANCAR						
3	Kas	43.451.358.584,33	33.440.250.610,35	70.516.417.774,23	53.974.186.507,64	27.100.379.663,26	3,65%
4	Kas di Kas Daerah	40.977.705.777,68	27.208.664.697,51	66.347.396.151,23	43.142.644.450,64	23.691.833.500,26	7,55%
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.473.652.806,65	6.231.585.912,84	1.913.238.323,00	8.318.258.972,00	550.034.063,00	81,00%
6	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	0	0	2.255.783.300,00	2.010.270.118,00	2.858.512.100,00	15,66%
7	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0	0
8	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	503.012.967,00	0,00	0
9	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
10	Piutang	20.993.439.485,00	32.474.608.939,00	39.921.167.622,00	40.170.076.223,03	26.634.964.971,61	11,14%
11	Piutang Pajak	87.534.531,00	122.665.303,00	2.751.790.130,00	2.866.891.185,00	3.238.125.912,00	550,15%
12	Piutang Retribusi	0	987.370.005,00	163.169.541,00	176.285.415,00	86.305.950,00	-42,16%
13	Penyisihan Piutang	0	0	0	(2.437.954.081)	(12.274.064.032)	403,46%
14	Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	256.792.010,33	339.369.401,33	32,16%
15	Piutang Dana Bagi Hasil	8.905.904.954,00	19.862.573.631,00	26.363.579.477,00	28.726.084.682,00	24.612.020.729,00	37,60%
16	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0	0	0	0
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0	0	21.950.000,00	14.030.000,00	107.260.000,00	314,21%
18	Piutang Lainnya	12.000.000.000,00	11.502.000.000,00	10.620.678.474,00	10.567.947.011,20	10.525.947.011,20	-3,18%
19	Persediaan	5.797.460.081,00	6.782.068.344,00	11.368.129.071,28	32.620.679.702,25	30.566.415.941,25	66,31%
20	Jumlah Aset Lancar (3+9+10+19)	70.242.258.150,33	72.696.927.893,35	121.805.714.467,51	126.764.942.432,92	84.301.760.576,12	10,41%
21	INVESTASI JANGKA PANJANG						
22	Investasi Non Permanen						
23	Dana Bergulir	2.041.590.000,00	1.893.525.380,00	1.749.093.180,00	2.070.985.520,00	2.056.016.280,00	0,70%
24	Jumlah Investasi Non Permanen	2.041.590.000,00	1.893.525.380,00	1.749.093.180,00	2.070.985.520,00	2.056.016.280,00	0,70%
25	Investasi Permanen						



No	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-rata Pertumbuhan pertahun
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00%
27	Jumlah Investasi Permanen	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	50,00%
28	Jumlah Investasi Jangka Panjang (24+27)	3.041.590.000,00	4.893.525.380,00	4.749.093.180,00	5.070.985.520,00	5.056.016.280,00	16,10%
29	ASET TETAP						
30	Tanah	200.000.000,00	200.000.000,00	39.798.352.000,00	50.160.022.650,00	97.462.996.950,00	4979,88%
31	Peralatan dan Mesin	72.367.691.450,00	103.513.447.327,00	129.174.343.700,18	158.577.292.309,18	175.975.501.977,19	25,39%
32	Gedung dan Bangunan	79.460.298.455,20	106.029.972.130,20	282.406.459.147,34	350.702.440.651,10	445.909.037.796,49	62,78%
33	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	175.802.231.719,16	259.454.729.072,16	454.183.339.838,50	519.871.289.465,42	661.522.143.507,40	41,09%
34	Aset Tetap Lainnya	10.605.947.267,00	10.865.629.617,00	12.410.660.276,00	14.253.717.828,00	15.677.110.928,00	10,38%
35	Konstruksi dalam Pengerjaan	76.346.414.300,00	99.933.948.001,00	83.524.215.062,62	90.732.612.828,71	68.631.778.972,46	-0,31%
36	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0	(160.282.806.245)	(228.793.506.113)	42,74%
37	Jumlah Aset Tetap (30 s/d 36)	414.782.583.191,36	579.997.726.147,36	1.001.497.370.024,64	1.024.014.569.487,32	1.236.385.064.018,68	33,87%
38	ASET LAINNYA						
39	Tagihan Penjualan Angsuran	0	0	0	0	0	0
40	Tuntutan Perbendaharaan	0	0	0	0	0	0
41	Tuntutan Ganti Rugi	0	0	10.550.000,00	0	0	0
42	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
43	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0	0	0
44	Aset Lain-Lain	427.068.700,00	427.068.700,00	578.444.910,00	704.436.460,00	8.257.916.553,00	282,45%
45	Jumlah Aset Lainnya (39 s/d 44)	427.068.700,00	427.068.700,00	588.994.910,00	704.436.460,00	8.257.916.553,00	282,45%
46	JUMLAH ASET (20+28+37+45)	488.493.500.041,69	658.015.248.120,71	1.128.641.172.582,15	1.156.554.933.900,24	1.334.000.757.427,80	31,01%
47	KEWAJIBAN						
48	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
49	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.171.158.782,65	1.360.620.109,84	397.939.252,00	8.405.663.915,20	550.033.563,00	466,07%
50	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0
51	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0



52	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0	0	0
53	Utang Belanja	0	0	0	5.756.054.184,00	4.524.660,00	-99,92%
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.230.176.492,00	7.755.643.962,00	7.901.391.321,00	10.823.927.476,00	27.617.130.182,06	50,32%
55	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (49 s.d 54)	8.401.335.274,65	9.116.264.071,84	8.299.330.573,00	24.985.645.575,20	28.171.688.405,06	53,34%
56	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
57	Utang kepada Pemerintah Pusat						
58	Utang Jangka Panjang Lainnya						
59	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s.d 58)	0	0	0	0	0	0
60	JUMLAH KEWAJIBAN (55+59)	8.401.335.274,65	9.116.264.071,84	8.299.330.573,00	24.985.645.575,20	28.171.688.405,06	53,34%
61	EKUITAS DANA						
62	EKUITAS DANA LANCAR						
63	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	42.280.199.801,68	32.081.545.100,51	70.978.834.496,23	45.781.958.103,64	26.550.346.100,26	19,81%
64	Pendapatan Yang Ditangguhkan	0	0	0	0	0	0
65	Cadangan Piutang	20.993.439.485,00	32.474.608.939,00	39.921.167.622,00	40.170.076.223,03	26.634.964.971,61	26,11%
66	Cadangan Persediaan	5.797.460.081,00	6.782.068.344,00	11.368.129.071,28	32.620.679.702,25	30.566.415.941,25	90,52%
67	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(7.230.176.492)	(7.755.643.962)	(7.901.391.321)	(16.579.981.660)	(27.621.654.842)	39,66%
68	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (63 s/d 67)	61.840.922.875,68	63.582.578.421,51	114.366.739.868,51	101.992.732.368,92	56.130.072.171,06	23,70%
69	EKUITAS DANA INVESTASI						
70	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0
71	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	3.041.590.000,00	4.893.525.380,00	4.749.093.180,00	5.070.985.520,00	5.056.016.280,00	21,57%
72	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	414.782.583.191,36	579.997.726.147,36	1.001.497.370.024,64	1.024.014.569.487,32	1.236.385.064.018,68	38,25%
73	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	427.068.700,00	427.068.700,00	588.994.910,00	704.436.460,00	8.257.916.553,00	19,17%
74	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (70 s/d 73)	418.251.241.891,36	585.318.320.227,36	1.006.835.458.114,64	1.029.789.991.467,32	1.249.698.996.851,68	38,08%
75	EKUITAS DANA CADANGAN	0	0	0	0	0	0
76	JUMLAH EKUITAS DANA (68+74+75)	480.092.164.767,04	648.900.898.648,87	1.121.202.197.983,15	1.131.782.723.836,24	1.305.829.069.022,74	31,07%
77	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA (60+76)	488.493.500.041,69	658.017.162.720,71	1.129.501.528.556,15	1.156.768.369.411,44	1.334.000.757.427,80	31,02%

Sumber : laporan keuangan, BPPKAD (2016)

Data menunjukkan bahwa aset pemerintah Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan selama periode 2012-2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 31,24%. Aset Pemerintah Kabupaten Mesuji terus mengalami peningkatan dan pada akhir periode, tahun 2016 mencapai sekitar 1,334 Trilyun. Proporsi Aset terbesar adalah Aset Tetap, pada Tahun 2014 terjadi peningkatan aset tetap sebesar 72,67 persen atau bila dilihat dalam satu periode Jumlah aset tetap yang disumbangkan Tahun 2014 adalah sebesar 81 persen.

Data kewajiban daerah, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mesuji tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban daerah hanya pada kewajiban jangka pendek, yang meliputi utang perhitungan kepada pihak ketiga (PFK), utang pajak dan utang jangka pendek lainnya. Besaran kewajiban sampai keadaan tahun 2016 sebesar kurang lebih Rp 28,171 Milyard dengan rata-rata pertumbuhan selama periode 2012-2016 sebesar 53,34 persen.

Dari tabel dapat diketahui juga jumlah ekuitas atau kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 31,06%. Peningkatan ekuitas tertinggi pada tahun 2014, sebesar 72,78 persen disebabkan oleh beberapa kondisi, Terjadi peningkatan Pendapatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 17,10 persen di tahun 2014 sementara dari sisi Belanja hanya peningkatan 8,46%.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Pemerintah Daerah lainnya dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah.

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah selama tahun anggaran 2012-2017, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai upaya, baik mengoptimalkan terhadap potensi yang ada (intensifikasi) maupun berupaya mengembangkan potensi potensi baru (ekstensifikasi). Intensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan terhadap subyek dan obyek pajak/retribusi yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak/retribusi serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan dalam APBD dapat tercapai. Sedangkan Ekstensifikasi pendapatan asli daerah (sektor pajak daerah dan retribusi daerah) dilakukan dengan upaya memperluas



subyek dan obyek pajak/retribusi serta penyesuaian tarif yang nantinya akan berdampak pada kenaikan potensi pendapatan sehingga target pendapatan meningkat pada tahun berikutnya.

Upaya tersebut disamping mengembangkan faktor pendukung juga berupaya mengatasi faktor-faktor yang bisa jadi penghambat dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan daerah. Dalam tahun anggaran 2012-2017, beberapa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan dalam menunjang realisasi penerimaan daerah Kabupaten Mesuji antara lain:

1. Berupaya untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, maupun upaya-upaya lain yang mengarah pada peningkatan pendapatan daerah.
2. Pada aspek regulasi, secara bertahap telah dilakukan pengkajian terhadap berbagai dasar hukum yang digunakan di dalam mengembangkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat ada beberapa regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga perlu diadakan revisi, baik menyangkut tarif maupun jumlah cakupan.
3. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.
4. Penyempurnaan administrasi dan pengelolaan pajak/retribusi.
5. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan retribusi
6. Penyempurnaan dan penataan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Perluasan wajib pajak dan retribusi daerah serta perluasan obyek pajak dan retribusi daerah.
9. Penyempurnaan tarif pajak dan retribusi daerah.
10. Perluasan obyek pajak/retribusi.
11. Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi.
12. Pengembangan sistem pengelolaan pendapatan asli daerah yang berbasis teknologi informasi.
13. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, melalui sosialisasi kepada masyarakat akan arti penting pajak untuk pembangunan daerah.
14. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggungjawab.

Di samping strategi di atas, dalam periode tahun anggaran 2012–2017 pemerintah Kabupaten Mesuji mengarahkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat disertai dengan tertib administrasi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan khusus untuk Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, strategi peningkatan Pendapatan Daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji antara lain adalah:

1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta melaksanakan Rekonsiliasi melalui dukungan Data Asumsi Dasar, Celah Fiskal, Data umum , Data Teknis dan Data Khusus sebagai dasar penetapan alokasi dana perimbangan.
2. Updating data dan tertib pelaporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari spesifik grant (Dana Alokasi Khusus).

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka detail kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017.
2. Belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Kabupaten.
6. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program program Pemerintah Pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Mesuji.
8. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pendapatan khusus (DAK, Cukai Hasil Tembakian dan Pajak Rokok) untuk menstimulasi capaian target kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji diarahkan penggunaannya untuk menutupi beban hutang Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah jatuh tempo sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, yang pada gilirannya akan mengurangi beban pemerintah pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penetapan kebijakan pembiayaan daerah dibarengi pula dengan optimalisasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyeimbangkan (balancing) antara pos penerimaan dan pos pengeluaran daerah pada komponen pembiayaan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Mesuji yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari:

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
2. pencairan dana cadangan,
3. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. penerimaan pinjaman daerah,
5. penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
6. penerimaan piutang daerah.

Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2012-2017 adalah sebagai berikut:



- 1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja.
- 2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD atau penyertaan Modal.
- 3. Defisit APBD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan.

Oleh karena itu, pada bagian ini dapat diuraikan dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis sesuai dengan kebutuhan. Dalam bentuk tabel dapat menggunakan contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Mesuji

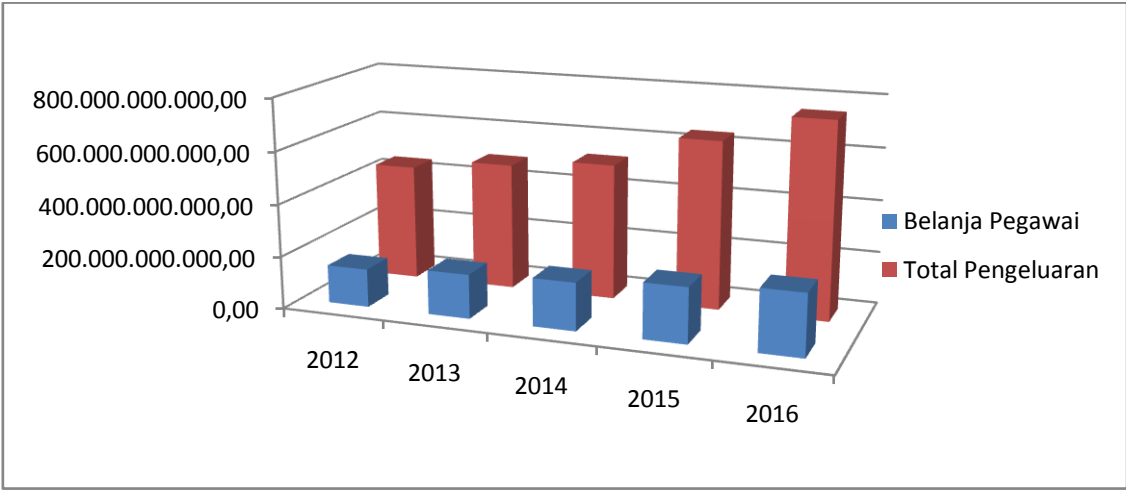
No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2012	145.648.121.080,00	446.308.470.592,00	32,63%
2	Tahun anggaran 2013	168.309.361.815,00	486.948.647.591,00	34,56%
3	Tahun anggaran 2014	182.326.592.754,00	519.397.434.630,94	35,10%
4	Tahun anggaran 2015	210.138.588.669,00	642.692.026.861,00	32,70%
5	Tahun anggaran 2016	234.779.548.211,00	748.915.683.895,00	31,35%

Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran Daerah (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Total Pengeluaran Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai langsung dan Belanja Pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan besaran porsi Pengeluaran Daerah yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Perkembangan proporsi belanja pegawai (pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terhadap total belanja daerah menunjukkan kecenderungan stabil yaitu berkisar 32,63% sampai dengan 35,10%. Perkembangan proporsi belanja pegawai (pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) terhadap total Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 3.3
Proporsi Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran di Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2016

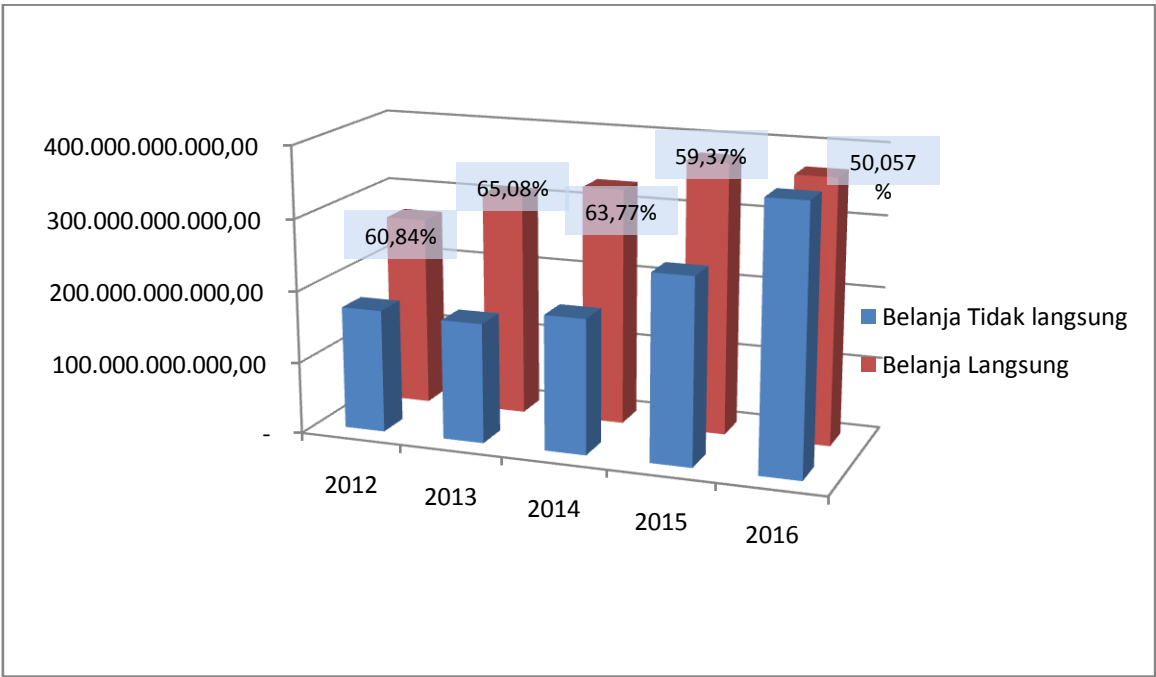


Sementara itu untuk porsi belanja tidak langsung dan belanja Langsung di Kabupaten mesuji dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung di Kabupaten Mesuji, jenis belanja meliputi belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Struktur Belanja di Kabupaten Mesuji yaitu Proporsi Belanja tidak langsung dari tahun 2012 – 2016 antara 34,92 persen hingga 49n,95 perse sementara untuk porsi Belanja langsung dari tahun 2012 – 2016 antara 50,05 persen hingga 65,08 persen.

Berikut adalah gambar porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung Kabupaten Mesuji tahun 2012-2016.

Grafik 3.4
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2012-2016

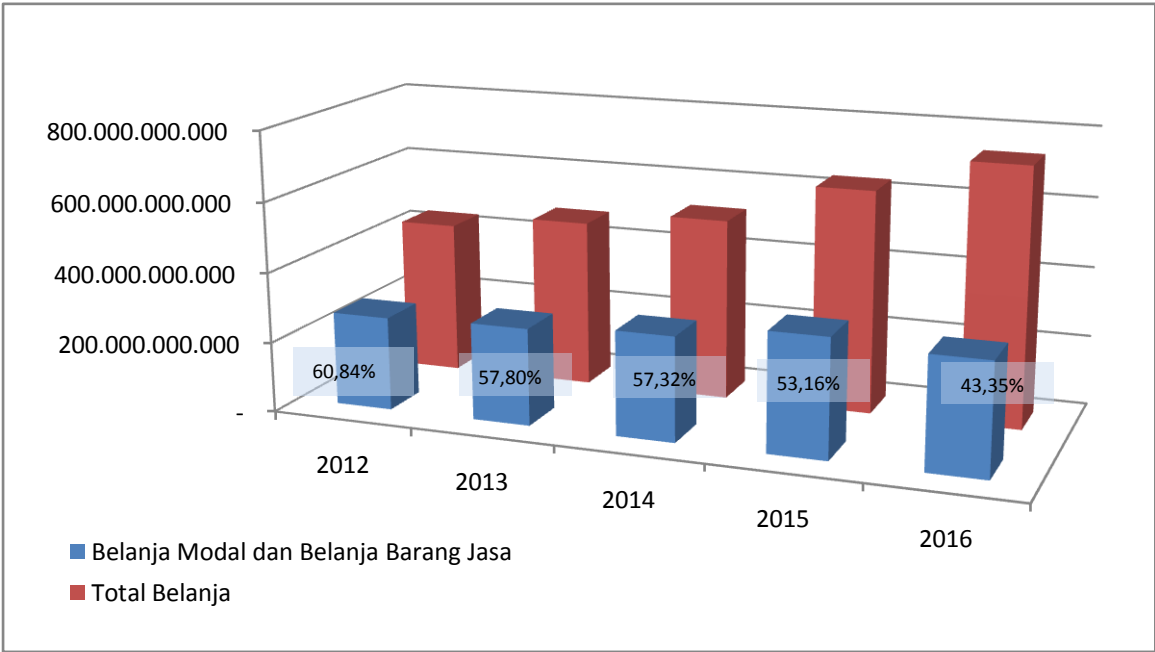




Untuk Rasio Belanja Modal dan Belanja Barang/jasa terhadap total Belanja Daerah Mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa. Belanja Modal ditambah belanja barang/jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja. Belanja tersebut akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Rasio belanja modal serta belanja barang/jasa terhadap total belanja daerah Kabupaten Mesuji pada kurun waktu 2012-2016 berkisar antara 43,35%-60,84% dari total belanja daerah.

Perkembangan proporsi belanja modal serta belanja barang/jasa terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada gambar berikut

Grafik 3.5
Proporsi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja Daerah



Tabel 3.5
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2012 – 2016 (Rp)

URAIAN	REALISASI 2012	REALISASI 2013	REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	TOTAL REALISASI 2012-2016
BELANJA						
BELANJA TIDAK LANGSUNG	171.387.059.501,00	166.957.004.766,00	187.863.955.025,97	258.399.100.735,00	367.472.325.596,00	1.152.079.445.623,97
Belanja Pegawai	145.648.121.080,00	133.497.929.965,00	148.861.853.854,00	170.593.010.179,00	185.456.108.961,00	784.057.024.039,00
Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	9.817.999.500,00	3.740.000.000,00	5.106.800.000,00	2.147.557.500,00	24.437.084.992,00	45.249.441.992,00
Belanja Bantuan Sosial	576.125.306,00	16.507.290.685,00	14.565.000.000,00	30.249.000.000,00	29.105.000.000,00	91.002.415.991,00
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	433.172.291,00	433.172.291,00
Bantuan Keuangan	11.373.795.115,00	12.483.354.116,00	17.657.088.621,97	53.184.800.516,00	127.885.959.352,00	222.584.997.720,97
Belanja Tidak Terduga	3.971.018.500,00	728.430.000,00	1.673.212.550,00	2.224.732.540,00	155.000.000,00	8.752.393.590,00
Belanja Langsung	266.261.018.391,00	311.159.052.920,00	330.686.571.403,97	377.625.079.911,00	368.274.856.891,00	1.654.006.579.516,97
Belanja Pegawai	25.740.841.700,00	34.811.431.850,00	33.464.738.900,00	39.545.578.490,00	49.323.439.250,00	182.886.030.190,00
Belanja Barang dan Jasa	113.653.347.667,00	125.688.107.586,00	139.672.244.322,00	179.555.951.256,00	123.439.817.894,00	682.009.468.725,00
Belanja Modal	152.607.670.724,00	150.659.513.484,00	157.549.588.181,97	158.523.550.165,00	195.511.599.747,00	814.851.922.301,97
TOTAL JUMLAH BELANJA DAERAH	437.648.077.892,00	478.116.057.686,00	518.550.526.429,94	636.024.180.646,00	735.747.182.487,00	2.806.086.025.140,94

Sumber: BPKAD Kabupaten Mesuji, 2016

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dapat dikatakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Mesuji masih mengandalkan dari pendapatan SILPA tahun lalu, sementara penerimaan dari sumber-sumber lain belum ada. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Mesuji selama tahun 2012-2016 dari pos penyertaan modal terealisasi sebesar 2 M rupiah kepada Bank Lampung (persero). Dari semula di tahun 2012 teralisasi sebesar 1 M rupiah kemudian berlanjut dengan penambahan sebesar 2 M rupiah ditahun 2013. Sementara itu kontribusi sisa penghematan belanja daerah atau akibat lainnya menjadi jumlah kontribusi paling besar dalam pembentukan SiLPA setiap tahunnya di Kabupaten Mesuji. Kedepan perlu analisis lebih mendalam terkait hal tersebut apakah pembentukan silpa tersebut berasal dari penghematan belanja daerah atau karena sebab lain seperti minimnya serapan belanja daerah.

Terjadi perubahan/selisih perhitungan pada pos SILPA yang terkoreksi pada tahun berikutnya (dapat dilihat pada Tabel 3.6)

- ✓ Tahun 2013 tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.32.081.545.100,51 namun pada tahun 2014 di catat pada pos SILPA sebesar Rp. 32.079.630.500,51 atau selisih sebesar Rp. 1.914.600,00 yang kemudian dicatat sebagai Hutang Pihak Ke-3 yang belum di bayar pada tahun berkenaan.
- ✓ Tahun 2014 tercatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.70.978.834.496,23 namun pada tahun 2015 di catat pada pos SILPA sebesar Rp. 69.858.156.022,23 atau selisih sebesar Rp. 1.120.678.474,00 yang merupakan reklasi ke pos Pitang Lainnya.

Tabel 3.6
Defisit Riil Anggaran dan Penutupan Defisit Riil
Kabupaten Mesuji

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	446.101.037.208,13	476.749.992.889,83	558.296.638.625,66	618.615.828.942,41	729.684.071.891,62
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	437.648.077.892,00	478.116.057.686,00	518.550.526.429,94	636.024.180.646,00	735.747.182.487,00
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.660.392.700,00	8.832.589.905,00	846.908.200,00	6.667.846.215,00	13.168.501.408,00
A	Defisit riil	(207.433.383,87)	(10.198.654.701,17)	38.899.203.995,72	(24.076.197.918,59)	(19.231.612.003,08)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4.	SILPA TA sebelumnya	42.487.633.185,55	42.280.199.801,68	32.079.630.500,51	69.858.156.022,23	45.781.958.103,64
5.	Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	42.487.633.185,55	42.280.199.801,68	32.079.630.500,51	69.858.156.022,23	45.781.958.103,64
A+B	Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	42.280.199.801,68	32.081.545.100,51	70.978.834.496,23	45.781.958.103,64	26.550.346.100,26



Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Mesuji

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Tabel 3.8
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Mesuji

No.	Uraian	Persentase dari SILPA			
		2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah SiLPA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	1,27%	3,11%	-14,97%	-44,16%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-8,73%	1,59%	-13,96%	-102,94%
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-25,58	-0,48%	-28,88%	-64,92%
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	159,01%	137,36%	136,88%	294,15%
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum	-25,98%	-41,58%	20,93%	17,88%

No.	Uraian	Persentase dari SILPA			
		2013	2014	2015	2016
	terselesaikan				

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Mesuji yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mesuji dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

Tabel. 3.9.
Data Realisasi Jumlah Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

No	Realisasi Anggaran	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
a.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	44.168.382.456,19	49.669.892.696,92	61.181.109.212,00	67.861.837.216,00	82.699.886.546,00
a.3.1	Hibah	5.000.000.000,00	15.500.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-
a.3.2	Dana darurat		-	-	-	-
a.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	23.312.964.950,00	14.686.289.696,92	32.174.793.212,00	34.361.386.952,00	52.822.880.460,00
a.3.4	Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus	15.777.198.000,00	19.483.603.000,00	27.006.316.000,00	26.388.926.000,00	22.079.780.250,00
a.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
a.3.6	Pendapatan Lainnya	78.219.506,19	-	-	7.111.524.264,00	7.797.225.836,00

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2017-2022 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2017-2022.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran —horisontal; dan kewajaran —vertikal. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.



Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Strategis yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasionalan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain.

Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah. PAD mencakup: 1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan alokasi Dana Desa; 3) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang berisi Dana Penyesuaian serta 4) Transfer Pemerintah Propinsi yang berisi Pendapatan Bagi Hasil Pajak; serta 5) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer pusat dan propinsi ke daerah saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 94,14% hingga 97,01%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya



aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah.
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 3.10
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017 s.d Tahun 2022
Kabupaten Mesuji

No	Uraian	Pertumbuhan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
			1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)	13,55%	743.880.240.150	841.686.981.590	955.481.011.737	1.088.434.089.921	1.244.435.676.049	1.428.268.261.358
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21,40%	36.224.899.000	43.571.331.058	52.658.680.286	63.937.986.043	77.983.447.823	95.527.012.995
1.1.1	Pajak daerah	3%	7.128.750.000	8.101.877.111	9.207.843.272	10.464.781.996	11.893.302.153	13.516.825.880
1.1.2	Retribusi daerah	-7,04%	10.999.673.000	12.501.209.737	14.207.717.346	16.147.175.868	18.351.384.826	20.856.484.613
1.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	5,80%	1.252.597.000	1.263.059.128	1.273.608.640	1.284.246.264	1.294.972.738	1.305.788.804
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,48%	16.843.879.000	21.705.185.082	27.969.511.028	36.041.781.915	46.443.788.106	59.847.913.699
1.2.	Dana Perimbangan (Transfer)	13,31%	672.201.136.000	756.673.182.246	854.380.174.297	967.872.000.952	1.100.264.237.836	1.255.374.016.999
1.2.1	Dana bagi hasil	3,03%	31.762.316.000	34.334.334.007	37.114.626.394	40.120.058.599	43.368.861.777	46.880.743.387
1.2.2	Dana alokasi umum	4,09%	448.282.207.000	488.465.678.252	532.251.146.944	579.961.491.741	631.948.533.759	688.595.630.928
1.2.3	Dana alokasi khusus	10,67%	108.586.146.000	127.990.200.958	150.861.708.835	177.820.294.227	209.596.306.997	247.050.608.580
1.2.4	Alokasi Dana Desa	4,00%	83.570.467.000	105.882.969.028	134.152.692.124	169.970.156.384	215.350.535.304	272.847.034.104
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	16,89%	35.454.205.150	41.442.468.286	48.442.157.154	56.624.102.926	66.187.990.390	77.367.231.364
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota	16,89%	35.454.205.150	41.442.468.286	48.442.157.154	56.624.102.926	66.187.990.390	77.367.231.364
2	Belanja (b1 + b.2)	9,79%	765.514.322.250	837.512.612.006	934.913.839.278	1.057.820.147.811	1.228.492.308.539	1.391.374.280.103
2.1	Belanja Tidak Langsung	8,39%	357.244.577.900	385.866.607.957	417.539.180.456	452.610.985.246	491.471.871.353	534.557.701.395
2.1.1	Belanja pegawai	4,43%	203.506.739.455	227.499.092.553	254.320.015.400	284.302.981.201	317.820.777.860	355.290.142.976
2.1.4	Hibah	4,43%	5.430.200.000	6.149.087.646	6.963.146.640	7.884.976.425	8.928.844.449	10.110.906.983
2.1.5	Bantuan sosial	4,43%	12.205.000.000	12.745.895.248	13.310.761.629	13.900.661.482	14.516.704.230	15.160.048.461
2.1.6	Belanja bagi hasil	-7,77%	1.812.842.300	1.671.894.207	1.541.904.797	1.422.022.036	1.311.460.133	1.209.494.394
2.1.7	Bantuan keuangan	2,61%	132.590.796.470	136.045.288.916	139.589.783.974	143.226.626.554	146.958.222.657	150.787.040.973
2.1.8	Belanja tidak terduga	3,32%	1.698.999.675	1.755.349.387	1.813.568.016	1.873.717.548	1.935.862.024	2.000.067.609
2.2	Belanja Langsung	10,96%	408.269.744.350	451.646.004.049	517.374.658.821	605.209.162.565	737.020.437.186	856.816.578.708
2.2.1	Belanja pegawai	19,41%	54.832.013.500	65.476.737.761	78.187.958.350	93.366.851.191	111.492.473.845	133.136.884.938
2.2.2	Belanja barang dan jasa	12,11%	166.319.157.472	186.457.202.710	216.033.577.196	234.343.515.617	282.717.999.895	334.528.087.483
2.2.3	Belanja modal	6,73%	187.118.573.378	199.712.063.577	223.153.123.275	277.498.795.757	342.809.963.446	389.151.606.287
Surplus/Defisit)		177,35%	(21.634.082.100)	4.174.369.585	20.567.172.459	30.613.942.109	15.943.367.510	36.893.981.255
3	Pembiayaan	-24,67%	21.634.082.100	19.509.337.138	930.641.716	(5.291.192.295)	(1.090.095.694)	(5.340.813.084)
3.1	penerimaan pembiayaan	0,90%	33.048.487.100	33.346.722.023	25.676.495.031	24.497.814.175	34.257.672.081	25.195.535.551
3.2	pengeluaran pembiayaan	21,23%	11.414.405.000	13.837.384.885	24.745.853.315	29.789.006.470	35.347.767.776	30.536.348.636

Tabel 3.11. Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2017-2022

URAIAN PEMBIAYAAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SURPLUS/Defisit	(21.634.082.100,00)	4.174.369.584,65	20.567.172.458,92	30.613.942.109,39	15.943.367.510,13	36.893.981.255,23
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.048.487.100,00	33.346.722.022,88	25.676.495.031,04	24.497.814.175,08	34.257.672.081,06	25.195.535.551,07
Penggunaan SiLPA	33.048.487.100,00	33.346.722.022,88	23.683.706.722,25	18.497.814.175,08	23.757.672.081,06	10.695.535.551,07
Pencairan Dana Cadangan						
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			1.992.788.308,79			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi						
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya						
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				2.500.000.000,00	7.000.000.000,00	8.500.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.048.487.100,00	33.346.722.022,88	25.676.495.031,04	24.497.814.175,08	34.257.672.081,06	25.195.535.551,07
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.414.405.000,00	13.837.384.885,28	24.745.853.314,88	29.789.006.469,98	35.347.767.775,54	30.536.348.635,54
Pembentukan Dana Cadangan		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya						
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu. Bukan Bank						
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi						
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	8.414.405.000,00	5.837.384.885,28	4.745.853.314,88	5.789.006.469,98	5.347.767.775,54	5.536.348.635,54
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara			4.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			5.000.000.000,00	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran	11.414.405.000,00	13.837.384.885,28	24.745.853.314,88	29.789.006.469,98	35.347.767.775,54	30.536.348.635,54
PEMBIAYAAN NETO	21.634.082.100,00	19.509.337.137,60	930.641.716,16	(5.291.192.294,90)	(1.090.095.694,47)	(5.340.813.084,46)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	23.683.706.722,25	21.497.814.175,08	25.322.749.814,49	14.853.271.815,66	31.553.168.170,77



3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangkapengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpolat.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur public dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja di publikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Tabel 3.12
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Mesuji

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	743.880.240.150,00	841.686.981.590,19	955.481.011.736,84	1.088.434.089.920,88	1.244.435.676.049,49	1.428.268.261.358,17
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	0,00	23.683.706.722,25	21.497.814.175,08	25.322.749.814,50	14.853.271.815,68	31.553.168.170,76
	Total Penerimaan	743.880.240.150,00	865.370.688.312,44	976.978.825.911,92	1.113.756.839.735,37	1.259.288.947.865,17	1.459.821.429.528,93
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung	357.244.577.900,00	385.866.607.956,95	417.539.180.456,44	452.610.985.246,15	491.471.871.353,40	534.557.701.395,29
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.414.405.000,00	13.837.384.885,28	24.745.853.314,88	29.789.006.469,98	35.347.767.775,54	30.536.348.635,54
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	375.221.257.250,00	465.666.695.470,21	534.693.792.140,60	631.356.848.019,25	732.469.308.736,23	894.727.379.498,11

Kebijakan umum anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana lokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

a. Pendapatan Daerah

Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan peningkatan pendapatan baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), maupun pendapatan lain-lain yang sah.

Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang, apabila sumber PAD tersebut menunjukkan peningkatan dalam kualitas dan kuantitas terutama sumber-sumber yang menjadi obyek PAD. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.

Pada periode tahun anggaran 2017-2021, prediksi anggaran pendapatan berjalan semakin meningkat meskipun peningkatan tersebut tidak relatif besar seiring dengan perubahan kondisi keadaan di masa yang akan datang. Dari sisi prosentase besaran kontribusi prediksi anggaran pendapatan, pada lima tahun ke depan antara PAD dengan Dana Perimbangan mengalami perjalanan yang cukup signifikan, dalam arti proporsi keduanya saling berimbang bahkan prediksi untuk tiga tahun terakhir dalam periode tersebut PAD dirahkan lebih berperan besar dari pada atau dibandingkan dengan Dana Perimbangan.

b. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes, Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/Kab/ Kota Dan Pemdes, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

1. Belanja Tidak Langsung

Pada tahun anggaran 2012, sebagaimana tahun 2010 dan 2011, pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji dalam lima tahun ke depan.

Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumberpendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompokbelanja tidak langsung adalah belanja hibah dan bantuan sosial.

Alokasi belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja hibah adalah untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Tujuan alokasi bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Alokasi belanja bantuan keuangan diarahkan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan khusus. Tujuan alokasi bantuan keuangan tersebut adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang tidak tersedia alokasi dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Mekanisme anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan pengajuan proposal dari masyarakat, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang berlaku.

Selain itu, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja bidang pendidikan dan kesehatan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak Langsung dalam lima tahun kedepan.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium PNS, Honorarium non PNS Uang Lembur, dan Belanja Pegawai BLUD.

Sementara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mesuji, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur untuk mempercepat peningkatan akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pengurangan kemiskinan. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat.

Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Mesuji.

Tabel 3.13
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Mesuji

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	375.221.257.250,00	465.666.695.470,21	534.693.792.140,60	631.356.848.019,25	732.469.308.736,23	894.727.379.498,11
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I						
II.a	Belanja Langsung	408.269.744.350,00	451.646.004.048,59	517.374.658.821,48	605.209.162.565,33	737.020.437.185,94	856.816.578.707,66
II.b	Pembentukan dana cadangan	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Dikurangi:						
II.c	Belanja Langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama	152.449.283.140,00	167.859.381.523,60	191.863.692.645,09	224.301.635.603,42	273.848.544.174,70	318.021.570.625,07
	Bidang Pendidikan	81.653.948.870,00	90.329.200.809,72	103.474.931.764,30	121.041.832.513,07	147.404.087.437,19	171.363.315.741,53
	Bidang Kesehatan	40.826.974.435,00	45.164.600.404,86	51.737.465.882,15	60.520.916.256,53	73.702.043.718,59	85.681.657.870,77
	Dana Desa	29.968.359.835,00	32.365.580.309,02	36.651.294.998,65	42.738.886.833,82	52.742.413.018,92	60.976.597.012,77
II.d	Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama	-	-	-	-	-	-
II	Total Rencana pengeluaran prioritas I (II.a+II.b-II.c-II.d)	560.719.027.490,00	624.505.385.572,19	714.238.351.466,57	839.510.798.168,75	1.020.868.981.360,64	1.184.838.149.332,73
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	(185.497.770.240,00)	(158.838.690.101,98)	(179.544.559.325,97)	(208.153.950.149,50)	(288.399.672.624,41)	(290.110.769.834,62)
	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II						



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

"Bumi Ragab Begawe Caram"

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan Kabupaten Mesuji yang menjadi prioritas atau menjadi agenda utama rencana pembangunan jangka menengah daerah kurun 2017 – 2022 dalam upaya mencapai arah dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mesuji, diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis. Selanjutnya dilakukan pembobotan untuk menghasilkan daftar isu strategis per bidang pemerintahan. Selanjutnya akan diuraikan daftar permasalahan urusan pemerintahan Kabupaten Mesuji, Lingkungan Strategis dan isu strategis dengan penjabarannya.

Beberapa permasalahan pembangunan yang menjadi agenda utama dalam pembangunan Kabupaten Mesuji terbagi dalam bidang pemerintahan dan hukum, ekonomi, sosial budaya dan kependudukan, infrastruktur, tata ruang dan pertanahan serta sumberdaya alam dan lingkungan. Penjabaran permasalahan selengkapnya adalah sebagai berikut.

4.1.1. Bidang Ekonomi

1. Rendahnya Produksi dan Produktivitas Produk di Sektor Pertanian

Rendahnya Produksi produk pertanian di Kabupaten Mesuji ditandai masih banyaknya produksi pertanian dari luar daerah yang dijual di Mesuji, diantaranya produk sayur mayur, produk perikanan dan produk pertanian lainnya. Produksi padi Tahun 2015 di Kabupaten Mesuji mencapai 214.253 ton, dengan luas panen seluas 42.850,5 ha, dengan indeks tanam mencapai 2 kali dalam setahun, dengan sebaran indeks tanam yang tidak merata atau tidak semua wilayah pertanian di Kabupaten Mesuji mempunyai indeks tanam 2 kali dalam setahun. Dengan asumsi indeks tanam yang belum merata, potensi untuk meningkatkan produksi padi masih terbuka lebar.

Diversifikasi tanaman perkebunan di Kabupaten Mesuji saat ini masih relatif rendah. Saat ini hanya ada 3 (tiga) komoditas yang dominan ditanam dan di produksi oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan besar. Produksi perkebunan di Kabupaten Mesuji masih terkonsentrasi pada komoditas, padi, karet dan Kelapa Sawit dan jagung. Kendala Rendahnya diversifikasi tanaman pertanian disebabkan beberapa hal, diantaranya adalah tipologi lahan yang tidak mendukung karena sebagian besar lahan pertanian yang ada di Kabupaten Mesuji adalah gambut dengan tingkat keasaman yang tinggi, hanya ada beberapa jenis tanaman yang cocok untuk ditanam.

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Mesuji bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) sedang mengembangkan Kedelai BJA (Budidaya Jenuh Air). Tanaman lain yang bisa dikembangkan pada lahan perkebunan dan tanaman pola tumpang sari di Kabupaten Mesuji diantaranya adalah tanaman pisang, papaya, dan hortikultura lainnya, diantaranya cabe, tanaman kakao atau coklat, jagung, dan lain sebagainya.

Secara garis besar Permasalahan-permasalahan terkait rendahnya produksi dan produktivitas Tanaman Pertanian dapat diurai dan disajikan sebagai berikut:

- a. Tingginya tingkat kerusakan Pintu Air Irigasi Rawa;
- b. Rendahnya pengelolaan Tata Air Mikro
- c. Rendahnya Diversifikasi Produk Pertanian;
- d. Rendahnya Budaya Tumpangsari pada lahan pesawahan
- e. Rendahnya Produktivitas tanaman Karet dan Sawit Perkebunan Rakyat;
- f. Kurangnya pemanfaatan lahan pekarangan;
- g. Banyaknya Pendangkalan saluran irigasi dan sering menyebabkan banjir;
- h. Masih adanya lahan non produktif yang belum dimanfaatkan

2. Kurangnya Nilai Tambah Produk UMKM

Untuk nilai tambah produk, terutama produk pertanian dari skala mikro dapat dipastikan bahwa Kabupaten belum mampu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi (*Raw Material*) maupun bahan jadi (*End Product*). Sebagai contoh hanya industri besar yang mampu mengolah umbi kayu menjadi tepung tapioka dan Tandan Buah Segar Kelapa Sawit menjadi (*Crude Palm Oil*). Perusahaan perusahaan tersebut dilihat secara nyata mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya, namun disisi lain ada banyak produk pertanian secara umum yang belum mampu diolah oleh UMKM, sehingga dapat dikatakan bahwa Nilai Tambah Produk terutama produk pertanian masih sangat kurang.

Secara umum berikut ini adalah penjabaran permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri skala kecil dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

- a. Kurangnya kemampuan SDM dan peralatan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk;
- b. Rendahnya Pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang perizinan khususnya industri makanan berbasis agroindustri
- c. Rendahnya Kualitas Pengemasan Produk UMKM di Kabupaten Mesuji
- d. Rendahnya akses penjualan produk UMKM Mesuji.
- e. Masih minimnya jenis usaha industri skala kecil yang berkembang di Kabupaten Mesuji.

3. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Daerah dari tahun 2012 s.d 2017 hanya berkisar diangka 2% s/d 3%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mesuji hanya mengandalkan Dana Perimbangan (Transfer Pusat) untuk mendanai pelaksanaan pembangunannya. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu komponen pendapatan sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Saat ini hanya beberapa jenis Pendapatan Asli Daerah yang mampu menghasilkan pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pada tahun 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 18.713.301.103,41 dari total pendapatan sebesar Rp. 618.615.824.942,41 atau 3,03% dari total pendapatan. Nilai tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan rasio PAD terhadap total pendapatan di beberapa Kabupaten/kota.

Beberapa permasalahan dalam rangka meningkatkan nilai PAD di Kabupaten Mesuji baik dari sisi nilai maupun proporsi adalah:

- a. Penggalian dan pola penggalian yang kurang tepat terhadap Objek PAD
- b. Kurangnya sinergisitas dan koordinasi antara Perizinan dan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Belum mutakhirnya data objek dan wajib pajak daerah
- d. Penetapan Tarif yang belum disesuaikan dengan kondisi terkini

4. Rendahnya Tingkat Investasi

Tingkat investasi di Kabupaten Mesuji saat ini masih relatif rendah. Indikator dari tingkat investasi dapat dilihat dari data jumlah usaha baru dan nilai investasi 3 tahun terakhir. Nilai investasi cenderung melambat dan tumbuh tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2016 jumlah perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Mesuji mencapai 66 unit dari semua jenis usaha, sedangkan nilai investasi mencapai Rp.42.426.780.000,- rupiah.

Beberapa permasalahan terkait investasi adalah:

- a. Kurangnya promosi investasi kepada perusahaan luar Mesuji.
- b. Kurangnya akses permodalan dari perbankan kepada UMKM
- c. Kurangnya koordinasi dengan perusahaan mengenai nilai investasi yang ada di Mesuji.

Secara khusus terkait sub permasalahan terkait rendahnya akses permodalan, khususnya UMKM di Kabupaten Mesuji masih menjadi kendala besar dan sebaiknya dibahas secara khusus dan mendalam. Rendahnya akses permodalan bagi UMKM menjadi hambatan untuk menumbuhkan UMKM di Kabupaten Mesuji. Beberapa permasalahan yang diakibatkan tidak teraksesnya permodalan kepada UMKM antara lain suburnya praktek ijon dan tengkulak disektor pertanian. Petani dan UMKM di sektor pertanian dipaksa untuk menerima pinjaman dari para tengkulak dengan imbalan hasil panen harus dijual kepada tengkulak namun dengan harga yang rendah. Di sektor lain efek akibat tidak teraksesnya UMKM pada permodalan adalah kesulitan pengembangan usaha UMKM.

Berikut ini adalah beberapa penjabaran terkait permasalahan terkait sulitnya akses permodalan Perbankan bagi UMKM.

- a. Jaringan perbankan dan Lembaga Keuangan yang masih terbatas
- b. UMKM masih banyak yang tidak *bankable* terutama dari sisi agunan.
- c. Kuota Kredit Lunak bagi UMKM di Perbankan sangat kecil
- d. Sistem kredit yang tidak memihak bagi UMKM terutama di Sektor Pertanian
- e. Kurangnya pemahaman bagi UMKM tentang akses permodalan
- f. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM belum dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis.

5. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Di Kabupaten Mesuji sarana dan prasarana perdagangan yang layak masih minim jumlahnya. Selain perlu direvitalisasi, sarana perdagangan khusus dapat dikembangkan di Kabupaten Mesuji antara lain adalah Pasar Lelang dan Pasar Komoditas khusus. Peluang tersebut perlu dikaji secara detail mengingat dari sisi produksi Mesuji memiliki Mesuji sebagai sentra perkebunan kelapa sawit dan karet.

Sampai dengan Tahun 2017 Kabupaten Mesuji telah merehabilitasi dan merevitalisasi 6 Pasar Tradisional. Beberapa pasar tradisional di Kabupaten Mesuji telah dibangun dan direhabilitasi namun jika dibandingkan dengan desa, luas wilayah serta jumlah penduduk yang ada jumlah tersebut relatif sedikit.

Beberapa permasalahan terkait sarana dan prasarana perdagangan diantaranya adalah:

- a. Belum tersedianya pasar lelang khusus atau pasar komoditas khusus dalam rangka mempertemukan petani dan pembeli
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pasar Tradisional
- c. Belum optimalnya Pengelolaan Pasar Tradisional

6. Rendahnya Jumlah Produksi dan Nilai Tambah Sektor Perikanan

Jumlah Produksi Sektor perikanan semakin menurun dari tahun sebelumnya terutama di sub sektor Perikanan Tangkap. Sebagai daerah rawa dan dialiri sungai, dulunya Mesuji merupakan salah satu sentra penghasil ikan air tawar di Provinsi Lampung. Seiring dengan perkembangan zaman dan berubahnya kondisi dan fungsi lahan di Kabupaten Mesuji produksi pertanian menjadi turunan digantikan oleh komoditas lain khususnya komoditas pertanian dan perkebunan.

Beberapa permasalahan dalam rangka meningkatkan jumlah produksi dan nilai tambah sektor perikanan diantaranya adalah:

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam mengelola sektor perikanan
- b. Jumlah peralatan Budidaya yang sangat sedikit
- c. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok perikanan
- d. Mahalnya harga pakan dan bibit ikan mengakibatkan tidak ekonomisnya usaha di Bidang Perikanan
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian ekosistem perairan.

7. Rendahnya Produksi Peternakan

Rendahnya produk peternakan di Kabupaten Mesuji dapat dilihat dari rendahnya Sentra Peternakan Rakyat dan jumlah populasi ternak di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mesuji. Dengan luas wilayah yang memadai, serta kultur berkebun dan bertani yang kuat sudah seharusnya masyarakat Mesuji dapat mengoptimalkan sektor peternakan. Sampai dengan tahun 2016 jumlah populasi ternak sapi di Mesuji mencapai 10.109 ekor.

Masyarakat Mesuji yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dengan berkebun dan beternak mempunyai waktu lebih untuk melakukan aktivitas sehingga menjadi lebih produktif. Sebagai seorang pekebun karet hanya membutuhkan waktu antara 3 s/d 4 Jam untuk beraktivitas mengurus lahan kebunnya, sedangkan sisa waktu tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Aktivitas beternak menjadi salah satu pilihan logis, sehingga masyarakat Mesuji lebih produktif.

Berikut ini adalah beberapa permasalahan terkait rendahnya aktivitas peternakan di Kabupaten Mesuji.

- a. Kesulitan Permodalan dalam mengembangkan peternakan
- b. Rendahnya jumlah bibit ternak berkualitas
- c. Rendahnya kemampuan dalam memproduksi pakan mandiri
- d. Rendahnya kepedulian peternak terhadap tingkat Kesehatan Hewan ternaknya

8. Rendahnya Pengelolaan Kepariwisata.

Mesuji memiliki beberapa potensi objek wisata yang dapat dikembangkan baik wisata alam maupun Wisata Buatan. Beberapa Wisata Alam yang ada di Kabupaten Mesuji diantaranya adalah Bendungan dan Sungai yang ada di Kabupaten Mesuji. Selain objek wisata Alam, beberapa objek wisata buatan yang telah selesai di bangun dan akan dimaksimalkan oleh Pemerintah Daerah diantaranya adalah Objek Wisata Taman Kehati, Tugu Petani Mesuji, Alun-Alun Simpang Pematang dan lain sebagainya. Selain objek, *event* atau kegiatan budaya yang ada di Kabupaten Mesuji masih minim dan perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan pelaksanaan *event* budaya dan kesenian diharapkan minat masyarakat dalam berwisata khususnya dari luar Mesuji naik.

Beberapa kendala dalam rangka pengembangan pariwisata diantaranya adalah:

- a. Belum terjadwalnya pelaksanaan event budaya dan kesenian secara teratur;
- b. Pemanfaatan Potensi Wisata belum optimal
- c. Belum optimalnya pengelolaan objek wisata di Mesuji
- d. Kurangnya objek wisata yang mampu menarik wisatawan.

9. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Mesuji selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Mesuji tahun 2013 sebesar 6,18 persen, sementara pada tahun 2014, 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 5,69 persen, 5,23 persen dan 5,10 persen. Hal ini disebabkan karena menurunnya produksi dari setiap sektor pembentuk PDRB menurut lapangan usahanya. Terutama dari sektor yang paling dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan, terlebih lagi dari sektor jasa perusahaan yang mengalami penurunan yang sangat signifikan.

4.1.2. Bidang Infrastruktur

1. Jalan dan Jembatan

Jalan dan jembatan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam suatu wilayah karena merupakan penyambung urat nadi aktivitas antar kawasan dalam suatu wilayah. Seperti diketahui bahwa jalan dan jembatan selalu menjadi focus prioritas dalam pembangunan baik dalam skala regional maupun nasional. Proporsi jalan dan jembatan di Kabupaten Mesuji kondisinya sangat memperhatikan baik yang merupakan kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat. Jalan di Kabupaten Mesuji masih banyak berupa tanah liat dan bebatuan sehingga menghambat aktivitas di berbagai aspek wilayah. Setiap tahun Kabupaten Mesuji juga menganggarkan sector infrastruktur jalan yang cukup besar agar kondisi jalan dan jembatan semakin baik. Selain peningkatan kualitas jalan, Mesuji juga giat melakukan pembukaan jalan baru untuk alternative ketika jalan utama sedang tidak bisa dilalui. Pada tahun 2016 ini perbaikan jalan provinsi yang terletak di Kecamatan Simpang Pematang juga dilakukan sepanjang sepuluh kilometer. Setiap tahun provinsi menganggarkan kurang lebih 10 M untuk 10 km.

Pemerintah Kabupaten Mesuji seharusnya perlu membuat peraturan jenis jalan dan kapasitas muatan jala dan jembatan agar bisa mencegah kerusakan jalan yang lebih cepat karena muatan tonase yang berlebih dari kendaraan yang melintas di jalan dan jembatan tersebut. Mengingat Kabupaten Mesuji kendaraan yang melintas sebagian besar dilewati oleh truk bermuatan hasil produksi pertanian yang memiliki muatan yang cukup besar. Apabila tidak diatur jenis jalan dan kendaraan yang harus dilewati, tentunya akan merugikan pemerintah daerah dan masyarakat itu sendiri. Dari factor penganggaran yang akan membengkak disebabkan oleh pemeliharaan jalan yang tinggi dan keamanan masyarakat dalam menggunakan jalan dan jembatan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mesuji hendaknya segera melakukan tindakan-tindakan yang dapat memacu pendapatan asli daerah dengan menggeliatkan potensi wilayah guna percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini mengingat kemampuan belanja daerah yang kecil yang tidak sebanding dengan jumlah dan jembatan yang harus diperbaiki.

Isu strategis nasional yang cukup menguntungkan bagi Kabupaten Mesuji adalah pembangunan jalan tol MBBPT yang merupakan penghubung jalan antar dua provinsi yaitu Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Mesuji sebaiknya disinergikan dan diprioritaskan dengan potensi-potensi wilayah dan bersifat darurat sehingga fungsi jalan yang diharapkan sesuai dan tepat sasaran. Selain dapat memudahkan aksesibilitas dan pergerakan aktivitas juga mampu menggeliatkan perekonomian wilayah Kabupaten Mesuji. Dalam perda RTRW Kabupaten Mesuji pun perlu dilakukan revisi dalam pengkategorian jenis jalan. Pengkategorian ini mengingat adanya perubahan perkembangan wilayah yang dinamis dan kemampuan dari daerah itu sendiri seperti jalan Blambangan Umpu yang menghubungkan Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Way Kanan, yang semula merupakan jalan Kabupaten sedangkan sekarang masih dalam proses tahapan perubahan status jalan.

Dalam proses tahapan pembangunan jalan pun perlu diperhatikan terutama dari struktur dan bahan yang digunakan. Secara keseluruhan proses pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji masih dirasakan kurang tepat baik dalam hal perencanaan maupun penganggaran kualitas dan kuantitasnya. Selama ini pembangunan jalan di Kabupaten Mesuji masih menggunakan bahan dan struktur yang tidak digunakan sebagaimana standar dalam sebuah jalan. Standardisasi diperlukan agar kualitas dan kondisi jalan yang bagus bertahan cukup lama dan memperkecil biaya pemeliharaan jalan guna optimalisasi dan penghematan anggaran.

Pembangunan jembatan penghubung di Kabupaten Mesuji sedikit terabaikan seharusnya terutama daerah yang terletak di kawasan sepanjang sungai untuk memudahkan aktivitas antar kawasan. Jembatan di Kabupaten Mesuji masih banyak yang menggunakan kayu sehingga kualitas dan keamanan dalam penggunaannya sedikit membahayakan bagi penggunanya terutama pada saat musim hujan.

Selain itu dinas yang terkait langsung dengan pekerjaan umum tidak menerbitkan dokumen laporan secara sah yang akuntabel dan transparan mengenai progress pembangunan fisik sehingga sering terjadi *miscommunication*. Selain dokumen laporan progress fisik, Kabupaten Mesuji belum mempunyai dokumen Rencana Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang seharusnya ada di setiap Kabupaten. Pengembangan infrastruktur pun dilakukan berdasarkan kepentingan politik yang mengakibatkan pembangunan infrastruktur tidak berdasarkan prioritas dan urgensi wilayah.

Adapun upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi isu-isu strategis yaitu:

- (1) Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah,
- (2) Penyusunan Laporan Triwulan Progres Pembangunan Fisik dan Wilayah,
- (3) Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi yang Rutin antar SKPD terkait dan masyarakat agar tercipta pembangunan yang efektif dan efisien,
- (4) Pembangunan Fisik yang berdasarkan bahan yang disesuaikan dengan SNI bukan berdasarkan pengembangan inovasi yang tidak berdasarkan kepada penelitian ilmiah yang mempertimbangkan dampak resiko.

2. Drainase dan Irigasi

Selain jalan, kondisi drainase dan irigasi cukup memprihatinkan. Kondisi akan diperparah terutama pada musim hujan. Masih banyaknya terdapat genangan di sepanjang jalan mengindikasikan fungsi dan jumlah saluran drainase dan irigasi Kabupaten Mesuji masih kurang dan tidak berjalan optimal. Partisipasi masyarakat pun tidak dilibatkan dalam pembangunan kedua saluran tersebut dalam hal pemeliharaan.

Padahal jika terjadi pelibatan partisipasi masyarakat setidaknya beban dari pemerintah daerah dapat berkurang.

3. Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjiwa diri, mandiri, dan produktif. Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Program Bedah Rumah sebagai salah satu program unggulan dari Kabupaten Mesuji yang berjalan sejak tahun 2012, baik yang dibiayai oleh APBD dan APBN cukup dirasakan manfaatnya bagi penduduk Kabupaten Mesuji. Program Bedah Rumah ini merupakan kerjasama dalam bentuk komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penduduk Kabupaten Mesuji. Program ini tidak seutuhnya bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pusat, namun juga penduduknya berpartisipasi dalam pembangunan rumah tersebut yaitu berupa tabungan dari penduduk tersebut dan tenaga kerja.

Selama 4 tahun berjalan, program ini mendapat apresiasi dan dukungan yang cukup baik dari stakeholders, namun sayangnya program bedah rumah ini tidak diiringi dengan penataan lingkungan permukiman sekitar rumah tersebut. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahan bangunan di perumahan belum sesuai dengan SNI. Bahan bangunan tersebut dapat membahayakan penghuninya. Kemudian program Rusunawa bagi PNS dan Pondok Pesantren menjadi program unggulan bagi Kabupaten Mesuji yang sedang dikerjakan. Pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Mesuji menyediakan lahan seluas 5 Ha. Program Rusunawa ini diharapkan dapat meringankan beban bagi pegawai dan pelajar yang mengabdikan di Kabupaten Mesuji, mengingat biaya sewa kontrak rumah cukup mahal. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Mesuji juga cukup konsisten terhadap perkembangan pembangunan rumah ibadah dengan selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah, terutama rumah ibadah yang sudah tidak layak dan membutuhkan renovasi. Untuk jumlah rumah ibadah di Kabupaten Mesuji tergolong rendah, hal ini terlihat dari masih rendahnya rasio rumah ibadah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Mesuji.

Isu-isu strategis yang cukup menjadi perhatian yaitu Pemerintah Kabupaten Mesuji belum mampu menyediakan Kawasan Siap Bangun dan Lahan Siap Bangun untuk bisa dibangun fasum dan fasos untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah yang dapat diambil dalam menghadapi isu strategis tersebut yaitu:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkala dalam proses pelaksanaan program bedah rumah, agar dapat diketahui permasalahan yang terjadi sehingga dihasilkan solusi pemecahan permasalahan tersebut;
- b. Pemerintah Kabupaten Mesuji lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan pembangunan yang menguntungkan kedua belah pihak.

4. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dalam konteks perhubungan terutama pemenuhan aksesibilitas transportasi, pemenuhan sarana komunikasi dan informasi menjadi isu strategis kabupaten mesuji, dimana masalah yang dihadapi antara lain :

- a. Sarana dan Prasarana teknologi informasi belum memadai
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi terbatas

- c. Pelayanan informasi masyarakat masih terbatas
- d. Kondisi jaringan listrik yang belum stabil di Kabupaten Mesuji mempengaruhi perkembangan komunikasi dan informatika
- e. Pemerintah daerah belum mampu menyediakan transportasi massal yang terjangkau dan layak bagi penduduk yang memudahkan mobilitas.
- f. Pemerintah daerah belum mempersiapkan regulasi tegas mengenai sarana dan prasarana yang sudah ada di Kabupaten Mesuji guna memperkecil tingkat pelanggaran lalu lintas dan kerusakan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Mesuji
- g. Masih banyaknya pungutan liar di jembatan timbang terutama bagi pengguna truk dan alat-alat berat yang melintas di Kabupaten Mesuji

5. Rendahnya Rasio Elektrifikasi

Sampai dengan Tahun 2016 *elektrifikasi ratio* di Kabupaten Mesuji hanya mencapai 65% dari total 105 Desa yang ada di Kabupaten Mesuji. jika dilihat dari jumlah Kepala Keluarga, dari 94.619 Kepala Keluarga, hanya sekitar 64.193 yang teraliri listrik PLN atau sebanyak 68%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Mesuji masih defisit Listrik. Penyebab rendahnya elektrifikasi ratio diantaranya adalah belum adanya jaringan PLN di seluruh desa di Kabupaten Mesuji, kurangnya daya listrik di Kabupaten Mesuji dan Lampung pada umumnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan Rasio elektrifikasi diantaranya adalah :

- a. Kabupaten Mesuji belum memiliki gardu induk yang menyebabkan kondisi listrik belum stabil yang seringkali menghambat berjalannya aktivitas
- b. Belum adanya Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Mesuji.
- c. Rendahnya Pemanfaatan Energi terbarukan di Kabupaten Mesuji
- d. Masih banyak wilayah di Kabupaten Mesuji yang belum dialiri oleh jaringan listrik.
- e. Pemanfaatan sumber daya alam sebagai energy alternative belum dikembangkan
- f. Penyelenggaraan jaringan listrik belum melibatkan partisipasi masyarakat sepenuhnya.
- g. Minimnya sumber daya manusia di Kabupaten Mesuji yang memahami potensi dan pengelolaan energy dan sumber daya mineral daerah.
- h. Pemerintah daerah belum terlalu *open minded* mengenai kerja sama dengan pihak luar terkait pengelolaan potensi energy dan sumber daya mineral

4.1.3. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1. Pengelolaan Limbah, Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Pengelolaan Limbah, baik limbah masyarakat maupun limbah industri dan Isu kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam telah menjadi topik yang berkembang. Isu ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan dan Sumber Daya Alam merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara normal. Hal itu juga telah memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan. Masalah yang dihadapi terkait pengelolaan limbah, konservasi lingkungan dan sumber daya alam adalah :

- a. Regulasi pengelolaan limbah belum tersedia
- b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) masih kurang, sehingga penduduk di Kabupaten Mesuji masih menggunakan metode bakar sampah di lapangan.
- c. Keterbatasan armada pengangkut sampah
- d. Masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah menggunakan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) masih rendah
- e. Cakupan pelayanan sampah, baik distribusi dan pengelolaan masih belum terkelola dengan baik.
- f. Kebiasaan masyarakat untuk membuang tinja di sungai masih tinggi
- g. Penduduk Kabupaten Mesuji masih banyak yang belum memiliki jamban sendiri
- h. Industri pabrik dan industri rumah tangga masih belum memiliki IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Terpadu sehingga masih banyak yang dibuang di selokan-selokan maupun kali yang mengotori lingkungan dan terseumbatnya saluran drainase.
- i. Belum optimalnya pengoperasian Instalasi pengelolaan limbah terpadu (IPLT)
- j. Dokumen yang berisi tentang kajian lingkungan hidup belum lengkap baik secara umum maupun detail.
- k. Sumber daya manusia yang memahami kajian lingkungan hidup di Kabupaten Mesuji masih sangat minim, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut.
- l. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih rendah
- m. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hidup bersih dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan sehingga berdampak kepada kesadaran masyarakat Kabupaten Mesuji sangat kurang.
- n. Sebagai daerah yang cukup gersang dan panas, keberadaan pepohonan hijau dan ruang terbuka hijau masih sangat kurang. RTH selain sebagai peneduh lingkungan dapat berfungsi sebagai estetika kawasan dan pencegah bencana alam.
- o. Sarana dan prasarana yang mendukung kajian lingkungan hidup yang bersifat ilmiah masih sangat kurang, seperti laboratorium kualitas udara, kualitas air, dsb.
- p. Minimnya anggaran setiap tahun yang dianggarkan pemerintah daerah di sector lingkungan hidup yang mengindikasikan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah.
- q. Masih banyaknya aktivitas atau kegiatan penduduk yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan belum memiliki UKL-UPL dan Amdal.
- r. Global warming sebagai isu strategis nasional nampaknya belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah daerah seperti pembangunan gedung bangunan yang belum menggunakan bahan-bahan yang bersifat ramah lingkungan.
- s. Pemerintah daerah belum menjadikan sector lingkungan hidup sebagai salah satu sector yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pendaur ulang sampah masyarakat dengan melibatkan pemuda dan ibu-ibu rumah tangga, perbanyak rth seperti pembangunan taman rakyat yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak swasta.
- t. Permasalahan Hutan Register 45 dan Agraria yang belum terselesaikan.

2. Sarana Penyediaan Air Minum dan Air Bersih

Krisis air bersih menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat Setiap mahluk hidup membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Cakupan pelayanan air bersih perpipaan masih rendah
- b. Ketersediaan sumber air baku sangat terbatas
- c. Belum memiliki system pengolahan air bersih skala kota
- d. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan air minum masih rendah
- e. Kondisi air bersih di Kabupaten Mesuji cukup memperhatikan, terlihat dari hasil pemeriksaan BOD dan COD terhadap kualitas air.
- f. Penduduk Kabupaten Mesuji masih banyak yang belum memiliki sumur sendiri untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya.

3. Pengendalian Pertambangan Mineral bukan Logam, Batuan dan Air Tanah

Kabupaten Mesuji merupakan salah satu wilayah di provinsi lampung yang memiliki potensi bahan tambang pasir. Masalah yang dihadapi antara lain :

- a. Masih banyak penambangan penggalian hasil bumi di Kabupaten Mesuji yang belum memiliki izin.
- b. Reklamasi pasca penggalian dan pertambangan tidak dilakukan.
- c. Terjadi kerusakan lingkungan yang membahayakan ketersediaan air bagi masyarakat.

4. Pengembangan Energi Terbarukan

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang, sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari karbon. Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan bahan bakar.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon secara efisien dan murah. Meskipun Kabupaten Mesuji menyediakan bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan bio fuel di Kabupaten Mesuji.

5. Antisipasi dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Mesuji secara geografis berada pada daerah aliran sungai sehingga rawan bencana alam terutama banjir, sehingga isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Mesuji untuk mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh, komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan penyediaan semua peralatan, fasilitas, serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM dalam penanganan bencana. Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit HIV/AIDS dan Flu Burung.

Masalah yang di hadapi antara lain :

- a. Belum adanya metadata geospasial mengenai daerah mitigasi bencana sehingga tindakan antisipasi dan pencegahan di wilayah mitigasi tidak berjalan optimal.
- b. Masih sedikitnya sosialisasi mengenai penanggulangan bencana baik pra maupun pasca bencana.
- c. Selain bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh keteldoran manusia seperti standardisasi bangunan untuk keamanan penghuninya belum terlalu diperhatikan. Misalnya bangunan gedung kantor yang belum memiliki alat pengaman kebakaran.
- d. Masih minimnya pelatihan dan sertifikasi terhadap petugas pemadam kebakaran.
- e. Masih sedikit jumlah posko penanggulangan bencana yang seharusnya diletakkan di setiap kecamatan.
- f. Minimnya anggaran pemerintah daerah dalam perencanaan sarana dan prasarana untuk mengatasi bencana di Kabupaten Mesuji.
- g. Keterbatasan sumber air baku sebagai prasarana utama dalam mengatasi bencana kekeringan dan kebakaran.

4.1.4. Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

1. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin dan Pengendalian Jumlah Penduduk

Penduduk miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di wilayah Desa Tertinggal (DT). Berdasarkan Indeks Kemajuan Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 380 desa. Dari 105 desa di Kabupaten mesuji, 31 desa merupakan desa tertinggal. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder merupakan kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini.

Kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan side effect dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. Side

effect tersebut antara lain berupa gangguan keamanan, peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka drop out sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah yang mengikuti, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis. Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek stake holder yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, sehingga semua persoalan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Jumlah Penduduk Kabupaten Mesuji sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan data BPS Kabupaten Mesuji adalah berjumlah 195.682 jiwa, meningkat dari tahun 2014 sebesar 194,282 jiwa. Dengan persentase paling banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 102,417 jiwa.

Dilihat dari (%) tingkat kemiskinan pada tahun 2014, Kabupaten Mesuji termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Lampung yaitu sebesar 6,57%. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 14,21% dan tingkat kemiskinan secara nasional sebesar 10,96%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji berada dibawah tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Lampung.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji dari tahun 2010 – 2014, secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji sebesar 8,65%, mengalami penurunan sampai sebesar 5,81% pada tahun 2013, namun mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 6,57%. Dengan demikian, analisis efektivitas tingkat kemiskinan Kabupaten Mesuji pun capaiannya membaik dari tahun 2010 sampai tahun 2014 yang ditunjukan dengan trend yang menurun, hal ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dinilai efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mesuji dan harus terus di tingkatkan untuk tahun tahun berikutnya.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mesuji pada tahun 2014 sebanyak 12.800 jiwa, yang merupakan jumlah penduduk miskin paling sedikit Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu sebanyak 170.700 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mesuji pada periode tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 16.228 Jiwa mengalami penurunan hingga menjadi 11.200 jiwa atau menurun sekitar 44,89%. Namun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin ini pada tahun 2014 hingga berjumlah 12.800 jiwa atau meningkat 14,29% dari tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mesuji berdasarkan sensus tahun 2015 sekitar 0,80% berada di bawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung yang mencapai 1,24%.

Yang perlu dijaga dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mesuji adalah pada kelahiran (alami) dan penduduk pendatang yang tidak jarang memunculkan persoalan sosial bila tidak ditangani segera dan diselesaikan.

2. Sistem pencatatan kependudukan yang belum optimal

Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih perlu ditingkatkan. Validitas data penduduk masih rendah. Validitas data bisa disebabkan oleh faktor penduduk dan faktor aparat. Penduduk sering mengabaikan isian data pada formulir pengurusan data kependudukan, sehingga data tidak lengkap atau data janggal. Sementara itu, aparat pengelola layanan pengurusan kependudukan juga kurang tegas memeriksa validitas data. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang. Hal ini ditunjukkan rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte pernikahan, akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian) belum mencapai 100%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Validitas data penduduk masih rendah;
- b. Belum optimalnya Sistem administrasi kependudukan;
- c. Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- d. Belum optimalnya SDM yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa;
- e. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;

3. Pertumbuhan penduduk yang cepat

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah;
- b. Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
- c. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- d. Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;

4. Rendahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumber daya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Belum optimalnya peran Kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender dan anak;
- b. Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- c. Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang.
- d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak.
- e. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;

5. Masih kurangnya perhatian terhadap pemuda dan Olah Raga

Potensi peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Mesuji. Permasalahan yang dihadapi :

- a. Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
- b. Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, dan Seks Bebas masih cukup tinggi;
- c. Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi;
- d. Minat berwirausaha di kalangan pemuda masih rendah;
- e. Pembinaan olah raga belum optimal;
- f. Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.
- g. Belum optimalnya peran kelembagaan pemuda.

6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM Kabupaten Mesuji berdasar kan data BPS tahun 2015 sebesar 59,79 meningkat dari tahun 2014 (58,71), walaupun demikian IPM Mesuji masih jauh dibawah rata rata IPM Provinsi Lampung yang menurut data BPS sebesar 66,95 dan rata rata IPM Indonesia sebesar 69,55. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji menduduki peringkat terakhir dari 15 Kabupaten/ Kota se Provinsi Lampung. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dalam tiga aspek yang membentuk IPM yaitu Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pengeluaran per kapita. Dalam meningkatkan indeks Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu melakukan upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan baik, mutu pendidik maupun sarana dan prasarana yang berkualitas lagi memadai. Dalam upaya peningkatan indeks kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu melakukan peningkatan pelayanan dibidang kesehatan dan yang paling utama adalah tindakan preventif melalui kegiatan-kegiatan Promosi kesehatan ke sekolah

maupun ke desa. Selain itu dengan sudah berjalannya Rumah Sakit Umum Daerah, diharapkan mampu melakukan pelayanan kesehatan dengan baik dengan didukung pemenuhan tenaga medis dan sarana maupun prasarana kesehatan yang berkualitas dan memadai. Sementara untuk meningkatkan indeks pengeluaran, diperlukan kerjasama lintas sektor yang baik antara Perindustrian dan perdagangan serta instansi di Lingkup Pertanian dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri maupun pertanian.

7. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian Isu peningkatan SDM melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah

1. sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata.
2. Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik masih kurang.
3. Angka Putus sekolah yang terbilang cukup tinggi

8. Belum optimalnya peran perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- b. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;
- c. Minat baca masyarakat masih rendah;

9. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin, jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh pelosok dan daerah terpencil, perilaku masyarakat terhadap kebiasaan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) masih cukup tinggi, keikutsertaan BPJS Mandiri masih rendah. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan di masyarakat, Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu, adanya tenaga kesehatan Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan, ataupun peningkatan operasionalisasi Puskesmas Keliling; selain itu perlu ditingkatkan ketersediaan jamban sehat permanen dengan program STBM (sanitasi Total Berbasis Masyarakat); serta peningkatan program promosi kesehatan.

10. Pemberdayaan masyarakat desa

Dengan adanya Undang-Undang tentang Desa dan adanya alokasi pembangunan dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa yang peruntukannya untuk pembangunan Desa, maka hal ini menyebabkan dibutuhkan percepatan-percepatan peningkatan kualitas aparatur di setiap desa itu sendiri. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat yang masiv sangat dibutuhkan guna menyikapi hal tersebut. Dengan peningkatan kualitas aparatur desa, maka proses pemberdayaan masyarakat desa akan berjalan lebih mudah dan sesuai dengan rencana pembangunan yang diinginkan.

4.1.5. Bidang Pemerintahan dan Hukum

1. Permasalahan Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah dan pelayanan Dasar.

Prinsip prinsip pemerintahan yang baik telah di atur oleh Undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah adalah :

- Pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Belum terpenuhinya ketersediaan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan publik
- Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja
- Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan
- Sistem inovasi daerah yang belum optimal pengembanganya.
- Landasan hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang belum memadai.
- Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi yang cenderung tidak menyentuh masalah atau menyelesaikan masalah.

Hasil yang di harapkan dari penyelesaian permasalahan permasalahan tersebut diatas adalah terbangunnya birokrasi pemerintahan yang, baik, bersih dan dipercaya dengan mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakatnya, hubungan yang baik dengan legislatif daerah (DPRD) dan *stakeholder* untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

2. Penyusunan, Implementasi dan Penegakan Regulasi Daerah.

Supremasi hukum perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Mesuji, karena dengan hukum akan menciptakan ketertiban sosial dan menjami keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan hukum melalui penerbitan peraturan daerah dan regulasi (kebijakan) yang mengayomi dan menjamin jalannya pemerintahan dengan baik. Serta mampu meningkatkan kesadaran hukum, hak dan kewajiban antara masyarakat dengan pemerintah (daerah). Produktivitas kajian peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan atau kebutuhan / tuntutan masyarakat perlu ditingkatkan.

Lebih luas lagi, kepastian hukum bukan hanya memberikan jaminan ketertiban sosial, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum kepada siapapun yang berada dalam wilayah Kabupaten Mesuji untuk bisa berusaha dengan aman dan nyaman. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Penegakan Perda belum optimal
- b. Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan belum optimal
- c. Sarana dan Prasarana keamanan dan ketertiban dalam penegakan hukum belum memadai.
- d. Penegakan regulasi pemerintah untuk kasus – kasus sengketa lahan dan peruntukan lahan masih banyak menimbulkan persoalan.
- e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih kurang.

3. Kinerja Pengelola Keuangan Daerah

Masalah pendataan data dasar (*based data*) obyek dan subyek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah yang belum optimal, termasuk ketertiban daftarpembayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Efektifitas dan efisiensi belanja daerah perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat. Publikasi informasi keuangan daerah kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, harus dilakukan oleh semua SKPD sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Ketertiban administrasi asset daerahperlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

4. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah, misalnya proporsi penempatan pegawai di kecamatan yang disesuaikan dengan luaswilayah. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastianhukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi,netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dankesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

5. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Keterbukaan informasi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat menjadi suatu yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Permasalahan yang di hadapi adalah :

- a. Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal.

- b. Transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPD menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data.
- c. Dokumen rencana kerja dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
- d. Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal.
- e. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengan pendapat public (*public hearing*) yang diadakan oleh DPRD dalam pembahasan Perda non APBD dan RAPBD masih perlu ditingkatkan.

6. Kerjasama Internal Penyelenggara Pemerintahan dan DPRD

Kerjasama antara SKPD masih perlu dioptimalkan. Sinergi program dan kegiatan lintas sektor, termasuk sinergitas administrasi data dan pemanfaatan data untuk perencanaan dan evaluasi program/kegiatan. Kerjasama dengan DPRD pada ranah legislasi, pengawasan dan penganggaran perlu dioptimalkan sehingga fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis kinerja dapat lebih akuntabel.

4.1.6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

1. Penataan Ruang

Ada beberapa isu strategis tata ruang di Kabupaten Mesuji yang secara tidak langsung mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Mesuji secara agregat. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- a. Produk hukum mengenai rencana tata ruang yang lebih operasional baik berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Rinci Kawasan Strategis serta perangkat pengendalian pemanfaatan ruang berupa Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dan standar-standar teknis lainnya belum tersedia; Produk produk hukum menjadi hal yang sangat krusial dalam arahan pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji baik pengembangan wilayah secara nasional maupun regional. Hal ini terlihat dari seperti pengembangan kawasan Merak-Bakauheni-Bandarlampung-Palembang-Tanjung Api-Api (MBBPT) yang salah satu kawasan pengembangannya melewati Kabupaten Mesuji. Selain itu, substansi dalam RTRW Kabupaten Mesuji tahun 2009-2021 masih perlu banyak mengalami revisi karena belum memenuhi standarisasi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2013 tentang Standarisasi peraturan tata ruang sehingga banyak pembangunan-pembangunan di Kabupaten Mesuji yang belum tercantum di dalam RTRW Kabupaten Mesuji seperti peraturan zonasi, pengawasan dan pengendalian tata ruang, dan sebagainya.
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap penataan ruang diantara stakeholder pembangunan. Dampak dari kurangnya sosialisasi tersebut diindikasikan dengan masih kurangnya kesadaran dalam mengurus perizinan sebelum pelaksanaan pembangunan serta kebingungan-kebingungan masyarakat awam dalam pemahaman tata ruang dalam pembangunan. Kurangnya sosialisasi ini disebabkan keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah dan terbatasnya kemampuan baik dari kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Mesuji;

- c. Strategi dalam pengembangan kawasan yang tercantum di RTRW Kabupaten Mesuji tahun 2009-2021 masih dirasakan belum tepat sasaran dan belum memacu potensi wilayah dan sumber daya manusia Kabupaten Mesuji. Strategi tersebut hendaknya mampu menarik investor dari luar untuk menanamkan investasi Kabupaten Mesuji dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Mesuji yang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk mekanisme perizinan dan pelaksanaannya belum optimal. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi permasalahan yang kerap kali terjadi di Kabupaten Mesuji. Pengendalian pemanfaatan ruang ini disebabkan tidak adanya ketegasan dalam penerapan insentif dan disinsentif sebagai bentuk dari pengawasan dan pengendalian itu sendiri. Selain itu ketidaktegasan ini terjadi karena substansi mengenai insentif dan disinsentif tidak tercantum secara detail di dalam peraturan daerah tata ruang Kabupaten Mesuji dan tidak adanya petugas yang dibentuk dari pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian tata ruang. Pengawasan dan pengendalian yang kurang mengakibatkan banyaknya penyimpangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mesuji. Sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ada sekitar delapan tindakan penyimpangan tata ruang yang cenderung diabaikan mengingat rendahnya penegakan hukum penataan ruang di Kabupaten Mesuji.
- e. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penataan ruang dimana penataan ruang suatu kawasan tidak dapat dipungkiri membutuhkan anggaran yang besar. Anggaran yang besar inilah yang menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan anggaran terbatas untuk dapat menegakkan peraturan penataan ruang secara tegas. Baik peraturan hukum penataan ruang secara rinci maupun detail. Selain itu kurangnya pemahaman yang mendalam bagi pemerintah daerah mengenai tata ruang sangat sedikit sehingga pemerintah daerah masih sangat terlalu fokus dalam pengembangan pembangunan infrastruktur, sedangkan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur sebenarnya berbasis kepada tata ruang wilayah. Pemerintah pusat pun bagi pemerintah daerah masih dirasakan kurang memberikan dukungan baik secara moril dan materiil kepada pemerintah daerah. Kurangnya dukungan tersebut terbukti dari tidak adanya bantuan dalam segi anggaran untuk membantu permasalahan penataan ruang di daerah.
- f. Pengaktifan kelembagaan BKPRD sebagai lembaga adhoc dalam rangka koordinasi antar SKPD terkait sebagai bentuk pengoptimalan kinerja pelaksanaan tata ruang kabupaten. BKPRD di Kabupaten Mesuji dalam perjalanannya tidak begitu aktif dalam pelaksanaan. Tidak pernah adanya sosialisasi dan rapat dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengendalian tata ruang menjadi salah satu indikasi tidak berjalannya BKPRD Kabupaten Mesuji.
- g. Kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi pegawai yang terlibat langsung di dalam tata ruang serta pelibatan partisipasi masyarakat sebagai kader tata ruang Kabupaten di dalam setiap kecamatan. Hal ini membuat respons dan pemahaman stakeholders terkait memandang

tata ruang menjadi urusan yang terabaikan dalam perkembangan wilayah.

- h. Urusan tata ruang tidak lepas dari data geospasial. Minimnya ketersediaan data dan SKPD yang mengurus tentang geospasial tidak ada. Mahalnya data geospasial dan minimnya sumber daya manusia yang memahami data geospasial secara komprehensif menjadi penyebab ketidaktersediaan data spasial secara akurat dan lengkap mengenai wilayah Kabupaten Mesuji. Data geospasial ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan baik perencanaan fisik maupun non fisik dalam hal peninjauan lokasi dan persebaran program dan kegiatan yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi isu-isu strategis tata ruang yang berkembang di Kabupaten Mesuji yaitu:

- a. Penganggaran yang rutin setiap tahun untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Tata Ruang baik dokumen umum maupun rinci sebagai arahan dasar perkembangan wilayah,
- b. Pelatihan dan Sosialisasi yang rutin yang melibatkan partisipasi masyarakat mengenai tata ruang dalam rangka peningkatan kinerja optimalisasi penataan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang,
- c. Pengaktifan kembali kelembagaan BKPRD sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian tata ruang, baik yang menangani permasalahan di lapangan maupun data yang bersifat numeric dan geospasial.

2. Pengembangan Wilayah Strategis

Kawasan strategik wilayah kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategik kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategik kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategik.

Penetapan kawasan strategik harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek strategik masing-masing kabupaten. Kawasan strategik yang ada di kabupaten memiliki peluang sebagai kawasan strategik nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategik kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan strategik dapat ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Mesuji terdapat kebijakan tentang Kawasan Andalan Provinsi, yaitu Kawasan Andalan Mesuji yang diarahkan sebagai kota pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti Pertanian, Perkebunan, Agro Industri, dan Peternakan.

Dalam konteks kawasan ekonomi strategis (khusus) Mesuji, Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Lampung menetapkan bahwa di Mesuji terdapat kawasan strategis, yaitu :

1. Kawasan niaga terpadu berbasis potensi lokal dengan manajemen agribisnis dikembangkan di sekitar kawasan agropolitan pertama di

- Lampung, yaitu di Kawasan Transmigrasi Mandiri atau Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kabupaten Mesuji yaitu diwilayah Tanjung Mas Makmur sampai Tanjung Mas Mulya Kecamatan Mesuji Timur.
2. Kawasan Minapolitan Rawajitu Utara, pada kawasan ini terdapat kawasan dengan kegiatan perikanan/minapolitan, sebagai pusat perdagangan serta terdapat dermaga.
 3. Kawasan Wiralaga Kota Tepian Sungai (Riverside City); pada kawasan ini sudah terdapat perkebunan sawit modern, dermaga dan diarahkan sebagai kota tepian sungai.
 4. Kawasan Argopolitan Kabupaten Mesuji, dimana berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan :
 - a. Kecamatan Mesuji meliputi desa sidomulyo, desa sungai badak, Wilaralaga II, tirtalaga, Tanjung Serayan, Mulya sari, Sumber Makmur, Sukamaju, Wiralaga Mulya, Nipah Kuning dan desa Wiralaga I.
 - b. Kecamatan Mesuji Timur meliputi Desa Eka Mulya, Tanjung Mas Jaya, Tanjung Mas Mulya, Pangkal mas mulya, muara mas, muara asri, Dwi Karya Mustika, Wonosari, Sungai cambai, Pangkal mas jaya, pangkal mas, Tanjung mas makmur, tanjung mas rejo, tebing karya mandiri, talang batu, margo jadi, margo jaya dan desa margo mulyo.
 - c. Kecamatan Rawajitu Utara meliputi desa Bandar Anom, Desa panggung Jaya, Telogo rejo, panggung rejo, Suangai buaya, way puji, kurnia agung, sidang iso mukti, Sidang iso Rahayu, Sungai sidang, sidang makmur, dan desa sidang muara jaya.
 5. Rencana Pengembangan Kawasan Pedesaan (RPPK), yang di tetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dimana ditetapkan:
 - a. Kawasan Perkotaan Baru (KPB)
 - Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji
 - Desa Sidomulyo Kec. Mesuji
 - Desa Sungai Badak Kec. Mesuji
 - b. Kawasan Argopolitan
 - Desa Tanjung Menang Kec. Mesuji Timur
 - Desa Talang Batu Kec. Mesuji Timur
 - Desa Margo Jadi Kec. Mesuji Timur
 - Desa Margo Jaya Kec. Mesuji Timur
 - Desa Tebing Karya Mandiri Kec. Mesuji Timur
 - Desa Dwi Karya Mustika Kec. Mesuji Timur
 - Desa Tanjung Menang Raya Kec. Mesuji Timur
 - Desa Margo Mulyo Kec. Mesuji Timur
 - Desa Eka Mulya Kec. Mesuji Timur
 6. Rencana Kawasan Industri Mesuji di Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Rawa Jitu Utara.
 7. Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kecamatan Rawajitu

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. ISU STRATEGIS NASIONAL

Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tidak terlepas dari Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. Pemerintah Indonesia di dalam melaksanakan roda pemerintahan memiliki visi (2015-2019)

**Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkeribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.**

Visi tersebut kemudian diterjemahkan kedalam 7 misi dan 9 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 7 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Bangsa berdaya saing;
6. Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan 9 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sebagai upaya mempercepat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mensinergisitkan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung ketercapaian visi tersebut. Adapun Permasalahan permasalahan yang dihadapi di tingkat nasional, dan merupakan isu strategis tingkat nasional yang berdampak pada Kabupaten Mesuji adalah sebagai berikut.

A. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain:

- a. Ketersediaan data untuk mendukung *evidencebasedplanning* yang belum didukung sistem informasi yang kuat;
- b. kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal;
- c. Sikronisasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah;
- d. Tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

B. Pendidikan

Ada tiga isu strategis bidang pendidikan di Indonesia. Masing-masing yaitu kualitas guru, sekolah yang tidak ramah anak dan deskriminasi terhadap kelompok marginal.

- a. Kualitas guru rendah disebabkan oleh rasio ketersediaan guru, khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
- b. Lingkungan sekolah di Indonesia belum ramah anak. Hal ini terlihat dari masih maraknya kekerasan di sekolah, baik fisik maupun bukan fisik. Setidaknya ada enam tipe kekerasan utama yang terus terulang di lingkungan sekolah, yaitu penganiayaan guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, sesama siswa wali murid kepada guru, pelecehan seksual dan tawuran antar sekolah.
- c. Akses pendidikan bagi kelompok marginal masih rendah. Kelompok marginal yang masuk kategori ini adalah perempuan, anak di penjara, kelompok difabel, anak keluarga miskin dan para pengungsi.

C. Kebudayaan

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri;
- (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan;
- (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial;
- (v) menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan antara lain:

- (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia diluar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas;
- (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa;
- (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada event budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun internasional belum optimal.

D. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

E. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi

203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah.

Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat. Kondisi ini berdampak pada timbulnya:

- (1) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar;
- (2) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung;
- (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

F. Peningkatan Pariwisata

Dalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini, yaitu:

- a. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman (*International Tourists Arrivals*), yang selalu meningkat.
- b. Pengeluaran wisman (*International Tourists Receipts*) juga meningkat setiap tahun.
- c. keterkaitan perjalanan dan pariwisata (*Affinity for Travel and Tourism*) khususnya untuk indikator sikap penduduk terhadap wisatawan asing (*Attitude of Population toward Foreign Visitors*) semakin memburuk.

Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah "Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata."

G. Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (Total Factor

Productivity) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (governance), dan stabilitas politik.

Selama ini sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan sumbangan Modal dan Tenaga Kerja. Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah bagaimana meningkatkan dukungannya kepada sektor- sektor produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.

H. Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara *megabiodiversity*. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 – 30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dan dari sejumlah itu baru 1,78 juta jenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis. Indonesia memiliki 1,3 persen daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17 persen dari total jumlah jenis *species* terrestrial di dunia. Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalah mengupayakan agar iptek dapat mendukung keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga tantangan yang perlu dihadapi secara nasional adalah dengan meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati.

I. Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 milyar jiwa, sehingga seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, *Global Village*. Kehidupan masyarakat dimasa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yang seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (*borderless world*).

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global yang demikian? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan / pengelola pembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern. Dukungan IPTEK tersebut dalam bentuk:

- a. Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern;
- b. Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

J. Masyarakat Ekonomi ASEAN (*Asean Economic Community*)

Terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan di bidang telekomunikasi dan transportasi menunjukkan adanya saling ketergantungan dan regionalisasi ekonomi berbagai negara. Posisi geografis Indonesia yang strategis menuntut adanya regionalisasi ekonomi dengan berbagai negara di sekitar Asia Pasifik, seperti AFTA, APEC dan EPA. Melalui regionalisasi ekonomi yang ada, diharapkan kinerja ekonomi Indonesia, terutama ekspor maupun impor, semakin membaik. Meningkatnya ekspor diharapkan juga mampu mendorong kinerja industri melalui meningkatnya penyerapan tenaga kerja serta daya saing industri. Selain itu, adanya integrasi ekonomi ini menuntut adanya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja (buruh) serta modal yang semakin tinggi. Dengan demikian tenaga kerja suatu negara bisa bekerja di negara lain secara lebih mudah, termasuk di dalamnya kegiatan investasi antar negara.

Di Indonesia, dan di Provinsi Lampung pada khususnya, Regionalisasi semacam AEC adalah realitas yang tak terhindarkan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan dan mendorong meningkatnya persaingan perdagangan dalam memasuki pasar global. Disisi lain, liberalisasi perdagangan juga menyebabkan persaingan dipasar domestik, terutama dengan kemungkinan masuknya barang – barang impor. Selain itu, perdagangan bebas juga memunculkan non-tarif barriers seperti standarisasi produk melalui ISO, Eco Labelling, HACCP dan lain– lain, yang dapat mengganggu kinerja perdagangan luar negeri kita.

K. *Sustainable Development Goals (SDG's)* / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

SDG's merupakan lanjutan dari MDG's. Tema menarik baru yang dimasukkan dalam SDG's adalah tentang bumi dan manusia serta lingkungan. Tanpa menampik permasalahan paling mengakar sampai hari ini adalah mengakhiri kemiskinan. Oleh karena itu, konsep ambisius ini semakin membutuhkan komitmen dari negara-negara untuk saling peduli dan menciptakan sebuah perdamaian. Adapun isu SDG's yang menjadi prioritas di Kabupaten Mesuji adalah:

1. Penghapusan Kemiskinan;
2. Kesehatan dan Kesejahteraan;
3. Pendidikan Berkualitas;
4. Air Bersih dan Sanitasi;
5. Infrastruktur tangguh, industri Inklusif dan Inovatif;
6. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.

4.2.2. ISU STRATEGIS PROVINSI LAMPUNG

Dalam menyusun Rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang ada di provinsi lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015 – 2019.

Visi Provinsi lampung adalah :

Lampung Maju dan Sejahtera 2019.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 5 (lima) misi Provinsi lampung yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama yang toleran.
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Menegakkan Supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Adapun permasalahan permasalahan yang di hadapi oleh Provinsi Lampung :

A. Pembangunan Bidang Ekonomi

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung terus mengalami penurunan selama periode (2011—2014) dengan laju pertumbuhan rata-rata 5,97 persen lebih besar dari rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,90 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan laju pertumbuhan pada sektor-sektor yang mendominasi relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sektor lainnya. Sektor pertanian telah mampu menyumbang lebih dari 30 persen terhadap perekonomian di Lampung dengan komoditas utama pertanian yaitu kopi, lada, karet, dan tebu, budidaya tambak dan air tawar. Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Lampung cenderung meningkat, namun lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Lampung dan PDB Nasional sebesar 68,5 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 69,3 persen. Hal ini menunjukkan pengaruh sektor pertanian mulai mengalami penurunan bagi peningkatan pendapatan perkapita di provinsi ini
- 2) Perdagangan dan Koperasi menghadapi masalah:
 - a. Lebih dari 38% dari 4.548 koperasi tidak aktif
 - b. Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi
 - c. Rendahnya kompetensi manajerial SDM pelaku usaha UMKM.
 - d. Rendahnya akses: permodalan (informasi sumber permodalan, kondisi UMKM yang belum bankable); pasar; penggunaan teknologi tepat guna; informasi; dan kelembagaan.
 - e. Daya saing produk koperasi dan UMKM lebih rendah dibandingkan produk-produk impor.
 - f. Pengembangan industri tidak berbasis potensi sumber daya lokal.
 - g. Penguasaan, Pemanfaatan dan Penerapan IPTEK rendah, berakibatrendahnya inovasi produk dan proses produksi.
 - h. Kurangnya peningkatan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.
- 3) Infrastruktur listrik dan energi menghadapi masalah sebagai berikut:
 - b. Lampung mengalami defisit listrik sekitar 100—150 MW;
 - c. Rasio elektrifikasi hanya 71% sementara nasional 78%;
- 4) Infrastruktur Jalan menghadapi permasalahan:
 - a. Kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis;
 - b. Kondisi jalan provinsi 21,52% rusak berat dan 16,73% kritis;
- 5) Infrastruktur Irigasi menghadapi masalah:
 - a. Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi karena kerusakan hutan
 - b. Kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan

- 6) Infrastruktur permukiman menghadapi masalah
 - a. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah, sampah, drainase)
 - b. Rendahnya penyediaan sumberdaya air baku untuk air minum
- 7) Sektor Perhubungan menghadapi masalah:
 - a. Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan
 - b. Masih tinggi tingkat *over loading* angkutan barang
 - c. Keberadaan bandar udara belum memadai untuk menampung perkembangan jumlah penumpang dan barang
 - d. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua
- 8) Bidang Pendapatan dan Keuangan menghadapi masalah:
 - a. Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung masih dibawah 50%;
 - b. Belanja modal hanya 21,99% dari total belanja daerah;
 - c. Belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) dan dekonsentrasi, dan potensi daerah khususnya kerjasama dengan pihak swasta.
- 9) Bidang Penanaman Modal menghadapi masalah:
 - a. Pertumbuhan investasi cenderung positif namun kecil atau lambat;
 - b. Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata seperti prasarana jalan dan listrik.
 - c. Konflik hubungan industrial seperti perbedaan pendapat tentang penetapan besarnya upah minimum regional dan penggunaan tenaga kerja dengan sistem *outsourcing*.
- 10) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadapi masalah
 - a. Lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) serta sarana dan prasarana
 - b. Belum meratanya pembangunan pariwisata
 - c. Kurangnya sadar wisata masyarakat
 - d. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif belum berkembang
- 11) Bidang Ketahanan Pangan menghadapi masalah:
 - a. Masih tingginya impor bahan pangan
 - b. Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Panganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas
- 12). Bidang Perencanaan Pembangunan menghadapi masalah:
 - a. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) antar dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan provinsi dan kabupaten belum optimal
 - b. Kualitas dan kuantitas SDM perencanaan belum memadai
 - c. Database dan peta belum terintegrasi
- 13) Bidang Penataan Ruang menghadapi masalah:
 - a. Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang
 - b. Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang
 - c. Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang
- 14) Bidang Komunikasi dan Informatika menghadapi masalah:
 - a. Pemanfaatan internet dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal
 - b. Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal

- c. E-Government masih sangat terbatas
- 15) Bidang Penanggulangan Bencana menghadapi masalah:
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM dalam penanggulangan bencana
 - b. Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana belum terbangun
- 16) Bidang Lingkungan Hidup menghadapi masalah:
 - a. Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya
 - b. Kerusakan kawasan pesisir dengan ditandai kekeringan hutan mangrove
 - c. Rendahnya pemahaman dan keberadaan masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup
 - d. Penggundulan dan penggalian bukit – bukit.
 - e. Pengawasan atas pencemaran lingkungan masih sangat terbatas
 - f. Kapasitas organisasi dan SDM masih sangat terbatas

B. Pembangunan Sosial Budaya

1) Bidang Pendidikan:

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan sektor pendidikan di Lampung memiliki peran penting dan strategis, dan berada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya.

Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Lampung semakin meningkat yang terlihat dari beberapa indikator dalam pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Lampung belum merata. Rata-rata APS Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 99,03 persen untuk usia 7-12 tahun dan 90,99 persen untuk usia 13-15 tahun. APS terendah meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat. Semakin tinggi kelompok umur APS cenderung menurun, yang salah satu penyebabnya adalah biaya sekolah yang tinggi. Secara umum gambaran pendidikan Lampung membaik, didukung bertambahnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi dan menurunnya persentase penduduk yang belum sekolah.

Capaian APS pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdampak pada rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indikator keberhasilan pembangunan oleh MDGs di Provinsi Lampung. RLS di Provinsi Lampung 7,5 tahun, lebih rendah dari RLS nasional 8 tahun. AMH Provinsi Lampung tahun 2009-2013 berkisar pada angka 95,92 persen dan tidak banyak peningkatannya, lebih tinggi daripada AMH nasional yang terus meningkat dari 91 persen di tahun 2009 menjadi 94 persen di tahun 2013. Peningkatan AMH dan RLS di Provinsi Lampung antara lain didukung kondisi Lampung dengan aksesibilitas yang cukup memadai, tingginya dukungan dana untuk bidang pendidikan, ketersediaan unit layanan dan kapasitas pelaksana kegiatan yang menyebabkan tingginya pertumbuhan AMH, dan keterdiaan penyediaan tenaga pendidik yang memadai. Dampak dari tingginya APS, AMH, serta RLS mempengaruhi produktivitas tenaga kerja di Provinsi Lampung.

Angkatan kerja di Provinsi Lampung memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi sehingga Lampung berada dalam ekonomi dengan produktivitas tinggi. Provinsi Lampung perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Lampung.

2) Bidang Kesehatan:

Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Lampung. Pembangunan di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi pada produktivitas dan meningkatkan kualitas SDM di Lampung. Tingkat kesehatan masyarakat Lampung menunjukkan hasil yang membaik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk. Angka kematian bayi di Lampung pada tahun 2012 sebanyak 30 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru. Angka ini juga mengalami perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian bayi Lampung 43 kematian per 1000 kelahiran hidup. Faktor penyebab meningkatnya AKB adalah gizi buruk penanganan persalinan yang kurang memadai, kesehatan lingkungan yang buruk, serta wawasan masyarakat terhadap kesehatan. Lebih dari 87 persen kelahiran di Lampung tahun 2014 sudah dibantu oleh tenaga medis khususnya bidan, sementara kelahiran yang dibantu dukun tradisional mengalami penurunan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan program prioritas untuk percepatan pembangunan kesehatan di Lampung. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Lampung antara lain peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional RSUD Abdoel Moeloek, RSUD Ahmad Yani, RSUD Mayjen Ryacudu dan lainnya. Jumlah pelayanan kesehatan di Lampung berupa puskesmas terbanyak berada di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah, sementara di Kabupaten pesisir Barat baru tersedia 9 unit puskesmas dengan jumlah perawatan 5 unit. Jumlah puskesmas dan unit perawatan ini tidak bertambah selama tahun 2012-2014. Pemerintah Provinsi Lampung terus berusaha meningkatkan derajat dan status kesehatan masyarakat, diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan dan memperpendek jarak jangkauan ke fasilitas dan sarana kesehatan serta petugas kesehatan. Dengan demikian penduduk yang mengalami keluhan kesehatan akan lebih mudah mengakses fasilitas dan sarana kesehatan untuk berobat.

Untuk masalah gizi buruk, di Lampung masih terdapat kasus kurang gizi pada beberapa daerah. Hal ini terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizimasyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

- 3) Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat menghadapi masalah:
- Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas
 - Rentan terhadap konflik horizontal
 - Masih banyaknya konflik tanah antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah
 - Belum memadainya landasan hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan
- 4) Bidang Kebudayaan menghadapi masalah:
- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
 - Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda
 - Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri
 - Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas
 - Terjadinya degradasi penggunaan bahasa lokal dalam lingkungan masyarakat

- 5) Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah
 - a. Rendahnya produktivitas pemuda dalam pembangunan
 - b. Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda
 - c. Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda
 - d. Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dankreativitas generasi muda generasi muda yang lebih berkualitas danmandiri
 - f. Lemahnya pola pembinaan bagi atlet
 - g. Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupunnasional
 - h. Rendahnya mental juara dan sportifitas
- 6) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapimasalah:
 - a. Indeks Pembangunan Gender 63,50 Nomor 9 di Sumatera (Nasional67,80)
 - b. Indeks Pemberdayaan Gender 65,86 Nomor 4 di Sumatera (Nasional 69,14)
 - c. Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak
- 7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghadapi masalah:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
 - b. Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
 - c. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.
 - d. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorongpercepatan pembangunan
 - e. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat pedesaanuntuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
- 8) Bidang Sosial menghadapi masalah:
 - a. Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
 - b. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota atau keluar provinsi;
 - c. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin
 - d. Tingginya kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya.
 - e. Belum terbangunnya komunikasi yang konstruktif antar kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang (social, ekonomi, budaya, dan agama)
- 9) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian menghadapi masalah:
 - a. Kualitas tenaga kerja masih rendah;
 - b. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;
 - c. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda;
 - d. Keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah transmigrasi;
 - e. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakattransmigrasi
 - f. Balai Latihan Kerja di Provinsi Lampung kekurangan guru pengajar dan peremajaan peralatan

- 10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi masalah:
 - a. Belum selesainya program administrasi dokumen kependudukan
 - b. Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik
- 11) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghadapi masalah:
 - a. Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga intensifikasi pelayanan KB sangat penting;
 - b. Belum optimalnya ketahanan keluarga;
 - c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.
- 12) Bidang Penelitian dan pengembangan inovasi daerah:
 - a. Pemanfaatan data kajian penelitian pengembangan dalam proses perencanaan masih belum optimal.
 - b. Masih kurangnya kepekaan peneliti dalam menangkap fenomena problematik yang terjadi dalam masyarakat untuk menjadi obyek penelitian.
 - c. Belum memadainya pengetahuan teori dan informasi para peneliti dan SDM bidang penelitian dan pengembangan.

C. Pembangunan Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- 1) Bidang Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menghadapi masalah:
 - a. Belum sinkronnya implemementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah
 - b. Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan HAM
 - c. Organisasi pemerintahan daerah masih belum sesuai dengan bidang urusan sesuai dengan kondisi lokal, dan belum sesuai dengan bidangbidang urusan pada organisasi pemerintah.
 - d. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*)
 - e. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance
 - f. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur
 - g. Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yg belum tersertifikasi;
 - h. Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas
 - i. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat
- 2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghadapi masalah:
 - a. Pendidikan politik masyarakat masih rendah
 - b. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bernuansa SARA.
 - c. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik dan yang bernuansa SARA

- 3) Bidang Pertanahan menghadapi masalah:
 - a. Lahan belum bersertifikat
 - b. Banyak masalah batas wilayah, baik antar kabupaten, maupun antar provinsi.
 - c. Lamanya proses penyelesaian sengketa pertanahan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat
 - d. Okupasi tanah negara oleh masyarakat

BAB V

PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD. Mengingat visi, misi, dan program Kepala Daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Kepala Daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

5.1. Visi

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mesuji periode Tahun 2017-2022, yaitu:

"Terwujudnya Mesuji yang Sejahtera, Aman dan berkeadilan"

Visi pembangunan Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Mesuji. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Masyarakat Kabupaten Mesuji yang **sejahtera** ditandai dengan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pembangunan ekonomi, peningkatan IPM dan penurunan angka kemiskinan.
- Aman**: Salah satu prasarat dalam melakukan aktivitas apapun termasuk pembangunan adalah aman, sehingga rasa aman harus diwujudkan terlebih dahulu ditandai dengan rendahnya tingkat kriminalitas, huru hara dan gangguan keamanan lainnya
- Masyarakat yang **berkeadilan** bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Mesuji bertujuan mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata tidak nepotis dan tidak mengabaikan hak orang lain. Adil juga berarti semua wilayah dan etnis, golongan dan agama mendapat pelayanan yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam menerima pelayanan pembangunan maupun di depan hukum.

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-citanya yang ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif. Perwujudan Masyarakat Kabupaten Mesuji yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Mesuji sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mesuji berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan. Visi yang ditetapkan merupakan keinginan

masyarakat Mesuji yang memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.

5.2. Misi

Misi pembangunan Kabupaten Mesuji merupakan bagian awal dari proses menuju pencapaian visi di atas. Dalam menjalankan misinya, Kabupaten Mesuji tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini. Ekonomi kita mengalami kontraksi yang disebabkan rusaknya lembaga-lembaga keuangan yang pada akhirnya telah mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riil dan perdagangan seluruh daerah di Indonesia. Pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan, dan target penurunan kemiskinan akan mengalami hambatan.

Upaya Kabupaten Mesuji memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2017 – 2022 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan iklim. Kabupaten Mesuji memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan asumsi perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode yang akan datang. Stabilitas sektor keuangan dunia dan ekonomi makro negara yang sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam. Tentunya hal ini menjadi peluang untuk dijadikan dasar pengembangan ekonomi Kabupaten Mesuji.

Misi Kabupaten Mesuji 2017-2022 diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Mesuji yang sejahtera, agamis harmonis dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan visi Kabupaten Mesuji dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata;
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal;
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban berbasis kemitraan yang partisipatif dan taat hukum;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Di sini, visi dan misi sangat penting agar proses penyusunan tujuan dan sasaran memenuhi syarat supaya selaras dengan sasaran pokok RPJPD. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD.

Permasalahan dan tuntutan pembangunan yang dihadapi akan bertambah banyak, sedangkan kemampuan dan sumber daya pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Pemerintah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan dalam bentuk skala prioritas. Dalam menentukan pilihan tersebut, pemerintah bersikap realistis, dengan tidak membuat sasaran-sasaran yang sejak semula disadari tidak bisa dipenuhi.

Berikut keterkaitan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 5.1.
Misi dan Tujuan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mesuji

	Misi	Tujuan	Indikator	Kondisi awal	Target Tahun					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata	Menyediakan Infrastruktur Wilayah untuk Membuka dan Mendukung aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkelanjutan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	6,18%	9,18%	12,18%	15,18%	18,18%	21,18 %	24,18 %
2	Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60,72	61,67	62,62	63,56	64,50	65,43	66,36
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,5658	0,5738	0,5818	0,5898	0,5978	0,6058	0,6138
		Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Persentase Penduduk Miskin	8,00	7,67	7,33	7,00	6,67	6,34	6,00
			Indeks Pengeluaran	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	64,66
		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,78	4,2075	4,64	5,06	5,49	5,92	6,35
		Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	5000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
		Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	86	-	106	129	149	172	192
		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Omset Penjualan Pedagang	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban berbasis kemitraan yang partisipatif dan taat hukum	Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat	Angka Kriminalitas	171	161	151	141	131	121	111
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	CC	B	B	BB	BB



Tabel 5.2.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Mesuji

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata	Menyediakan Infrastruktur Wilayah untuk Membuka dan Mendukung aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan dalam kondisi baik/Panjang Seluruh Jalan) x100	34,80/563,14*100	6,18%	9,18%	12,18%	15,18%	18,18%	21,18%	24,18%	24,18%
				Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Panjang Jembatan dalam kondisi baik/Panjang Seluruh Jembatan) x 100	48/176*100	27,27%	22,89%	27,27%	31,18%	34,69%	37,86%	40,74%	40,74%
				Tersedianya Terminal /dermaga angkutan Penumpang Berfungsi	Jumlah Terminal /dermaga yang di bangun/ Target x 100	-	-	1 Dermaga	1 Dermaga	1 Dermaga	1 Dermaga dan 1 terminal	1 Dermaga dan 1 terminal	1 Dermaga dan 1 terminal	1 Dermaga dan 1 terminal
				Jumlah angkutan umum darat yang beroperasi	Jumlah angkutan umum darat yang beroperasi	-	-	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Persentase Luas areal yang terlayani jaringan irigasi dalam kondisi baik			41,63%	42%	43%	44%	46%	48%	50%	50%

BAB V - PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir																																	
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022																																		
				Indeks Kualitas Air	Tabel 1.1. Penentuan skor nilai untuk ketersediaan status mutu air <table><tr><th rowspan="2">Jumlah sampel</th><th rowspan="2">Nilai</th><th colspan="3">Parameter</th></tr><tr><th>Turbiditas</th><th>Warna</th><th>Kebersihan</th></tr><tr><td rowspan="3">< 10</td><td>Maksimal</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Minuman</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Kulit</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="3">≥ 10</td><td>Maksimal</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>Minuman</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>Kulit</td><td>4</td><td>12</td><td>18</td></tr></table> Skor = (Catat 177) Catatan : 1 jumlah parameter yang digunakan untuk penentuan status mutu air.	Jumlah sampel	Nilai	Parameter			Turbiditas	Warna	Kebersihan	< 10	Maksimal	1	2	3	Minuman	1	2	3	Kulit	3	4	5	≥ 10	Maksimal	2	4	6	Minuman	2	4	6	Kulit	4	12	18	Baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik	baik
Jumlah sampel	Nilai	Parameter																																													
		Turbiditas	Warna	Kebersihan																																											
< 10	Maksimal	1	2	3																																											
	Minuman	1	2	3																																											
	Kulit	3	4	5																																											
≥ 10	Maksimal	2	4	6																																											
	Minuman	2	4	6																																											
	Kulit	4	12	18																																											
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumberdaya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah	Rasio Elektrifikasi	(Jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik / Jumlah Rumah Tangga)x 100%	57122/90949 X 100	62,81%	62,81%	67,00%	72,00%	77,00%	82,00%	90,00%	90,00%																																	
				Persentase Peningkatan jumlah penerangan jalan umum	(Jumlah Lampu jalan terpasang tahun n - Jumlah lampu terpasang tahun n-1 / Jumlah lampu yang terpasang pada tahun n) x 100%	(675/(563*20))	0,00%	0,00%	0,36%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%																																		
2	Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Jumlah Indeks Rata-Rata Lama Sekolah + Indeks Harapan Lama Sekolah / 2	(62,22+40,86) / 2	51,54	53,04	54,54	56,04	57,54	59,04	60,54	60,54																																	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	(AHH - AHHMin)/ (AHHmak - AhhMin)	(67,32- 20)/(85- 20)*100	72,8	73,11	73,42	73,72	74,03	74,34	74,65	74,65																																	
			Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah/ Jumlah Pekerja Perempuan x 100	(1069+307)/(1069+307+2122)	39,34%	39,84%	40,34%	40,84%	41,34%	41,84%	42,34%	42,34%																																	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Jumlah anak / Jumlah Keluarga x 100	86048/58327	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
			Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi / Jumlah cabang olahraga	7/12	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%	58,33%	66,67%	100,00%	100,00%
			Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Rasio Rumah Ibadah Per Satuan Penduduk	Jumlah Rumah Ibadah / Jumlah Penduduk x 1000	86/196913*1000	0,4367	0,4469	0,4571	0,4672	0,4774	0,4875	0,4977	0,4977
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	Jumlah Kelompok seni budaya yang dibina / Jumlah Total kelompok seni budaya x 100	50/159*100	31,45%	34,59%	37,74%	40,88%	44,03%	47,17%	50,31%	50,31%
3	Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan desa yang Cepat berkembang	Jumlah Desa yang cepat Berkembang / Jumlah Seluruh Desa x 100% (yang di nilai Pemerintahan, kemasyaraatan, kewilayahan)	14/105*100	13,33%	14,29%	15,24%	16,19%	17,14%	18,10%	19,05%	19,05%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengurangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	Jumlah PMKS tahun N- Jumlah PMKS Tahun N-1 / Jumlah PMKS Tahun N-1 x 100%	14709/193916 *100	7,59%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	4,59%
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Jumlah partisipasi angkatan Kerja/ jumlah penduduk usia kerja 15-84 *100%	137592/199794*100	68,87	69,37	69,87	70,37	70,87	71,37	71,87	71,87
				Persentase Penurunan Tingkat Pengangguran	(Jumlah pengangguran / Jumlah angkatan kerja) x 100%		18%	17%	16%	15%	14%	13%	12%	12%
		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan produksi tanaman pangan :										
				Padi (Ton)	Jumlah Produksi padi Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi padi tahun N-1 / Jumlah Produksi padi Tahun N-1 x 100	252.334	252.334	252.834	253.334	253.834	254.334	254.834	255.334	1.776.838



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Jagung (Ton)	Jumlah Produksi Jagung Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Jagung tahun N-1 / Jumlah Produksi Jagung Tahun N-1 x 100	3.203	3.203	3.184	3.264	3.343	3.423	3.502	3.582	23.501
				Kedelai (Ton)	Jumlah Produksi Kedelai Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Kedelai tahun N-1 / Jumlah Produksi Kedelai Tahun N-1 x 100	56	56	60	80	99	101	106	111	613
				ubi kayu (Ton)	Jumlah Produksi Ubi Kayu Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Ubi Kayu tahun N-1 / Jumlah Produksi Ubi Kayu Tahun N-1 x 100	54.510	54.510	54.668	54.826	54.984	55.142	55.300	55.458	384.888
				Jeruk (Ha)	Luas tanam Jeruk (Ha)		-	153	243	308	371	434	502	1.307



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Peningkatan produksi Ternak :										
			Sapi (ekor)	Jumlah Produksi Daging Sapi Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Daging Sapi tahun N-1 / Jumlah Produksi Daging Sapi Tahun N-1 x 100	398	397,6	408,2	418,9	429,5	440,2	450,9	461,5	3.006,8	
			Kerbau (ekor)	Jumlah Produksi Daging Kerbau Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Daging Kerbau tahun N-1 / Jumlah Produksi Daging Kerbau Tahun N-1 x 100	4,46	4,46	4,46	4,91	5,36	5,80	6,25	6,70	37,95	
			Babi (ekor)	Jumlah Produksi Daging babi Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Daging babi tahun N-1 / Jumlah Produksi Daging babi Tahun N-1 x 100	804,76	804,76	853,89	903,02	952,15	1.001,28	1.050,42	1.099,55	6.665,08	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Kambing (ekor)	Jumlah Produksi Daging Kambing Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Daging Kambing tahun N-1 / Jumlah Produksi Daging Kambing Tahun N-1 x 100	8.853	8.853	9.275	9.696	10.118	10.540	10.708	10.961	70.151,77
				Ayam (ekor)	Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Daging Ayam tahun N-1 / Jumlah Produksi Daging Ayam Tahun N-1 x 100	230.280	230.280	239.923	249.566	259.209	268.852	278.496	288.139	1.814.464,80



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Telur (Ton)	Jumlah Produksi Telur Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Telur tahun N-1 / Jumlah Produksi Telur Tahun N-1 x 100	210,00	210,00	211,00	212,00	213,00	214,00	215,00	216,00	1.491
				Peningkatan Produksi Perkebunan :										
				Sawit (Ton)	Jumlah Produksi Sawit Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Sawit tahun N-1 / Jumlah Produksi Sawit Tahun N-1 x 100	15476x1,532	23.695	23.849	24.002	24.155	24.308	24.461	24.615	169.085
				Karet(Ton)	Jumlah Produksi Karet Tahun Ke N di kurang Jumlah Produksi Karet tahun N-1 / Jumlah Produksi Karet Tahun N-1 x 100	0,9211x 21891	20.164	21.991	22.091	22.191	22.291	22.391	22.491	153.610



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Ketersediaan pangan pada lumbung pangan masyarakat	Jumlah Ketersediaan Pangan Tahun ke N	48 ton	48 ton	50 ton	60 ton	70 ton	80 ton	90 ton	100 ton	100 ton
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi			73	73,5	75	77	78	79	80	79
			Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Peningkatan Produksi Perikanan (Ton)	Jumlah produksi Tahun ke n - Jumlah Produksi tahun n-1 / Jumlah Produksi tahun ke n-1 x 100		5.685	5.799	5.915	6.033	6.154	6.277	6.402	6.402
				Persentase Tingkat Konsumsi ikan (jumlah konsumsi ikan/ standar konsumsi nasional) *100%	Jumlah Produksi Ikan budidaya+ tangkap/ Jumlah Penduduk x 100	28,87/43,8*100	65,91	29,16	29,45	29,74	30,03	30,31	30,60	30,60
		Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	Realisasi Kunjungan wisata Tahun N / Target Kunjungan Wisata Tahun N *100	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000	11.000
		Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Jumlah Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang dibina/ Jumlah Total Koperasi *100	86	86	-	20	23	20	23	20	192



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Jumlah IKM yang berkualitas	Jumlah IKM yang di bina Tahun N / Jumlah Total IKM Tahun N* 100	103	103	-	24	24	24	24	24	223
			Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, UKM dan IKM	Jumlah UMKM yang berkualitas	Jumlah UMKM yang di bina Tahun N / Jumlah Total UMKM Tahun N * 100	31	31	70	70	70	70	70	70	451
		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan Omset Penjualan Pedagang (Rp)	Jumlah Pertumbuhan Omset Penjualan Pedagang Tahun N di kurangi Jumlah Pertumbuhan Omset Penjualan tahun N-1 / Jumlah Pertumbuhan Omset Penjualan tahun N-1	151934350000	151.934.350.000	161.050.411.000	170.713.435.660	180.956.241.800	191.813.616.308	203.322.433.286	215.521.779.283	215.521.779.283
4	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban berbasis kemitraan yang partisipatif dan taat hukum	Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat	Terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat	Presentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan dilingkungan pemerintah dan masyarakat.			0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir								
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022									
				Jumlah Peraturan Daerah dan Perkada yang ditegakan	Jumlah Peraturan Daerah dan Perkada yang ditegakan/ Jumlah target Perda dan perkada yang di tegakkan Tahun ke n)*100%	0 Perda dan Perkada	0 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada	2 Perda dan Perkada								
				Jumlah Konflik yang tertangani	(Jumlah Konflik yang di tangani/ Jumlah Total Tahun ke n)*100%	45 konflik	45 konflik	5 konflik	5 konflik	5 konflik	5 konflik	5 konflik	5 konflik	15 Konflik								
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Aset Daerah	(Jumlah Realisasi PAD Tahun ke n/Target PAD Tahun n)*100%		75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	81,00%	81,00%								
				Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	Tabel V-5 Konversi Nilai Opini Pemeriksaan Laporan keuangan <table><tr><td>Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan</td><td>Nilai</td></tr><tr><td>WTP</td><td>3</td></tr><tr><td>WDP</td><td>2</td></tr><tr><td>TW</td><td>1</td></tr><tr><td>TMP/ Disclaimer</td><td>0</td></tr></table>	Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan	Nilai	WTP	3	WDP	2	TW	1	TMP/ Disclaimer	0	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Opini Pemeriksaan Laporan Keuangan	Nilai																		
WTP	3																					
WDP	2																					
TW	1																					
TMP/ Disclaimer	0																					
Meningkatnya perencanaan yang partisipatif, berkualitas dan akuntabel	Persentase Kegiatan Usulan Musrenbang kabupaten yang tertampung dalam RKPD	(Jumlah Realisasi usulan Musrenbang Tahun ke n/ Jumlah RKPD Tahun n)*100%	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%											



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	Jumlah Program RKPD yang sesuai dengan RPJMD/ Jumlah Program RPJM*100	25/35*100	71	88,6	91%	92,00%	93,00%	94,00%	95,00%	95,00%
			Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	Jumlah pelaksanaan audit APIP yang terselesaikan/ Target audit yang di lakukan APIP x 100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase disiplin aparatur			70%	75%	80%	85%	90%	90%	90%	90%
			Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Pengembangan kompetensi/ Jumlah ASN x 100		15	45,00%	46,00%	47,00%	48,00%	49,00%	50,00%	46,00%
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	Survey IKM kepegawaian		74,00%	75,00%	76,00%	77,00%	78,00%	79,00%	80,00%	79,00%
				Persentase Peningkatan Organsasi Perangkat Daerah yang sesuai standar Tata Naskah Dinas	Jumlah Organsasi Perangkat Daerah yang sesuai standar Tata Naskah Dinas/ Jumlah Total OPD x 100	1/35*100	3	-	23	43	63	83	100	100



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Jumlah Wilayah Pemerintahan yang di mekarkan	Jumlah wilayah yang di mekarkan/ Target Wilayah di mekarkan x 100	0	-	-	10 Desa dan 3 Kecamatan	-	-	-	-	10 Desa dan 3 Kecamatan
				Persentase OPD dengan administrasi pembangunan yang baik	Jumlah OPD dengan administrasi pembangunan yang baik/ Total Jumlah OPD x 100	25/35*100	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
				Persentase produk hukum daerah yang d syahkan	Jumlah produk hukum daerah yang d syahkan/ Jumlah Produk hukum yang masuk x 100	3/15*100	20,00%	33,33%	46,67%	60,00%	73,33%	86,67%	100,00%	15 produk hukum
				Nilai Laporan Akuntabilias Kinerja Istansi Pemerintah kabupaten	Nilai Laporan Akuntabilias Kinerja Istansi Pemerintah kabupaten oleh MENPAN RB	CC	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Persentase peningkatan Peraturan Daerah yang di sahkan	Jumlah Peraturan Daerah yang di sahkan/ Jumlah peraturan daerah yang masuk x 100	$14/90 \times 100$	15,56	20,00	37,78	43,33	54,44	65,56	76,67	77
			Pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan			0,00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				Jumlah penerbitan E-KTP dan Kartu Keluarga	Realisasi E-KTP yang di terbitkan/ Target Jumlah E-KTP yang di terbitkan *100	247191	247191	22800	22400	22300	21900	21500	21500	379591
				Jumlah Penerbitan akta-akta	Realisasi Akta yang di terbitkan/ Target Jumlah Akta yang di terbitkan *100	55907	55907	9750	10000	10100	10200	10300	10425	116682



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Presentase Jumlah instansi yang terfasilitasi data kependudukan	Jumlah instansi yang terfasilitasi data kependudukan / Jumlah OPD x 100	0/35*100	0,00%	0,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	100,00%
			Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	Persentase Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan di media massa	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan di media massa / Target kegiatan pimpinan yang di publikasikan x 100	100/160*100	63%	69%	75%	81%	88%	94%	100%	100%
				Jumlah lembaga media masa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	Jumlah lembaga media masa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	70 media massa	70 media massa	0	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa
			Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan / Jumlah Totak konflik x 100	10/70*100	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100,00	100,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				Jumlah Tanah Milik Pemerintah daerah yang Bersertifikat	Jumlah tanah milik pemda yang bersertifikat/ Target Jumlah laha pemda yang akan di sertifikatkan x 100	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang	10 Bidang
			Meningkatnya kesiapsiagaan dan kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana	Persentase Desa Siaga Bencana	Jumlah Desa Siaga Bencana/ Total Desa x 100	24/94*100	25,53	25,53	31,91	38,30	44,68	51,06	57,45	57,45



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Persentase Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai Standar Pelayanan/ Jumlah Total OPD x 100	0/35*100	0%	0%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	(Jumlah Rekomendasi usulan perijinan yang disetujui/ Jumlah Usulan Perijinan yang telah sesuai Dokumen Tata Ruang)*100%	1/1*100	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula		Kondisi Awal	Target Tahun						Kondisi Akhir
					Fungsi	Angka Hitung		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			Meningkatnya nilai investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi	Jumlah Investasi Tahun ke n- Jumlah Investasi tahun n-1 / Jumlah investasi tahun ke n-1 x 100	$\frac{138588600370}{81522706100} \times 100$	59	65	71	76	82	88	94	100
			Meningkatnya kekuatan kelembagaan Pemerintahan dan kemampuan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berperan aktif dalam pembangunan pemerintahan desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif / jumlah lembaga kemasyarakatan desa x 100%	8/15X100	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	93%

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Kebijakan Umum

Arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Mesuji 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi yang terkait didalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing. Arah kebijakan umum ini merupakan instrumen untuk mencapai visi misi melalui strategi yang akan ditempuh sebagaimana telah dijelaskan pada BAB sebelumnya.

Dalam rangka menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan ditetapkan beberapa kebijakan umum pembangunan yaitu :

- a. Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat sistem ketahanan pangan dan agribisnis serta membuka akses di wilayah pedalaman yang didukung pendayagunaan teknologi tepat guna. Khususnya untuk pembangunan jalan akan difokuskan pada rencana pengembangan Pelabuhan Laut Mesuji/Sungai Sidang (sebagai rintisan tol laut) dan pengembangan kawasan daerah sekitar dua exit tol yang ada di Kabupaten Mesuji (Sp. Pematang dan Way Serdang).
- b. Meningkatkan derajat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjamin terselenggaranya kehidupan bermasyarakat yang tertib dan tentram.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prioritas penanganan kemiskinan dan peningkatan IPM, yang dilakukan dengan berbagai upaya antara lain:
 - Peningkatan kecerdasan dengan penekanan pada lulusan yang berkualitas serta penyiapan tenaga kerja terampil;
 - Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang difokuskan pada upayapeningkatan derajat kesehatan masyarakat, penanganan ibu hamil, bayi danbalita serta pengembangan jaminan sosial;
 - Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan melalui forum formal maupun informal;
- e. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab yang ditandai adanya kemampuan cara berpikir dan bertindak yang baru melalui pembenahan sistem pemerintahan, penyiapan kelembagaan/lembaga yang mutakhir dan penyiapan SDM aparatur yang efisien dan berkelas;
- f. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan lestari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan pengurangan resiko bencana;
- g. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan
- h. Menciptakan iklim demokratisasi dengan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan kemampuannya
- i. Menyelenggarakan pengawasan yang efektif dengan memfungsikan lembaga pengawas internal dan lembaga pengawas eksternal;
- j. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan berbagai upaya, antara lain:
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber pendapatan daerah, secara efektif dan efisien;
 - Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah yang sudah dimiliki;
 - Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal bagi para investor dengan pola kemitraan; serta

- Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna mewujudkan kemandirian dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

6.2. Program Pembangunan

Penjabaran lebih detail dari visi misi tertuang dalam arah kebijakan umum yang terimplementasi dalam program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017 - 2022. Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, program yang terdapat pada rencana strategis di masing-masing OPD diselaraskan dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Mesuji, yang juga mengacu pada program yang tertera pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan Rencana Pembangunan diperlukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program sebagai berikut:

Semua OPD (Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan) melaksanakan program OPD yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui program-program:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah
 - f. dll
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan Meubelair
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan dinas/ operasional, perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung
3. Program peningkatan disiplin aparatur, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
 - b. Penyusunan laporan realisasi anggaran
 - c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
 - a. Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah:

Guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mesuji 2017 – 2022, ditetapkan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Membuka dan membangun jalan kabupaten dan desa serta sarana air bersih
2. Bantuan perumahan layak huni (baperlahu)



- 3. Asuransi kesehatan dan pelayanan puskesmas serta rumah sakit non kelas (kaya & miskin ruang rawat inap sama)
- 4. Ambulance desa yang jauh dari pustu & puskesmas
- 5. Sekolah gratis & bantuan perlengkapan sekolah sd dan smp serta mobil sekolah
- 6. Mengoptimalkan pertanian, perikanan serta peternakan
- 7. Tunjangan guru ngaji & pondok pesantren
- 8. Bantuan tempat ibadah & pembinaan mental serta moral masyarakat
- 9. Alokasi dana desa terus meningkat untuk membangun desa
- 10. Gedung olahraga tiap kecamatan dan lapangan serta tempat hiburan dan rekreasi bagi masyarakat
- 11. Pembinaan pengusaha kecil dan pengrajin
- 12. Mengupayakan lapangan kerja
- 13. Listrik pedesaan dan program lainnya

Untuk menggambarkan keterkaitan antara visi, misi tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Kabupaten Mesuji periode 2017-2022, berikut akan ditampilkan tabel yang menjelaskan hal-hal tersebut sebagai dasar arah kebijakan pembangunan daerah.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kabupaten Mesuji

Visi: "TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN"			
	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata			
1	Menyediakan Infrastruktur Wilayah untuk Membuka dan Mendukung aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkelanjutan	Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa	Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
			Pembangunan, peningkatan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan serta komunikasi dan informasi
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya	Peningkatan kualitas Pengelolaan dan Pengembangan sistem irigasi dan drainase.
		Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman	Penataan dan pengembangan perumahan dan fasilitas permukiman
		Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan optimalisasi upaya pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan dan limbah
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumberdaya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah	Peningkatan Rasio Elektrifikasi dengan upaya optimalisasi koordinasi dengan perusahaan listrik negara dan upaya pengembangan energi terbarukan
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing			
2	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses, pemerataan serta kualitas pendidikan	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan searah nilai-nilai lokal



Visi: "TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN"			
	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
		Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan	Meningkatkan peran, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak dan lansia
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk	mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik bidang pengendalian penduduk
		Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga melalui peningkatan kualitas pembinaannya
		Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghayatan dan pengamalan agama	Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi yang kondusif bagi kehidupan beragama
		Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Peningkatan pemberdayaan budaya daerah secara berkelanjutan
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal			
3	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan melalui penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa)
4	Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas pelayanan terhadap PMKS dan optimalisasi pemanfaatan PSKS
			Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan melalui penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa)
		Menurunnya tingkat pengangguran	pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja
			pengembangan dan perlindungan tenaga kerja
5	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan Perikanan pada kawasan minapolitan dan agropolitan yaitu Rawajitu Utara, Mesuji, dan Mesuji Timur



Visi: "TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN"			
	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya ketersediaan,distribusi dan komsumsi serta keamanan pangan daerah	Mengendalikan keseimbangan ketersediaan bahan pangan dengan kebutuhan pangan
		Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Mengembangkan agribisnis melalui pelaksanaan usaha agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan dan perikanan
6	Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Berkembangnya pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
7	Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah terutama pada wilayah kawasan industri di way serdang dan sekitarnya
		Pengembangan dan Pembinaan Koperasi, UKM dan IKM	Menumbuhkan koperasi dan UKM, pemberdayaan kelembagaan Koperasi dan UKM, pembinaan, pelatihan dan pengawasan
8	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Meningkatkan peran sektor perdagangan dlm perekonomian daerah melalui peningkatan sarana & prasarana, promosi , keamanan perdagangan & perlindungan konsumen
Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban berbasis kemitraan yang partisipatif dan taat hukum			
9	Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat	Terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat	Meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien			
10	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan aset
		Meningkatnya perencanaan yang partisipatif, berkualitas dan akuntabel	Meningkatkan perencanaan yang partisipatif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan daerah
		Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan melalui peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH



Visi: "TERWUJUDNYA MESUJI YANG SEJAHTERA, AMAN DAN BERKEADILAN"			
	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya kompetensi aparaturnya	Meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui peningkatan kualitas manajemen kepegawaian daerah
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif	Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif melalui bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
		Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Memberikan dukungan pada DPRD melalui optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi
		Pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan
		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	peningkatan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di urusan komunikasi dan informasi
		Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam layanan penanganan masalah pertanahan melalui koordinasi penyelenggaraan pertanahan
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
		Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kearsipan melalui peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
		Meningkatnya nilai investasi	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan pelayanan perijinan
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan Pemerintahan dan kemampuan pemerintahan desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa



Tabel 6.2.
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Mesuji

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan keberdayaan dan produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan badan usaha lain berbasis pertanian dan pariwisata	Mewujudkan Mesuji yang sejahtera, aman dan berkeadilan
Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas dalam menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik	Mewujudkan ketersediaan sistem-sistem jaringan angkutan umum dan sarana transportasi, komunikasi dan informasi yang berkualitas	Menata dan mengembangkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat	Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi
Memberikan beasiswa/subsidi pendidikan bagi siswa yang tidak mampu atau berprestasi dan subsidi pendidikan bagi sekolah dan tenaga pendidik	Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di desa, dukungan pembentukan BUMDES dan KAD	Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat yg bergerak di bidang kepemudaan & olahraga serta meningkatkan kuantitas & kualitas kompetisi kepemudaan dan olahraga	Mengoptimalkan peran SDM dan kelembagaan dan kegiatan keagamaan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Meningkatkan sarana dan prasarana, SDM dan akses serta mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi subsektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan Perikanan dengan meningkatkan produktivitasnya, menerapkan teknologi, dan memberdayakan penyuluh	Peningkatan kualitas kerjasama dengan pihak terkait dalam peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan dengan mengembangkan pola stelsel aktif maupun stelsel pasif	Melaksanakan pengembangan dstinasi, pemasaran, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan perbaikan sarpras, promosi wisata
Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan menuju bangsa yang berkarakter	Penyelenggaraan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan perumusan kebijakan, pelayanan administrasi pemerintahan dan koordinasi perangkat daerah	Meningkatnya nilai investasi meliputi: kepastian hukum bagi investor, Pelayanan Terpadu Satu Atap, pelayanan perizinan online, Promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, Data dan Sistem	Akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian desa	peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, koordinasi penanganan pasca bencana dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha



Tabel 6.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Mesuji

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
1				Misi 1 : Mewujudkan Infrastruktur yang memadai, berkualitas dan merata																	
1	1			Tujuan 1 : Menyediakan Infrastruktur Wilayah untuk Membuka dan Mendukung aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya secara Berkelanjutan																	
1	1	1		Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa																	
1	1	1	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	6,18%	9,18%	7.723.864	12,18 %	11.137.360	15,18%	12.151.096	18,18%	22.266.205	21,18%	23.492.826	24,18%	14.842.108	24,18%	91.613.459	Dinas PU
					Persentase Jembatan dalam kondisi baik	17,95%	22,89 %	7.397.599,6	27,27 %	9.137.359,6	31,18%	9.951.095,5	34,69%	11.846.205,1	37,86%	10.830.825,6	40,74%	10.913.908,1	40,74%	60.076.993,5	Dinas PU
1	1	1	2	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	0,00%	5,54%	50.798.020,0	13,47 %	65.377.822,0	21,13%	85.415.604,0	29,02%	90.957.165,0	36,90%	67.052.881,0	44,79%	58.758.169,0	44,79%	418.359.661	Dinas PU
1	1	1	3	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara	0,00%	1,21%	64.787.418,0	2,93%	17.034.646,0	4,59%	11.470.776,0	6,24%	14.617.854,0	7,76%	13.879.639,0	9,26%	14.267.603,0	9,26%	136.057.936	Dinas PU
1	1	1	4	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Persentase panjang drainase yang dibangun	9,25%	9,75%	8.664.023,0	10,30 %	11.118.830,0	10,85%	12.230.713,0	11,39%	14.076.526,0	11,93%	14.799.163,0	12,45%	14.204.577,0	12,45%	75.093.832	Dinas PU



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
1	1	1	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat yang beroperasi baik	100,00 %	100,00 %	20.350.726	100,00 %	33.436.849,0	100,00 %	41.508.525,0	100,00 %	54.791.528,0	100,00 %	53.488.985,0	100,00 %	31.375.517,0	100,00 %	234.952.130	Dinas PU
1	1	1	6	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Dokumen Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen	564.376	1 dokumen	500.000	1 dokumen	700.000	1 dokumen	600.000	-	-	-	-	1 dokumen	2.364.376	Dishubko minfo
1	1	1	7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal (Darat, Laut dan Udara)	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1	5.000.000	1	150.000.000	0,00%	-	1 Terminal darat 1 Terminal laut	155.000.000	Dishubko minfo
1	1	1	8	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah transportasi umum darat yang tersedia	0,00%	3 unit	1.561.214	6 unit	1.127.997	6 unit	1.192.351	6 unit	1.259.078	6 unit	1.331.976	6 unit	1.406.665	6 unit	7.879.280	Dishubko minfo
1	1	1	9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	47 unit	0,00%	-	264 unit	520.477	158 unit	337.227	153 unit	452.267	160 unit	238.059	163 unit	242.522	898 unit	1.790.552	Dishubko minfo
1	1	1	10	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Uji Kelayakan Kendaraan umum	100,00 %	0,00%	-	100,00 %	37.850	100,00 %	787.850	100,00 %	4.037.850	100,00 %	37.850	100,00 %	37.850	100,00 %	4.939.250	Dishubko minfo



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode			Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1			2	3	4	5												6		7	
1	1	2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Irigasi Lainnya																		
1	1	2	11	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pesentase Luas Areal Yang terlayani Jaringan Irigasi Kondisi Baik	41,63%	42,00 %	8.192.018	43,00 %	5.178.788	44,00%	5.696.667	46,00%	6.266.334	48,00%	6.892.967	50,00%	7.582.264	50,00%	39.809.037	Dinas PU
1	1	3	Sasaran 3 : Tersedianya sarana dan prasarana dasar permukiman																		
1	1	3	12	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	35,30%	41,67 %	893.410	48,04 %	982.751	54,41%	1.081.026	60,78%	1.189.129	67,15%	1.308.042	73,52%	1.438.846	73,52%	6.893.203	Dinas Perumahan
1	1	3	13	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga dengan MCK standar	25,00%	41,00 %	6.881.514	54,00 %	7.569.665	66,00%	11.326.632	77,00%	12.159.295	89,00%	10.075.225	100,00 %	11.082.747	100,00 %	59.095.078	Dinas Perumahan
1	1	3	14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	100,00 %	100,00 %	162.900	100,00 %	941.190	100,00 %	1.035.309	100,00 %	1.138.840	100,00 %	1.252.724	100,00 %	1.377.996	100,00 %	5.908.959	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	3	15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah SR yang mendapatkan akses air bersih	2706 SR	3006	5.296.222	3306	5.825.844	3606	6.408.428	3906	7.049.271	4206	7.754.198	4506	8.529.618	4506	40.863.581	Dinas Perumahan



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
1	1	3	16	Program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan	Sarana dan Prasarana Pemerintah yang dibangun	11 unit	15 unit	5.296.222	17 unit	5.825.844	14 unit	6.408.428	14 unit	7.049.271	14 unit	7.754.198	14 unit	8.529.618	95 unit	40.863.580	Dinas Perumahan
1	1	3	17	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Gedung Pemerintah	Panjang Jalan dan drainase Fasilitas Pemerintah yang dibangun	-	9 km	10.328.349	18 km	11.361.184	15 km	17.497.302	15 km	18.747.032	15 km	15.121.735	15 km	16.633.909	87 km	89.689.510	Dinas Perumahan
1	1	4		Sasaran 4 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur energi dan sumberdaya mineral untuk mendukung peningkatan perekonomian daerah																	
1	1	4	18	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah dokumen jenis energi alternatif yang dikembangkan	2 dokumen	1 dokumen	56.000	2 dokumen	625.000	2 dokumen	330.000	1 dokumen	363.000	1 dokumen	399.300	1 dokumen	439.230	10 dokumen	2.212.530	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	4	19	Program Penerangan Jalan Untuk Kepentingan Umum	Persentase ketersediaan penerangan jalan	5,99%	5,99%	91.350	6,44%	558.000	7,77%	868.800	8,21%	955.680	9,10%	1.051.248	9,99%	1.156.373	9,99%	4.681.451	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	5		Sasaran 5 : Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah																	
1	1	5	20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara Ambient	baik	baik	100.000	baik	110.000	baik	721.000	baik	793.100	baik	872.410	baik	959.651	baik	3.556.161	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Air	baik	baik		baik		baik		baik		baik		baik		baik		Dinas Lingkungan Hidup



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
1	1	5	21	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Perusahaan yang memiliki IPAL	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %	300.000	100,00 %	330.000	100,00 %	363.000	100,00 %	399.300	100,00 %	439.230	100,00 %	1.831.530	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	5	22	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH	45,78%	30,00 %	137.145	30,00 %	770.000	30,00%	847.000	30,00%	931.700	30,00%	1.024.870	30,00%	980.947	30,00%	4.691.662	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	5	23	Program Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persentase Perusahaan yang mentaati dokumen LH (AMDAL UKL UPL)	100,00 %	100,00 %	200.000	100,00 %	300.000	100,00 %	330.000	100,00 %	363.000	100,00 %	399.300	100,00 %	439.230	100,00 %	2.031.530	Dinas Lingkungan Hidup
1	1	5	24	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Jumlah dokumen Informasi Bidang LH	3 dokumen	4 dokumen	218.715	4 dokumen	945.000	4 dokumen	1.139.500	4 dokumen	1.253.450	4 dokumen	1.378.795	4 dokumen	1.370.265	4 dokumen	6.305.725	Dinas Lingkungan Hidup
2				Misi 2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, agamis berbudaya unggul dan berdaya saing																	
2	1			Tujuan 1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat																	
2	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan akses, pemerataan serta kualitas pendidikan																	
2	1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar :			8.070.160		9.459.414		10.288.733		13.118.052		14.947.371		12.947.371		68.831.101	Dinas Pendidikan
					APK PAUD/TK	86,28%	86,28 %				86,28%				86,28%						
					APM PAUD/TK	85,05%	85,05 %				85,05%				85,05%						
					APS PAUD	93,17%	93,17 %				93,17%				93,17%						



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	1	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,46			7,54		7,55		7,57		7,59		7,71		7,62	Dinas Pendidikan	
					APK SD	95,55%	96,05 %		96,55 %		97,05%		97,55%		98,05%		98,55%		98,55%		
					APM SD	82,36%	83,36 %		84,36		85,36		86,36		87,36		88,36		88,36		
					APS SD	87,99%	88,49 %		88,99 %		89,49%		89,99%		90,59%		99,62%		99,62%		
					Angka putus sekolah (APTS) SD	0,4%	04, %		04, %		0,4%		0,4%		0,4%		0,4%		0,4%		
					Angka kelulusan SD	98,01%	98,21 %		98,41 %		98,61%		98,81		99,01		99,21		99,21		
					Angka melanjutkan SD ke SMP	77,88%	79,88 %	23.158.257	81,88 %	24.135.908	83,88%	24.696.794	85,88%	33.333.384	87,88%	35.588.636	89,88%	22.588.636	89,88%		163.501.615
					Rasio siswa SMP terhadap jumlah RKB	2,61%	2,66%		2,71%		2,76%		2,82%		2,87%		2,91%		2,91%		
					APK SMP	96,73%	97,03 %		97,33 %		97,63%		97,93%		98,23%		98,53%		98,53%		
					APM SMP	74,19%	74,06 %		74,66 %		75,26%		75,86%		76,46%		77,06%		77,06%		
					APS SMP	99,20%	99,25 %		99,30 %		99,35%		99,40%		99,45%		99,50%		99,55%		
					Angka putus sekolah (APTS) SMP	1,50%	1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		
					Angka kelulusan SMP	98,6%	98,65 %		98,70 %		98,75%		98,80%		98,85%		98,90%		98,95%		
2	1	1	3	Program Pendidikan Non Formal	Angka kelulusan paket A		100%	60.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	375.000	Dinas Pendidikan		



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
					Angka kelulusan paket B	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
					Angka kelulusan paket C	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
					Jumlah lembaga penyelenggara Paket A,B dan C yang dibina	7 lembaga	7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga				
2	1	1	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SD	72,20 %	73,20 %	13.504.051	74,20 %	19.010.828	75,20 %	24.517.605	76,20 %	30.024.383	77,20 %	35.531.160	78,20 %	36.651.716	78,20 %	159.239.742	Dinas Pendidikan
					Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SMP	76,30 %	77,30 %		78,30 %		79,80 %		80,80 %		81,80 %		82,80 %				
					Persentase pendidik yang bersertifikasi bagi SD dan SMP	28,57 %	28,85 %		29,14 %		29,42 %		29,71 %		29,99 %		30,27 %		30,27 %		
					Persentase Jumlah SD dan yang terakreditasi	81%	82%		83%		84%		85%		86%		87%		88%		
					Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi	32,60 %	33,6 %		34,6 %		35,6%		36,6%		37,6%		38,6%		38,6%		



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	1	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Ketersediaan data pendidikan secara berkelanjutan	0,00%	95,00 %	381.354	95,00 %	600.421	95,00%	639.489	95,00%	678.557	95,00%	717.624	95,00%	756.692	95,00%	3.774.136	Dinas Pendidikan
2	1	2		Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
2	1	2	6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan Keseahatan	100,00 %	100,00 %	2.919.153	100,00 %	3.211.068	100,00 %	3.532.175	100,00 %	4.885.393	100,00 %	4.273.932	100,00 %	4.701.325	100,00 %	23.523.046	Dinas Kesehata n
2	1	2	7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	80,00	80,50	1.862.930	81,00	2.442.223	81,50	2.686.445	82,00	2.955.090	82,50	3.250.599	83,00	3.575.659	83,00	16.772.946	Dinas Kesehata n
2	1	2	8	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Penurunan tingkat penyalahgunaa n bahan makanan berbahaya dan NAPZA	2 kasus	0 kasus	196.610	0 kasus	304.271	0 kasus	334.698	0 kasus	368.168	0 kasus	404.985	0 kasus	445.483	0 kasus	2.054.215	Dinas Kesehata n
2	1	2	9	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah Jenis Tanaman Obat Yang di kembangkan	35 Jenis	2 Jenis	143,61	2 Jenis	157.971	2 Jenis	173.768	2 Jenis	191.145	2 Jenis	210.259	2 Jenis	231,29	47 Jenis	733.518,31	Dinas Kesehata n



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	2	10	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Desa yang telah Melaksanakan Germas	0,00%	1,90%	700.000	23,81 %	770.000	47,62%	847.000	71,43%	931.700	100,00 %	1.024.870	100,00 %	1.127,36	100,00 %	4.274.697	Dinas Kesehatan
2	1	2	11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang ter akreditasi	33,3 %	69,2%	2.399.280	75,00 %	2.639.208	80,00%	2.127.047	90,00%	1.723.751	100,00 %	1.896.127	100,00 %	2.085.739	100,00 %	12.871.152	Dinas Kesehatan
					Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,096	0,096		0,122		0,147		0,173		0,198		0,223		0,223		
					Rasio Bidan per satuan Penduduk	1,463	1,463		1,473		1,483		1,493		1,503		1,503		1,503		
					Rasio Perawat per satuan Penduduk	0,741	0,741		0,792		0,843		0,894		0,945		0,995		0,995		
2	1	2	12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk	100,00 %	100,00 %	52.620	100,00 %	57.882	100,00 %	63.670,200	100,00 %	70.037	100,00 %	77.041	100,00 %	84,750	100,00 %	321.335	Dinas Kesehatan
2	1	2	13	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar	45%	46%	9.275.720	48%	12.803.292	48%	14.083.621	50%	18.491.983	50%	19.041.182	83%	18.745.300	100,00 %	92.441.098	Dinas Kesehatan
					Rasio Puskesmas per satuan	0,061	0,061		0,066		0,066		0,071		0,071		0,071		0,071		



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
								2017		2018		2019		2020		2021					2022
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1					2	3	4	5										6		7	
						penduduk;															
						Rasio Pustu per satuan penduduk	0,218	0,218		0,223		0,223		0,229		0,229		0,071			
						Rasio Poskesdes per satuan penduduk	0,533	0,533		0,533		0,533		0,533		0,533		0,533			
2	1	2	14	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar	22,20%	33,00 %	18.185.180	47,20 %	19.703.698	63,80%	21.374.068	83,30%	28.211.475	100,00 %	29.232.622	100,00 %	24.445.880	100,00 %	141.152.923	Dinas Kesehatan
2	1	2	15	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	65	65	5.804.850	68	6.385.335	71	7.023.868,50	75	10.726.255	78	11.498.881	81	9.348.769	81	50.787.958,7	Dinas Kesehatan
2	1	2	16	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	100,00 %	100,00 %	76.000	100,00 %	83.600	100,00 %	91.960	100,00 %	101.156	100,00 %	111.272	100,00 %	122.400,00	100,00 %	586.388	Dinas Kesehatan
2	1	2	17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar Pelayanan	100,00 %	100,00 %	76.000	100,00 %	83.600	100,00 %	91.960	100,00 %	101.156	100,00 %	111.272	100,00 %	122.400,00	100,00 %	586.388	Dinas Kesehatan



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	2	18	Program Pengawasan dan Penegendalian Kesehatan Makanan	Persentase Pengawasan dan Penegendalian Kesehatan Makanan	100,00 %	100,00 %	0,00	100,00 %	138.000	100,00 %	151.800	100,00 %	166.980	100,00 %	183.678	100,00 %	202.050	100,00 %	842.508	Dinas Kesehata n
2	1	2	19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Per seribu Kelahiran hidup	2,66	2,66	1.756.160	2,39	1.931.776	2,39	2.124.954	2,39	2.337.449	2,39	2.571.194	2,39	2.828.310	2,39	13.549.842	Dinas Kesehata n
					Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu Kelahiran Hidup	8,50	7,97		6,91		6,38		5,31		4,78		4,25		4,25		
2	1	2	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi yang ditangani	100,00 %	100,00 %	446.770	100,00 %	491.447	100,00 %	540.592	100,00 %	594.651	100,00 %	654.116	100,00 %	719.528	100,00 %	3.447.103	Dinas Kesehata n
2	1	2	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	1,90	9,52	71.510,00	28,57	78.661,00	57,14	86.527,10	76,19	90.647,44	100,00	104.697,79	100,00	115.170,00	100,00 %	547.213	Dinas Kesehata n
2	1	2	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penanganan & Pengendalian kejadian penyakit di Masyarakat	75,00%	80,00 %	39.120	85,00 %	43.032	90,00%	47.335	95,00%	52.069	100,00 %	57.276	100,00 %	63.003	100,00 %	301.835	Dinas Kesehata n
2	1	3		Sasaran 3 : Terbangunnya perempuan, anak dan lansia yang berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1					2	3	4	5												6		7
2	1	3	23	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase kelompok bina keluarga	3,17%	3,81%	60.108	5,08%	225.000	6,35%	247.500	7,62%	272.250	8,89%	299.475	10,16%	329.423	10,16%	1.433.756	DP2KBP3 A	
2	1	3	24	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utama Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	-	-	25.000	100,00 %	105.000	100,00 %	115.500	100,00 %	127.050	100,00 %	139.755	100,00 %	153.731	100,00 %	666.036	DP2KBP3 A	
2	1	3	25	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan peran perempuan	0,04%	4,76%	70.000	5,71%	77.000	6,67%	84.700	7,62%	93.170	8,57%	102.487	9,52%	112.736	9,52%	540.093	DP2KBP3 A	
2	1	3	26	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Desa Layak Anak	-	-	30.000	2,00	60.000	2,00	69.300	2	76.230	2,00	83.853	3,00	92.238	11,00	411.621	DP2KBP3 A	
2	1	4		Sasaran 4 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk																		
2	1	4	27	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	75,07	75,37	565.480	75,67	986.383	75,97	1.085.021	76,27	1.317.736	76,57	1.610.767	76,87	1.862.113	76,87	7.427.500	DP2KBP3 A	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	4	28	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,5	17,4	17.000	17,3	28.050	17,2	30.855	17,1	38.466	17	42.312	16,9	46.544	16,9	203.227	DP2KBP3 A
2	1	4	29	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Peningkatan jumlah kelompok PIK (Pusat Informasi Konseling) Remaja	36,36%	43,18 %	50.000	52,27 %	134.000	63,64%	159.500	75,00%	175.450	86,36%	192.995	100,00 %	228.399	100,00 %	940.344	DP2KBP3 A
2	1	4	30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB	Persentase pengadaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KIE Program KB	100%	100%	1.119.000	100%	1.230.900	100%	1.353.990	100%	1.489.389	100%	1.638.328	100%	1.802.161	100%	8.633.768	DP2KBP3 A
2	1	5		Sasaran 5 : Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga / meningkatnya event atau kegiatan yang dilaksanakan organisasi kepemudaan dan keolahragaan																	
2	1	5	31	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	7 cabang	7 cabang	560.000	7 cabang	830.000	7 cabang	865.000	7 cabang	1.381.000	8 cabang	940.000	12 cabang	1.070.000	12 cabang	5.646.000	Dispora
2	1	5	32	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Jumlah kelompok / organisasi yang berperan aktif dalam bidang kepemudaan	5 kelompok	1 kelompok	267.000	11 kelompok	475.000	11 kelompok	550.000	12 kelompok	475.000	20 kelompok	680.000	25 kelompok	580.000	25 kelompok	3.027.000	Dispora



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	5	33	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok yang berperan aktif dibidang kewirausahaan pemuda	25 kelompok	0 kelompok	-	15 kelompok	300.000	15 kelompok	300.000	15 kelompok	320.000	20 kelompok	350.000	30 kelompok	400.000	30 kelompok	1.670.000	Dispora
2	1	5	34	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga	328 lapangan	0 lapangan	-	20 lapangan	150.000	30 lapangan	350.000	0 lapangan	-	40 lapangan	555.000	0 lapangan	-	418 lapangan	1.055.000	Dispora
2	1	6		Sasaran 6 : Terjaminnya keadaan yang kondusif bagi penghormatan dan pengamalan agama																	
2	1	6	35	Program bimbingan keagamaan	Jumlah fasilitasi bimbingan keagamaan dan jumlah rumah ibadah yang terpelihara	2 bimbingan keagamaan dan 35 rumah ibadah	2 bimbingan keagamaan dan 46 rumah ibadah	3.470.930	2 bimbingan keagamaan dan 50 rumah ibadah	4.048.023	2 bimbingan keagamaan dan 56 rumah ibadah	4.452.825	2 bimbingan keagamaan dan 60 rumah ibadah	4.478.125	2 bimbingan keagamaan dan 66 rumah ibadah	4.925.938	2 bimbingan keagamaan dan 76 rumah ibadah	5.418.532	2 bimbingan keagamaan dan 76 rumah ibadah	26.794.373	sekadaka b (bagian kesra)
2	1	6	36	Program pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah cabang lomba yang diikuti	10 cabang lomba	10 cabang lomba	511.587	10 cabang lomba	562.745	10 cabang lomba	619.020	10 cabang lomba	680.922	10 cabang lomba	749.014	10 cabang lomba	823.915	10 cabang lomba	3.947.203	sekadaka b (bagian kesra)
2	1	6	37	program pembinaan keagamaan	Jumlah fasilitasi pembinaan keagamaan	2 fasilitasi	2 fasilitasi	349.650	2 fasilitasi	384.615	2 fasilitasi	423.076	2 fasilitasi	465.384	2 fasilitasi	511.922	2 fasilitasi	563.114	2 fasilitasi	2.697.761	sekadaka b (bagian kesra)
2	1	7		Sasaran 7 : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
2	1	7	38	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	34,59	37,74 %	2.828.615	40,88 %	3.111.476	44,03%	3.422.624	47,17%	3.764.887	50,31%	4.141.375	50,31	4.555.513	50,31	21.824.490	Dinas Pendidikan
2	1	7	39	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis seni dan budaya yang dikelola	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		
2	1	7	40	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni dan budaya yang dikelola	7 event	7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		
3				Misi 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal																	
3	1			Tujuan 1 : Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat																	
3	1	1		Sasaran 1 : Meningkatnya status desa																	
3	1	1	1	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Gerbang desa	7,62%	20,00 %	187.239	29,52 %	310.000	34,29%	341.000	38,10%	375.100	42,86%	412.610	47,62%	453.871	100,00 %	2.079.820	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	1	1	2	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Peningkatan desa yang memiliki bumdes	0,95%	82,86 %	173.687	85,71 %	448.500	88,57%	493.350	91,51%	542.685	96,19%	596.954	100,00 %	656.649	100,00 %	2.911.824	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
								2017		2018		2019		2020		2021					2022
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1					2	3	4	5										6		7	
3	1	1	3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dari aparat pemerintah	1 desa	1 desa	100.000	2 desa	250.000	2 desa	275.000	2 desa	302.500	2 desa	332.750	2 desa	366	12 desa	1.260.616	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at Desa
3	1	1	4	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas aparat pemerintah desa	12%	23%	1.278.302	33%	1.953.545	44%	2.768.900	54%	2.363.789	65%	3.800.168	75%	2.860.185	75,24%	15.024.890	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at Desa
3	1	1	5	Program Bulan Bhakti Gorong Royong	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	1 desa	1 desa	153.035	1 desa	200.000	1 desa	220.000	1 desa	242.000	1 desa	266.200	1 desa	292.820	7 desa	1.374.055	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at Desa
3	1	1	6	Program Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Daerah	persentase Peningkatan pebinaan kelompok kerja wanita dalam pembangunan daerah	0,00%	25,00%	102.000	50,00%	150000	75,00%	165.000	100,00%	181.500	100,00%	199.650	100,00%	219.615	100,00%	1.017.765	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at Desa
3	1	1	7	Program Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang diikutsertakan di tingkat nasional	7 TTG	1 TTG	315.835	1 TTG	455.000	1 TTG	500.500	1 TTG	550.550	1 TTG	605.605	1 TTG	666.166	13 TTG	3.093.656	Dinas Pemberd ayaan Masyarak at Desa
3	2			Tujuan 2 : Menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan pengangguran																	
3	2	2		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pengerahan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), penyediaan safety net penduduk miskin dan penanganan kemiskinan terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
3	2	2	8	Program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1349 orang	3768 orang	200.000	6700 orang	559.000	6770 orang	771.500	6770 orang	784.625	6770 orang	784.625	6770 orang	844.000	37548 orang	3.943.750	Dinas Sosial
3	2	2	9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan	0 orang	50 orang	88.033	212 orang	470.000	500 orang	846.700	500 orang	866.235	499 orang	866.747	499 orang	711.625	2260 orang	3.849.339	Dinas Sosial
3	2	2	10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah masyarakat yang di layani dan di rehabilitasi	20 orang	10 orang	293.870	35 orang	261.943	185 orang	768.393	195 orang	774.018	195 orang	1.181.522	195 orang	1.181.522	815 orang	4.461.268	Dinas Sosial
3	2	2	11	Program Pembinaan Anak terlantar	Jumlah Anak yang Tertangani dalam lembaga kesejahteraan sosial anak	675 anak	675 anak	-	675 orang	129.795	835 orang	295.000	840 orang	332.500	895 orang	407.000	900 orang	395.000	5180 orang	1.559.295	Dinas Sosial
3	2	2	12	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Extrauma	Jumlah Penyandang Cacat yang Tertangani	0 orang	0 orang	-	125 orang	232.904	215 orang	464.549	215 orang	476.777	220 orang	580.971	220 orang	580.971	995 orang	2.336.172	Dinas Sosial
3	2	2	13	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat yang terfasilitasi Kelembagaan Sosial (orang)	0 orang	105 orang	300.000	50 orang	117.955	523 orang	1.124.000	523 orang	1.124.000	543 orang	1.159.000	543 orang	1.159.000	2287 orang	4.983.955	Dinas Sosial



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
3	3			Tujuan 3 : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan																	
3	3	3		Sasaran 3 : Menurunnya tingkat pengangguran																	
3	3	3	14	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang ditangani	50 orang	-	-	90 orang	60.000	90 orang	66.000	90 orang	72.600	90 orang	79.860	90 orang	87.846	590 orang	366.306	Nakertrans
3	3	3	15	Program Pengembangan informasi data ketenagakerjaan	Database ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	2 dokumen	125.000	1 dokumen	82.500	1 dokumen	90.750	1 dokumen	99.825	2 dokumen	548.075	Nakertrans
3	3	3	16	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 orang	20 orang	40.325	20 orang	75.000	20 orang	75.000	20 orang	82.500	20 orang	90.750	20 orang	99.825	190 orang	463.400	Nakertrans
3	3	3	17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh	10,00%	11,00 %	70.000	12,00 %	60.000	13,00%	66.000	14,00%	72.600	15,00%	79.860	16,00%	87.846	16,00%	436.306	Nakertrans
3	3	3	18	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase desa di wilayah transmigrasi yang dikembangkan	0,00%	5,13%	3.220.625	5,13%	3.381.656	10,26%	3.550.739	5,13%	3.728.276	5,13%	3.914.690	5,13%	4.110.424	35,90%	21.906.410	Nakertrans
3	3	4		Sasaran 4 : Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
							2017		2018		2019		2020		2021					2022
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1				2	3	4	5										6		7	
3	3	4	19	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)	Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Pangan pertanian (Ton)													Dinas Pertanian		
					Padi (Ton)	252.334	252.834		253.334		253.834		254.334		254.834		255.334		1.776.838	
					Jagung (Ton)	3.203	3.184	470.209	3.264	2.079.719	3.343	2.820.905	3.423	2.532.908	3.502	4.859.042	3.582		5.602.619	23.501
					Kedelai (Ton)	56	60		80		99		101		106		111		613	
					ubi kayu (Ton)	54.510	54.668		54.826		54.984		55.142		55.300		55.458		384.888	
					Jeruk (Ha)	-	153		243		308		371		434		502		2.011	
					Pisang (Ha)	-	44		58		72		86		102		115		477	
					Nanas (Ha)	0	5,5		23		41		57,50		72		86		285	
3	3	4	20	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan :													Dinas Pertanian		
					Sawit (Ton)	23.695	23.849	242.755	24.002	601.253	24.155	741.066	24.308	891.687	24.461	933.158	24.615		975.519	169.085
					Karet(Ton)	20.164	21.991		22.091		22.191		22.291		22.391		22.491		153.610	
					Lada (Ha)	-	5		5		5		10		20		25	70		
					Kelapa (Ha)	-	10		35		40		50		50		80	265		
					Cabe Jawa (Ha)	-	5		14		15		25		35		45	139		



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD								
							2017		2018		2019		2020		2021					2022							
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)						
1				2	3	4	5										6		7								
3	3	4	21	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Peningkatan produksi Ternak :			169.762		178.250		187.163		196.521		206.347		216.664		1.154.706	Dinas Pertanian						
					Sapi (Ekor)	398	408				419				430				440				451		462		3.007
					Kerbau (Ekor)	4	4				5				5				6				6		7		38
					Babi (Ekor)	805	854				903				952				1.001				1.050		1.100		6.665
					Kambing (Ekor)	8.853	9.275				9.696				10.118				10.540				10.708		10.961		70.152
					Ayam (Ekor)	230.280	239.923				249.566				259.209				268.852				278.496		288.139		1.814.465
					Telur (Ton)	210,00	211,00				212,00				213,00				214,00				215,00		216,00		1.491
3	3	4	22	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	149,00 %	2,00%	75.000	2,00%	170.000	2,00%	187.000	2,00%	205.700	2,00%	226.270	2,00%	248.897	161,00 %	1.112.867	Dinas Perikanan dan Kelautan						
3	3	4	23	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	10,00%	2,00%	25.000	2,00%	3.070.000	2,00%	77.000	2,00%	84.700	2,00%	93.170	2,00%	102.487	22,00%	3.452.357	Dinas Perikanan dan Kelautan						
3	3	4	24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Luas Areal Budidaya Perikanan	730 kolam	300 kolam	120.000	300 kolam	200.000	300 kolam	220.000	300 kolam	242.000	300 kolam	266.200	300 kolam	292.820	2300 kolam	1.341.020	Dinas Perikanan dan Kelautan						



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
								2017		2018		2019		2020		2021					2022
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1					2	3	4	5										6		7	
3	3	4	25	Program Peningkatan sarana dan prasarana balai benih, UPR, atau HSRT dan Penyediaan induk atau calon induk	Jumlah UPR yang dibangun	7 UPR	0,00%	-	0,00%	-	1 UPR	220.000	1 UPR	242.000	1 UPR	266.200	1 UPR	292.820	11 UPR	1.021.020	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	3	4	26	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah unit prasarana budidaya perikanan yang dibagikan ke kelompok	18 paket	0,00%	-	5 unit	100.000	5 unit	110.000	5 unit	121.000	5 unit	133.100	5 unit	146.410	28 unit	610.510	Dinas Perikanan dan Kelautan
3	3	4	27	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan Jalan Pertanian yang mendukung Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan	112.4 km	0 km	65.585	3,5 km	918.864	3,5 km	964.807	3,5 km	1.013.048	3,5 km	1.063.700	3,5 km	1.116.885	129.9 Km	5.142.890	Dinas Pertanian
3	3	4	28	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Tepat Guna	Meningkatkan Pengetahuan Petani Tentang Panen dan Pasca Panen Tanaman Karet, Pengoperasian	0 Petani	30 Petani	172.735	30 Petani	181.372	30 Petani	190.440	30 Petani	199.962	30 Petani	209.960	30 Petani	220.458	180 Petani	1.174.928	Dinas Pertanian



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
3	3	4	29	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian perkebunan yang meningkat kapasitasnya	72 orang	72 orang	252.793	72 orang	265.432	72 orang	278.704	72 orang	292.639	72 orang	307.271	72 orang	322.634	72 orang	1.719.473	Dinas Pertanian
3	3	4	30	Program Peningkatan Produksi	Jumlah peningkatan Luas Areal Tanam Tembakau	2 Ha	15 Ha	249.454	15 Ha	261.927	30 Ha	275.023	40 Ha	288.774	50 Ha	303.213	60 Ha	318.374	162 Ha	1.696.764	Dinas Pertanian
3	3	4	31	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah jaringan irigasi pertanian yang dikembangkan	0 Unit	20 Unit	5.759.736	20 Unit	6.047.723	20 Unit	6.350.109	20 Unit	6.667.614	20 Unit	7.000.995	20 Unit	7.351.045	120 Unit	39.177.222	Dinas Pertanian
3	3	4	32	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Difasilitasinya pencegahan Penanggulanga n penyakit Ternak	552 ekor	500 Ekor	451.044	500 Ekor	845.386	500 Ekor	483.365	500 Ekor	507.534	500 Ekor	532.910	500 Ekor	559.556	3552 Ekor	3.379.795	Dinas Pertanian
3	3	5		Sasaran 5 : Meningkatnya ketersediaan,distribusi dan komsumsi serta keamanan pangan daerah																	
3	3	5	33	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan pada lumbung pangan masyarakat	48 ton	50 ton	32.500	60 ton	396.551	70 ton	470.491	80 ton	517.540	90 ton	569.294	100 ton	626.223	100 ton	2.612.599	Dinas Ketahana n Pangan
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	73	73,5	61.171	75	203.723	77	324.095	78	356.505	79	392.155	80	431.371	80	1.769.020	Dinas Ketahana n Pangan



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
								2017		2018		2019		2020		2021		2022				
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1					2	3	4	5												6		7
3	3	6	Sasaran 6 : Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian																			
3	3	6	35	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Petani Pelaku Agribisnis yang Meningkatkan Pengetahuannya	0,0	20,0	768.283	20,0	157.175	20,0	368.963	20,0	427.795	20,0	957.963	20,0	206.241	120,0	2.886.419	Dinas Pertanian	
3	3	6	36	Program Pembinaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah perkebunan besar swasta yang di bina	10 Perusahaan	11 Perusahaan	143.616	11 Perusahaan	250.000	11 Perusahaan	150.000	11 Perusahaan	150.000	11 Perusahaan	300.000	11 Perusahaan	175.000	11 Perusahaan	1.168.616	Dinas Pertanian	
3	3	6	37	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase Standar peralatan penyuluhan yang dimiliki oleh penyuluh perikanan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	50.000	25,00%	55.000	0,25%	60.500	100,00%	66.550	100,00%	232.050	Dinas Perikanan dan Kelautan	
3	3	6	38	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase Poklamsar yang mendapatkan pendampingan	0,00%	0,00%	-	20,00%	50.000	20,00%	55.000	20,00%	60.500	20,00%	66.550	20,00%	73.205	100,00%	305.255	Dinas Perikanan dan Kelautan	
3	4	Tujuan 4 : Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah																				
3	4	7	Sasaran 7 : Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata																			
3	4	7	39	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	5000	6000	180.000	7000	525.000	8000	565.000	9000	624.000	10000	637.000	11000	747.000	11000	3.278.000	Dispora	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
3	4	7	40	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	1	0	-	1	275.000	1	175.000	2	875.000	1	795.000	1	200.000	7	2.320.000	Dispora
3	5			Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah																	
3	5	8		Sasaran 8 : Berkembangnya industri kecil dan menengah																	
3	5	8	41	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang terfasilitasi	103 IKM	-	-	24 IKM	425.000	24 IKM	278.250	24 IKM	292.163	24 IKM	506.771	24 IKM	322.109	199 IKM	1.824.292	Dinas Koperasi dan UKM
3	5	9		Sasaran 9 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)																	
3	5	9	42	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	116 Koperasi	-	-	5 Koperasi	50.000	5 Koperasi	192.500	5 Koperasi	55.125	5 Koperasi	207.881	5 Koperasi	60.775	141	566.282	Dinas Koperasi dan UKM
3	5	9	43	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	0 UMKM	0 UMKM	30.300	20 UMKM	3.715.000	20 UMKM	386.750	20 UMKM	786.088	20 UMKM	426.392	20 UMKM	447.711	100 UMKM	5.792.241	Dinas Koperasi dan UKM
3	6			Tujuan 6 : Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah																	
3	6	10		Sasaran 10 : Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
3	6	10	44	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah jenis barang dan jasa beredar yang diawasi	11 Jenis	11 Jenis	25.000	12 Jenis	85.000	13 Jenis	1.589.250	14 Jenis	93.713	15 Jenis	98.398	16 Jenis	103.318	16	1.994.679	Dinas Koperasi dan UKM
3	6	10	45	Program Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event Promosi yang diikuti	14 Event	3 Event	211.776	3 Event	350.000	3 Event	367.500	3 Event	385.875	3 Event	405.169	3 Event	425.427	32	2.145.747	Dinas Koperasi dan UKM
3	6	10	46	Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi	Jumlah desa penerima manfaat sistem distribusi perdagangan	21 Desa	10 Desa	48.266	10 Desa	150.000	10 Desa	157.500	10 Desa	165.375	10 Desa	173.644	10 Desa	182.326	81 Desa	877.111	Dinas Koperasi dan UKM
3	6	10	47	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah UPTD yang terpelihara	3 UPTD	3 UPTD	161.200	4 UPTD	180.000	5 UPTD	350.000	6 UPTD	367.500	7 UPTD	385.875	7 UPTD	405.169	7 UPTD	1.849.744	Dinas Koperasi dan UKM
4				Misi 4 : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban berbasis kemitraan yang partisipatif dan taat hukum																	
4	1			Tujuan 1 : Memelihara ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat																	
4	1	1		Sasaran 1 : Terciptanya ketentraman, ketertiban dan pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
								2017		2018		2019		2020		2021					2022	
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
								5														6
1	2	3	4	5														6		7		
4	1	1	1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik yang tertangani	45 konflik	5 konflik	163.400	5 konflik	172.000	5 konflik	180.200	5 konflik	190.000	5 konflik	199.000	5 konflik	205.000	75 konflik	1.109.600	Kesbangpol	
4	1	1	2	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kanrantibmas			138.000		258.000	20	258.000	40	258.000	60	258.000	80	258.000	100	1.428.000	Satpol PP	
4	1	1	3	Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakan			-	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	325.000	Satpol PP	
4	1	1	4	Program kerjasama daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah dokumen kerjasama daerah	1	1	1.959.688	1	2.155.657	1	2.371.222	1	2.608.345	1	2.869.179	1	3.156.097	7	15.120.189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
4	1	1	5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Tokoh suku bangsa, agama, dan masyarakat sipil	3 kegiatan	3 kegiatan	194.000	4 kegiatan	453.500	4 kegiatan	476.150	4 kegiatan	499.500	4 kegiatan	525.500	4 kegiatan	546.000	4 kegiatan	2.694.650	Kesbangpol	
4	1	1	6	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan politik Masyarakat di	3 kegiatan	3 kegiatan	208.593	2 kegiatan	112.350	2 kegiatan	117.950	2 kegiatan	123.900	2 kegiatan	130.100	3 kegiatan	286.100	3 kegiatan	978.993	Kesbangpol	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
					daerah																
4	1	1	7	Program Analisis Potensi	Jumlah Potensi Konflik yang terfasilitasi	2 konflik	2 konflik	110.000	7 konflik	115.500	7 konflik	121.200	7 konflik	127.400	7 konflik	133.700	7 konflik	140.000	39 konflik	747.800	Kesbangpol
4	1	1	8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan dilingkungan pemerintah dan masyarakat.	0	0	508.506	20	585.000	40	676.718	60	400.000	80	400.000	100	400.000	100,00	2.970.223	Satpol PP
5				Misi 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien															-		
5	1			Tujuan 1 : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik																	
5	1	1		Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah																	
5	1	1	1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	WTP	WTP	4.236.044	WTP	4.468.116	WTP	4.963.007	WTP	5.447.302	WTP	5.992.032	WTP	6.438.775	WTP	31.545.275	BPPKAD



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	1	2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Persentase Pencapaian Realisasi pajak yang dikelola Kabupaten (realisasi Penerimaan Pajak th n/Jumlah Target Pajak daerah)*100%	44,26%	46,00 %	246.811	48,00 %	246.811	50,00%	271.492	52,00%	298.641	54,00%	328.505	56,00%	361.356	56,00%	1.753.617	BPPKAD
5	1	1	3	Program Peningkatan Pencapaian PAD	Persentase Pencapaian Target PAD (Jumlah Realisasi PAD Tahun ke n/Target PAD Tahun n)*100%	75,00%	76,00 %	0	77 %	250.000	78,00%	407.000	79,00%	447.700	80,00%	492.470	81,00%	541.717	81,00%	2.138.887	BPPKAD
5	1	1	4	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Sumber Pendapatan Daerah	0,00%	0,00%	-	10,00 %	100.000	10,00%	110.000	10,00%	121.000	10,00%	133.100	10,00%	146.410	10,00%	610.510	BPPKAD
5	1	1	5	Program Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase Pencapaian Realisasi PBB P2 (Realisasi PBB P2 tahun ke n/Target PBB P2 tahun ke n)*100%	56,00%	0,00%	-	60,00 %	120.000	70,00%	132.000	80,00%	145.200	90,00%	159.720	100,00 %	175.692	100,00 %	732.612	BPPKAD
5	1	2		Sasaran 2 : Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	2	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Usulan Musrenbang kabupaten yang tertampung dalam RKPD	-	5%		6%	7,00%		8,00%		9,00%		10,00%	10,00%		Bappeda		
					Persentase Kesesuaian Renja OPD dengan RKPD	-	90%	915.000	91%	551.250	92,00%	678.813	93,00%	607.753	94,00%	638.141	95,00%	670.048		95,00%	4.061.004
					Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	-	90%		91%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%			95,00%	
					Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD	-	90%		91%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%			95,00%	
5	1	2	7	Program Pengendalian, pelaporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan	5	4	275.000	3	182.500	4	275.750	3	220.825	3	242.908	4	267.198	26	1.464.185	Bappeda
5	1	2	8	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber daya Alam	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	7	3	448.000	2	183.750	2	192.938	2	202.584	2	412.714	2	223.349	20	1.663.335	Bappeda



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode					Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD	
								2017		2018		2019		2020		2021					2022
								Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target
1					2	3	4	5										6		7	
5	1	2	9	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	2	5	688.500	3	336.525	3	353.351	3	371.019	3	389.570	3	409.048	24	2.548.013	Bappeda
5	1	2	10	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2	375.000	1	315.000	2	405.750	1	347.288	2	439.652	1	223.349	9	2.106.039	Bappeda
5	1	2	11	Program Peningkatan Penelitian dan pengembangan Inovasi Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian Kerjasama dengan Lembaga Penelitian	-	-		2	250.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	650.000	Bappeda
					Presentase tindak lanjut hasil penelitian			100%			100%				100%				100%		
5	1	2	12	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4	275.000	3	182.500	4	275.750	3	220.825	3	242.908	4	267.198	23	1.464.181	Bappeda



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
5	1	2	13	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Persentase OPD dengan dokumen renja yang baik	-	-	-	90%	125.000	90%	137.500	90%	151.250	90%	166.375	90%	183.013	90%	763.138	Bappeda
5	1	3		Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan																	
5	1	3	13	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	100%	100%	1.396.143,50	100%	2.442.299,50	100%	2.774.431,05	100%	3.132.274,96	100%	3.441.224,65	100%	3.696.141,51	100%	16.882.515,16	Inspektorat
5	1	3	14	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	6 kali	12 kali	37.900,00	12 kali	41.690,00	12 kali	45.859,00	12 kali	50.450,00	12 kali	55.495,00	12 kali	61.000,00	78 kali	292.394,00	Inspektorat
5	1	3	15	Program Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Persentase disiplin aparatur	70%	75%	75.885,00	80%	114.565,00	85%	120.300,00	90%	126.315,00	90%	132.600,00	90%	139.230,00	90%	708.895,00	Inspektorat
5	1	3	16	Program Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan	60%	100%	157.742,50	100%	442.142,50	100%	486.356,75	100%	534.992,43	100%	588.491,67	100%	647.340,83	100%	2.857.066,68	Inspektorat



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
					pemeriksaan																
5	1	4		Sasaran 4 : Meningkatnya kompetensi aparatur																	
5	1	4	17	Program Peningkatan Kapasiti Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompotensi	43,49%	45,00 %	1.611.594	46,00 %	3.996.465	47,00%	4.162.500	48,00%	4.884.133	49,00%	4.174.500	50,00%	4.274.500	50,00%	23.103.692	BKDD
5	1	4	18	Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	64,00%	65,00 %	2.503.219	66,00 %	6.020.322	67,00%	7.141.645	68,00%	4.792.837	69,00%	5.569.287	70,00%	10.414.987	70,00%	36.442.297	BKDD
5	1	4	19	Program Mutasi dan Kepangkatan	Persentase Penerbitan SK Mutasi dan Kepangkatan yang Tepat Waktu	75,00%	80,00 %	209.000	82,00 %	234.650	85,00%	644.633	87,00%	676.864	90,00%	710.707	92,00%	746.243	92,00%	3.222.097	BKDD
5	1	4	20	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS	15	26	93.500	15	93.500	20	98.175	20	98.175	20	98.175	25	103.082	121	584.607	BKDD
5	1	4	21	Program Penyusunan Data Pegawai	Jumlah Data Pegawai yang di susun	2 Dok	2 Dok	210.850	2 Dok	285.850	2 Dok	296.393	2 Dok	311.212	2 Dok	319.085	2 Dok	331.289	12 dokume n	1.754.679	BKDD
5	1	5		Sasaran 5 : Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	5	22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	8.953.526	100%	9.848.879	100%	10.833.766	100%	11.917.143	100%	13.108.857	100%	14.419.743	100%	69.081.914,74	Bagian Umum (Sekretariat at Daerah)
5	1	5	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik	67	72	3.641.799	78	3.642.163	83	3.642.527	89	3.642.892	94	3.643.256	96	3.643.620	100	21.856.257	
5	1	5	24	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	presentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam menjalankan tupoksi	100%	100%	76.042,00	100%	76.810,80	100%	77.578,91	100%	78.354,70	100%	79.138,24	100%	387.924,64	100%	775.849,28	
5	1	5	25	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur Pemerintah yang Meningkatkan kapasitasnya	0	50	200.840	55	220.924	66	243.016	72	267.318	79	294.050	86	323.455	408	1.549.603	
5	1	5	26	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	192.101	4 dokumen	211.311	4 dokumen	232.442	4 dokumen	255.687	4 dokumen	281.255	4 dokumen	309.380.783	4 dokumen	310.553.579	
5	1	5	27	Program Penataan Kelembagaan dan organisasi perangkat daerah	Jumlah Sosialisasi Tata Naskah organisasi perangkat daerah	0	0	-	1 Keg	62.300	1 Keg	68.530	1 Keg	75.383	1 Keg	82.921	1 Keg	91.213	6 Keg	380.348	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	5	28	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksana peningkatan pelayanan kedinasan	100%	100%	455.000	100%	500.500	100%	550.550	100%	605.605	100%	666.166	100%	732.782	100%	3.510.603	sekda (Tata Pemerintahan)
5	1	5	29	Program penataan Wilayah Pemerintahan	Jumlah Wilayah Pemerintahan yang di mekarkan	-	-	355.955	10 Desa dan 3 Kecamatan	841.551		430.706		473.776		521.154		573.269	10 Desa dan 3 Kecamatan	3.196.410	sekda (Tata Pemerintahan)
5	1	5	30	Program Evaluasi dan pelaporan pemerintahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	3 Dok	2 Dok	125.620	2 Dok	138.182	2 Dok	152.000	2 Dok	167.200	2 Dok	183.920	2 Dok	202.312	14 Dok	969.235	sekda (Tata Pemerintahan)
5	1	5	31	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase produk hukum daerah yang dibentuk dan disosialisasikan	-	100%	1.013.000	100%	1.364.300	100%	1.500.730	100%	1.650.803	100%	1.815.883	100%	1.997.471	100%	9.342.187	sekda (hukum dan organisasi)
5	1	5	32	program kelembagaan	Peningkatan jumlah produk hukum terkait kelembagaan yang disahkan	3 produk hukum	2 produk hukum	100.000	2 produk hukum	110.000	2 produk hukum	121.000	2 produk hukum	133.100	2 produk hukum	146.410	2 produk hukum	161.051	15 produk hukum	771.561	sekda (hukum dan organisasi)
5	1	5	33	Program analisis dan formasi jabatan	persentase keterisian jabatan	0%	90%	200.000	90%	220.000	90%	242.000	90%	254.100	90%	279.510	90%	307.461	90%	1.503.071	sekda (hukum dan organisasi)



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021					2022	
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	5	34	Program pengembangan kinerja aparatur	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten	CC	CC	151.587	CC	166.745	B	183.420	B	195.520	BB	215.071	A	236.579	A	1.148.922	sekda (hukum dan organisasi)
5	1	5	35	Program ketatalaksanaan	persentase OPD yang memiliki SOP	-	75%	50.000	75%	543.195	80%	152.399	85%	167.639	90%	184.403	95%	202.843	95%	1.300.479	sekda (hukum dan organisasi)
5	1	5	36	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur bagian hukum dan organisasi yang mengikuti bimtek	0%	0%	-	25%	75.000	42%	82.500	50%	90.750	58%	99.825	83%	109.807	83%	457.882	sekda (hukum dan organisasi)
5	1	5	37	Program Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan administrasi pembangunan yang baik	70%	70%	280.000	70%	408.000	70%	448.800	70%	493.680	70%	543.048	70%	597.353	70%	2.770.881	sekda (Ekbang)
5					Persentase Peningkatan Lelang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah	19%	31%		43%		56%		70%		85%		100%		Sekda (Bagian Pengadaa n Barang dan Jasa)		
5	1	5	38	Program peningkatan kualitas aparatur Korpri	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Konsultasi bagi Aparatur Sipil Negara	4	9%	342.231	13%	295.000	18%	450.000	22%	375.000	27%	600.000	31%	600.000	36%	2.662.231	Sekretari at Korpri



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
5	1	6		Sasaran 6 : Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa																	
5	1	6	1	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	420	420	175.000	420	192.500	420	211.750	420	232.925	420	256.218	420	281.839	2.940	1.350.652	Kecamatan
5	1	6	2	Program Penjangkaran Aspirasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan penjangkaran aspirasi pembangunan	35	7	140.000	7	154.000	7	169.400	7	186.340	7	204.974	7	225.471	77	1.080.192	Kecamatan
5	1	6	3	Program Peningkatan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan			15.800	1.750	350.000	1.925	385.000	2.118	423.500	2.329	465.850	2.562	512.435	10.684	2.152.585	Kecamatan
5	1	7		Sasaran 7 : Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD																	
5	1	7	4	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan Peraturan Daerah yang di sahkan	16%	20%	8.314.886,65	38%	9.117.875,32	43%	10.029.663	54%	11.032.629	66%	12.135.892	77%	13.349.481	77%	63.980.427	Sekretari at DPRD
5	1	8		Sasaran 8 : Pengembangan dan penataan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu																	
5	1	8	5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	0,00%	30,00 %	31.630	35,00 %	214.780	40,00%	74.470	45,00%	81.917	50,00%	90.159	55,00%	293.486	55,00%	786.442	Dukcapil



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
5	1	8	6	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan / Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan E-KTP dan Kartu Keluarga	247191	22800	130.229	22400	143.252	22300	144.373	21900	151.838	21500	383.442	21500	638.206	379591	1.591.342	Dukcapil
5	1	8	7	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan akta-akta	55907	9750	77.390	10000	85.129	10100	93.642	10200	103.006	10300	113.307	10425	124.637	116682	597.111	Dukcapil
5	1	8	8	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	jumlah dokumen laporan administrasi kependudukan dalam satu tahun	12 dokume n	12 dokum en	42.700	12 dokum en	46.970	12 dokume n	51.667	12 dokume n	56.834	12 dokume n	62.517	12 dokume n	68.769	12 dokume n	329.457	Dukcapil
5	1	8	9	Progam Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Presentase Jumlah instansi yang terfasilitasi data kependudukan	0,00%	0,00%	-	10,00 %	29.000	15,00%	31.900	20,00%	35.090	25,00%	38.599	30,00%	42.459	100,00 %	177.048	Dukcapil
5	1	9		Sasaran 9 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.																	
5	1	9	10	Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa	jumlah desa yang dapat mengakses radio dengan baik	0,00%	0,00%	-	105 desa	69.270	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	69.270	Dishubko minfo



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
5	1	9	11	Program keterbukaan informasi publik	Jumlah Penyelenggaraa n kegiatan Pemerintahan yang dipublikasikan	96 kali	96 kali	54.136	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	454.811	Dishubko minfo
5	1	9	12	Pengembangan data/Informasi/S tatistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	0,00	0,00	-	6 dokum en	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokume n	350.000	Dishubko minfo
5	1	9	13	Program Optimaliasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan media massa	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan di media massa	100 Rilis	110	1.900.00 0	120	2.280.00 0	130	2.717.00 0	140	3.218. 600	150	3.793. 350	160	4.386.66 9	810	18.295.6 19	Bagian Humas
5	1	9	14	Program Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Jumlah Media non media masa yang menyebarluask an Informasi pembangunan daerah	9 Jenis	9 Jenis	250.000	9 Jenis	275.000	9 Jenis	302.500	9 Jenis	332.75 0	9 Jenis	366.02 5	9 Jenis	402.628	9 Jenis	1.928.90 3	Bagian Humas
5	1	9	15	Program Peningkatan Hubungan antar lembaga dan masyarakat	Jumlah lembaga media masa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	70 media massa	0	24.400	70 media massa	26.840	70 media massa	29.524	70 media massa	29.524	70 media massa	32.476	70 media massa	35.724	70 media massa	178.488, 44	Bagian Humas
5	1	10		Sasaran 10 : Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
							2017		2018		2019		2020		2021		2022				
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1				2	3	4	5												6		7
5	1	10	16	Program sertifikasi tanah	Jumlah Tanah Milik Pemerintah daerah yang Bersertifikat	10 Bidang	10 Bidang	230.000	10 Bidang	253.000	10 Bidang	278.300	10 Bidang	306.130	10 Bidang	336.743	10 Bidang	370.417	70 Bidang	1.774.590	sekda (Tata Pemerint ahan)
5	1	10	17	Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	14%	29%	95.000,00	43%	104.500,00	57%	114.950,00	71%	126.445,00	86%	139.089,50	100%	152.998,45	100%	732.983	sekda (Tata Pemerint ahan)
5	1	11		Sasaran 11 : Meningkatnya kesiapsiagaan dan kerjasama Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam penanggulangan bencana																	
5	1	11	18	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Desa Siaga Bencana	-	-	162.782	32%	1.360.000	38%	570.000	44%	615.707	50%	513.100	56%	526.410	62%	2.567.998	BPBD, sat pol pp dan Dinas Sosial
5	1	11	19	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulanga n Korban Bercana Alam	0 orang	118 orang	-	175 orang	226.640	300 orang	485.640	300 orang	389.840	300 orang	399.500	300 orang	399.500	1598 orang	1.901.120	Dinas Sosial
5	1	12		Sasaran 12 : Meningkatnya tertib kearsipan daerah																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD		
							2017		2018		2019		2020		2021		2022			Target	Rp (000)
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1				2	3	4	5										6		7		
5	1	2	20	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Sekolah (sd/SMP) yang mendapatkan Layanan Perpustakaan Keliling	28,41%	28,41 %	104.500	34,09 %	238.825	36,93%	262.500	39,77%	288.300	42,61%	316.975	42,61%	316.975	42,61%	1.528.075	Kantor Arsip
5	1	2	21	Program Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase OPD yang menjalankan standar baku arsip	0,00%	2,86%	67.500	11,43 %	103.000	22,86%	113.300	34,29%	90.250	40,00%	99.250	51,43%	99.250	51,43%	572.550	Kantor Arsip
5	1	2	22	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD yang mengikuti Pelatihan	0,00%	100,00 %	19.150	100,00 %	50.000	100,00 %	55.000	100,00 %	60.500	100,00 %	66.550	100,00 %	66.550	100,00 %	317.750	Kantor Arsip
5	1	3		Sasaran 13 : Terwujudnya keseuaian pemanfaatan ruang																	
5	1	3	23	Program Perencanaan Tata Ruang	Tertatanya zonasi ruang di wilayah kabupaten mesuji	100,00 %	100,00 %	640.120	100,00 %	2.150.000	100,00 %	3.555.000	100,00 %	60.500	100,00 %	66.550	100,00 %	73.205	100,00 %	6.545.375	Dinas PU (Tata Ruang)
5	1	3	24	Program Pemanfaatan dan Penegndalian Tata Ruang	Termanfaatnya fungsi ruang sesuai dengan peruntukan	0,00%	0,00%	493.430	100,00 %	2.962.377	100,00 %	195.115	100,00 %	214.626	100,00 %	236.089	100,00 %	259.698	100,00 %	4.361.334	Dinas PU (Tata Ruang)
5	1	4		Sasaran 14 : Meningkatnya nilai investasi																	



RPJMD KABUPATEN MESUJI 2017-2022

Kode				Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		OPD			
							2017		2018		2019		2020		2021					2022		
							Targe t	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)	
							5										6			7		
5	1	1	4	25	Progam Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi	59%	65%	-	71%	375.000	76%	238.000	82%	237.000	88%	265.000	94%	262.000	100%	1.377.000	DPMPT
						JUMLAH			345.997.722		383.514.134		437.341.348		507.761.729		646.089.561		769.649.416		3.090.353.911	

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Selain itu, dalam upaya mewujudkan program perangkat daerah tersebut, dibutuhkan asumsi pendanaan sebagai gambaran dari biaya yang akan dikeluarkan pada program tersebut. Hal ini dirumuskan dalam sebuah kerangka pendanaan keuangan daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk melihat kemampuan kerangka pendanaan keuangan suatu daerah, dapat dilihat dari perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tersebut. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Mesuji yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mesuji dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2017-2022 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya, maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2017-2022.



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022
Kabupaten Mesuji

No	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
			1	2	3	4	5	6
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN							
2	Belanja (b1 + b.2)	9,79%	765.514.322.250	837.512.612.006	934.913.839.278	1.057.820.147.811	1.228.492.308.539	1.391.374.280.103
2.1	Belanja Tidak Langsung	8,39%	357.244.577.900	385.866.607.957	417.539.180.456	452.610.985.246	491.471.871.353	534.557.701.395
2.1.1	Belanja pegawai	4,43%	203.506.739.455	227.499.092.553	254.320.015.400	284.302.981.201	317.820.777.860	355.290.142.976
2.1.4	Hibah	4,43%	5.430.200.000	6.149.087.646	6.963.146.640	7.884.976.425	8.928.844.449	10.110.906.983
2.1.5	Bantuan sosial	4,43%	12.205.000.000	12.745.895.248	13.310.761.629	13.900.661.482	14.516.704.230	15.160.048.461
2.1.6	Belanja bagi hasil	-7,77%	1.812.842.300	1.671.894.207	1.541.904.797	1.422.022.036	1.311.460.133	1.209.494.394
2.1.7	Bantuan keuangan	2,61%	132.590.796.470	136.045.288.916	139.589.783.974	143.226.626.554	146.958.222.657	150.787.040.973
2.1.8	Belanja tidak terduga	3,32%	1.698.999.675	1.755.349.387	1.813.568.016	1.873.717.548	1.935.862.024	2.000.067.609
2.2	Belanja Langsung	10,96%	408.269.744.350	451.646.004.049	517.374.658.821	605.209.162.565	737.020.437.186	856.816.578.708
2.2.1	Belanja pegawai	19,41%	54.832.013.500	65.476.737.761	78.187.958.350	93.366.851.191	111.492.473.845	133.136.884.938
2.2.2	Belanja barang dan jasa	12,11%	166.319.157.472	186.457.202.710	216.033.577.196	234.343.515.617	282.717.999.895	334.528.087.483
2.2.3	Belanja modal	6,73%	187.118.573.378	199.712.063.577	223.153.123.275	277.498.795.757	342.809.963.446	389.151.606.287



7.2. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan, disusun program-program pembangunan sebagaimana telah disusun dalam bab sebelumnya. Pelaksanaan program dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tanggungjawab kewenangan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun pilihan. Program-program yang telah disusun tersebut merupakan program prioritas pembangunan yang merupakan urusan pemerintah dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab OPD

Masing-masing program disertai dengan indikator kinerja program sebagai alat perencanaan dan pengendalian pembangunan setiap tahunnya, sehingga hasil pembangunan akan terukur perkembangannya hingga akhir periode RPJMD. Penyusunan indikator kinerja program berupa hasil (outcomes) dan kumpulan keluaran (output). Indikator kinerja program menjadi acuan utama dalam menyusun kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh OPD.

Disamping itu, disajikan pula rancangan secara proyektif mengenai rencana atau target capaian setiap tahun perencanaan selama kurun waktu lima tahun, sehingga didapatkan gambarannya tentang prospek pencapaian target tersebut bagi masyarakat di satu sisi, serta menjadi acuan kinerja bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, kebutuhan pendanaan yang dapat difasilitasi bagi setiap program prioritas tersebut juga digambarkan secara proyektif, berdasarkan evaluasi terhadap kerangka pendanaan yang dapat dicapai pada lima tahun anggaran terakhir.

Uraian program sesuai urusan disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut:



Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Kabupaten Mesuji

KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
A	PENDIDIKAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			904.048		982.425		1.072.830		1.163.235		1.253.639		1.379.003		6.755.180	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.192.627		732.200		802.400		870.600		938.800		1.032.680		5.569.307	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.091.460		1.200.606		1.309.752		1.418.898		1.528.044		1.680.848		8.229.608	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.000		38.500		40.000		45.000		50.000		55.000		263.500	Dinas Pendidikan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000		33.000		36.000		39.000		42.000		46.200		226.200	Dinas Pendidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar :			8.070.160		9.459.414		10.288.733		13.118.052		14.947.371		12.947.371		68.831.101	Dinas Pendidikan
		APK PAUD/TK	86,28%	86,28%				86,28%		86,28%		86,28%						
		APM PAUD/TK	85,05%	85,05%				85,05%		85,05%		85,05%						



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD																					
				2017		2018		2019		2020		2021		2022																									
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0																						
1	2	3	4	5												6		7																					
		APS PAUD	93,17%	93,17%		93,17%		93,17%		93,17%		93,17%		93,17%		93,17%																							
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	7,46			7,54		7,55		7,57		7,59		7,71		7,62	163.501.615	Dinas Pendidikan																					
		APK SD	95,55%	96,05%		96,55%		97,05%		97,55%		98,05%		98,55%		98,55%																							
		APM SD	82,36%	83,36%		84,36		85,36		86,36		87,36		88,36		88,36																							
		APS SD	87,99%	88,49%		88,99%		89,49%		89,99%		90,59%		99,62%		99,62%																							
		Angka putus sekolah (APTS) SD	0,40%	4,00%		4,00%		0,40%		0,40%		0,40%		0,40%		0,40%																							
		Angka kelulusan SD	98,01%	98,21%		98,41%		98,61%		98,81		99,01		99,21		99,21																							
		Angka melanjutkan SD ke SMP	77,88%	79,88%	23.158.257	81,88%	24.135.908	83,88%	24.696.794	85,88%	33.333.384	87,88%	35.588.636	89,88%	22.588.636	89,88%																							
		Rasio siswa SMP terhadap jumlah RKB	2,61%	2,66%																2,71%		2,76%		2,82%		2,91%		2,91%											
		APK SMP	96,73%	97,03%																97,33%		97,63%		97,93%		98,23%		98,53%		98,53%									
		APM SMP	74,19%	74,06%																74,66%		75,26%		75,86%		76,46%		77,06%		77,06%									
		APS SMP	99,20%	99,25%																99,30%		99,35%		99,40%		99,45%		99,50%		99,55%									
		Angka putus sekolah (APTS) SMP	1,50%	1,50%																1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%		1,50%									
		Angka kelulusan SMP	98,60%	98,65%																98,70%		98,75%		98,80%		98,85%		98,90%		98,95%									
Program Pendidikan Non Formal	Angka kelulusan paket A		100%	60.000													100%	63.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	63.000	100%	375.000	Dinas Pendidikan										
	Angka kelulusan paket B	100%	100%																												100%		100%		100%		100%		100%
	Angka kelulusan paket C	100%	100%																												100%		100%		100%		100%		100%



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		Jumlah lembaga penyelenggara Paket A,B dan C yang dibina	7 lembaga	7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		7 lembaga		
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SD	72,20%	73,20%	13.504.051	74,20%	19.010.828	75,20%	24.517.605	76,20%	30.024.383	77,20%	35.531.160	78,20%	36.651.716	78,20%	159.239.742	Dinas Pendidikan
		Persentase pendidik yang berkualifikasi S1/D4 bagi pendidik SMP	76,30%	77,30%		78,30%		79,80%		80,80%		81,80%		82,80%		82,80%		
		Persentase pendidik yang bersertifikasi bagi SD dan SMP	28,57%	28,85%		29,14%		29,42%		29,71%		29,99%		30,27%		30,27%		
		Persentase Jumlah SD dan yang terakreditasi	81%	82%		83%		84%		85%		86%		87%		88%		
		Persentase Jumlah SMP yang terakreditasi	32,60%	33,60%		34,60%		35,60%		36,60%		37,60%		38,60%		38,60%		
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Ketersediaan data pendidikan secara berkelanjutan	0,00%	95,00%	381.354	95,00%	600.421	95,00%	639.489	95,00%	678.557	95,00%	717.624	95,00%	756.692	95,00%	3.774.136	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	34,59	37,74%	2.828.615	40,88%	3.111.476	44,03%	3.422.624	47,17%	3.764.887	50,31%	4.141.375	50,31	4.555.513	50,31	21.824.490	Dinas Pendidikan
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah jenis seni dan budaya yang dikelola	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		Dinas Pendidikan



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah event seni dan budaya yang dikelola	7 event	7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		7 event		Dinas Pendidik an
B.	KESEHATAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			203.524		2.238.764		2.462.640		2.708.904		2.979.795		3.277.774		13.871.402	Dinas Kesehata n
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			62.400		1.186.400		755.040		1.330.544		913.598		1.004.958		5.252.941	Dinas Kesehata n
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			3.000		33.000		36.300		39.930		43.923		48.315		204.468	Dinas Kesehata n
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Obat dan Bahan Habis Pakai untuk Pelayanan Keseahtan	100,00%	100,00 %	2.919.153	100,00%	3.211.068	100,00%	3.532.175	100,00 %	4.885.393	100,00 %	4.273.932	100,00%	4.701.325	100,00 %	22.523.046	Dinas Kesehat an
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kesehatan Masyarakat	80	80,5	1.862.930	81	2.442.223	81,5	2.686.445	82	2.955.090	82,5	3.250.599	83	3.575.659	83	16.772.946	Dinas Kesehat an
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Penurunan tingkat penyalahgunaaan bahan makanan berbahaya dan NAPZA	2 kasus	0 kasus	196.610	0 kasus	304.271	0 kasus	334.698	0 kasus	368.168	0 kasus	404.985	0 kasus	445.483	0 kasus	2.054.215	Dinas Kesehat an



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah Jenis Tanaman Obat Yang di kembangkan	35 Jenis	2 Jenis	143,61	2 Jenis	157.971	2 Jenis	173.768	2 Jenis	191.145	2 Jenis	210.259	2 Jenis	231,29	47 Jenis	733.518,31	Dinas Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Desa yang telah Melaksanakan Germas	0,00%	1,90%	700.000	23,81%	770.000	47,62%	847.000	71,43%	931.700	100,00%	1.024.870	100,00%	1.127,36	100,00%	4.274.697	Dinas Kesehatan
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang ter akreditasi	33,30%	69,20%	2.399.280	75,00%	2.639.208	80,00%	2.127.047	90,00%	1.723.751	100,00%	1.896.127	100,00%	2.085.739	100,00%	12.871.152	Dinas Kesehatan
		Rasio Dokter per satuan Penduduk	0,096	0,096		0,122		0,147		0,173		0,198		0,223				
		Rasio Bidan per satuan Penduduk	1,463	1,463		1,473		1,483		1,493		1,503		1,503				
		Rasio Perawat per satuan Penduduk	0,741	0,741		0,792		0,843		0,894		0,945		0,995				
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Peningkatan Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk	100,00%	100,00%	52.620	100,00%	57.882	100,00%	63.670,20	100,00%	70.037	100,00%	77.041	100,00%	84,75	100,00%	321.335	Dinas Kesehatan
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar	45%	46%	9.275.720	48%	12.803.292	48%	14.083.621	50%	18.491.983	50%	19.041.182	83%	18.745.300	100,00%	87.441.098	Dinas Kesehatan
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk;	0,061	0,061		0,066		0,066		0,071		0,071	0,071					



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		Rasio Pustu per satuan penduduk	0,218	0,218		0,223		0,223		0,229		0,229		0,229		0,071		
		Rasio Poskesdes per satuan penduduk	0,533	0,533		0,533		0,533		0,533		0,533						
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan dasar	22,20%	33,00%	18.185.180	47,20%	19.703.698	63,80%	21.374.068	83,30%	28.211.475	100,00%	29.232.622	100,00%	24.445.880	100,00%	141.152.923	Dinas Kesehatan
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	65	65	5.804.850	68	6.385.335,00	71	7.023.868,50	75	10.726.255,4	78	11.498.881	81	9.348.768,97	81	44.787.958,70	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita yang mendapat pelayanan sesuai standar	100,00%	100,00%	76.000	100,00%	83.600	100,00%	91.960	100,00%	101.156	100,00%	111.272	100,00%	122.400,00	100,00%	586.388	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah lansia yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar Pelayanan	100,00%	100,00%	76.000	100,00%	83.600	100,00%	91.960	100,00%	101.156	100,00%	111.272	100,00%	122.400,00	100,00%	586.388	Dinas Kesehatan
	Program Pengawasan dan Penegendalian Kesehatan Makanan	Persentase Pengawasan dan Penegendalian Kesehatan Makanan	100,00%	100,00%	0	100,00%	138.000	100,00%	151.800	100,00%	166.980	100,00%	183.678	100,00%	202.050	100,00%	842.508	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Per	2,66	2,66	1.756.160	2,39	1.931.776	2,39	2.124.954	2,39	2.337.449	2,39	2.571.194	2,39	2.828.310	2,39	13.549.842	Dinas Kesehatan



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		seribu Kelahiran hidup																
		Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per seribu Kelahiran Hidup	8,5	7,97		6,91		6,38		5,31		4,78		4,25		4,25		
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase kasus gizi yang ditangani	100,00%	100,00 %	446.770	100,00%	491.447	100,00%	540.592	100,00 %	594.651	100,00 %	654.116	100,00%	719.528	100,00 %	3.447.103	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Desa ODF	1,9	9,52	71.510,00	28,57	78.661,00	57,14	86.527,10	76,19	90.647,44	100	104.697,79	100	105.170,00	100,00 %	547.213	Dinas Kesehatan
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penanganan & Pengendalian kejadian penyakit di Masyarakat	75,00%	80,00%	39.120	85,00%	43.032	90,00%	47.335	95,00%	52.069	100,00 %	57.276	100,00%	63.003	100,00 %	301.835	Dinas Kesehatan
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			2.784.610		3.055.371		3.360.908		3.696.999		4.066.699		4.473.369		21.437.956	Dinas PU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur			1.047.130		161.700		177.870		195.657		215.223		236.745		2.034.325	Dinas PU
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000		110.000		121.000		133.100		146.410		161.051		771.561	Dinas PU



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembanagan sisem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			54.007		59.408		65.348		71.883		79.072		86.979		416.697	Dinas PU
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	6,18%	9,18%	7.723.863,5	12,18%	11.137.360,0	15,18%	12.151.096,0	18,18%	22.266.205,0	21,18%	23.492.826,0	24,18%	14.842.108,0	24,18%	91.613.458,5	Dinas PU
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	17,95%	22,89%	7.397.599,60	27,27%	9.137.359,60	31,18%	9.951.095,50	34,69%	11.846.205	37,86%	10.830.825,6	40,74%	10.913.908,10	40,74%	60.076.994	Dinas PU
	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten yang ditingkatkan	0,00%	5,54%	50.798.020	13,47%	65.377.822	21,13%	85.415.604	29,02%	90.957.165	36,90%	67.052.881	44,79%	58.758.169	44,79%	418.359.661	Dinas PU
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten yang dipelihara	0,00%	1,21%	64.787.418	2,93%	17.034.646	4,59%	11.470.776	6,24%	14.617.854	7,76%	13.879.639	9,26%	14.267.603	9,26%	136.057.936	Dinas PU
	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong- gorong	Persentase panjang drainase yang dibangun	9,25%	9,75%	8.664.023	10,30%	11.118.830	10,85%	12.230.713	11,39%	14.076.526	11,93%	14.799.163	12,45%	14.204.577	12,45%	75.093.832	Dinas PU
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase alat berat yang beroperasi baik	100,00%	100,00%	20.350.726	100,00%	33.436.849	100,00%	41.508.525	100,00%	54.791.528	100,00%	53.488.985	100,00%	31.375.517	100,00%	234.952.130	Dinas PU
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pesentase Luas Areal Yang terlayani Jaringan Irigasi Kondisi Baik	41,63%	42,00%	8.192.018	43,00%	5.178.788	44,00%	10.696.667	46,00%	16.266.334	48,00%	6.892.967	50,00%	7.582.264	50,00%	54.809.038	Dinas PU



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Perencanaan Tata Ruang	Tertatanya zonasi ruang di wilayah kabupaten mesuji	100,00%	100,00 %	640.120	100,00%	2.150.000	100,00%	3.555.000	100,00 %	60.500	100,00 %	66.550	100,00%	73.205	100,00 %	6.545.375	Dinas PU (Tata Ruang)
	Program Pemanfaatan dan Penegndalian Tata Ruang	Termanfaatnya fungsi ruang sesuai dengan peruntukan	0,00%	0,00%	493.430	100,00%	2.962.377	100,00%	195.115	100,00 %	214.626	100,00 %	236.089	100,00%	259.698	100,00 %	4.361.335	Dinas PU (Tata Ruang)
D.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			855.227		1.148.750		1.263.625		1.389.987		1.528.986		1.681.884		7.868.459	Dinas Perumahan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur			111.000		402.100		442.310		244.541		268.995		295.895		1.764.841	Dinas Perumahan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningakatan Disiplin aparatur kinerja			0		12.500		0		14.375		0		0		26.875	Dinas Perumahan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			25.000		27.500		30.250		33.275		36.603		295.895		448.523	Dinas Perumahan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			54.600		60.060		66.066		72.673		79.940		87.934		421.273	Dinas Perumahan
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang	35,30%	41,67%	893.410	48,04%	982.751	54,41%	1.081.026	60,78%	1.189.129	67,15%	1.308.042	73,52%	1.438.846	73,52%	6.893.204	Dinas Perumahan



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		tertangani																
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Rumah Tangga dengan MCK standar	25,00%	41,00%	6.881.514	54,00%	7.569.665	66,00%	11.326.632	77,00%	12.159.295	89,00%	10.075.225	100,00%	11.082.747	100,00%	59.095.078	Dinas Perumahan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Jumlah SR yang mendapatkan akses air bersih	2706 SR	3006	5.438.457	3306	5.982.303	3606	8.875.037	3906	7.238.586	4206	7.962.445	4506	8.758.689	4506	44.255.517	Dinas Perumahan
	Program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan	Sarana dan Prasarana Pemerintah yang dibangun	11 unit	15 unit	5.296.222	17 unit	5.825.844	14 unit	6.408.428	14 unit	7.049.271	14 unit	7.754.198	14 unit	8.529.618	95 unit	40.863.581	Dinas Perumahan
	Pengembangan Infrastruktur Penunjang Gedung Pemerintah	Panjang Jalan dan drainase Fasilitas Pemerintah yang dibangun	-	9 km	10.328.349	18 km	11.361.184	15 km	17.497.302	15 km	18.747.032	15 km	15.121.735	15 km	16.633.909	87 km	89.689.511	Dinas Perumahan
E.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			381.975		427.133		465.600		488.700		513.200		590.400		2.867.008	Kesbangpol
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur			73.000		195.000		953.650		212.900		222.100		214.700		1.871.350	Kesbangpol
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			24.755		27.000		30.300		33.100		36.400		38.100		189.655	Kesbangpol



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			15.000		15.800		16.600		17.400		18.300		19.400		102.500	Kesbangpol
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Konflik yang tertangani	45 konflik	5 konflik	163.400	5 konflik	172.000	5 konflik	180.200	5 konflik	190.000	5 konflik	199.000	5 konflik	205.000	75 konflik	1.109.600	Kesbangpol
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap Tokoh suku bangsa, agama, dan masyarakat sipil	3 kegiatan	3 kegiatan	194.000	4 kegiatan	453.500	4 kegiatan	476.150	4 kegiatan	499.500	4 kegiatan	525.500	4 kegiatan	546.000	4 kegiatan	2.694.650	Kesbangpol
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan politik Masyarakat di daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	208.593	2 kegiatan	112.350	2 kegiatan	117.950	2 kegiatan	123.900	2 kegiatan	130.100	3 kegiatan	286.100	3 kegiatan	978.993	Kesbangpol
	Program Analisis Potensi	Jumlah Potensi Konflik yang terfasilitasi	2 konflik	2 konflik	110.000	7 konflik	115.500	7 konflik	121.200	7 konflik	127.400	7 konflik	133.700	7 konflik	140.000	39 konflik	747.800	Kesbangpol
E.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			7.853.089		7.986.450		8.010.430		8.336.930		8.561.434		8.884.934		49.633.267	Satpol PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur			3.009.550		1.690.000		1.810.000		1.924.000		2.019.000		2.083.000		12.535.550	Satpol PP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			517.875		531.175		560.000		582.000		599.000		616.000		3.406.050	Satpol PP



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		360.000	Satpol PP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			21.800		9.700		9.700		9.700		9.700		9.700		70.300	Satpol PP
	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Kanrantibmas			138.000		258.000	20	258.000	40	258.000	60	258.000	80	258.000	100	1.428.000	Satpol PP
	Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Daerah yang ditegakan			-	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	65.000	2	325.000	Satpol PP
F.	SOSIAL																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			356.418		412.121		403.912		421.439		475.966		475.966		2.545.821	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur			181.780		176.374		209.205		192.615		222.871		225.638		1.208.483	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			850		10.000		-		8.000		10.000		18.000		46.850	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			29.050		30.765		32.015		33.328		46.165		46.165		217.488	Dinas Sosial



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	1349 orang	3768 orang	200.000	6700 orang	559.000	6770 orang	771.500	6770 orang	784.625	6770 orang	784.625	6770 orang	844.000	37548 orang	3.943.750	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan	0 orang	50 orang	88.033	212 orang	470.000	500 orang	846.700	500 orang	866.235	499 orang	866.747	499 orang	711.625	2260 orang	3.849.339	Dinas Sosial
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Jumlah masyarakat yang di layani dan di rehabilitasi	20 orang	10 orang	293.870	35 orang	261.943	185 orang	768.393	195 orang	774.018	195 orang	1.181.522	195 orang	1.181.522	815 orang	4.461.268	Dinas Sosial
	Program Pembinaan Anak terlantar	Jumlah Anak yang Tertangani dalam lembaga kesejahteraan sosial anak	675 anak	675 anak	-	675 orang	129.795	835 orang	295.000	840 orang	332.500	895 orang	407.000	900 orang	395.000	5180 orang	1.559.295	Dinas Sosial
	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Extrauma	Jumlah Penyandang Cacat yang Tertangani	0 orang	0 orang	-	125 orang	232.904	215 orang	464.549	215 orang	476.777	220 orang	580.971	220 orang	580.971	995 orang	2.336.172	Dinas Sosial
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat yang terfasilitasi Kelembagaan Sosial (orang)	0 orang	105 orang	300.000	50 orang	117.955	523 orang	1.124.000	523 orang	1.124.000	543 orang	1.159.000	543 orang	1.159.000	2287 orang	4.983.955	Dinas Sosial
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Presentase meningkatnya keamanan dan kenyamanan dilingkungan pemerintah dan masyarakat.	0	0	508.506	20	585.000	40	676.718	60	400.000	80	400.000	100	400.000	100	2.970.223	Satpol PP
II.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
G.	TENAGA KERJA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			526.092		449.700		477.600		511.790		549.399		581.875		2.945.046.400	Nakertrans
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			257.683		152.800		137.400		148.015		165.648		180.563		1.042.108	Nakertrans
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			7.200		6.900		6.750		6.750		9.000		-		36.600	Nakertrans
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD			23.700		2.500		23.700		25.200		27.075		29.783		131.958	Nakertrans
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah angkatan kerja yang ditangani	50 orang	-	-	90 orang	60.000	90 orang	66.000	90 orang	72.600	90 orang	79.860	90 orang	87.846	590 orang	366.306	Nakertrans
	Program Pengembangan informasi data ketenagakerjaan	Database ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen	75.000	1 dokumen	75.000	2 dokumen	125.000	1 dokumen	82.500	1 dokumen	90.750	1 dokumen	99.825	2 dokumen	548.075	Nakertrans
	Program Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran tenagakerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	70 orang	20 orang	40.325	20 orang	75.000	20 orang	75.000	20 orang	82.500	20 orang	90.750	20 orang	99.825	190 orang	463.400	Nakertrans
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/buruh	10,00%	11,00%	70.000	12,00%	60.000	13,00%	66.000	14,00%	72.600	15,00%	79.860	16,00%	87.846	16,00%	436.306	Nakertrans



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase desa di wilayah transmigrasi yang dikembangkan	0,00%	5,13%	3.220.625	5,13%	3.381.656	10,26%	3.550.739	5,13%	3.728.276	5,13%	3.914.690	5,13%	4.110.424	35,90%	21.906.410	Nakertrans
H.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK + PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			378.026		450.577		495.635		565.762		622.339		709.436		3.221.775.715	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran.			108.050		121.985		134.184		147.602		162.362		183.821		709.402.575	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin aparatur kinerja			3.300		11.550		29.705		13.976		34.305		17.935		110.770.475	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-		-		-		-		-		-		-	DP2KBP3A
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000		39.000		42.900		47.190		51.909		59.296		270.295.050	DP2KBP3A
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase kelompok bina keluarga	3,17%	3,81%	60.108	5,08%	225.000	6,35%	247.500	7,62%	272.250	8,89%	299.475	10,16%	329.423	10,16%	1.433.756	DP2KBP3A



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	-	-	25.000	100,00%	105.000	100,00%	115.500	100,00 %	127.050	100,00 %	139.755	100,00%	153.731	100,00 %	666.036	DP2KBP3 A
	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan peran perempuan	3,81%	4,76%	70.000	5,71%	77.000	6,67%	84.700	7,62%	93.170	8,57%	102.487	9,52%	112.736	9,52%	540.093	DP2KBP3 A
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Desa Layak Anak	-	-	30.000	2	60.000	2	69.300	2	76.230	2	83.853	3	92.238	11	411.621	DP2KBP3 A
	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	75,07	75,37	565.480	75,67	986.383	75,97	1.085.021	76,27	1.317.736	76,57	1.610.767	76,87	1.862.113	76,87	7.427.500	DP2KBP3 A
	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	17,5	17,4	17.000	17,3	28.050	17,2	30.855	17,1	38.466	17	42.312	16,9	46.544	16,9	203.227	DP2KBP3 A
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Peningkatan jumlah kelompok PIK (Pusat Informasi Konseling) Remaja	36,36%	43,18%	50.000	52,27%	134.000	63,64%	159.500	75,00%	175.450	86,36%	192.995	100,00%	228.399	100,00 %	940.344	DP2KBP3 A



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KIE Program KB	Persentase pengadaan sarana dan prasarana fisik pelayanan KIE Program KB	100%	100%	1.119.000	100%	1.230.900	100%	1.353.990	100%	1.489.389	100%	1.638.328	100%	1.802.161	100%	8.633.768	DP2KBP3 A
I.	PANGAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			315.288		353.148		372.182		409.400		450.341		495.375		2.395.733	Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana aparatur			40.100		32.500		55.750		61.325		77.458		85.203		352.336	Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			-		10.330		10.000		11.363		11.000		-		42.693	Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-		5.000		5.500		6.050		6.655		7.321		30.526	Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			30.000		30.000		33.000		36.300		39.930		43.923		213.153	Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan pada lumbung pangan masyarakat	48 ton	50 ton	32.500	60 ton	396.551	70 ton	470.491	80 ton	517.540	90 ton	569.294	100 ton	626.223	100 ton	2.612.599	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	73	73,5	61.171	75	203.723	77	324.095	78	356.505	79	392.155	80	431.371	80	1.769.020	Dinas Ketahanan Pangan
J.	LINGKUNGAN HIDUP																	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			509.567		619.800		681.780		749.958		824.954		907.449		4.293.507	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			159.005		254.800		280.280		308.308		339.139		373.053		1.714.584	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			9.200		22.120		24.332		26.765		29.442		15.972		127.831	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			59.378		80.000		88.000		96.800		106.480		117.128		547.786	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			32.000		35.200		38.720		42.592		46.851		51.536		246.900	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	100,00%	100,00%	162.900	100,00%	941.190	100,00%	1.035.309	100,00%	1.138.840	100,00%	1.252.724	100,00%	1.377.996	100,00%	5.908.959	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penerangan Jalan Untuk Kepentingan Umum	Persentase ketersediaan penerangan jalan	5,99%	5,99%	91.350	6,44%	558.000	7,77%	868.800	8,21%	955.680	9,10%	1.051.248	9,99%	1.156.373	9,99%	4.681.451	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Jumlah dokumen jenis energi alternatif yang dikembangkan	2 dokumen	1 dokumen	56.000	2 dokumen	625.000	2 dokumen	330.000	1 dokumen	363.000	1 dokumen	399.300	1 dokumen	439.230	10 dokumen	2.212.530	Dinas Lingkungan Hidup



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				100.000		110.000		721.000		793.100		872.410		959.651		3.556.161	Dinas Lingkung an Hidup
		Indeks Kualitas Udara Ambient	baik	baik		baik		baik		baik		baik		Dinas Lingkung an Hidup				
		Indeks Kualitas Air	baik	baik		baik		baik		baik		baik		Dinas Lingkung an Hidup				
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Perusahaan yang memiliki IPAL	100,00%	100,00 %	-	100,00%	300.000	100,00%	330.000	100,00 %	363.000	100,00 %	399.300	100,00%	439.230	100,00 %	1.831.530	Dinas Lingkung an Hidup
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase RTH	45,78%	30,00%	137.145	30,00%	770.000	30,00%	847.000	30,00%	931.700	30,00%	1.024.870	30,00%	980.947	30,00%	4.691.662	Dinas Lingkung an Hidup
	Program Pembinaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Persentase Perusahaan yang mentaati dokumen LH (AMDAL UKL UPL)	100,00%	100,00 %	200.000	100,00%	300.000	100,00%	330.000	100,00 %	363.000	100,00 %	399.300	100,00%	439.230	100,00 %	2.031.530	Dinas Lingkung an Hidup
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH	Jumlah dokumen Informasi Bidang LH	3 dokume n	4 dokum en	218.715	4 dokumen	945.000	4 dokume n	1.139.500	4 dokum en	1.253.450	4 dokum en	1.378.795	4 dokume n	1.370.265	4 dokum en	6.305.725	Dinas Lingkung an Hidup
K.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran			1.100.793		1.193.996		1.302.027		1.413.731		1.542.042		1.691.380		8.243.968	Dukcapil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			326.381		369.019		405.921		446.513		491.164		540.281		2.579.280	Dukcapil
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			10.535		10.800		7.000		13.500		2.135		70.000		19.101.015	Dukcapil
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			11.700		12.870		14.157		15.573		17.130		18.843		19.101.015	Dukcapil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Penyediaan Laporan-laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD			30.000		33.000		36.300		39.930		43.923		48.315		19.101.015	Dukcapil
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penataan Administrasi Kependudukan	0,00%	30,00%	31.630	35,00%	214.780	40,00%	74.470	45,00%	81.917	50,00%	90.159	55,00%	293.486	55,00%	786.442	Dukcapil
	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan / Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan E-KTP dan Kartu Keluarga	247191	22800	130.229	22400	143.252	22300	144.373	21900	151.838	21500	383.442	21500	638.206	379591	1.591.342	Dukcapil
	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan akta-akta	55907	9750	77.390	10000	85.129	10100	93.642	10200	103.006	10300	113.307	10425	124.637	116682	597.111	Dukcapil
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	jumlah dokumen laporan administrasi kependudukan dalam satu tahun	12 dokumen	12 dokumen	42.700	12 dokumen	46.970	12 dokumen	51.667	12 dokumen	56.834	12 dokumen	62.517	12 dokumen	68.769	12 dokumen	329.457	Dukcapil



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Progam Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Presentase Jumlah instansi yang terfasilitasi data kependudukan	0,00%	0,00%	-	10,00%	29.000	15,00%	31.900	20,00%	35.090	25,00%	38.599	30,00%	42.459	100,00 %	177.048	Dukcapil
L.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			568.553		665.370		731.907		805.098		885.607		974.168		4.630.703	PMD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur untuk mendukung kinerja SKPD			25.000		150.000		165.000		181.500		199.650		219.615		940.765	PMD
	Program Peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam Berpakaian			-		25.000		27.500		30.250		33.275		36.603		152.628	PMD
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100.000		100.000		110.000		121.000		133.100		146.410		710.510	PMD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	mendukung akuntabilitas SKPD			25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		150.000	PMD
	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan Gerbang desa	7,62%	20,00%	187.239	29,52%	310.000	34,29%	341.000	38,10%	375.100	42,86%	412.610	47,62%	453.871	100,00 %	2.079.820	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase Peningkatan desa yang memiliki bumdes	0,95%	82,86%	173.687	85,71%	448.500	88,57%	493.350	91,51%	542.685	96,19%	596.954	100,00%	656.649	100,00 %	2.911.824	Dinas Pember dayaan Masyara kat Desa
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dari aparat pemerintah	1 desa	1 desa	100.000	2 desa	250.000	2 desa	275.000	2 desa	302.500	2 desa	332.750	2 desa	366	12 desa	1.260.616	Dinas Pember dayaan Masyara kat Desa
	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah Desa	Persentase Peningkatan Kapasitas aparat pemerintah desa	12%	23%	1.278.302	33%	1.953.545	44%	2.768.900	54%	2.363.789	65%	3.800.168	75%	2.860.185	75,24%	15.024.890	Dinas Pember dayaan Masyara kat Desa
	Program Bulan Bhakti Gorong Royong	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan	1 desa	1 desa	153.035	1 desa	200.000	1 desa	220.000	1 desa	242.000	1 desa	266.200	1 desa	292.820	7 desa	1.374.055	Dinas Pember dayaan Masyara kat Desa
	Program Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Daerah	persentase Peningkatan pebinaan kelompok kerja wanita dalam pembangunan daerah	0,00%	25,00%	102.000	50,00%	150000	75,00%	165.000	100,00 %	181.500	100,00 %	199.650	100,00%	219.615	100,00 %	1.017.765	Dinas Pember dayaan Masyara kat Desa



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Teknologi Tepat Guna	Jumlah TTG yang diikutsertakan di tingkat nasional	7 TTG	1 TTG	315.835	1 TTG	455.000	1 TTG	500.500	1 TTG	550.550	1 TTG	605.605	1 TTG	666.166	13 TTG	3.093.656	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program kerjasama daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah dokumen kerjasama daerah	1	1	1.959.688	1	2.155.657	1	2.371.222	1	2.608.345	1	2.869.179	1	3.156.097	7	15.120.189	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
M.	PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			851.737		855.737		943.767		980.217		1.016.667		1.016.667		5.664.792	Dishubko minfo
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur			214.904		229.924		153.700		209.284		154.700		154.700		1.117.212	Dishubko minfo
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin aparatur kinerja			80.370		-		59.370		-		-		-		139.740	Dishubko minfo
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			0		100.000		110.000		121.000		133.100		146.410		710.510	Dishubko minfo
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			28.893		28.893		29.500		30.000		32.000		32.000		181.286	Dishubko minfo



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Kinerja dan Keuangan	Capaian Kinerja dan Keuangan																
	Program Pembangunan Prasarana dan fasilitas Perhubungan	Dokumen Perhubungan	1 dokume n	1 dokum en	564.376	1 dokumen	500.000	1 dokume n	700.000	1 dokum en	600.000	-	-	-	-	1 dokum en	2.364. 376	Dishubk ominfo
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Terminal (Darat, Laut dan Udara)	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	1	5.000.000	1	150.000. 000	0,00%	-	1 Termi nal darat 1 Termi nal laut	155.00 0.000	Dishubk ominfo
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah transportasi umum darat yang tersedia	0,00%	3 unit	1.561.21 4	6 unit	1.127.997	6 unit	1.192.351	6 unit	1.259.078	6 unit	1.331.97 6	6 unit	1.406.66 5	6 unit	7.879. 280	Dishubk ominfo
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	47 unit	0,00%	-	264 unit	520.477	158 unit	337.227	153 unit	452.267	160 unit	238.059	163 unit	242.522	898 unit	1.790. 552	Dishubk ominfo
	Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Uji Kelayakan Kendaraan umum	100,00%	0,00%	-	100,00%	37.850	100,00%	787.850	100,00 %	4.037.850	100,00 %	37.850	100,00%	37.850	100,00 %	4.939. 250	Dishubk ominfo



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program keterbukaan informasi publik	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dipublikasikan	96 kali	96 kali	54.136	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	80.135	96 kali	454.81 ₁	Dishubk ominfo
	Pengembangan data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	0	0	-	6 dokumen	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokum en	70.000	6 dokum en	70.000	6 dokume n	70.000	6 dokum en	350.00 ₀	Dishubk ominfo
	Program peningkatan komunikasi dan informasi serta penggunaan media massa	jumlah desa yang dapat mengakses radio dengan baik	0,00%	0,00%	-	105 desa	69.270	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	-	105 desa	69.270	Dishubk ominfo
N.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			360.565		403.210		417.946		433.418		449.664		494.630		2.559.4 ₃₂	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur			138.250		119.500		142.675		117.059		136.662		150.328		804.47 ₃	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			9.000		7.200		-		-		-		-		16.200	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			10.000		10.000		10.500		11.025		11.576		12.734		65.835	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja			68.650		74.950		78.698		82.632		86.764		95.440		487.13 ₄	Dinas Koperasi dan UKM



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Kinerja dan Keuangan	dan Keuangan																
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Jumlah IKM yang terfasilitasi	103 IKM	-	-	24 IKM	425.000	24 IKM	278.250	24 IKM	292.163	24 IKM	506.771	24 IKM	322.109	199 IKM	1.824.292	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	116 Koperasi	-	-	5 Koperasi	50.000	5 Koperasi	192.500	5 Koperasi	55.125	5 Koperasi	207.881	5 Koperasi	60.775	141	566.282	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang terfasilitasi	0 UMKM	0 UMKM	30.300	20 UMKM	3.715.000	20 UMKM	386.750	20 UMKM	786.088	20 UMKM	426.392	20 UMKM	447.711	100 UMKM	5.792.241	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah jenis barang dan jasa beredar yang diawasi	11 Jenis	11 Jenis	25.000	12 Jenis	85.000	13 Jenis	1.589.250	14 Jenis	93.713	15 Jenis	98.398	16 Jenis	103.318	16	1.994.679	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Promosi Produk Unggulan Daerah	Jumlah Event Promosi yang diikuti	14 Event	3 Event	211.776	3 Event	350.000	3 Event	367.500	3 Event	385.875	3 Event	405.169	3 Event	425.427	32	2.145.747	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distribusi	Jumlah desa penerima manfaat sistem distribusi perdagangan	21 Desa	10 Desa	48.266	10 Desa	150.000	10 Desa	157.500	10 Desa	165.375	10 Desa	173.644	10 Desa	182.326	81 Desa	877.111	Dinas Koperasi dan UKM
	Program Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah UPTD yang terpelihara	3 UPTD	3 UPTD	161.200	4 UPTD	180.000	5 UPTD	350.000	6 UPTD	367.500	7 UPTD	385.875	7 UPTD	405.169	7 UPTD	1.849.744	Dinas Koperasi dan UKM



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
O.	PENANAMAN MODAL																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			547.465		604.212		664.633		731.096		804.206		884.626		4.236.237	Satu Pintu
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	0		80.672		88.739		97.613		107.374		118.112		129.923		622.434	Satu Pintu
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	0		-		-	22 Orang	11.000		-		-		-		11.000	Satu Pintu
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	0		20.000		22.000		24.200		26.620		29.282		32.210		154.312	Satu Pintu
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	0		72.648		79.913		87.904		96.694		106.364		117.000		560.524	Satu Pintu
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi	59%	65%	-	71%	375.000	76%	238.000	82%	237.000	88%	265.000	94%	262.000	100%	1.377.000	DPMPT
P.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Perkantoran			556.000		561.000		562.778		582.278		628.178		690.996		3.581.230	Dispora
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			95.000		80.000		78.000		83.000		87.000		95.700		518.700	Dispora
	Program Peningkatan Disiplin aparaturnya	Meningkatnya Disiplin aparaturnya kinerja		-	2.000		16.000		2.000		18.000		-		-		38.000	Dispora



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000		30.000		32.500		33.000		35.600		39.160		200.260	Dispora
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	7 cabang	7 caban g	560.000	7 cabang	830.000	7 cabang	865.000	7 caban g	1.381.000	8 caban g	940.000	12 cabang	1.070.000	12 caban g	5.646.000	Dispora
	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Jumlah kelompok / organisasi yang berperan aktif dalam bidang kepemudaan	5 kelompok	1 kelompok	267.000	11 kelompok	475.000	11 kelompok	550.000	12 kelompok	475.000	20 kelompok	680.000	25 kelompok	580.000	25 kelompok	3.027.000	Dispora
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok yang berperan aktif dibidang kewirausahaan pemuda	25 kelompok	0 kelompok	-	15 kelompok	300.000	15 kelompok	300.000	15 kelompok	320.000	20 kelompok	350.000	30 kelompok	400.000	30 kelompok	1.670.000	Dispora
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga	328 lapangan	0 lapangan	-	20 lapangan	150.000	30 lapangan	350.000	0 lapangan	-	40 lapangan	555.000	0 lapangan	-	418 lapangan	1.055.000	Dispora
	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	5000	6000	180.000	7000	525.000	8000	565.000	9000	624.000	10000	637.000	11000	747.000	11000	3.278.000	Dispora
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	1	0	-	1	275.000	1	175.000	2	875.000	1	795.000	1	200.000	7	2.320.000	Dispora
Q.	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																	
	Program Pelayanan Administrasi	Peningkatan Pelayanan			167.300		274.894		296.500		318.460		351.878		387.065		1.796.097	Arsip



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Perkantoran	Administrasi Perkantoran																
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			110.400		150.900		165.950		182.545		200.600		220.660		1.031.055	Arsip
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			1.500		7.100		7.800		8.580		9.400		10.340		44.720	Arsip
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			25.000		35.000		38.500		42.350		46.500		51.150		238.500	Arsip
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.650		5.500		7.300		7.950		8.650		9.515		43.565	Arsip
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah Sekolah (sd/SMP) yang mendapatkan Layanan Perpustakaan Keliling	28,41%	28,41%	104.500	34,09%	238.825	36,93%	262.500	39,77%	288.300	42,61%	316.975	42,61%	316.975	42,61%	1.528.075	Kantor Arsip
	Program Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase OPD yang menjalankan standar baku arsip	0,00%	2,86%	67.500	11,43%	103.000	22,86%	113.300	34,29%	90.250	40,00%	99.250	51,43%	99.250	51,43%	572.550	Kantor Arsip
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase OPD yang mengikuti Pelatihan	0,00%	100,00 %	19.150	100,00%	50.000	100,00%	55.000	100,00 %	60.500	100,00 %	66.550	100,00%	66.550	100,00 %	317.750	Kantor Arsip
III.	URUSAN PILIHAN																	
R.	KELAUTAN DAN PERIKANAN																	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			502.455		513.400		556.908		604.375		656.177		712.728		712.728	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-		105.000		130.000		143.000		157.300		173.030		190.333		190.333	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	-		-		14.000		15.400		16.940		18.634		20.497		20.497	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		-		18.000		19.800		21.780		23.958		26.354		26.354	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			52.500		32.500		35.750		61.325		43.258		47.583		47.583	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	149,00%	2,00%	75.000	2,00%	170.000	2,00%	187.000	2,00%	205.700	2,00%	226.270	2,00%	248.897	161,00%	1.112.867	Dinas Perikanan dan Kelautan
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	10,00%	2,00%	25.000	2,00%	3.070.000	2,00%	77.000	2,00%	84.700	2,00%	93.170	2,00%	102.487	22,00%	3.452.357	Dinas Perikanan dan Kelautan



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya	Peningkatan Luas Areal Budidaya Perikanan	730 kolam	300 kolam	120.000	300 kolam	200.000	300 kolam	220.000	300 kolam	242.000	300 kolam	266.200	300 kolam	292.820	2300 kolam	1.341.020	Dinas Perikana n dan Kelautan
	Program Peningkatan sarana dan prasrana balai benih, UPR, atau HSRT dan Penyediaan induk atau calon induk	Jumlah UPR yang dibangun	7 UPR	0,00%	-	0,00%	-	1 UPR	220.000	1 UPR	242.000	1 UPR	266.200	1 UPR	292.820	11 UPR	1.021.020	Dinas Perikana n dan Kelautan
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah unit prasarana budidaya perikanan yang dibagikan ke kelompok	18 paket	0,00%	-	5 unit	100.000	5 unit	110.000	5 unit	121.000	5 unit	133.100	5 unit	146.410	28 unit	610.510	Dinas Perikana n dan Kelautan
	Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Persentase Standar peralatan penyuluhan yang dimiliki oleh penyuluh perikanan	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	50.000	25,00%	55.000	0,25%	60.500	100,00%	66.550	100,00 %	232.050	Dinas Perikana n dan Kelautan
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase Poklaha sar yang mendapatkan pendampingan	0,00%	0,00%	-	20,00%	50.000	20,00%	55.000	20,00%	60.500	20,00%	66.550	20,00%	73.205	100,00 %	305.255	Dinas Perikana n dan Kelautan
S.	PERTANIAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			953.931		1.016.096		1.082.817		1.154.465		1.231.446		1.314.200		6.752.955	Dinas Pertanian



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD						
				2017		2018		2019		2020		2021		2022										
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0							
1	2	3	4	5												6		7						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasaana Aparatur			227.000		238.350		250.268		262.781		275.920		289.716		1.544.034	Dinas Pertanian						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			7.450		7.450		7.450		7.450		7.450		200.376		237.626	Dinas Pertanian						
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/Perkebunan)	Peningkatan Jumlah Produksi Tanaman Pangan pertanian (Ton)			470.209		2.079.719		2.820.905		2.532.908		4.859.042		5.602.619		18.365.403	Dinas Pertanian						
		Padi (Ton)	252.334	252.834				253.334				253.834				254.334				255.334		764.502		
		Jagung (Ton)	3.203	3.184				3.264				3.343				3.423				3.502		3.582		10.507
		Kedelai (Ton)	56	60				80				99				101				106		111		318
		ubi kayu (Ton)	54.510	54.668				54.826				54.984				55.142				55.300		55.458		165.900
		Jeruk (Ha)	-	153				243				308				371				434		502		1.307
		Pisang (Ha)	-	44				58				72				86				102		115		303
		Nanas (Ha)	0	5,5				23				41				57,5				72		86		216
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Produksi Perkebunan :			242.755		601.253		741.066		891.687		933.158		975.519		4.385.439	Dinas Pertanian						
		Sawit (Ton)	23.695	23.849				24.002				24.155				24.308				24.461		24.615		73.384
		Karet(Ton)	20.164	21.991				22.091				22.191				22.291				22.391		22.491		67.173
		Lada (Ha)	-	5		5		5		10		20		25		55								
		Kelapa (Ha)	-	10		35		40		50		50		80		180								
		Cabe Jawa (Ha)	-	5		14		15		25		35		45		105								
	Program peningkatan	Peningkatan			169.762		178.250		187.163		196.521		206.347		216.664		1.154.	Dinas						



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	produksi hasil peternakan	produksi Ternak :															706	Pertanian
		Sapi (Ekor)	398	408		419		430		440		451		462		3.007		
		Kerbau (Ekor)	4	4		5		5		6		6		7		38		
		Babi (Ekor)	805	854		903		952		1.001		1.050		1.100		6.665		
		Kambing (Ekor)	8.853	9.275		9.696		10.118		10.540		10.708		10.961		70.152		
		Ayam (Ekor)	230.280	239.923		249.566		259.209		268.852		278.496		288.139		1.814.465		
		Telur (Ton)	210	211		212		213		214		215		216		1.491		
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Peningkatan Jalan Pertanian yang mendukung Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan	112.4 km	0 km	65.585	3,5 km	918.864	3,5 km	964.807	3,5 km	1.013.048	3,5 km	1.063.700	3,5 km	1.116.885	129.9 Km	5.142.890	Dinas Pertanian
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Tepat Guna	Meningkatkan Pengetahuan Petani Tentang Panen dan Pasca Panen Tanaman Karet, Pengoperasian	0 Petani	30 Petani	172.735	30 Petani	181.372	30 Petani	190.440	30 Petani	199.962	30 Petani	209.960	30 Petani	220.458	180 Petani	1.174.928	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian perkebunan yang meningkat	72 orang	72 orang	252.793	72 orang	265.432	72 orang	278.704	72 orang	292.639	72 orang	307.271	72 orang	322.634	72 orang	1.719.473	Dinas Pertanian



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		kapasitasnya																
	Program Peningkatan Produksi	Jumlah peningkatan Luas Areal Tanam Tembakau	2 Ha	15 Ha	249.454	15 Ha	261.927	30 Ha	275.023	40 Ha	288.774	50 Ha	303.213	60 Ha	318.374	162 Ha	1.696.764	Dinas Pertanian
	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah jaringan irigasi pertanian yang dikembangkan	0 Unit	20 Unit	5.759.736	20 Unit	6.047.723	20 Unit	6.350.109	20 Unit	6.667.614	20 Unit	7.000.995	20 Unit	7.351.045	120 Unit	39.177.222	Dinas Pertanian
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Difasilitasinya pencegahan Penanggulangan penyakit Ternak	552 ekor	500 Ekor	451.044	500 Ekor	845.386	500 Ekor	483.365	500 Ekor	507.534	500 Ekor	532.910	500 Ekor	559.556	3552 Ekor	3.379.795	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Petani Pelaku Agribisnis yang Meningkatkan Pengetahuannya	0	20	768.283	20	157.175	20	368.963	20	427.795	20	957.963	20	206.241	160	2.886.419	Dinas Pertanian
	Program Pembinaan Perkebunan Besar Swasta	Jumlah perkebunan besar swasta yang di bina	10 Perusahaan	11 Perusahaan	143.616	11 Perusahaan	250.000	11 Perusahaan	150.000	11 Perusahaan	150.000	11 Perusahaan	300.000	11 Perusahaan	175.000	11 Perusahaan	1.168.616	Dinas Pertanian
IV.	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH																	
T.	PERENCANAAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Realisasi Anggaran pelayanan administrasi perkantoran		100	603.820		626.661		657.994		692.217		728.283		766.298		4.075.274	Bappeda



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Presentase Realisasi Anggaran peningkatan sarana dan prasarana aparatur	38	100	331.700		226.210		123.701		129.886		136.380		143.199		1.091.075	Bappeda
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Realisasi Anggaran Program Program Disiplin Aparatur	-	100	2.500		30.000		-		30.000		-		30.000		92.500	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	-	3	15.000		20.000		25.000		25.000		25.000		25.000		135.000	Bappeda
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan	Persentase OPD dengan dokumen renja yang baik	0	0	0	90%	125.000	90%	137.500	90%	151.250	90%	166.375	90%	183.013	90%	763.138	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Usulan Musrenbang kabupaten yang tertampung dalam RKPD	-	5%	915.000	6%	551.250	7,00%	678.813	8,00%	607.753	9,00%	638.141	10,00%	670.048	10,00%	4.061.004	Bappeda
		Persentase Kesesuaian Renja OPD dengan RKPD	-	90%		91%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%				
		Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	-	90%		91%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%				
		Persentase kesesuaian KUA-PPAS dengan RKPD	-	90%		91%		92,00%		93,00%		94,00%		95,00%				



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pengendalian, pelaporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan	5	4	275.000	3	182.500	4	275.750	3	220.825	3	242.908	4	267.198	26	1.464.185	Bappeda
	Program perencanaan pembangunan ekonomi dan Sumber daya Alam	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	7	3	448.000	2	183.750	2	192.938	2	202.584	2	412.714	2	223.349	20	1.663.335	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	2	5	688.500	3	336.525	3	353.351	3	371.019	3	389.570	3	409.048	24	2.548.013	Bappeda
	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	-	4	375.000	2	315.000	2	405.750	2	347.288	2	439.652	2	223.349	14	2.106.039	Bappeda
	Program Peningkatan Penelitian dan pengembangan Inovasi Pembangunan Daerah	Jumlah Penelitian Kerjasama dengan Lembaga Penelitian	-	-		2	250.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	650.000	Bappeda
		Presentase tindak lanjut hasil penelitian			100%			100%				100%				100%		
	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4	275.000	3	182500	4	275750	3	220825	3	242907,5	4	267198,25	23	1.464.181	Bappeda



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
U.	KEUANGAN																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.659.645		1.732.850		1.982.857		1.741.493		1.915.642		2.102.940		11.135.426	BPPKAD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			241.170		758.045		833.850		917.234		1.008.958		1.109.854		4.869.111	BPPKAD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			55.000		55.000		66.000		72.600		79.000		86.900		414.500	BPPKAD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000		30.000		33.000		39.000		42.900		47.000		221.900	BPPKAD
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	WTP	WTP	4.236.044	WTP	4.468.116	WTP	4.963.007	WTP	5.447.302	WTP	5.992.032	WTP	6.438.775	WTP	31.545.275	BPPKAD
		Persentase Pencapaian Realisasi pajak yang dikelola Kabupaten (realisasi Penerimaan Pajak th n/Jumlah Target Pajak daerah)*100%	44,26%	46,00%	246.811	48,00%	246.811	50,00%	271.492	52,00%	298.641	54,00%	328.505	56,00%	361.356	56,00%	1.753.617	BPPKAD
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota																



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Pencapaian PAD	Persentase Pencapaian Target PAD (Jumlah Realisasi PAD Tahun ke n/Target PAD Tahun n)*100%	75,00%	76,00%	0	77%	250.000	78,00%	407.000	79,00%	447.700	80,00%	492.470	81,00%	541.717	81,00%	2.138.887	BPPKAD
	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Dokumen Sumber Pendapatan Daerah	0,00%	0,00%	-	10,00%	100.000	10,00%	110.000	10,00%	121.000	10,00%	133.100	10,00%	146.410	10,00%	610.510	BPPKAD
	Program Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase Pencapaian Realisasi PBB P2 (Realisasi PBB P2 tahun ke n/Target PBB P2 tahun ke n)*100%	56,00%	0,00%	-	60,00%	120.000	70,00%	132.000	80,00%	145.200	90,00%	159.720	100,00%	175.692	100,00%	732.612	BPPKAD
V.	KEPEGAWAIAN																	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			710.400		889.620		922.101		972.956		994.829		1.033.808		5.523.714	BKDD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			88.000		399.000		133.400		126.470		125.024		131.275		1.003.168	BKDD



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			25.475		0		25.200		0		27.300		0		77.975	BKDD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS yang mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi	43,49%	45,00%	1.611.594	46,00%	3.996.465	47,00%	4.162.500	48,00%	4.884.133	49,00%	4.174.500	50,00%	4.274.500	50,00%	23.103.692	BKDD
	Program Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian	64,00%	65,00%	2.503.219	66,00%	6.020.322	67,00%	7.141.645	68,00%	4.792.837	69,00%	5.569.287	70,00%	10.414.987	70,00%	36.442.297	BKDD
	Program Mutasi dan Kepangkatan	Persentase Penerbitan SK Mutasi dan Kepangkatan yang Tepat Waktu	75,00%	80,00%	209.000	82,00%	234.650	85,00%	644.633	87,00%	676.864	90,00%	710.707	92,00%	746.243	92,00%	3.222.097	BKDD
	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS	Jumlah Penerbitan SK Pensiun PNS	15	26	93.500	15	93.500	20	98.175	20	98.175	20	98.175	25	103.082	121	584.607	BKDD
	Program Penyusunan Data Pegawai	Jumlah Data Pegawai yang disusun	2 Dok	2 Dok	210.850	2 Dok	285.850	2 Dok	296.393	2 Dok	311.212	2 Dok	319.085	2 Dok	331.289	12 dokum en	1.754.679	BKDD
W.	FUNGSI LAIN (INSPEKTORAT)																	
	Program Pelayanan Administrasi Umum	Peningkatan pelayanan			398.499		437.748		479.708		525.756		576.216		631.676		3.049.604	Inspektor at
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			145.900		173.450		113.100		148.100		113.390		164.400		858.340	Inspektor at
	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur			29.600		18.000		16.200		19.800		17.820		21.780		123.200	Inspektor at



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Jumlah aparatur fungsional pengawas bersertifikat			92.320		140.000		154.000		169.400		186.340		204.974		947.034	Inspektorat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Meningkat dan berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			35.000		58.500		64.350		70.785		77.860		85.646		392.141	Inspektorat
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan	100%	100%	1.396.143,50	100%	2.442.299,50	100%	2.774.431,05	100%	3.132.274,96	100%	3.441.224,65	100%	3.696.141,51	100%	16.882.515,16	Inspektorat
	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	6 kali	12 kali	37.900,00	12 kali	41.690,00	12 kali	45.859,00	12 kali	50.450,00	12 kali	55.495,00	12 kali	61.000,00	78 kali	292.394,00	Inspektorat
	Program Gerakan Disiplin Nasional (GDN)	Persentase disiplin aparatur	70%	75%	75.885,00	80%	114.565,00	85%	120.300,00	90%	126.315,00	90%	132.600,00	90%	139.230,00	90%	708.895,00	Inspektorat
	Program Reformasi Birokrasi	Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan	60%	100%	157.742,50	100%	442.142,50	100%	486.356,75	100%	534.992,43	100%	588.491,67	100%	647.340,83	100%	2.857.066,68	Inspektorat
X.	FUNGSI LAIN (SEKRETARIAT																	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp0	
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0			
1	2	3	4	5												6		7
	DAERAH)																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase lancarnya administrasi perkantoran	100%	100%	8.953.526	100%	9.848.879	100%	10.833.766	100%	11.917.143	100%	13.108.857	100%	14.419.743	100%	69.081.914,74	Bagian Umum (Sekretariat Daerah)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dan dalam kondisi baik	67	72	3.641.799	78	3.642.163	83	3.642.527	89	3.642.892	94	3.643.256	96	3.643.620	100	21.856.257	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	presentase meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam menjalankan tupoksi	100%	100%	76.042,00	100%	76.810,80	100%	77.578,91	100%	78.354,70	100%	79.138,24	100%	387.924,64	100%	775.849,28	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah aparatur Pemerintah yang Meningkatkan kapasitasnya	0	50	200.840	55	220.924	66	243.016	72	267.318	79	294.050	86	323.455	408	1.549.603	
	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	192.101	4 dokumen	211.311	4 dokumen	232.442	4 dokumen	255.687	4 dokumen	281.255	4 dokumen	309.380.783	4 dokumen	310.553.579	
	Program Penataan Kelembagaan dan organisasi perangkat daerah	Jumlah Sosialisasi Tata Naskah organisasi perangkat daerah	0	0	-	1 Keg	62.300	1 Keg	68.530	1 Keg	75.383	1 Keg	82.921	1 Keg	91.213	6 Keg	380.348	



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Terlaksana peningkatan pelayanan kedinasan	100%	100%	455.000	100%	500.500	100%	550.550	100%	605.605	100%	666.166	100%	732.782	100%	3.510.603	sekda (Tata Pemerin tahan)
	Program penataan Wilayah Pemerintahan	Jumlah Wilayah Pemerintahan yang di mekarkan	-	-	355.955	10 Desa dan 3 Kecamatan	841.551		430.706		473.776		521.154		573.269	10 Desa dan 3 Kecamatan	3.196.410	sekda (Tata Pemerin tahan)
	Program Evaluasi dan pelaporan pemerintahan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pemerintahan	3 Dok	2 Dok	125.620	2 Dok	138.182	2 Dok	152.000	2 Dok	167.200	2 Dok	183.920	2 Dok	202.312	14 Dok	969.235	sekda (Tata Pemerin tahan)
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	persentase produk hukum daerah yang dibentuk dan disosialisasikan	-	100%	1.013.000	100%	1.364.300	100%	1.500.730	100%	1.650.803	100%	1.815.883	100%	1.997.471	100%	9.342.187	sekda (hukum dan organisa si)
	program kelembagaan	Peningkatan jumlah produk hukum terkait kelembagaan yang disahkan	3 produk hukum	2 produk hukum	100.000	2 produk hukum	110.000	2 produk hukum	121.000	2 produk hukum	133.100	2 produk hukum	146.410	2 produk hukum	161.051	15 produk hukum	771.561	sekda (hukum dan organisa si)
	Program analisis dan formasi jabatan	persentase keterisian jabatan	0%	90%	200.000	90%	220.000	90%	242.000	90%	254.100	90%	279.510	90%	307.461	90%	1.503.071	sekda (hukum dan organisa si)
	Program pengembangan kinerja aparatur	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah	CC	CC	151.587	CC	166.745	B	183.420	B	195.520	BB	215.071	A	236.579	A	1.148.922	sekda (hukum dan organisa



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
		kabupaten																si)
	Program ketatalaksanaan	persentase OPD yang memiliki SOP	-	75%	50.000	75%	543.195	80%	152.399	85%	167.639	90%	184.403	95%	202.843	95%	1.300.479	sekda (hukum dan organisasi)
	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur bagian hukum dan organisasi yang mengikuti bimtek	0%	0%	-	25%	75.000	42%	82.500	50%	90.750	58%	99.825	83%	109.807	83%	457.882	sekda (hukum dan organisasi)
	Program Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan administrasi pembangunan yang baik	70%	70%	280.000	70%	408.000	70%	448.800	70%	493.680	70%	543.048	70%	597.353	70%	2.770.881	sekda (Ekbang)
		Persentase Peningkatan Lelang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah	19%	31%		43%		56%		70%		85%		100%		100%		Sekda (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)
	Program bimbingan keagamaan	Jumlah fasilitasi bimbingan keagamaan dan jumlah rumah ibadah yang terpelihara	2 bimbingan keagamaan dan 35 rumah ibadah	2 bimbingan keagamaan dan 46 rumah ibadah	3.470.930	2 bimbingan keagamaan dan 50 rumah ibadah	4.048.023	2 bimbingan keagamaan dan 56 rumah ibadah	4.452.825	2 bimbingan keagamaan dan 60 rumah ibadah	4.478.125	2 bimbingan keagamaan dan 66 rumah ibadah	4.925.938	2 bimbingan keagamaan dan 76 rumah ibadah	5.418.532	2 bimbingan keagamaan dan 76 rumah ibadah	26.794.373	sekadab (bagian kesra)



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program pengembangan tilawatil qur'an	Jumlah cabang lomba yang diikuti	10 cabang lomba	10 cabang lomba	511.587	10 cabang lomba	562.745	10 cabang lomba	619.020	10 cabang lomba	680.922	10 cabang lomba	749.014	10 cabang lomba	823.915	10 cabang lomba	3.947.203	sekadab (bagian kesra)
	program pembinaan keagamaan	Jumlah fasilitasi pembinaan keagamaan	2 fasilitas	2 fasilitas	349.650	2 fasilitas	384.615	2 fasilitas	423.076	2 fasilitas	465.384	2 fasilitas	511.922	2 fasilitas	563.114	2 fasilitas	2.697.761	sekadab (bagian kesra)
	Program Optimaliasi Pemanfaatan Teknologi informasi dan media massa	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan di media massa	100 Rilis	110	1.900.000	120	2.280.000	130	2.717.000	140	3.218.600	150	3.793.350	160	4.386.669	810	18.295.619	Bagian Humas
	Program Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah	Jumlah Media non media masa yang menyebarluaskan Informasi pembangunan daerah	9 Jenis	9 Jenis	250.000	9 Jenis	275.000	9 Jenis	302.500	9 Jenis	332.750	9 Jenis	366.025	9 Jenis	402.628	9 Jenis	1.928.903	Bagian Humas
	Program Peningkatan Hubungan antar lembaga dan masyarakat	Jumlah lembaga media masa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	70 media massa	0	24.400	70 media massa	26.840	70 media massa	29.524	70 media massa	29.524	70 media massa	32.476	70 media massa	35.724	70 media massa	178.488,44	Bagian Humas
	Program sertifikasi tanah	Jumlah Tanah Milik Pemerintah daerah yang Bersertifikat	10 Bidang	10 Bidang	230.000	10 Bidang	253.000	10 Bidang	278.300	10 Bidang	306.130	10 Bidang	336.743	10 Bidang	370.417	70 Bidang	1.774.590	sekda (Tata Pemerintahan)



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	14%	29%	95.000,00	43%	104.500,00	57%	114.950,00	71%	126.445,00	86%	139.089,50	100%	152.998,45	100%	732.983	sekda (Tata Pemerin tahan)
Y.	FUNGSI LAIN (KORPRI)																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			239.900		307.200		343.850		364.100		383.450		383.450		2.021.950	Korpri
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur			133.569		51.100		86.500		68.000		73.000		73.000		485.169	Korpri
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			-		14.000		24.000		-		-		-		38.000	Korpri
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran			14.200		16.900		16.900		21.200		22.200		22.200		113.600	Korpri
	Program peningkatan kualitas aparatur Korpri	Persentase Peningkatan Pelayanan dan Konsultasi bagi Aparatur Sipil Negara	4	9%	342.231	13%	295.000	18%	450.000	22%	375.000	27%	600.000	31%	600.000	36%	2.662.231	Sekretariat Korpri
Z.	FUNGSI LAIN (KECAMATAN)																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			261.075		274.129		287.835		302.227		317.338		349.072		1.791.676	Kec. Way Serdang



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 kali	43.000	1 kali	45.150	1 kali	47.408	1 kali	49.778	1 kali	52.267	1 kali	57.493	19 orang	295.096	Kec. Way Serdang
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Way Serdang			5.600		-		6.160				6.776		7.454	27 Orang	25.990	Kec. Way Serdang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terealisasinya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			22.400		23.520		24.696		25.931		27.227		29.950		153.724	Kec. Way Serdang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Mesuji			259.750		270.360		278.260		286.390		294.790		303.390		1.692.940	Kec. Mesuji
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			55.000		92.750		60.600		81.700		76.800		70.200		437.050	Kec. Mesuji
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Mesuji			6.250		7.600		15.200		8.000		9.975		14.400		61.425	Kec. Mesuji
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			30.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		155.000	Kec. Mesuji
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Mesuji Timur			254.890		262.740		268.790		275.340		282.090		289.540		1.633.390	Kec. Mesuji Timur



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			54.645		87.400		63.000		68.600		65.200		77.800		416.645	Kec. Mesuji Timur
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Mesuji Timur			670		8.000		12.600		-		3.135		13.800		38.205	Kec. Mesuji Timur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		180.000	Kec. Mesuji Timur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Panca jaya			196.864		226.050		248.655		273.521		298.939		327.507		1.571.537	Kec. Panca Jaya
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			65.500		66.600		-		52.916		56.708		58.208		299.931	Kec. Panca Jaya
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Panca jaya			5.400		7.000		-		-		9.000		7.500		28.900	Kec. Panca Jaya
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			25.000		27.500		30.250		33.275		36.603		40.263		192.890	Kec. Panca Jaya



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Simpang Pematang			239.320		258.852		284.737		313.211		344.532	-	378.985		1.819.637	Kec. Simpang Pematang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Simpang Pematang			50.000	-	76.600	-	70.060	-	76.066	-	84.673		93.140		450.538	Kec. Simpang Pematang
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur di Kecamatan Simpang Pematang			10.500		-		14.000		-		15.400		16.940		56.840	Kec. Simpang Pematang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			30.000	-	25.000	-	25.500	-	26.050	-	26.655		29.321		162.526	Kec. Simpang Pematang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			284.760		318.998		334.948		351.695		369.280		387.744		2.047.425	Kec. Rawa Jitu Utara
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			74.140		75.960		69.600		69.230		19.892		72.586		381.408	Kec. Rawa Jitu Utara
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			900		19.800	-			19.800		-		19.800		60.300	Kec. Rawa Jitu Utara



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			21.000		23.100		30.000		30.000		30.000		30.000		164.100	Kec. Rawa Jitu Utara
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			235.055		258.378		272.265		287.865		295.000		295.000		1.643.563	Kec. Tanjung raya
	Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan	Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan			17.300		19.300		20.000		20.500		20.000		20.000		117.100	Kec. Tanjung raya
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			50.800		52.500		63.000		64.000		63.000		63.000		356.300	Kec. Tanjung raya
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur			5.000		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		42.500	Kec. Tanjung raya
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			6.845		9.845		9.570		9.570		9.570		9.570		54.970	Kec. Tanjung raya
	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	420	420	175.000	420	192.500	420	211.750	420	232.925	420	256.218	420	281.839	2.940	1.350.652	Kecamat an
	Program Penjaringan Aspirasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan penjaringan aspirasi pembangunan	35	7	140.000	7	154.000	7	169.400	7	186.340	7	204.974	7	225.471	77	1.080.192	Kecamat an



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
	Program Peningkatan Perizinan	Jumlah dokumen perizinan			15.800	1.750	350.000	1.925	385.000	2.118	423.500	2.329	465.850	2.562	512.435	10.684	2.152.585	Kecamatan
AA.	FUNGSI LAIN (SEKRETARIAT DPRD)																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Realisasi Anggaran pelayanan administrasi perkantoran			3.568.269		3.785.805		4.130.998		4.524.373		4.956.100		5.432.054		26.397.599,36	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Realisasi Anggaran peningkatan sarana dan prasarana aparatur			4.716.346		1.151.060		1.272.416		1.250.220		1.435.083		1.432.015		11.257.139	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Realisasi Anggaran Program Disiplin Aparatur			112.600		112.600		123.860		136.246		149.871		164.858		800.034	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		22 orang	112.600		112.600		123.860		136.246		149.871		164.858		800.034	Sekretariat DPRD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Peningkatan Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan			56.475		56.475		60.623		65.185		70.203		77.224		386.184	Sekretariat DPRD
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase peningkatan Peraturan Daerah yang di sahkan	16%	20%	8.314.886,65	38%	9.117.875,32	43%	10.029.663	54%	11.032.629	66%	12.135.892	77%	13.349.481	77%	63.980.427	Sekretariat DPRD



KODE	Prioritas Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir RPJMD		OPD
				2017		2018		2019		2020		2021		2022				
				Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
1	2	3	4	5												6		7
AB.	FUNGSI LAIN (PENANGGULANGAN BENCANA)																	
	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Desa Siaga Bencana	-	-	162.782	32%	1.360.000	38%	570.000	44%	615.707	50%	513.100	56%	526.410	62%	2.567.998	BPBD, sat pol pp dan Dinas Sosial
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam	Jumlah masyarakat yang terfasilitasi Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bercana Alam	0 orang	118 orang	-	175 orang	226.640	300 orang	485.640	300 orang	389.840	300 orang	399.500	300 orang	399.500	1598 orang	1.901.120	Dinas Sosial
		JUMLAH			408.269.744		451.646.004		517.374.659		605.209.163		737.020.438		856.816.579		2.373.430.779	



BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut:

Tabel.8.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Mesuji

No	Indikator	Target Tahun ke					
		1	2	3	4	5	6
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	9,18%	12,18%	15,18%	18,18%	21,18%	24,18%
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	61,67	62,62	63,56	64,50	65,43	66,36
3	Indeks Desa Membangun	0,5658	0,5738	0,5818	0,5898	0,5978	0,6058
4	Persentase Penduduk Miskin	8,00	7,67	7,33	7,00	6,67	6,34
5	Indeks Pengeluaran	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82
6	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,78	4,21	4,64	5,06	5,49	5,92
7	Peningkatan jumlah kunjungan wisata	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
8	Pertumbuhan Koperasi yang berkualitas	86	96	106	129	149	172
9	Persentase Pertumbuhan Omset Penjualan Pedagang	6%	6%	6%	6%	6%	6%
10	Angka Kriminalitas	171	161	151	141	131	121
11	Nilai SAKIP Kabupaten	CC	CC	CC	B	B	BB



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Mesuji

No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,10	5,23	5,36	5,49	5,62	5,75	5,88	5,88
2	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	41.209.035	44.505.261	47.801.488	51.097.714	54.393.940	57.690.167	60.986.393	60.986.393
3	Persentase Penduduk Miskin (%)	8,00	7,92	7,85	7,77	7,69	7,61	7,54	7,54
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	60,72	61,67	62,62	63,56	64,50	65,43	66,36	66,36
	a. Pengeluaran Per Kapita (rupiah/kapita/ bulan	59,67	60,50	61,33	62,16	62,99	63,82	64,66	64,66
	b. Harapan Lama Sekolah (tahun)	40,86	42,36	43,86	45,36	46,86	48,36	49,86	49,86
	c. Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	62,22	63,72	65,22	66,72	68,22	69,72	71,22	71,22
	d. Angka Harapan Hidup (tahun)	67,32	67,52	67,72	67,92	68,12	68,32	68,52	68,52
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		18%	17%	16%	15%	14%	13%	12%
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	PELAYANAN URUSAN WAJIB								
	URUSAN PENDIDIKAN								
a	Angka Partisipasi Kasar (APK)								
	- TK/PAUD		86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28	86,28
	- SD/MI		96,05%	96,55%	97,05%	97,55%	98,05%	98,55%	98,55%
	- SMP/MTs		97,03%	97,33%	97,63%	97,93%	98,23%	98,53%	98,53%
b	Angka Partisipasi Murni (APm)								
	- TK/PAUD		85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05	85,05
	- SD/MI		83,36%	84,36	85,36	86,36	87,36	88,36	88,36
	- SMP/MTs		74,06%	74,66%	75,26%	75,86%	76,46%	77,06%	77,06%
c	Angka Partisipasi Sekolah (APS)								
	- TK/PAUD		93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17
	- SD/MI		88,49%	88,99%	89,49%	89,99%	90,59%	91,19%	91,69%
	- SMP/MTs		99,25%	99,30%	99,35%	99,40%	99,45%	99,50%	99,55%
d	Angka kelulusan seluruh jenjang pendidikan								
	- TK/PAUD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- SD/MI		98,21%	98,41%	98,61%	98,81	99,01	99,21	99,21
	- SMP/MTs		98,65%	98,70%	98,75%	98,80%	98,85%	98,90%	98,95%
e	Angka Putus Sekolah seluruh jenjang pendidikan								
	- SD/MI		04,%	04,%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	- SMP/MTs		1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	URUSAN KESEHATAN								
a	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup		0	0	0	0	0	0	0
b	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		0	0	0	0	0	0	0
c	Persentase BBLR (%)		13,0	10,0	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0
d	Persentase persalinan di fasilitas kesehatan (%)		70,0	75,0	85,0	95,0	100	100	100
e	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil (%)		100	100	100	100	100	100	100
f	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan (%)		100	100	100	100	100	100	100
g	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)		100	100	100	100	100	100	100
h	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
i	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
j	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (%)		17,6	17,2	17,0	16,8	16,5	16,5	16,5
k	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (%)		39,7	38,7	37,7	37,0	36,7	36,7	36,7
l	Persentase bumil KEK (%)		20,7	19,7	18,7	18,0	17,5	17,5	17,5
m	Persentase bumil KEK yang mendapat makanan tambahan (%)		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
n	Persentase bumil Anemia (%)		31,7	29,9	28,0	27,0	26,0	26,0	26,0
o	Persentase bumil Anemia yang mendapat tablet tambah darah (%)		90,0	93,3	95,0	96,0	97,0	97,0	97,0
p	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
q	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
r	Persentase Desa yang memiliki kebijakan PHBS (%)		66,2	75,0	80,0	90	100	100	100
	Perevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk		304	275	245	220	198	198	198
s	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
t	Prevalensi HIV (%)		< 1	< 0,75	< 0,50	< 0,40	< 0,30	< 0,30	< 0,30
u	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
v	Prevalensi Hipertensi (%)		24,3	23,8	23,4	23,0	22,6	22,6	22,6



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
w	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
x	Prevalensi Obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)		15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
y	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)		100	100	100	100	100	100	100
a	Prevalensi merokok penduduk usia ≤ 18 tahun (%)		5,9	5,6	5,4	5,3	5,2	5,2	5,2
b	Persentase Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu (%)		20,0	25,0	40,0	41,0	42,0	42,0	42,0
c	Persentase Puskesmas yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)		75,0	80,0	95,0	95,5	96,0	96,0	96,0
d	Persentase Desa yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan (%)		15,0	25,0	40,0	60,0	85,0	85,0	85,0
	Jumlah Desa ODF		7	14	28	56	105	105	105
	Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi		8	12	12	13	13	13	13
e	Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional		-	-	1	1	1	1	1
f	Jumlah Puskesmas dengan PPK-BLUD		12	12	13	13	13	13	13
g	Jumlah RSUD dengan PPK-BLUD		1	1	1	1	1	1	1
	Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar jenis, jumlah dan mutu (%)		50	75	100	100	100	100	100
	Persentase Puskesmas yang melaporkan Data Kesehatan Prioritas secara lengkap dan tepat waktu (%)		50	65	80	100	100	100	100
	Persentase Puskesmas dengan jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health (%)		30	40	50	75	100	100	100
h	Jumlah Puskesmas yang memiliki lima jenis tenaga kesehatan(tenaga kesehatan masyarakat,kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kefarmasiandan analis kesehatan)		10	12	12	13	13	13	13
	Persentase RSUD kelas C yang memiliki tujuh dokter spesialis (4 dasar dan 3 penunjang) (%)		100	100	100	100	100	100	100
a	Persentase Nakes dengan STR (%)		96	100	100	100	100	100	100
b	Jumlah Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Nakes		10	13	14	15	16	16	16
c	Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan (JKN) (%)		65	85	95	100	100	100	100
d	Persentase Kepesertaan JKN Mandiri (%)		15	35	50	70	70	70	70



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	Persentase Desa yang mengalokasikan minimal 10 persen anggaran untuk bidang kesehatan (%)		60	70	80	90	100	100	100
a	Persentase ketersediaan Obat dan Vaksin di puskesmas (%)		80	85	90	100	100	100	100
	Persentase Kepemilikan Izin pada apaotik, toko obat dan kosmetik (%)		40	60	80	100	100	100	100
b	Persentase Kegiatan Asuhan Mandiri (Pemanfaatan Toga /obat tradisional dan Akupresure (%)		40	60	80	100	100	100	100
c	Jumlah lokasi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang tersedia								
	URUSAN PEKERJAAN UMUM								
1	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik		9,18%	12,18%	15,18%	18,18%	21,18%	24,18%	24,18%
2	Jumlah jembatan yang Kondisi Baik		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	60 Unit
3	Jumlah luas areal jaringan irigasi pertanian yang direhabilitasi dan ditingkatkan (meter)		240 ha	150 ha	150 ha	150 ha	150 ha	150 ha	1850 ha
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT								
1	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan akses air bersih		3.006	3.306	3.606	3.906	4.206	4.506	4.506
2	Persentase Jumlah Rumah Tidak Layah Huni yang tertangani		0	0	1	1	1	1	1
3	Persentase Rumah yang terlayani MCK		0	1	1	1	1	1	1
4	Jumlah unit sarana prasana umum yang dibangun		10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
5	Persentase Gedung Kantor yang di bangun		0	1	1	1	1	1	1
6	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun		4 KM	5 KM	5 KM	5 KM	5 KM	5 KM	5 KM
7	Jumlah bangunan yang memiliki IMB								
	URUSAN PENATAAN RUANG								
a	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang		-	1	1	1	1	1	1
	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
a	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		7	5	6	5	5	6	34
b	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan pembangunan		11	11	11	11	11	11	66
c	Persentase hasil musrenbang yang tertampung dalam APBD		5	5	5	5	5	5	5
	URUSAN PERHUBUNGAN								
a	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang terpasang								
b	Jumlah terminal angkutan yang sesuai standar pelayanan		-	-	1				



No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
a	Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen UKL-UPL dan perusahaan yang menggunakan IPAL		UKL- UPL 71, IPAL 7 / 100%	UKL- UPL 72, IPAL 8 / 100%	UKL- UPL 73, IPAL 9 / 100%	UKL- UPL 74, IPAL 10 / 100%	UKL- UPL 75, IPAL 11/ 100%	UKL- UPL 76, IPAL 12 / 100%	UKL-UPL 76, IPAL 12/ 100%
b	Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen AMDAL		AMDAL 8 / 100%	AMDAL 9 / 100%	AMDAL 10 / 100%	AMDAL 11 / 100%	AMDAL 12 / 100%	AMDAL 13 / 100%	AMDAL 13 / 100%
c	Status mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
d	Status mutu udara lokasi padat lalu lintas dan cerobong industri		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	URUSAN PERTANAHAN								
a	Persentase penyelesaian bidang tanah sengketa		29	43	57	71	86	100	100
b	Jumlah lahan bersertifikat milik pemerintah		10	10	10	10	10	10	60
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
a	Jumlah dan persentase penduduk yang memiliki KK dan e-KTP		22.800	22.400	22.300	21.900	21.500	21.500	379.591
b	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan per tahun		9.600	9.800	9.850	9.900	9.950	10.000	114.329
c	Jumlah akta kematian yang diterbitkan per tahun		100	125	150	175	200	250	1.139
d	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan per tahun		50	75	100	125	150	175	1.214
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
a	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		0	0	0	0	0	0	0
b	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif		0	0	0	0	0	0	0
c	Rasio kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak		-	-	-	-	-	-	-
	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA								
a	Prevalensi KB aktif pada pasangan usia subur		75	75	76	76	76	77	77
b	Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I		-	-	-	-	-	-	-
	URUSAN SOSIAL								
a	Jumlah pemberdayaan fakir miskin dan PMKS lainnya (orang)		200	250	250	250	250	250	1.450
b	Jumlah pelayanan terhadap anak terlantar dan lanjut usia dari keluarga rentan dan tidak mampu (orang)		50	100	100	100	100	100	550
c	Jumlah pelayanan bagi penyandang cacat dan mental		4	50	50	50	50	50	254
d	Jumlah kelompok ORSOS, PSM dan lembaga sosial lainnya yang telah diberdayakan		35	32	32	32	32	30	193
	URUSAN								



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	PENANGGULANGAN BENCANA								
a	persentase Desa Siaga Bencana	26%	26	26	32	38	45	51	57
	URUSAN KETENAGAKERJAAN								
a	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)		68,87	69,37	69,87	70,37	70,87	71,37	71,87
b	Penurunan Angka pengangguran		18%	17%	16%	15%	14%	13%	12%
c	Tingkat Partisipasi Kepesertaan Jamsostek		10%	1%	1%	1%	1%	1%	15%
	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
a	Jumlah koperasi aktif		116	121	126	131	136	141	146
b	Jumlah koperasi yang berbadan hukum		155	160	165	170	175	180	180
c	Jumlah koperasi berkualifikasi "berkualitas"		145	148	151	154	157	160	160
d	Jumlah UKM		300	305	310	315	320	325	325
e	Jumlah UMKM		2.993	3.063	3.133	3.203	3.273	3.343	3.343
	URUSAN PENANAMAN MODAL								
a	Jumlah Investor PMDN/PMA	61	66	71	76	81	86	91	91
b	Jumlah Investasi PMDN/PMA	43.210.300.000	48.384.849.750	53.559.399.500	58.733.949.250	63.908.499.000	69.083.048.750	74.257.598.500	74.257.598.500
	URUSAN KEBUDAYAAN								
a	Jumlah penyelenggaraan event budaya		2	2	2	2	2	2	12
b	Jumlah pengelolaan aset kebudayaan Mesuji		1	1	1	1	1	1	1
c	Jumlah pelaksanaan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		1	1	1	1	1	1	1
	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
a	Jumlah cabang olah raga yang dibina		7	7	7	7	8	12	12
b	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia		328	338	348	358	368	378	378
c	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga		48	48	48	48	48	48	48
	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI								
a	Jumlah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat		45	40	35	30	25	20	20
b	Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP		1	1	1	1	1	1	1
c	Jumlah pembinaan politik daerah		1	1	1	1	1	1	1
d	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,29	0,32	0,35	0,38	0,41	0,44	0,44
	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
a	Opini BPK dan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b	Jumlah kasus pelanggaran	ITarget-	0	0	0	0	0%	0%	0%



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	disiplin PNS	Kondisi Awal I - Realisasi / ITarget- Kondisi Awal I x 100							
c	Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah		76%	77%	78%	79%	80%	81%	81%
e	Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah		76%	77%	78%	79%	80%	81%	81%
f	Persentase aset yang dikelola dengan baik		90%	92%	94%	96%	98%	100%	100%
g	Terlaksananya promosi jabatan struktural secara terbuka		2	2	2	2	200%	200%	1200%
h	Indeks kepuasan masyarakat / IKM		75	76	77	78	7900%	8000%	8000%
i	Persentase Jenis Peizin yang waktu penerbitannya lebih cepat dari ketentuan (SOP)		29	38	46	54	6250%	7083%	7917%
j	Jumlah produk hukum daerah yang disusun		395	445	350	350	41000%	41000%	236000%
k	Jumlah Kegiatan Pimpinan Daerah Yang Dipublikasikan di media massa		110	120	130	140	15000%	16000%	81000%
l	Jumlah Media non media masa yang menyebarkan Informasi pembangunan daerah		9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis
m	Jumlah lembaga media masa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah		-	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa	70 media massa
	URUSAN KETAHANAN PANGAN								
a	Jumlah cadangan pangan masyarakat (ton)		50 ton	60 ton	70 ton	80 ton	90 ton	100 ton	100 ton
c	Jumlah kelompok tani yang meningkat kemampuannya (poktan)		10 kelompo k	10 kelompo k	10 kelompo k	10 kelompo k	10 kelompo k	10 kelompo k	
d	Regulasi ketahanan pangan		-	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	5 dok
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
a	Jumlah desa/kelurahan swadaya		14 desa	16 desa	18 desa	20 desa	22 desa	24 desa	24 desa
b	Jumlah desa/kelurahan swakarya		89 desa	87 desa	85 desa	84 desa	82 desa	81 desa	81 desa
c	Jumlah desa/kelurahan swasembada		2 desa	2 desa	2 desa	1 desa	1 desa	-	-
	URUSAN KEARSIPAN								
a	Persentase Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai Standar Pelayanan		0%	0%	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
	URUSAN PERPUSTAKAAN								
a	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)		1.400	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
b	Jumlah koleksi buku (eksemplar)		2.750	2.850	2.950	3.050	3.150	3.250	3.250
2	PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
	URUSAN PERTANIAN								
a	Jumlah Luas areal tanam dan panen padi (ha)								



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	- Tanam	60520	60.520	52.235	54.397	55.897	60.650	61.850	63.350
	- Panen	57494	57.494	49.623	51.667	53.102	57.618	58.758	60.183
b	Luas areal tanam dan panen palawija (ha)								
	- Tanam	1500	1.500	2.971	3.750	4.200	4.700	5.050	5.500
	- Panen	1416	1.416	2.822	3.563	3.990	4.465	4.798	5.275
c	Luas areal tanam dan panen buah-buahan								
	- Tanam (batang)	215	215	236	260	286	314	346	380
	- Panen (kg)	1962	1.962	2.158	2.373	2.611	2.872	3.159	3.475
d	Luas areal tanam dan panen biofarmaka								
	- Tanam (rumpun)		23	25	27	30	33	37	40
	- Panen (rumpun)		73	80	88	97	106	117	129
e	Luas areal tanam dan panen sayur-sayuran								
	- Tanam (ha)	399	399	450	500	550	580	600	650
	- Panen (ha)	399	399	420	475	530	550	575	630
f	Produktivitas padi (kw/ha)	47	47	50	52	54	56	57	60
g	Produktivitas palawija (kw/ha)	43	43	48	50	51	53	55	60
h	Produksi padi (ton)	234444	234.444	261.175	282.804	301.844	339.640	352.545	380.100
i	Produksi palawija (ton)	5575	5.575	13.120	15.900	17.720	20.470	22.835	26.850
j	Konsumsi protein hewani asal ternak (kg/kapita/tahun)	2,68	2,68	2,73	2,79	2,86	2,89	2,96	3,02
k	Jumlah populasi ternak serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton)	8886	8.886	9.100	9.500	10.250	10.820	11.120	11.600
l	Peningkatan kelompok/jumlah rumah tangga peternak	2221	2.221	2.275	2.335	2.563	2.705	2.780	2.900
	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
a	Rasio Elektrifikasi (persentase)		1	1	1	1	1	1	1
	URUSAN PARIWISATA								
a	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	Target/ Realisasi x100	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
a	Jumlah produksi perikanan serta peningkatan kesehatan masyarakat veteriner (ton) :								
	a. Perikanan tangkap		1.369	1.396	1.424	1.453	1.482	1.511	8.634
	b. Perikanan budidaya		4.430	4.519	4.609	4.701	4.795	4.891	27.944
	URUSAN PERDAGANGAN								
a	Jumlah pasar yang tersedia		27	27	27	27	27	27	27
b	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB		0	0	0	0	0	0	0



No	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
	(persentase)								
	URUSAN INDUSTRI								
a	Persentase Nilai produksi industri kecil dan menengah		0	0	0	0	0	0	0
b	Jumlah industri kecil dan menengah		1.462	1.497	1.532	1.567	1.602	1.637	1.640
c	Jumlah tenaga kerja di sektor industri		840	857	867	877	887	897	907
d	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (persentase)		0	0	0	0	0	0	0
	URUSAN TRANSMIGRASI								
a	Jumlah orang yang di latih di Wilayah desa transmigrasi		20	20	20	20	20	20	120
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
a	Angka Konsumsi RT per Kapita								
	- Total Pengeluaran RT	4,93	5,06	5,19	5,31	5,44	5,57	5,70	5,70
	- Jumlah RT	102534	106.361	110.187	114.014	117.840	121.667	125.493	125.493
b	Lama proses perijinan hari)	5	5	5	5	5	5	5	5



BAB IX PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mesuji, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2017-2022 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Mesuji yang Aman, Adil, dan Sejahtera Tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Mesuji, dibarengi dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, masyarakat dan kemitraan dengan pihak swasta.

BUPATI MESUJI,

KHAMAMI